

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 96);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berupa laporan keuangan memuat:
   a. laporan realisasi anggaran;
   b. neraca;
   c. laporan arus kas;
   d. laporan operasional;
   e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
   f. laporan perubahan ekuitas; dan
   g. catatan atas laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan sebesar Rp970.822.454.588,79 (sembilan ratus tujuh puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah);
b. belanja sebesar Rp1.013.167.924.077,29 (satu triliun tiga belas miliar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah);

c. surplus/defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp(42.345.469.488,50) (minus empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma lima rupiah);
d. pembiayaan terdiri atas:
   1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);
   2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp44.206.461.463,21 (empat puluh empat miliar dua ratus enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga koma dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.015.028.916.052,00 (satu triliun lima belas miliar dua puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu lima puluh dua rupiah);
   2. realisasi pendapatan sebesar Rp970.822.454.588,79 (sembilan ratus tujuh puluh miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan koma tujuh puluh sembilan rupiah);
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp47.516.531.451,71 (empat puluh tujuh miliar lima ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.060.684.455.529,00 (satu triliun enam puluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);
   2. realisasi belanja sebesar Rp1.013.167.924.077,29 (satu triliun tiga belas miliar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh tujuh koma dua puluh sembilan rupiah);
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(3.310.069.988,50) (minus tiga miliar tiga ratus sepuluh juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp(45.655.539.477,00) (minus empat puluh lima miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
   2. realisasi defisit sebesar Rp(42.345.469.488,50) (minus empat puluh dua milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh delapan koma lima rupiah);
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp0,05 (nol koma nol lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp46.430.539.477,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 46.430.539.477,05 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   2. realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 terdiri atas:

a. jumlah aset sebesar Rp2.452.898.457.443,96 (dua triliun empat ratus lima puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga koma sembilan puluh enam rupiah);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp31.732.265.978,39 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh sembilan rupiah);
c. jumlah ekuitas Rp 2.421.166.191.465,57 (dua triliun empat ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024 sebesar Rp46.437.998.770,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh koma nol lima rupiah);
b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp59.461.506.474,66 (lima puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh satu juta lima ratus enam ribu empat ratus tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah);
c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(101.806.975.963,16) (minus seratus satu miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma enam belas rupiah);
d. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp(7.459.293,00) (minus tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah);
e. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan sebesar Rp1.022.365.976.055,99 (satu triliun dua puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh lima koma sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri dari:

1. pendapatan asli daerah sebesar Rp120.084.773.552,20 (seratus dua puluh miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua koma dua rupiah);
2. pendapatan transfer sebesar Rp863.339.185.252,00 (delapan ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp38.942.017.251,79 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah).

b. beban terdiri dari:
1. beban operasi sebesar Rp1.098.972.178.944,35 (satu triliun sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh empat koma tiga puluh lima rupiah);
2. defisit operasi sebesar Rp(76.606.202.888,36) (minus tujuh puluh enam miliar enam ratus enam juta dua ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma tiga puluh enam rupiah);
3. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp380.744.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
4. pos luar biasa sebesar Rp(2.485.520.287,00) (minus dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

c. defisit laporan operasional sebesar Rp(78.710.979.175,36) (minus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima koma tiga puluh enam rupiah).

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp46.430.539.477,05 (empat puluh enam miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh koma nol lima rupiah);
c. subtotal (a-b) Rp 0,00 (nol rupiah);
d. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
e. subtotal (c+d) Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp4.085.069.988,55 (empat miliar delapan puluh lima juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma lima puluh lima rupiah).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut :

a. ekuitas awal sebesar Rp 2.505.772.587.186,13 (dua triliun lima ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam koma tiga belas rupiah);
b. defisit laporan operasional Rp(78.710.979.175,36) (minus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima koma tiga puluh enam rupiah);
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar adalah sebagai berikut :
    1. dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
    2. dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar Rp(5.895.416.545,20) (minus lima miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh lima koma dua rupiah);
d. ekuitas akhir sebesar Rp2.421.166.191.465,57 (dua triliun empat ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. Lampiran III memuat laporan operasional;
d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
e. Lampiran V memuat Neraca;
f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
t. Lampiran XX memuat iktisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah terdiri atas; iktisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah; iktisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

JASMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2025 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/28/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai tindaklanjut dari amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

Secara Umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 128

DAFTAR ISI

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
LAMPIRAN I	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
LAMPIRAN I.1	RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN ORGANISASI	1
LAMPIRAN 1.2	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	21
LAMPIRAN 1.3	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	23
1.01.02.	KESEHATAN	
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	29
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	34
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	35
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	39
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.0.00.0.00.01.0000	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	41
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	43
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1.06.2.08.2.14.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	45
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.06.2.08.2.14.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	48
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	
2.09.3.25.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	50
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	52
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	53
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	56
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	58
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
1.06.2.08.2.14.01.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	60
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	62
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	64
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	66
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	68
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.22.3.26.2.19.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	70
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	
2.22.3.26.2.19.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	74
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	75
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	77
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.09.3.25.0.00.01.0000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	79
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
2.22.3.26.2.19.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAH RAGA	80
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN	81
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	84
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	
2.17.3.30.3.31.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	85
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	
3.32.2.07.0.00.01.0000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	86
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	88
4.02	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKERTARIAT DPRD	92
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	
5.01	PERENCANAAN	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	95
5.02	KEUANGAN	
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH	98

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
5.03	KEPEGAWAIAN	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	102
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT KABUPATEN	105
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	
7.01	KECAMATAN	
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PULAU PUNJUNG	108
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN SITIUNG	110
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN KOTO BARU	112
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN SUNGAI RUMBAI	114
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN IX KOTO	116
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TIMPEH	118
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KOTO SALAK	119
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN ASAM JUJUHAN	121
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN KOTO BESAR	123
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN PADANG LAWEH	125
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN TIUMANG	127
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	129
LAMPIRAN 1.4	REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	132
LAMPIRAN II	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	178
LAMPIRAN III	LAPORAN OPERASIONAL	179
LAMPIRAN IV	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	181
LAMPIRAN V	NERACA	182
LAMPIRAN VI	LAPORAN ARUS KAS	184
LAMPIRAN VII	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	187
LAMPIRAN VIII	DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH	425
LAMPIRAN IX	DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	427
LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR	428
LAMPIRAN XI	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	430
LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH	431

Kode REKENING	BIDANG, UNIT ORGANISASI	HAL
1	2	
LAMPIRAN XIII	DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP	433
LAMPIRAN XIV	DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	435
LAMPIRAN XV	DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA	436
LAMPIRAN XVI	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	437
LAMPIRAN XVII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	438
LAMPIRAN XVIII	DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	439
LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	440
LAMPIRAN XX	IKTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH/ PERUSAHAAN DAERAH TERDIRI ATAS	
LAMPIRAN XX.1	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH	442
LAMPIRAN XX.2	IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH	443

LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TANGGUNG ANGGARAN 2024

KAB. DHARMASRAYA
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	1.015.028.916.052	970.822.454.588,79	(44.206.461.463,21)	95,64
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	77.585.687.617	65.182.388.058,00	(12.403.299.559)	84,01
1,01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	60.200.000	68.761.428,00	8.561.428	114,22
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	60.200.000	68.761.428,00	8.561.428	114,22
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	60.200.000	68.761.428,00	8.561.428	114,22
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.200.000	68.761.428,00	8.561.428	114,22
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000	68.569.200,00	8.569.200	114,28
1,01	1.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200,000	192.228,00	(7,772)	96,11
1,02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	75.645.987.617	64.136.596.743,00	(11.509.390.874)	84,79
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	60.000.000	63.213.000,00	3.213.000	105,36
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	60.000.000	63.213.000,00	3.213.000	105,36
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000	63.213.000,00	3.213.000	105,36
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000	63.213.000,00	3.213.000	105,36
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Sungai Rumbai	337.000.000	359.518.900,00	22.518.900	106,68
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4	PENDAPATAN DAERAH	337.000.000	359.518.900,00	22.518.900	106,68
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	337.000.000	359.518.900,00	22.518.900	106,68
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0002	4.1.02	Retribusi Daerah	337.000.000	359.518.900,00	22.518.900	106,68
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Koto Besar	98.000.000	134.353.984,00	36.353.984	137,10
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4	PENDAPATAN DAERAH	98.000.000	134.353.984,00	36.353.984	137,10
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.000.000	134.353.984,00	36.353.984	137,10
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0003	4.1.02	Retribusi Daerah	98.000.000	134.353.984,00	36.353.984	137,10
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	7.200.000.000	6.192.602.286,00	(1.007.397.714)	86,01
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	7.200.000.000	6.192.602.286,00	(1.007.397.714)	86,01
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.200.000.000	6.192.602.286,00	(1.007.397.714)	86,01
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	7.200.000.000	6.192.602.286,00	(1.007.397.714)	86,01
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Sungai Limau	169.286.246	165.134.000,00	(4.152.246)	97,55
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4	PENDAPATAN DAERAH	169.286.246	165.134.000,00	(4.152.246)	97,55
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.286.246	165.134.000,00	(4.152.246)	97,55
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0004	4.1.02	Retribusi Daerah	169.286.246	165.134.000,00	(4.152.246)	97,55
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Koto Baru	621.905.037	627.787.200,00	5.882.163	100,95
1,02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4	PENDAPATAN DAERAH	621.905.037	627.787.200,00	5.882.163	100,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	621.905.037	627.787.200,00	5.882.163	100,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	4.1.02	Retribusi Daerah	621.905.037	627.787.200,00	5.882.163	100,95
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Tiumang	100.000.000	136.068.500,00	36.068.500	136,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4	PENDAPATAN DAERAH	100.000.000	136.068.500,00	36.068.500	136,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100.000.000	136.068.500,00	36.068.500	136,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	4.1.02	Retribusi Daerah	100.000.000	136.068.500,00	36.068.500	136,07
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Padang Laweh	165.526.700	209.567.120,00	44.040.420	126,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	165.526.700	209.567.120,00	44.040.420	126,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.526.700	209.567.120,00	44.040.420	126,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	4.1.02	Retribusi Daerah	165.526.700	209.567.120,00	44.040.420	126,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Sitiung I	624.298.100	547.385.300,00	(76.912.800)	87,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4	PENDAPATAN DAERAH	624.298.100	547.385.300,00	(76.912.800)	87,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	624.298.100	547.385.300,00	(76.912.800)	87,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	4.1.02	Retribusi Daerah	624.298.100	547.385.300,00	(76.912.800)	87,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Timpeh	216.383.000	243.846.700,00	27.463.700	112,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4	PENDAPATAN DAERAH	216.383.000	243.846.700,00	27.463.700	112,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	216.383.000	243.846.700,00	27.463.700	112,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	4.1.02	Retribusi Daerah	216.383.000	243.846.700,00	27.463.700	112,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Gunung Medan	125.000.000	121.940.980,00	(3.059.020)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4	PENDAPATAN DAERAH	125.000.000	121.940.980,00	(3.059.020)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000	121.940.980,00	(3.059.020)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	4.1.02	Retribusi Daerah	125.000.000	121.940.980,00	(3.059.020)	97,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Sitiung II	138.452.600	116.643.000,00	(21.809.600)	84,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4	PENDAPATAN DAERAH	138.452.600	116.643.000,00	(21.809.600)	84,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	138.452.600	116.643.000,00	(21.809.600)	84,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	4.1.02	Retribusi Daerah	138.452.600	116.643.000,00	(21.809.600)	84,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Beringin Sakti	110.000.000	272.428.700,00	162.428.700	247,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4	PENDAPATAN DAERAH	110.000.000	272.428.700,00	162.428.700	247,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	110.000.000	272.428.700,00	162.428.700	247,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	4.1.02	Retribusi Daerah	110.000.000	272.428.700,00	162.428.700	247,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Silago	258.033.934	295.072.500,00	37.038.566	114,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4	PENDAPATAN DAERAH	258.033.934	295.072.500,00	37.038.566	114,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	258.033.934	295.072.500,00	37.038.566	114,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	4.1.02	Retribusi Daerah	258.033.934	295.072.500,00	37.038.566	114,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Sungai Dareh	167.232.000	95.968.400,00	(71.263.600)	57,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4	PENDAPATAN DAERAH	167.232.000	95.968.400,00	(71.263.600)	57,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.232.000	95.968.400,00	(71.263.600)	57,39

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	4.1.02	Retribusi Daerah	167.232.000	95.968.400,00	(71.263.600)	57,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Sialang	55.370.000	60.063.200,00	4.693.200	108,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4	PENDAPATAN DAERAH	55.370.000	60.063.200,00	4.693.200	108,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.370.000	60.063.200,00	4.693.200	108,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	4.1.02	Retribusi Daerah	55.370.000	60.063.200,00	4.693.200	108,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Laboratorium Kesehatan Daerah	175.000.000	161.310.000,00	(13.690.000)	92,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4	PENDAPATAN DAERAH	175.000.000	161.310.000,00	(13.690.000)	92,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.000.000	161.310.000,00	(13.690.000)	92,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000	161.310.000,00	(13.690.000)	92,18
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	65.024.500.000	54.333.692.973,00	(10.690.807.027)	83,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	65.024.500.000	54.333.692.973,00	(10.690.807.027)	83,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.024.500.000	54.333.692.973,00	(10.690.807.027)	83,56
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	65.024.500.000	54.333.692.973,00	(10.690.807.027)	83,56
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.635.000.000	678.089.487,00	(956.910.513)	41,47
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	1.635.000.000	678.089.487,00	(956.910.513)	41,47
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.635.000.000	678.089.487,00	(956.910.513)	41,47
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.635.000.000	678.089.487,00	(956.910.513)	41,47
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.630.000.000	676.361.887,00	(953.638.113)	41,49
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000	1.727.600,00	(3.272.400)	34,55
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	244.500.000	298.940.400,00	54.440.400	122,27
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	244.500.000	298.940.400,00	54.440.400	122,27
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	244.500.000	298.940.400,00	54.440.400	122,27
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	244.500.000	298.940.400,00	54.440.400	122,27
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	240.000.000	289.300.000,00	49.300.000	120,54
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.500.000	9.640.400,00	5.140.400	214,23
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	394.580.000	435.614.010,00	41.034.010	110,40
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	13.980.000	11.237.500,00	(2.742.500)	80,38
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000	11.237.500,00	(2.742.500)	80,38
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	13.980.000	11.237.500,00	(2.742.500)	80,38
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.980.000	11.237.500,00	(2.742.500)	80,38
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	13.980.000	11.237.500,00	(2.742.500)	80,38

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000	32.080.000,00	12.080.000	160,40
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	20.000.000	32.080.000,00	12.080.000	160,40
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000	32.080.000,00	12.080.000	160,40
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000	32.080.000,00	12.080.000	160,40
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000	32.080.000,00	12.080.000	160,40
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	90.800.000	105.560.000,00	14.760.000	116,26
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	90.800.000	105.560.000,00	14.760.000	116,26
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	90.800.000	105.560.000,00	14.760.000	116,26
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.800.000	105.560.000,00	14.760.000	116,26
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	90.800.000	105.560.000,00	14.760.000	116,26
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	5.750.000	3.400.000,00	(2.350.000)	59,13
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	5.750.000	3.400.000,00	(2.350.000)	59,13
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	5.750.000	3.400.000,00	(2.350.000)	59,13
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.750.000	3.400.000,00	(2.350.000)	59,13
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	5.750.000	3.400.000,00	(2.350.000)	59,13
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	207.050.000	255.636.500,00	48.586.500	123,47
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	207.050.000	255.636.500,00	48.586.500	123,47
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	207.050.000	255.636.500,00	48.586.500	123,47
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	207.050.000	255.636.500,00	48.586.500	123,47
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	207.000.000	255.543.500,00	48.543.500	123,45
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000	93.000,00	43.000	186,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	32.000.000	23.400.010,00	(8.599.990)	73,13
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	32.000.000	23.400.010,00	(8.599.990)	73,13
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	32.000.000	23.400.010,00	(8.599.990)	73,13
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.000.000	23.400.010,00	(8.599.990)	73,13
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	32.000.000	23.400.010,00	(8.599.990)	73,13
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.000.000	4.300.000,00	(20.700.000)	17,20
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000	4.300.000,00	(20.700.000)	17,20
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000	4.300.000,00	(20.700.000)	17,20

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000	4.300.000,00	(20.700.000)	17,20
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	25.000.000	4.300.000,00	(20.700.000)	17,20
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	105.000.000	94.980.000,00	(10.020.000)	90,46
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	105.000.000	94.980.000,00	(10.020.000)	90,46
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	105.000.000	94.980.000,00	(10.020.000)	90,46
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	105.000.000	94.980.000,00	(10.020.000)	90,46
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.000.000	94.980.000,00	(10.020.000)	90,46
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	105.000.000	94.980.000,00	(10.020.000)	90,46
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	80.000.000	126.050.000,00	46.050.000	157,56
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	80.000.000	126.050.000,00	46.050.000	157,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	80.000.000	126.050.000,00	46.050.000	157,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	80.000.000	126.050.000,00	46.050.000	157,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.000.000	126.050.000,00	46.050.000	157,56
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	80.000.000	126.050.000,00	46.050.000	157,56
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	936.843.918.435	904.955.667.521,91	(31.888.250.913)	96,60
5.02			KEUANGAN	936.843.918.435	904.955.667.521,91	(31.888.250.913)	96,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	936.843.918.435	904.955.667.521,91	(31.888.250.913)	96,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	936.843.918.435	904.955.667.521,91	(31.888.250.913)	96,60
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.053.185.417	42.503.459.605,91	(1.549.725.811)	96,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.01	Pajak Daerah	26.432.781.411	25.092.743.486,00	(1.340.037.925)	94,93
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	83.000.000	86.408.500,00	3.408.500	104,11
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006	5.347.929.006,00	0	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.189.475.000	11.976.378.613,91	(213.096.386)	98,25
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	880.926.579.803	850.689.858.617,00	(30.236.721.186)	96,57
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	796.228.371.644	792.448.801.416,00	(3.779.570.228)	99,53
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.698.208.159	58.241.057.201,00	(26.457.150.958)	68,76
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.864.153.215	11.762.349.299,00	(101.803.916)	99,14
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000	71.350.441,00	(28.649.559)	71,35
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215	11.690.998.858,00	(73.154.357)	99,38
7			UNSUR KEWILAYAHAN	19.730.000	27.755.000,00	8.025.000	140,67
7.01			KECAMATAN	19.730.000	27.755.000,00	8.025.000	140,67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000	3.500.000,00	500.000	116,67

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000	3.500.000,00	500.000	116,67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000	3.500.000,00	500.000	116,67
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000	3.500.000,00	500.000	116,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sitiung	1.750.000	2.000.000,00	250.000	114,29
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	1.750.000	2.000.000,00	250.000	114,29
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000	2.000.000,00	250.000	114,29
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000	2.000.000,00	250.000	114,29
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Koto Baru	2.000.000	4.750.000,00	2.750.000	237,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000	4.750.000,00	2.750.000	237,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000	4.750.000,00	2.750.000	237,50
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000	4.750.000,00	2.750.000	237,50
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Sungai Rumbai	6.475.000	10.750.000,00	4.275.000	166,02
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	6.475.000	10.750.000,00	4.275.000	166,02
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.475.000	10.750.000,00	4.275.000	166,02
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	6.475.000	10.750.000,00	4.275.000	166,02
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Sembilan Koto	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Timpeh	2.500.000	2.750.000,00	250.000	110,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000	2.750.000,00	250.000	110,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000	2.750.000,00	250.000	110,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000	2.750.000,00	250.000	110,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Koto Besar	2.005.000	2.005.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	2.005.000	2.005.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.005.000	2.005.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000	2.000.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000	5.000,00	0	100,00
		5	Belanja	1.060.684.455.529	1.013.167.924.077,29	(47.516.531.451,71)	92,52
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	682.471.525.401	648.081.538.935,00	(34.389.986.466,10)	94,96
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	320.101.605.390	310.593.098.816,00	(9.508.506.574,00)	97,03
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	320.101.605.390	310.593.098.816,00	(9.508.506.574,00))	97,03
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	320.101.605.390	310.593.098.816,00	(9.508.506.574,00)	97,03
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	292.219.135.236	282.964.644.691,00	(9.254.490.545,00)	96,83
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	245.672.116.486	238.103.869.503,00	(7.568.246.983)	96,92
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.462.218.750	35.824.820.568,00	(1.637.398.182,00)	95,63

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	9.084.800.000	3.054.210.000,00	(6.030.590.000)	33,62
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.882.470.154	27.628.454.125,00	(254.016.029)	99,09
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.987.655.164	7.927.584.614,00	(60.070.550)	99,25
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.098.817.790	15.907.272.311,00	(191.545.479)	98,81
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.795.997.200	3.793.597.200,00	(2.400.000)	99,94
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	259.982.392.986	243.166.135.036,90	(16.816.257.949)	93,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	118.993.821.630	116.627.803.290,00	(2.366.018.340)	98,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	118.993.821.630	116.627.803.290,00	(2.366.018.340)	98,01
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	106.356.386.254	104.775.182.293,00	(1.581.203.961)	98,51
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	65.379.767.000	64.871.520.978,00	(508.246.022)	99,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.976.619.254	39.903.661.315,00	(1.072.957.939)	97,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.637.435.376	11.852.620.997,00	(784.814.379)	93,79
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.279.048.300	7.146.260.900,00	(132.787.400)	98,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.519.387.076	4.080.534.097,00	(438.852.979)	90,29
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	839.000.000	625.826.000,00	(213.174.000)	74,59
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Sungai Rumbai	2.559.383.840	2.517.555.211,00	(41.828.629)	98,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	2.559.383.840	2.517.555.211,00	(41.828.629)	98,37
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.519.033.840	2.477.394.211,00	(41.639.629)	98,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	940.422.251	914.218.225,00	(26.204.026)	97,21
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.578.611.589	1.563.175.986,00	(15.435.603)	99,02
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	40.350.000	40.161.000,00	(189.000)	99,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.350.000	40.161.000,00	(189.000)	99,53
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Koto Besar	1.951.941.741	1.657.768.512,99	(294.173.228)	84,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	1.951.941.741	1.657.768.512,99	(294.173.228)	84,93
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.886.941.741	1.626.362.514,99	(260.579.226)	86,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	422.835.000	391.378.837,17	(31.456.162)	92,56
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.464.106.741	1.234.983.677,82	(229.123.063)	84,35
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	65.000.000	31.405.998,00	(33.594.002)	48,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.000.000	31.405.998,00	(33.594.002)	48,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	11.616.494.798	10.309.168.047,00	(1.307.326.751)	88,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	11.616.494.798	10.309.168.047,00	(1.307.326.751)	88,75
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.556.778.798	6.754.913.545,00	(801.865.253)	89,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	752.400.000	627.225.964,00	(125.174.036)	83,36
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.804.378.798	6.127.687.581,00	(676.691.217)	90,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	4.059.716.000	3.554.254.502,00	(505.461.498)	87,55
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.899.716.000	1.634.906.637,00	(264.809.363)	86,06
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.160.000.000	1.919.347.865,00	(240.652.135)	88,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Sungai Limau	1.472.432.348	1.307.641.753,00	(164.790.595)	88,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	1.472.432.348	1.307.641.753,00	(164.790.595)	88,81
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.446.432.348	1.305.791.753,00	(140.640.595)	90,28

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	213.100.000	207.026.255,00	(6.073.745)	97,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.233.332.348	1.098.765.498,00	(134.566.850)	89,09
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	26.000.000	1.850.000,00	(24.150.000)	7,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.000.000	1.850.000,00	(24.150.000)	7,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Koto Baru	3.176.959.788	2.824.519.872,00	(352.439.916)	88,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	3.176.959.788	2.824.519.872,00	(352.439.916)	88,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.117.959.788	2.780.604.942,00	(337.354.846)	89,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.01	Belanja Pegawai	877.306.685	870.545.337,00	(6.761.348)	99,23
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.240.653.103	1.910.059.605,00	(330.593.498)	85,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	59.000.000	43.914.930,00	(15.085.070)	74,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.000.000	43.914.930,00	(15.085.070)	74,43
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Tiumang	1.674.863.233	1.594.864.154,00	(79.999.079)	95,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.674.863.233	1.594.864.154,00	(79.999.079)	95,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.652.278.551	1.576.045.154,00	(76.233.397)	95,39
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	408.744.513	401.948.073,00	(6.796.440)	98,34
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.243.534.038	1.174.097.081,00	(69.436.957)	94,42
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	22.584.682	18.819.000,00	(3.765.682)	83,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.584.682	18.819.000,00	(3.765.682)	83,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Padang Laweh	1.341.185.024	1.296.951.925,00	(44.233.099)	96,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	1.341.185.024	1.296.951.925,00	(44.233.099)	96,70
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.333.185.024	1.288.951.925,00	(44.233.099)	96,68
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	263.600.000	261.602.609,00	(1.997.391)	99,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.069.585.024	1.027.349.316,00	(42.235.708)	96,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000	8.000.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	8.000.000,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Sitiung I	2.920.247.922	2.644.888.767,00	(275.359.155)	90,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	2.920.247.922	2.644.888.767,00	(275.359.155)	90,57
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.820.247.922	2.558.214.767,00	(262.033.155)	90,71
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.01	Belanja Pegawai	1.001.983.794	942.913.032,00	(59.070.762)	94,10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.818.264.128	1.615.301.735,00	(202.962.393)	88,84
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	100.000.000	86.674.000,00	(13.326.000)	86,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000	86.674.000,00	(13.326.000)	86,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Timpeh	1.976.575.240	1.874.899.464,75	(101.675.775)	94,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	1.976.575.240	1.874.899.464,75	(101.675.775)	94,86
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	1.932.575.240	1.833.486.424,75	(99.088.815)	94,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.01	Belanja Pegawai	600.041.516	512.299.435,77	(87.742.080)	85,38
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.533.724	1.321.186.988,98	(11.346.735)	99,15
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	44.000.000	41.413.040,00	(2.586.960)	94,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.000.000	41.413.040,00	(2.586.960)	94,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Gunung Medan	1.524.472.867	1.466.113.399,00	(58.359.468)	96,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5	BELANJA DAERAH	1.524.472.867	1.466.113.399,00	(58.359.468)	96,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	1.506.572.867	1.448.283.399,00	(58.289.468)	96,13
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	419.000.000	417.439.801,00	(1.560.199)	99,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.087.572.867	1.030.843.598,00	(56.729.269)	94,78

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	17.900.000	17.830.000,00	(70.000)	99,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.900.000	17.830.000,00	(70.000)	99,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Sitiung II	1.677.908.645	1.638.101.609,00	(39.807.036)	97,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5	BELANJA DAERAH	1.677.908.645	1.638.101.609,00	(39.807.036)	97,63
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	1.583.708.645	1.543.918.109,00	(39.790.536)	97,49
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	382.962.425	382.962.425,00	0	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.746.220	1.160.955.684,00	(39.790.536)	96,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	94.200.000	94.183.500,00	(16.500)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.200.000	94.183.500,00	(16.500)	99,98
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Beringin Sakti	1.223.093.570	1.092.640.528,00	(130.453.042)	89,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5	BELANJA DAERAH	1.223.093.570	1.092.640.528,00	(130.453.042)	89,33
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	1.215.093.570	1.087.756.528,00	(127.337.042)	89,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.01	Belanja Pegawai	238.000.000	235.211.607,00	(2.788.393)	98,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.093.570	852.544.921,00	(124.548.649)	87,25
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	8.000.000	4.884.000,00	(3.116.000)	61,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000	4.884.000,00	(3.116.000)	61,05
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Silago	1.748.056.545	1.707.248.242,00	(40.808.303)	97,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5	BELANJA DAERAH	1.748.056.545	1.707.248.242,00	(40.808.303)	97,67
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	1.717.056.545	1.678.982.743,00	(38.073.802)	97,78
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.01	Belanja Pegawai	499.421.529	490.033.996,00	(9.387.533)	98,12
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.217.635.016	1.188.948.747,00	(28.686.269)	97,64
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2	BELANJA MODAL	31.000.000	28.265.499,00	(2.734.501)	91,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.000.000	28.265.499,00	(2.734.501)	91,18
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Sungai Dareh	3.081.675.232	2.851.136.541,00	(230.538.691)	92,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5	BELANJA DAERAH	3.081.675.232	2.851.136.541,00	(230.538.691)	92,52
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	2.928.175.232	2.724.432.591,00	(203.742.641)	93,04
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.178.776	971.218.710,00	(76.960.066)	92,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.879.996.456	1.753.213.881,00	(126.782.575)	93,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	153.500.000	126.703.950,00	(26.796.050)	82,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.400.000	103.341.000,00	(25.059.000)	80,48
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.100.000	23.362.950,00	(1.737.050)	93,08
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Sialang	1.588.693.904	1.474.761.453,00	(113.932.451)	92,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5	BELANJA DAERAH	1.588.693.904	1.474.761.453,00	(113.932.451)	92,83
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	1.548.693.904	1.436.147.453,00	(112.546.451)	92,73
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.01	Belanja Pegawai	502.360.000	491.167.572,00	(11.192.428)	97,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.046.333.904	944.979.881,00	(101.354.023)	90,31
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000	38.614.000,00	(1.386.000)	96,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	38.614.000,00	(1.386.000)	96,54
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Laboratorium Kesehatan Daerah	575.964.248	482.475.423,00	(93.488.825)	83,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5	BELANJA DAERAH	575.964.248	482.475.423,00	(93.488.825)	83,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	575.964.248	482.475.423,00	(93.488.825)	83,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	136.786.124	117.157.378,00	(19.628.746)	85,65
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	439.178.124	365.318.045,00	(73.860.079)	83,18

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	100.878.622.411	89.797.596.845,16	(11.081.025.565)	89,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	100.878.622.411	89.797.596.845,16	(11.081.025.565)	89,02
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	90.903.133.981	82.989.810.618,00	(7.913.323.363)	91,29
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	46.382.059.254	44.271.443.015,00	(2.110.616.239)	95,45
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.521.074.727	38.718.367.603,00	(5.802.707.124)	86,97
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	9.975.488.430	6.807.786.227,16	(3.167.702.202)	68,25
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.695.393.548	2.787.385.750,00	(2.908.007.798)	48,94
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal *Gedung dan* Bangunan	3.802.094.882	3.564.685.477,16	(237.409.404)	93,76
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	478.000.000	455.715.000,00	(22.285.000)	95,34
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	76.243.716.022	68.808.326.143,00	(7.435.389.879)	90,25
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	76.243.716.022	68.808.326.143,00	(7.435.389.879)	90,25
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	76.243.716.022	68.808.326.143,00	(7.435.389.879)	90,25
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	26.477.216.045	24.189.820.105,00	(2.287.395.940)	91,36
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.721.867.000	4.469.292.048,00	(252.574.952)	94,65
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.755.349.045	19.720.528.057,00	(2.034.820.988)	90,65
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	49.766.499.977	44.618.506.038,00	(5.147.993.939)	89,66
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.770.000	237.867.000,00	(903.000)	99,62
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.479.697.525	415.790.200,00	(5.063.907.325)	7,59
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.048.032.452	43.964.848.838,00	(83.183.614)	99,81
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.573.992.987	10.382.449.970,00	(191.543.017)	98,19
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.573.992.987	10.382.449.970,00	(191.543.017)	98,19
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	10.573.992.987	10.382.449.970,00	(191.543.017)	98,19
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	10.570.662.987	10.379.119.970,00	(191.543.017)	98,19
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.825.028.000	1.745.852.030,00	(79.175.970)	95,66
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.745.634.987	8.633.267.940,00	(112.367.047)	98,72
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.330.000	3.330.000,00	0	100,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.330.000	3.330.000,00	0	100,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.038.613.214	10.681.057.369,00	(357.555.845)	96,76
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.173.389.214	7.958.612.893,00	(214.776.321)	97,37
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.173.389.214	7.958.612.893,00	(214.776.321)	97,37
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.173.389.214	7.958.612.893,00	(214.776.321)	97,37
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.204.242.000	3.126.633.582,00	(77.608.418)	97,58

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.969.147.214	4.831.979.311,00	(137.167.903)	97,24
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.865.224.000	2.722.444.476,00	(142.779.524)	95,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.865.224.000	2.722.444.476,00	(142.779.524)	95,02
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.822.762.000	2.679.982.476,00	(142.779.524)	94,94
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.079.393.000	1.029.932.045,00	(49.460.955)	95,42
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.743.369.000	1.650.050.431,00	(93.318.569)	94,65
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	42.462.000	42.462.000,00	0	100,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.462.000	42.462.000,00	0	100,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.531.204.802	4.450.471.600,00	(80.733.202)	98,22
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.531.204.802	4.450.471.600,00	(80.733.202)	98,22
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.531.204.802	4.450.471.600,00	(80.733.202)	98,22
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.499.304.802	4.418.821.600,00	(80.483.202)	98,21
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.571.597.000	2.514.028.604,00	(57.568.396)	97,76
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.927.707.802	1.904.792.996,00	(22.914.806)	98,81
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	31.900.000	31.650.000,00	(250.000)	99,22
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.900.000	31.650.000,00	(250.000)	99,22
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	71.246.241.271	68.602.197.186,39	(2.644.044.084)	96,29
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.118.954.300	932.925.873,00	(186.028.427)	83,37
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.118.954.300	932.925.873,00	(186.028.427)	83,37
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.118.954.300	932.925.873,00	(186.028.427)	83,37
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.118.954.300	932.925.873,00	(186.028.427)	83,37
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.118.954.300	932.925.873,00	(186.028.427)	83,37
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.238.365.100	1.122.047.242,00	(116.317.858)	90,61
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.238.365.100	1.122.047.242,00	(116.317.858)	90,61
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.238.365.100	1.122.047.242,00	(116.317.858)	90,61
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.161.954.350	1.061.503.154,00	(100.451.196)	91,35
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.954.350	1.061.503.154,00	(100.451.196)	91,35
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	76.410.750	60.544.088,00	(15.866.662)	79,24
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.410.750	60.544.088,00	(15.866.662)	79,24
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.958.313.200	3.850.600.917,00	(107.712.283)	97,28

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	3.958.313.200	3.850.600.917,00	(107.712.283)	97,28
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.958.313.200	3.850.600.917,00	(107.712.283)	97,28
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.901.113.200	3.796.850.917,00	(104.262.283)	97,33
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.471.055.000	2.421.064.129,00	(49.990.871)	97,98
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.430.058.200	1.375.786.788,00	(54.271.412)	96,20
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	57.200.000	53.750.000,00	(3.450.000)	93,97
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.200.000	53.750.000,00	(3.450.000)	93,97
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	185.259.000	179.179.652,00	(6.079.348)	96,72
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	185.259.000	179.179.652,00	(6.079.348)	96,72
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	185.259.000	179.179.652,00	(6.079.348)	96,72
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	185.259.000	179.179.652,00	(6.079.348)	96,72
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.259.000	179.179.652,00	(6.079.348)	96,72
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	6.583.758.275	6.381.732.158,39	(202.026.116)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	6.583.758.275	6.381.732.158,39	(202.026.116)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	6.583.758.275	6.381.732.158,39	(202.026.116)	96,93
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.247.950.215	6.060.265.476,39	(187.684.738)	97,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.367.521.000	2.309.432.235,00	(58.088.765)	97,55
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.880.429.215	3.750.833.241,39	(129.595.973)	96,66
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	335.808.060	321.466.682,00	(14.341.378)	95,73
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.200.000	263.025.682,00	(14.174.318)	94,89
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.060	49.841.000,00	(159.060)	99,68
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.608.000	8.600.000,00	(8.000)	99,91
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.245.810.794	4.162.710.345,00	(83.100.449)	98,04
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.245.810.794	4.162.710.345,00	(83.100.449)	98,04
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.245.810.794	4.162.710.345,00	(83.100.449)	98,04
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.955.330.450	3.874.322.797,00	(81.007.653)	97,95
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.573.942.000	2.514.082.069,00	(59.859.931)	97,67
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.381.388.450	1.360.240.728,00	(21.147.722)	98,47
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	290.480.344	288.387.548,00	(2.092.796)	99,28
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.500.000	74.230.000,00	(270.000)	99,64
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.980.344	214.157.548,00	(1.822.796)	99,16
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.780.953.850	4.635.014.363,00	(145.939.487)	96,95

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.780.953.850	4.635.014.363,00	(145.939.487)	96,95
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.780.953.850	4.635.014.363,00	(145.939.487)	96,95
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.780.953.850	4.635.014.363,00	(145.939.487)	96,95
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.435.420.000	2.371.838.801,00	(63.581.199)	97,39
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.345.533.850	2.263.175.562,00	(82.358.288)	96,49
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.119.970.000	4.024.031.810,00	(95.938.190)	97,67
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.119.970.000	4.024.031.810,00	(95.938.190)	97,67
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.119.970.000	4.024.031.810,00	(95.938.190)	97,67
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.119.970.000	4.024.031.810,00	(95.938.190)	97,67
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.119.970.000	4.024.031.810,00	(95.938.190)	97,67
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.419.026.170	11.863.338.737,00	(555.687.433)	95,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	12.419.026.170	11.863.338.737,00	(555.687.433)	95,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.419.026.170	11.863.338.737,00	(555.687.433)	95,53
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.320.835.450	11.765.458.737,00	(555.376.713)	95,49
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.605.279.000	2.542.651.682,00	(62.627.318)	97,60
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.715.556.450	9.222.807.055,00	(492.749.395)	94,93
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	98.190.720	97.880.000,00	(310.720)	99,68
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.190.720	97.880.000,00	(310.720)	99,68
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.841.534.474	5.641.490.314,00	(200.044.160)	96,58
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	5.841.534.474	5.641.490.314,00	(200.044.160)	96,58
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.841.534.474	5.641.490.314,00	(200.044.160)	96,58
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.841.534.474	5.641.490.314,00	(200.044.160)	96,58
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.365.528.000	2.296.348.976,00	(69.179.024)	97,08
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.476.006.474	3.345.141.338,00	(130.865.136)	96,24
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.843.626.010	3.659.800.692,00	(183.825.318)	95,22
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	3.843.626.010	3.659.800.692,00	(183.825.318)	95,22
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.843.626.010	3.659.800.692,00	(183.825.318)	95,22
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.719.512.010	3.536.831.192,00	(182.680.818)	95,09
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.528.160	2.361.836.369,00	(72.691.791)	97,01
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.983.850	1.174.994.823,00	(109.989.027)	91,44
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	124.114.000	122.969.500,00	(1.144.500)	99,08
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.475.000	77.600.000,00	(875.000)	98,88
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.639.000	45.369.500,00	(269.500)	99,41

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.340.694.650	4.265.247.603,00	(75.447.047)	98,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.340.694.650	4.265.247.603,00	(75.447.047)	98,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.340.694.650	4.265.247.603,00	(75.447.047)	98,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.137.148.950	4.065.238.903,00	(71.910.047)	98,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.914.667.000	1.863.660.239,00	(51.006.761)	97,34
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.222.481.950	2.201.578.664,00	(20.903.286)	99,06
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	203.545.700	200.008.700,00	(3.537.000)	98,26
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.725.000	99.791.700,00	(2.933.300)	97,14
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.820.700	100.217.000,00	(603.700)	99,40
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.970.497.214	1.844.677.885,00	(125.819.329)	93,61
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.970.497.214	1.844.677.885,00	(125.819.329)	93,61
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.970.497.214	1.844.677.885,00	(125.819.329)	93,61
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.970.497.214	1.844.677.885,00	(125.819.329)	93,61
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.100.000	10.000.000,00	(100.000)	99,01
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.480.397.214	1.454.893.985,00	(25.503.229)	98,28
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	480.000.000	379.783.900,00	(100.216.100)	79,12
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	43.721.650	30.990.297,00	(12.731.353)	70,88
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	43.721.650	30.990.297,00	(12.731.353)	70,88
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	43.721.650	30.990.297,00	(12.731.353)	70,88
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	43.721.650	30.990.297,00	(12.731.353)	70,88
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.721.650	30.990.297,00	(12.731.353)	70,88
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	21.124.000	19.118.750,00	(2.005.250)	90,51
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	21.124.000	19.118.750,00	(2.005.250)	90,51
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5	BELANJA DAERAH	21.124.000	19.118.750,00	(2.005.250)	90,51
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	21.124.000	19.118.750,00	(2.005.250)	90,51
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.124.000	19.118.750,00	(2.005.250)	90,51
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.651.935.874	12.209.519.193,00	(442.416.681)	96,50
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.651.935.874	12.209.519.193,00	(442.416.681)	96,50
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5	BELANJA DAERAH	12.651.935.874	12.209.519.193,00	(442.416.681)	96,50
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	12.635.135.874	12.192.719.193,00	(442.416.681)	96,50
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.256.591.000	2.183.679.695,00	(72.911.305)	96,77
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.781.044.874	8.551.539.498,00	(229.505.376)	97,39
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.597.500.000	1.457.500.000,00	(140.000.000)	91,24
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	16.800.000	16.800.000,00	0	100,00

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.800.000	16.800.000,00	0	100,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.765.166.710	3.671.855.338,00	(93.311.372)	97,52
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.765.166.710	3.671.855.338,00	(93.311.372)	97,52
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.765.166.710	3.671.855.338,00	(93.311.372)	97,52
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.112.139.150	3.024.139.838,00	(87.999.312)	97,17
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.186.912.000	2.126.857.377,00	(60.054.623)	97,25
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.227.150	877.282.461,00	(27.944.689)	96,91
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000	20.000.000,00	0	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	653.027.560	647.715.500,00	(5.312.060)	99,19
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.750.000	178.300.000,00	(3.450.000)	98,10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	396.277.560	394.545.500,00	(1.732.060)	99,56
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	74.870.000,00	(130.000)	99,83
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	117.530.000	107.916.017,00	(9.613.983)	91,82
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	117.530.000	107.916.017,00	(9.613.983)	91,82
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	117.530.000	107.916.017,00	(9.613.983)	91,82
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	117.530.000	107.916.017,00	(9.613.983)	91,82
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.530.000	107.916.017,00	(9.613.983)	91,82
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.319.259.221	23.138.289.642,00	(3.180.969.579)	87,91
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	867.824.600	857.388.887,00	(10.435.713)	98,80
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	867.824.600	857.388.887,00	(10.435.713)	98,80
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	867.824.600	857.388.887,00	(10.435.713)	98,80
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	856.424.600	846.288.887,00	(10.135.713)	98,82
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	826.424.600	816.288.887,00	(10.135.713)	98,77
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	11.400.000	11.100.000,00	(300.000)	97,37
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.400.000	11.100.000,00	(300.000)	97,37
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	471.652.800	455.988.945,00	(15.663.855)	96,68
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	471.652.800	455.988.945,00	(15.663.855)	96,68
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	5	BELANJA DAERAH	471.652.800	455.988.945,00	(15.663.855)	96,68
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	471.652.800	455.988.945,00	(15.663.855)	96,68
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.652.800	455.988.945,00	(15.663.855)	96,68
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	20.512.690.371	17.465.505.291,00	(3.047.185.080)	85,14
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	20.512.690.371	17.465.505.291,00	(3.047.185.080)	85,14
3,27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	20.512.690.371	17.465.505.291,00	(3.047.185.080)	85,14
3,27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.512.690.371	17.465.505.291,00	(3.047.185.080)	85,14

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	10.447.449.000	10.278.043.112,00	(169.405.888)	98,38
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.035.241.371	7.157.462.179,00	(2.877.779.192)	71,32
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000	30.000.000,00	0	100,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	183.598.050	182.942.094,00	(655.956)	99,64
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	183.598.050	182.942.094,00	(655.956)	99,64
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	183.598.050	182.942.094,00	(655.956)	99,64
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	183.598.050	182.942.094,00	(655.956)	99,64
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.598.050	182.942.094,00	(655.956)	99,64
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	117.058.800	116.915.297,00	(143.503)	99,88
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	117.058.800	116.915.297,00	(143.503)	99,88
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	117.058.800	116.915.297,00	(143.503)	99,88
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	117.058.800	116.915.297,00	(143.503)	99,88
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.058.800	116.915.297,00	(143.503)	99,88
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.166.434.600	4.059.549.128,00	(106.885.472)	97,43
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.166.434.600	4.059.549.128,00	(106.885.472)	97,43
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.166.434.600	4.059.549.128,00	(106.885.472)	97,43
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.089.384.600	3.983.549.128,00	(105.835.472)	97,41
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.314.126.000	3.250.853.891,00	(63.272.109)	98,09
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	775.258.600	732.695.237,00	(42.563.363)	94,51
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	77.050.000	76.000.000,00	(1.050.000)	98,64
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.050.000	76.000.000,00	(1.050.000)	98,64
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	84.936.484.320	81.538.067.932,00	(3.398.416.388)	96,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	36.510.944.634	34.946.055.803,00	(1.564.888.831)	95,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	36.510.944.634	34.946.055.803,00	(1.564.888.831)	95,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	36.510.944.634	34.946.055.803,00	(1.564.888.831)	95,71
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	33.469.626.944	32.569.609.353,00	(900.017.591)	97,31
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	8.047.717.000	7.776.675.334,00	(271.041.666)	96,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.721.909.944	24.093.108.860,00	(628.801.084)	97,46
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000	699.825.159,00	(174.841)	99,98
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.041.317.690	2.376.446.450,00	(664.871.240)	78,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.953.250	371.425.000,00	(2.528.250)	99,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.667.364.440	2.005.021.450,00	(662.342.990)	75,17
4.02			SEKRETARIAT DPRD	48.425.539.686	46.592.012.129,00	(1.833.527.557)	96,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	48.425.539.686	46.592.012.129,00	(1.833.527.557)	96,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	48.425.539.686	46.592.012.129,00	(1.833.527.557)	96,21
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	47.401.339.686	45.624.432.129,00	(1.776.907.557)	96,25
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	14.110.149.046	13.354.454.339,00	(755.694.707)	94,64
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.291.190.640	32.269.977.790,00	(1.021.212.850)	96,93

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.024.200.000	967.580.000,00	(56.620.000)	94,47
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.024.200.000	967.580.000,00	(56.620.000)	94,47
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	144.718.356.760	142.174.107.016,00	(2.544.249.744)	98,24
5.01			PERENCANAAN	4.474.523.850	4.259.998.162,00	(214.525.688)	95,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4.474.523.850	4.259.998.162,00	(214.525.688)	95,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.474.523.850	4.259.998.162,00	(214.525.688)	95,21
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.424.398.850	4.210.193.162,00	(214.205.688)	95,16
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.512.795.000	2.411.565.417,00	(101.229.583)	95,97
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.911.603.850	1.798.627.745,00	(112.976.105)	94,09
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	50.125.000	49.805.000,00	(320.000)	99,36
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.125.000	49.805.000,00	(320.000)	99,36
5.02			KEUANGAN	133.926.049.190	131.886.723.637,00	(2.039.325.553)	98,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	133.926.049.190	131.886.723.637,00	(2.039.325.553)	98,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	133.926.049.190	131.886.723.637,00	(2.039.325.553)	98,48
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.312.272.200	13.735.123.686,00	(577.148.514)	95,97
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	6.337.367.000	5.986.865.624,00	(350.501.376)	94,47
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.974.905.200	7.748.258.062,00	(226.647.138)	97,16
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	362.311.200	350.937.200,00	(11.374.000)	96,86
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	295.877.200	285.137.200,00	(10.740.000)	96,37
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.660.000	27.500.000,00	(160.000)	99,42
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	38.774.000	38.300.000,00	(474.000)	98,78
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000	2.485.520.287,00	(514.479.713)	82,85
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	2.485.520.287,00	(514.479.713)	82,85
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	116.251.465.790	115.315.142.464,00	(936.323.326)	99,19
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.920.693.150	1.984.369.824,00	(936.323.326)	67,94
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.330.772.640	113.330.772.640,00	0	100,00
5.03			KEPEGAWAIAN	5.450.934.720	5.204.675.792,00	(246.258.928)	95,48
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.450.934.720	5.204.675.792,00	(246.258.928)	95,48
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.450.934.720	5.204.675.792,00	(246.258.928)	95,48
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.405.634.720	5.160.525.792,00	(245.108.928)	95,47
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.482.877.000	3.393.801.127,00	(89.075.873)	97,44
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.922.757.720	1.766.724.665,00	(156.033.055)	91,88
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	45.300.000	44.150.000,00	(1.150.000)	97,46
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.300.000	44.150.000,00	(1.150.000)	97,46
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	306.646.000	270.703.164,00	(35.942.836)	88,28
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	306.646.000	270.703.164,00	(35.942.836)	88,28
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	306.646.000	270.703.164,00	(35.942.836)	88,28
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	306.646.000	270.703.164,00	(35.942.836)	88,28

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.646.000	270.703.164,00	(35.942.836)	88,28
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	560.203.000	552.006.261,00	(8.196.739)	98,54
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	560.203.000	552.006.261,00	(8.196.739)	98,54
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	560.203.000	552.006.261,00	(8.196.739)	98,54
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	560.203.000	552.006.261,00	(8.196.739)	98,54
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	560.203.000	552.006.261,00	(8.196.739)	98,54
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7.419.560.006	6.981.266.226,00	(438.293.780)	94,09
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	7.419.560.006	6.981.266.226,00	(438.293.780)	94,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kabupaten	7.419.560.006	6.981.266.226,00	(438.293.780)	94,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	7.419.560.006	6.981.266.226,00	(438.293.780)	94,09
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.326.299.856	5.928.878.637,00	(397.421.219)	93,72
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.204.226.000	3.132.605.727,00	(71.620.273)	97,76
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.122.073.856	2.796.272.910,00	(325.800.946)	89,56
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.093.260.150	1.052.387.589,00	(40.872.561)	96,26
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.325.000	1.006.300.000,00	(38.025.000)	96,36
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.935.150	46.087.589,00	(2.847.561)	94,18
7			UNSUR KEWILAYAHAN	17.742.285.350	16.980.677.618,00	(761.607.732)	95,71
7.01			KECAMATAN	17.742.285.350	16.980.677.618,00	(761.607.732)	95,71
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Pulau Punjung	2.259.238.500	2.195.817.966,00	(63.420.534)	97,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.259.238.500	2.195.817.966,00	(63.420.534)	97,19
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.225.138.500	2.161.717.966,00	(63.420.534)	97,15
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.865.213.000	1.818.508.317,00	(46.704.683)	97,50
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.925.500	343.209.649,00	(16.715.851)	95,36
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	34.100.000	34.100.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.100.000	34.100.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sitiung	1.970.561.800	1.920.430.459,00	(50.131.341)	97,46
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.970.561.800	1.920.430.459,00	(50.131.341)	97,46
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.955.261.800	1.905.180.459,00	(50.081.341)	97,44
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.626.487.000	1.581.282.368,00	(45.204.632)	97,22
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.774.800	323.898.091,00	(4.876.709)	98,52
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.300.000	15.250.000,00	(50.000)	99,67
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.300.000	15.250.000,00	(50.000)	99,67
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Koto Baru	2.052.789.950	1.985.274.892,00	(67.515.058)	96,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	2.052.789.950	1.985.274.892,00	(67.515.058)	96,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.052.789.950	1.985.274.892,00	(67.515.058)	96,71
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.525.550.000	1.482.843.455,00	(42.706.545)	97,20
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	527.239.950	502.431.437,00	(24.808.513)	95,29
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Sungai Rumbai	1.626.463.950	1.578.590.161,00	(47.873.789)	97,06
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.626.463.950	1.578.590.161,00	(47.873.789)	97,06
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.611.063.950	1.563.590.161,00	(47.473.789)	97,05
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.315.498.000	1.274.427.682,00	(41.070.318)	96,88

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.565.950	289.162.479,00	(6.403.471)	97,83
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.400.000	15.000.000,00	(400.000)	97,40
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000	15.000.000,00	(400.000)	97,40
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Sembilan Koto	1.661.455.000	1.516.607.037,00	(144.847.963)	91,28
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.661.455.000	1.516.607.037,00	(144.847.963)	91,28
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.549.184.800	1.405.311.037,00	(143.873.763)	90,71
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.211.855.000	1.080.569.315,00	(131.285.685)	89,17
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.329.800	324.741.722,00	(12.588.078)	96,27
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2	BELANJA MODAL	112.270.200	111.296.000,00	(974.200)	99,13
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.300.000	11.500.000,00	(800.000)	93,50
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.970.200	99.796.000,00	(174.200)	99,83
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Timpeh	1.325.442.750	1.194.469.284,00	(130.973.466)	90,12
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5	BELANJA DAERAH	1.325.442.750	1.194.469.284,00	(130.973.466)	90,12
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.325.442.750	1.194.469.284,00	(130.973.466)	90,12
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	989.815.150	946.700.254,00	(43.114.895)	95,64
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.627.600	247.769.030,00	(87.858.570)	73,82
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Koto Salak	1.221.976.200	1.171.730.313,00	(50.245.887)	95,89
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5	BELANJA DAERAH	1.221.976.200	1.171.730.313,00	(50.245.887)	95,89
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.194.376.200	1.144.380.313,00	(49.995.887)	95,81
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	890.455.000	848.497.733,00	(41.957.267)	95,29
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.921.200	295.882.580,00	(8.038.620)	97,36
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.600.000	27.350.000,00	(250.000)	99,09
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000	27.350.000,00	(250.000)	99,09
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Asam Jujuhan	1.160.033.000	1.097.530.544,00	(62.502.456)	94,61
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5	BELANJA DAERAH	1.160.033.000	1.097.530.544,00	(62.502.456)	94,61
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.160.033.000	1.097.530.544,00	(62.502.456)	94,61
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	789.739.000	747.692.816,00	(42.046.184)	94,68
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.294.000	349.837.728,00	(20.456.272)	94,48
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Koto Besar	1.837.788.600	1.792.779.213,00	(45.009.387)	97,55
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5	BELANJA DAERAH	1.837.788.600	1.792.779.213,00	(45.009.387)	97,55
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.833.288.600	1.788.279.213,00	(45.009.387)	97,54
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.512.660.000	1.469.234.763,00	(43.425.237)	97,13
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.628.600	319.044.450,00	(1.584.150)	99,51
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000	4.500.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000	4.500.000,00	0	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Padang Laweh	1.187.281.800	1.139.101.310,00	(48.180.490)	95,94
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5	BELANJA DAERAH	1.187.281.800	1.139.101.310,00	(48.180.490)	95,94
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.141.481.800	1.095.441.310,00	(46.040.490)	95,97
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	846.427.000	805.963.120,00	(40.463.880)	95,22
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.054.800	289.478.190,00	(5.576.610)	98,11
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2	BELANJA MODAL	45.800.000	43.660.000,00	(2.140.000)	95,33
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.800.000	43.660.000,00	(2.140.000)	95,33
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan *Tiumang*	1.439.253.800	1.388.346.439,00	(50.907.361)	96,46

Kode			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				ANGGRAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5	BELANJA DAERAH	1.439.253.800	1.388.346.439,00	(50.907.361)	96,46
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.411.653.800	1.360.846.439,00	(50.807.361)	96,40
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.015.854.000	975.467.766,00	(40.386.234)	96,02
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.799.800	385.378.673,00	(10.421.127)	97,37
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2	BELANJA MODAL	27.600.000	27.500.000,00	(100.000)	99,64
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000	27.500.000,00	(100.000)	99,64
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	25.830.743.200	25.671.779.522,00	(158.963.678)	99,38
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.830.743.200	25.671.779.522,00	(158.963.678)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.830.743.200	25.671.779.522,00	(158.963.678)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	25.830.743.200	25.671.779.522,00	(158.963.678)	99,38
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	25.779.243.200	25.622.429.522,00	(156.813.678)	99,39
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.504.000	941.277.179,00	(59.226.821)	94,08
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.128.024.200	2.094.325.795,00	(33.698.405)	98,42
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	22.650.715.000	22.586.826.548,00	(63.888.452)	99,72
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	51.500.000	49.350.000,00	(2.150.000)	95,83
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.500.000	49.350.000,00	(2.150.000)	95,83
			Jumlah	(45.655.539.477)	(42.345.469.488,50)	(3.310.069.988,50)	92,75

LAMPIRAN I.2

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN I.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TANGGUNG ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2	3	4	6	5
PENDAPATAN	**1.015.028.916.052,00**	**970.822.454.588,79**	**95,64**	**937.513.290.365,65**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**122.238.183.034,00**	**108.370.246.672,79**	**88,65**	**115.996.029.005,65**
Pendapatan Pajak Daerah	26.432.781.411,00	25.092.743.485,78	94,93	23.692.000.465,50
Pendapatan Retribusi Daerah	78.258.242.617,00	65.941.537.340,00	84,26	2.449.560.848,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.347.929.006,00	100,00	4.832.210.107,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.199.230.000,00	11.988.036.841,01	98,27	85.022.257.585,15
PENDAPATAN TRANSFER	**880.926.579.803,00**	**850.689.858.617,00**	**96,57**	**819.526.123.990,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**720.162.822.644,00**	**716.383.072.416,00**	**99,48**	**707.811.761.315,00**
Dana Bagi Hasil Pajak	11.920.351.000,00	14.676.153.000,00	123,12	15.830.852.055,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.103.314.000,00	22.402.073.000,00	123,75	19.414.761.014,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	519.999.606.000,00	512.944.707.932,00	98,64	489.147.246.531,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	170.139.551.644,00	166.360.138.484,00	97,78	183.418.901.715,00
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	**76.065.549.000,00**	**76.065.729.000,00**	**100,00**	**63.086.878.000,00**
Dana Desa	55.320.687.000,00	55.320.687.000,00	100,00	8.601.217.000,00
Dana Insentif Fiskal	20.744.862.000,00	20.745.042.000,00	100,00	54.485.661.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	**84.698.208.159,00**	**58.241.057.201,00**	**68,76**	**48.627.484.675,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	68,76	48.627.484.675,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**11.864.153.215,00**	**11.762.349.299,00**	**99,14**	**1.991.137.370,00**
Pendapatan Hibah	100.000.000,00	71.350.441,00	71,35	1.991.137.370,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	11.764.153.215,00	11.690.998.858,00	99,38	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	**1.015.028.916.052,00**	**970.822.454.588,79**	**95,64**	**937.513.290.365,65**
BELANJA DAERAH	**1.060.684.455.529,00**	**1.013.167.924.077,29**	**95,52**	**931.495.282.968,76**
BELANJA OPERASI	**828.429.541.746,00**	**793.179.544.263,13**	**95,74**	**680.833.715.658,76**
Belanja Pegawai	469.211.518.709,00	454.911.665.442,94	96,95	373.990.257.238,36
Belanja Barang dan Jasa	324.625.008.037,00	304.013.952.063,19	93,65	278.076.015.874,40
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
Belanja Hibah	34.593.015.000,00	34.253.926.757,00	99,02	28.767.442.546,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	**113.003.447.993,00**	**102.187.717.063,16**	**90,43**	**137.284.235.323,00**
Tanah	27.871.180.864,00	24.237.257.450,00	86,96	0,00
Peralatan dan mesin	35.814.155.477,00	28.954.072.575,16	80,85	39.031.009.865,00
Gedung dan Bangunan	45.373.640.452,00	45.054.989.838,00	99,30	45.091.507.154,00
Jalan, irigasi dan jaringan	3.812.797.200,00	3.810.397.200,00	99,94	50.167.680.309,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	131.674.000,00	131.000.000,00	99,49	2.751.538.825,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	242.499.170,00

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2	3	4	6	5
BELANJA TIDAK TERDUGA	**3.000.000.000,00**	**2.485.520.287,00**	**82,85**	**3.924.380.709,00**
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	**82,85**	3.924.380.709,00
JUMLAH BELANJA	**944.432.989.739,00**	**897.852.781.613,29**	**95,07**	**822.042.331.690,76**
TRANSFER	**116.251.465.790,00**	**115.315.142.464,00**	**99,19**	**109.452.951.278,00**
TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	**116.251.465.790,00**	**115.315.142.464,00**	**99,19**	**109.452.951.278,00**
Bagi Hasil Pajak	2.651.291.150,00	1.809.666.373,00	**68,26**	1.107.049.776,00
Bagi Hasil Retribusi	269.402.000,00	174.703.451,00	**64,85**	110.265.502,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	113.330.772.640,00	113.330.772.640,00	**100,00**	108.235.636.000,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	**1.060.684.455.529,00**	**1.013.167.924.077,29**	**95,52**	**931.495.282.968,76**
SURPLUS/(DEFISIT)	**(45.655.539.477,00)**	**(42.345.469.488,50)**	**92,75**	**6.018.007.396,89**
PEMBIAYAAN	**46.430.539.477,00**	**46.430.539.477,05**	**100,00**	**41.912.532.080,16**
PENERIMAAN DAERAH	**46.430.539.477,00**	**46.430.539.477,05**	**100,00**	**41.912.532.080,16**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	**100,00**	41.912.532.080,16
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	**46.430.539.477,00**	**46.430.539.477,05**	**100,00**	**41.912.532.080,16**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**775.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Cicilan Utang Jatuh Tempo	775.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	775.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	**45.655.539.477,00**	**46.430.539.477,05**	**101,70**	**40.412.532.080,16**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) SEBELUM KOREKSI		4.085.069.988,55		46.430.539.477,05
Koreksi SILPA				
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)SETELAH KOREKSI		**4.085.069.988,55**		**46.430.539.477,05**

LAMPIRAN I.3

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi : Dinas Pendidikan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	60.200.000,00	68.761.428,00	8.561.428,00	114,22	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.200.000,00	68.761.428,00	8.561.428,00	114,22	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000,00	68.569.200,00	8.569.200,00	114,28	
	1.01.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.000,00	192.228,00	(7.772,00)	96,11	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	320.101.605.390,00	310.593.098.816,00	(9.508.506.574,00)	97,03	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.566.510.004,00	70.223.322.273,00	(1.343.187.731,00)	98,12	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	44.730.474.839,00	43.968.323.023,00	(762.151.816,00)	98,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	432.000.000,00	431.400.700,00	(599.300,00)	99,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	432.000.000,00	431.400.700,00	(599.300,00)	99,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	432.000.000,00	431.400.700,00	(599.300,00)	99,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006		Pembangunan Sarana, Prasarana *dan Utilitas Sekolah*	3.570.533.362,00	3.554.694.361,00	(15.839.001,00)	99,56	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	794.811.392,00	787.503.899,00	(7.307.493,00)	99,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	794.811.392,00	787.503.899,00	(7.307.493,00)	99,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.775.721.970,00	2.767.190.462,00	(8.531.508,00)	99,69	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.075.721.970,00	2.067.615.462,00	(8.106.508,00)	99,61	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	99.575.000,00	(425.000,00)	99,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	160.900.000,00	160.750.000,00	(150.000,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	160.900.000,00	160.750.000,00	(150.000,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.900.000,00	160.750.000,00	(150.000,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	405.600.000,00	390.879.000,00	(14.721.000,00)	96,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	405.600.000,00	390.879.000,00	(14.721.000,00)	96,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	405.600.000,00	390.879.000,00	(14.721.000,00)	96,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014		Pengadaan Mebel Sekolah	3.328.014.000,00	3.211.487.100,00	(116.526.900,00)	96,50	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	1.185.800.000,00	1.104.706.900,00	(81.093.100,00)	93,16	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.800.000,00	1.104.706.900,00	(81.093.100,00)	93,16	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	2.142.214.000,00	2.106.780.200,00	(35.433.800,00)	98,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.142.214.000,00	2.106.780.200,00	(35.433.800,00)	98,35	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.550.142.000,00	2.224.889.328,00	(325.252.672,00)	87,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	2.550.142.000,00	2.224.889.328,00	(325.252.672,00)	87,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.01	Belanja Pegawai	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.533.942.000,00	2.208.689.328,00	(325.252.672,00)	87,16	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	175.000.000,00	173.395.000,00	(1.605.000,00)	99,08	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	148.455.000,00	(1.545.000,00)	98,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.455.000,00	(1.545.000,00)	98,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	24.940.000,00	(60.000,00)	99,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	24.940.000,00	(60.000,00)	99,76	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	33.919.650,00	33.888.800,00	(30.850,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	33.919.650,00	33.888.800,00	(30.850,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.919.650,00	33.888.800,00	(30.850,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.229.500,00	16.445.900,00	(3.783.600,00)	81,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	20.229.500,00	16.445.900,00	(3.783.600,00)	81,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.229.500,00	16.445.900,00	(3.783.600,00)	81,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	603.325.000,00	600.354.276,00	(2.970.724,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	603.325.000,00	600.354.276,00	(2.970.724,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	603.325.000,00	600.354.276,00	(2.970.724,00)	99,51	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.753.082.287,00	24.740.032.814,00	(13.049.473,00)	99,95	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	19.482.721.507,00	19.469.672.034,00	(13.049.473,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.919.621.507,00	15.907.710.434,00	(11.911.073,00)	99,93	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.05	Belanja Hibah	3.563.100.000,00	3.561.961.600,00	(1.138.400,00)	99,97	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	5.270.360.780,00	5.270.360.780,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.782.106.580,00	2.782.106.580,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.488.254.200,00	2.488.254.200,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.305.600.000,00	1.264.673.000,00	(40.927.000,00)	96,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	1.305.600.000,00	1.264.673.000,00	(40.927.000,00)	96,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.305.600.000,00	1.264.673.000,00	(40.927.000,00)	96,87	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.437.600,00	0,00	(7.437.600,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	7.437.600,00	0,00	(7.437.600,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.437.600,00	0,00	(7.437.600,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047		Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.522.803.750,00	3.429.791.659,00	(93.012.091,00)	97,36	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	410.927.500,00	356.917.865,00	(54.009.635,00)	86,86	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.01	Belanja Pegawai	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.927.500,00	311.917.865,00	(54.009.635,00)	85,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	3.111.876.250,00	3.072.873.794,00	(39.002.456,00)	98,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.111.876.250,00	3.072.873.794,00	(39.002.456,00)	98,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000,00	199.698.221,00	(301.779,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.698.221,00	(301.779,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.698.221,00	(301.779,00)	99,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.000.000,00	9.851.500,00	(148.500,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.851.500,00	(148.500,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.851.500,00	(148.500,00)	98,52	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.641.887.690,00	3.516.091.364,00	(125.796.326,00)	96,55	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	201.364.000,00	153.834.585,00	(47.529.415,00)	76,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.364.000,00	153.834.585,00	(47.529.415,00)	76,40	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	3.440.523.690,00	3.362.256.779,00	(78.266.911,00)	97,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.440.523.690,00	3.362.256.779,00	(78.266.911,00)	97,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	18.513.184.965,00	18.299.388.785,00	(213.796.180,00)	98,85	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006		Pembangunan Laboratorium	982.521.000,00	981.528.361,00	(992.639,00)	99,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	982.521.000,00	981.528.361,00	(992.639,00)	99,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	982.521.000,00	981.528.361,00	(992.639,00)	99,90	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.564.475.680,00	1.552.628.109,00	(11.847.571,00)	99,24	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	746.994.000,00	744.893.000,00	(2.101.000,00)	99,72	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.994.000,00	244.893.000,00	(2.101.000,00)	99,15	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	817.481.680,00	807.735.109,00	(9.746.571,00)	98,81	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	263.500.000,00	256.115.250,00	(7.384.750,00)	97,20	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	503.981.680,00	501.984.859,00	(1.996.821,00)	99,60	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	49.635.000,00	(365.000,00)	99,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.462.825.700,00	2.429.829.247,00	(32.996.453,00)	98,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	246.726.000,00	218.483.247,00	(28.242.753,00)	88,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	89.618.400,00	89.235.166,00	(383.234,00)	99,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.618.400,00	89.235.166,00	(383.234,00)	99,57	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	48.600.000,00	48.323.980,00	(276.020,00)	99,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2	BELANJA MODAL	48.600.000,00	48.323.980,00	(276.020,00)	99,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.600.000,00	48.323.980,00	(276.020,00)	99,43	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	494.863.400,00	400.534.831,00	(94.328.569,00)	80,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	494.863.400,00	400.534.831,00	(94.328.569,00)	80,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.863.400,00	400.534.831,00	(94.328.569,00)	80,94	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	550.000.000,00	542.638.000,00	(7.362.000,00)	98,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	247.060.000,00	(2.940.000,00)	98,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	247.060.000,00	(2.940.000,00)	98,82	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	300.000.000,00	295.578.000,00	(4.422.000,00)	98,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	295.578.000,00	(4.422.000,00)	98,53	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20.995.000,00	0,00	(20.995.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1	BELANJA OPERASI	20.995.000,00	0,00	(20.995.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.995.000,00	0,00	(20.995.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	28.127.000,00	28.104.500,00	(22.500,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1	BELANJA OPERASI	28.127.000,00	28.104.500,00	(22.500,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.127.000,00	28.104.500,00	(22.500,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	178.249.000,00	178.099.000,00	(150.000,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1	BELANJA OPERASI	178.249.000,00	178.099.000,00	(150.000,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.249.000,00	178.099.000,00	(150.000,00)	99,92	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	99.971.650,00	99.954.507,00	(17.143,00)	99,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	99.971.650,00	99.954.507,00	(17.143,00)	99,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.971.650,00	99.954.507,00	(17.143,00)	99,98	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018		Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.281.600.000,00	4.184.196.216,00	(97.403.784,00)	97,73	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	4.269.400.000,00	4.175.596.216,00	(93.803.784,00)	97,80	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.200.000,00	598.762.216,00	(63.437.784,00)	90,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	3.607.200.000,00	3.576.834.000,00	(30.366.000,00)	99,16	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	12.200.000,00	8.600.000,00	(3.600.000,00)	70,49	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	6.500.000,00	(3.400.000,00)	65,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.300.000,00	2.100.000,00	(200.000,00)	91,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030		Pembangunan Ruang Kelas Baru	197.267.400,00	196.823.115,00	(444.285,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2	BELANJA MODAL	197.267.400,00	196.823.115,00	(444.285,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.267.400,00	196.823.115,00	(444.285,00)	99,77	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.675.499.350,00	1.568.878.974,00	(106.620.376,00)	93,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	486.202.500,00	482.727.500,00	(3.475.000,00)	99,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.520.000,00	17.895.000,00	(625.000,00)	96,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.520.000,00	17.895.000,00	(625.000,00)	96,63	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2	BELANJA MODAL	467.682.500,00	464.832.500,00	(2.850.000,00)	99,39	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.650.000,00	123.800.000,00	(2.850.000,00)	97,75	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	341.032.500,00	341.032.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.508.000,00	21.796.800,00	(3.711.200,00)	85,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1	BELANJA OPERASI	25.508.000,00	21.796.800,00	(3.711.200,00)	85,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.508.000,00	21.796.800,00	(3.711.200,00)	85,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	112.599.150,00	112.466.200,00	(132.950,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1	BELANJA OPERASI	112.599.150,00	112.466.200,00	(132.950,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.599.150,00	112.466.200,00	(132.950,00)	99,88	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	908.859.500,00	810.100.000,00	(98.759.500,00)	89,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	883.194.500,00	792.285.000,00	(90.909.500,00)	89,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.294.500,00	163.385.000,00	(90.909.500,00)	64,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	628.900.000,00	628.900.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	25.665.000,00	17.815.000,00	(7.850.000,00)	69,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.315.000,00	17.815.000,00	(6.500.000,00)	73,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap *Lainnya*	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	142.330.200,00	141.788.474,00	(541.726,00)	99,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.1	BELANJA OPERASI	22.839.000,00	22.727.000,00	(112.000,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.839.000,00	22.727.000,00	(112.000,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.2	BELANJA MODAL	119.491.200,00	119.061.474,00	(429.726,00)	99,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.491.200,00	119.061.474,00	(429.726,00)	99,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	428.756.850,00	423.017.397,00	(5.739.453,00)	98,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	213.756.900,00	208.211.253,00	(5.545.647,00)	97,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	211.656.900,00	208.211.253,00	(3.445.647,00)	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	211.656.900,00	208.211.253,00	(3.445.647,00)	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.656.900,00	208.211.253,00	(3.445.647,00)	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54.586.500,00	48.352.809,00	(6.233.691,00)	88,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.586.500,00	48.352.809,00	(6.233.691,00)	88,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.586.500,00	13.352.809,00	(6.233.691,00)	68,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.586.500,00	13.352.809,00	(6.233.691,00)	68,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.586.500,00	13.352.809,00	(6.233.691,00)	68,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	248.051.752.036,00	239.898.406.337,00	(8.153.345.699,00)	96,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat	358.714.950,00	353.064.810,00	(5.650.140,00)	98,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.579.000,00	83.579.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.579.000,00	83.579.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.719.000,00	43.719.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.719.000,00	43.719.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.451.200,00	69.866.200,00	(585.000,00)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.451.200,00	69.866.200,00	(585.000,00)	99,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	883.194.500,00	792.285.000,00	(90.909.500,00)	89,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.294.500,00	163.385.000,00	(90.909.500,00)	64,25	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	628.900.000,00	628.900.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	25.665.000,00	17.815.000,00	(7.850.000,00)	69,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.315.000,00	17.815.000,00	(6.500.000,00)	73,27	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	142.330.200,00	141.788.474,00	(541.726,00)	99,62	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.1	BELANJA OPERASI	22.839.000,00	22.727.000,00	(112.000,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.839.000,00	22.727.000,00	(112.000,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.2	BELANJA MODAL	119.491.200,00	119.061.474,00	(429.726,00)	99,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.491.200,00	119.061.474,00	(429.726,00)	99,64	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	428.756.850,00	423.017.397,00	(5.739.453,00)	98,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	213.756.900,00	208.211.253,00	(5.545.647,00)	97,41	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	0,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	211.656.900,00	208.211.253,00	(3.445.647,00)	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	211.656.900,00	208.211.253,00	(3.445.647,00)	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.656.900,00	208.211.253,00	(3.445.647,00)	98,37	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan *Nonformal*	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.999.950,00	214.806.144,00	(193.806,00)	99,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54.586.500,00	48.352.809,00	(6.233.691,00)	88,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan *Pendidikan Dasar*, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.586.500,00	48.352.809,00	(6.233.691,00)	88,58	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.586.500,00	13.352.809,00	(6.233.691,00)	68,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.586.500,00	13.352.809,00	(6.233.691,00)	68,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.586.500,00	13.352.809,00	(6.233.691,00)	68,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.1.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	248.051.752.036,00	239.898.406.337,00	(8.153.345.699,00)	96,71	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	245.610.916.486,00	238.028.632.973,00	(7.582.283.513,00)	96,91	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat	358.714.950,00	353.064.810,00	(5.650.140,00)	98,42	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.997.000,00	9.997.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.579.000,00	83.579.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.579.000,00	83.579.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.719.000,00	43.719.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.719.000,00	43.719.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.451.200,00	69.866.200,00	(585.000,00)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	70.451.200,00	69.866.200,00	(585.000,00)	99,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.451.200,00	69.866.200,00	(585.000,00)	99,17	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.968.750,00	131.903.610,00	(5.065.140,00)	96,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	136.968.750,00	131.903.610,00	(5.065.140,00)	96,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.968.750,00	131.903.610,00	(5.065.140,00)	96,30	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.978.340.600,00	1.413.438.554,00	(564.902.046,00)	71,45	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.735.000,00	133.363.754,00	(11.371.246,00)	92,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	144.735.000,00	133.363.754,00	(11.371.246,00)	92,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.735.000,00	133.363.754,00	(11.371.246,00)	92,14	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.605.600,00	1.271.074.800,00	(553.530.800,00)	69,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.824.605.600,00	1.271.074.800,00	(553.530.800,00)	69,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.824.605.600,00	1.271.074.800,00	(553.530.800,00)	69,66	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.780.000,00	103.270.000,00	(510.000,00)	99,51	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.500.000,00	70.990.000,00	(510.000,00)	99,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.500.000,00	70.990.000,00	(510.000,00)	99,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	70.990.000,00	(510.000,00)	99,29	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.280.000,00	16.280.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Dinas Kesehatan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	10.621.487.617,00	9.802.903.770,00	(818.583.847,00)	92,29	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.621.487.617,00	9.802.903.770,00	(818.583.847,00)	92,29	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	10.621.487.617,00	9.802.903.770,00	(818.583.847,00)	92,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	159.103.770.575,00	153.368.538.191,74	(5.735.232.383,26)	96,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	64.763.918.336,00	61.923.000.402,00	(2.840.917.934,00)	95,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.617.943.996,00	18.591.055.503,00	(1.026.888.493,00)	94,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	560.566.000,00	500.090.435,00	(60.475.565,00)	89,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.246.000,00	0,00	(22.246.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.246.000,00	0,00	(22.246.000,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	538.320.000,00	500.090.435,00	(38.229.565,00)	92,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	538.320.000,00	500.090.435,00	(38.229.565,00)	92,89	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006		Pengembangan Puskesmas	11.873.954.836,00	11.146.929.955,00	(727.024.881,00)	93,87	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	333.715.358,00	332.339.493,00	(1.375.865,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.715.358,00	332.339.493,00	(1.375.865,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	11.540.239.478,00	10.814.590.462,00	(725.649.016,00)	93,71	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.730.000.000,00	6.618.000.000,00	(112.000.000,00)	98,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.971.239.478,00	3.570.764.462,00	(400.475.016,00)	89,91	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	839.000.000,00	625.826.000,00	(213.174.000,00)	74,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	290.000.000,00	274.500.000,00	(15.500.000,00)	94,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	290.000.000,00	274.500.000,00	(15.500.000,00)	94,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	290.000.000,00	274.500.000,00	(15.500.000,00)	94,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	219.080.900,00	189.126.233,00	(29.954.667,00)	86,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	219.080.900,00	189.126.233,00	(29.954.667,00)	86,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	219.080.900,00	189.126.233,00	(29.954.667,00)	86,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.560.003.660,00	6.369.274.080,00	(190.729.580,00)	97,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	6.560.003.660,00	6.369.274.080,00	(190.729.580,00)	97,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.560.003.660,00	6.369.274.080,00	(190.729.580,00)	97,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	114.338.600,00	111.134.800,00	(3.203.800,00)	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	114.338.600,00	111.134.800,00	(3.203.800,00)	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.338.600,00	111.134.800,00	(3.203.800,00)	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.766.003.990,00	42.990.112.120,00	(1.775.891.870,00)	96,03	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.733.000,00	204.220.342,00	(12.512.658,00)	94,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	216.733.000,00	204.220.342,00	(12.512.658,00)	94,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.733.000,00	204.220.342,00	(12.512.658,00)	94,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187.520.800,00	113.336.500,00	(74.184.300,00)	60,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.520.800,00	113.336.500,00	(74.184.300,00)	60,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.520.800,00	113.336.500,00	(74.184.300,00)	60,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	312.183.850,00	201.951.198,00	(110.232.652,00)	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	312.183.850,00	201.951.198,00	(110.232.652,00)	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.183.850,00	201.951.198,00	(110.232.652,00)	64,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.416.000,00	231.256.225,00	(14.159.775,00)	94,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	245.416.000,00	231.256.225,00	(14.159.775,00)	94,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.416.000,00	231.256.225,00	(14.159.775,00)	94,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000,00	44.657.100,00	(5.342.900,00)	89,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	44.657.100,00	(5.342.900,00)	89,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	44.657.100,00	(5.342.900,00)	89,31	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78.001.000,00	75.639.600,00	(2.361.400,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	78.001.000,00	75.639.600,00	(2.361.400,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.001.000,00	75.639.600,00	(2.361.400,00)	96,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.401.000,00	29.875.000,00	(3.526.000,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.401.000,00	29.875.000,00	(3.526.000,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.401.000,00	29.875.000,00	(3.526.000,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.197.140,00	220.726.129,00	(7.471.011,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	228.197.140,00	220.726.129,00	(7.471.011,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.197.140,00	220.726.129,00	(7.471.011,00)	96,72	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	135.125.000,00	131.359.260,00	(3.765.740,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	135.125.000,00	131.359.260,00	(3.765.740,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.125.000,00	131.359.260,00	(3.765.740,00)	97,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000,00	48.390.300,00	(1.609.700,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.390.300,00	(1.609.700,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.390.300,00	(1.609.700,00)	96,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	348.509.900,00	343.921.805,00	(4.588.095,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	348.509.900,00	343.921.805,00	(4.588.095,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.509.900,00	343.921.805,00	(4.588.095,00)	98,68	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000,00	47.473.800,00	(2.526.200,00)	94,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	47.473.800,00	(2.526.200,00)	94,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	47.473.800,00	(2.526.200,00)	94,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41.000.000,00	34.995.000,00	(6.005.000,00)	85,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	34.995.000,00	(6.005.000,00)	85,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	34.995.000,00	(6.005.000,00)	85,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	141.000.000,00	135.126.200,00	(5.873.800,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	141.000.000,00	135.126.200,00	(5.873.800,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.000.000,00	135.126.200,00	(5.873.800,00)	95,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	562.585.000,00	560.774.000,00	(1.811.000,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	562.585.000,00	560.774.000,00	(1.811.000,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.585.000,00	560.774.000,00	(1.811.000,00)	99,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250.000.000,00	247.405.150,00	(2.594.850,00)	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	247.405.150,00	(2.594.850,00)	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	247.405.150,00	(2.594.850,00)	98,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97.010.000,00	96.366.700,00	(643.300,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	97.010.000,00	96.366.700,00	(643.300,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.010.000,00	96.366.700,00	(643.300,00)	99,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	59.400.000,00	57.994.554,00	(1.405.446,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	59.400.000,00	57.994.554,00	(1.405.446,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.400.000,00	57.994.554,00	(1.405.446,00)	97,63	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	174.490.000,00	174.028.354,00	(461.646,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	174.490.000,00	174.028.354,00	(461.646,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.490.000,00	174.028.354,00	(461.646,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.440.170.400,00	23.170.285.858,00	(269.884.542,00)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	23.440.170.400,00	23.170.285.858,00	(269.884.542,00)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.440.170.400,00	23.170.285.858,00	(269.884.542,00)	98,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.410.000.000,00	4.155.936.328,00	(254.063.672,00)	94,23	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	749.999.996,00	(4,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	749.999.996,00	(4,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2	BELANJA MODAL	3.660.000.000,00	3.405.936.332,00	(254.063.668,00)	93,05	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000.000,00	1.486.588.467,00	(13.411.533,00)	99,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.160.000.000,00	1.919.347.865,00	(240.652.135,00)	88,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	12.750.046.700,00	11.815.283.331,00	(934.763.369,00)	92,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	12.708.021.700,00	11.773.258.331,00	(934.763.369,00)	92,64	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.708.021.700,00	11.773.258.331,00	(934.763.369,00)	92,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2	BELANJA MODAL	42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.025.000,00	42.025.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	668.592.000,00	618.404.711,00	(50.187.289,00)	92,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	463.443.700,00	417.968.811,00	(45.474.889,00)	90,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.443.700,00	417.968.811,00	(45.474.889,00)	90,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2	BELANJA MODAL	205.148.300,00	200.435.900,00	(4.712.400,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.148.300,00	200.435.900,00	(4.712.400,00)	97,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	45.000.000,00	43.206.020,00	(1.793.980,00)	96,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.206.020,00	(1.793.980,00)	96,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.206.020,00	(1.793.980,00)	96,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	27.060.000,00	26.680.000,00	(380.000,00)	98,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	27.060.000,00	26.680.000,00	(380.000,00)	98,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.060.000,00	26.680.000,00	(380.000,00)	98,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	110.132.000,00	108.975.250,00	(1.156.750,00)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1	BELANJA OPERASI	110.132.000,00	108.975.250,00	(1.156.750,00)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.132.000,00	108.975.250,00	(1.156.750,00)	98,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	54.430.200,00	51.843.405,00	(2.586.795,00)	95,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	54.430.200,00	51.843.405,00	(2.586.795,00)	95,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.430.200,00	51.843.405,00	(2.586.795,00)	95,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	131.012.250,00	115.101.571,00	(15.910.679,00)	87,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	131.012.250,00	115.101.571,00	(15.910.679,00)	87,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	131.012.250,00	115.101.571,00	(15.910.679,00)	87,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.012.250,00	115.101.571,00	(15.910.679,00)	87,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248.958.100,00	226.731.208,00	(22.226.892,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	248.958.100,00	226.731.208,00	(22.226.892,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	248.958.100,00	226.731.208,00	(22.226.892,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	248.958.100,00	226.731.208,00	(22.226.892,00)	91,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.518.846.900,00	1.450.689.620,00	(68.157.280,00)	95,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	461.937.400,00	438.005.631,00	(23.931.769,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	461.937.400,00	438.005.631,00	(23.931.769,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	461.937.400,00	438.005.631,00	(23.931.769,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	461.937.400,00	438.005.631,00	(23.931.769,00)	94,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.909.500,00	1.012.683.989,00	(44.225.511,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.909.500,00	1.012.683.989,00	(44.225.511,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.056.909.500,00	1.012.683.989,00	(44.225.511,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.056.909.500,00	1.012.683.989,00	(44.225.511,00)	95,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	372.331.000,00	363.319.000,00	(9.012.000,00)	97,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	57.030.000,00	(6.700.000,00)	89,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	57.030.000,00	(6.700.000,00)	89,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.730.000,00	57.030.000,00	(6.700.000,00)	89,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.730.000,00	57.030.000,00	(6.700.000,00)	89,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	308.601.000,00	306.289.000,00	(2.312.000,00)	99,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	308.601.000,00	306.289.000,00	(2.312.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	308.601.000,00	306.289.000,00	(2.312.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	308.601.000,00	306.289.000,00	(2.312.000,00)	99,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	361.790.000,00	238.241.481,00	(123.548.519,00)	65,85	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.270.000,00	149.808.481,00	(101.461.519,00)	59,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	251.270.000,00	149.808.481,00	(101.461.519,00)	59,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	251.270.000,00	149.808.481,00	(101.461.519,00)	59,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.270.000,00	149.808.481,00	(101.461.519,00)	59,62	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.520.000,00	88.433.000,00	(22.087.000,00)	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.520.000,00	88.433.000,00	(22.087.000,00)	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.520.000,00	88.433.000,00	(22.087.000,00)	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.520.000,00	88.433.000,00	(22.087.000,00)	80,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.086.884.339,00	89.393.287.688,74	(2.693.596.650,26)	97,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.410.581.800,00	64.899.850.184,00	(510.731.616,00)	99,21	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.379.767.000,00	64.871.520.978,00	(508.246.022,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.379.767.000,00	64.871.520.978,00	(508.246.022,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	65.379.767.000,00	64.871.520.978,00	(508.246.022,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.326.800,00	6.209.350,00	(1.117.450,00)	84,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.326.800,00	6.209.350,00	(1.117.450,00)	84,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.326.800,00	6.209.350,00	(1.117.450,00)	84,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.488.000,00	22.119.856,00	(1.368.144,00)	94,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.488.000,00	22.119.856,00	(1.368.144,00)	94,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.488.000,00	22.119.856,00	(1.368.144,00)	94,17	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.838.500,00	32.176.950,00	(661.550,00)	97,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.503.500,00	5.062.150,00	(1.441.350,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.503.500,00	5.062.150,00	(1.441.350,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.503.500,00	5.062.150,00	(1.441.350,00)	77,83	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.335.000,00	27.114.800,00	779.800,00	102,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.335.000,00	27.114.800,00	779.800,00	102,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.335.000,00	27.114.800,00	779.800,00	102,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.936.100,00	273.344.048,00	(7.592.052,00)	97,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.616.000,00	(384.000,00)	92,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.616.000,00	(384.000,00)	92,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.616.000,00	(384.000,00)	92,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.755.000,00	52.265.000,00	(490.000,00)	99,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.080.000,00	41.665.000,00	(415.000,00)	99,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.080.000,00	41.665.000,00	(415.000,00)	99,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	10.675.000,00	10.600.000,00	(75.000,00)	99,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.675.000,00	10.600.000,00	(75.000,00)	99,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.195.000,00	10.643.000,00	(552.000,00)	95,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.995.000,00	9.943.000,00	(52.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.995.000,00	9.943.000,00	(52.000,00)	99,47	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	700.000,00	(500.000,00)	58,33	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	14.738.000,00	(262.000,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.738.000,00	(262.000,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.738.000,00	(262.000,00)	98,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.900,00	19.849.900,00	(150.000,00)	99,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.900,00	19.849.900,00	(150.000,00)	99,24	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	19.849.900,00	(150.000,00)	99,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.986.200,00	171.232.148,00	(5.754.052,00)	96,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	176.986.200,00	171.232.148,00	(5.754.052,00)	96,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.986.200,00	171.232.148,00	(5.754.052,00)	96,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.923.421.596,00	2.884.065.077,00	(39.356.519,00)	98,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.879.996,00	82.860.177,00	(9.019.819,00)	90,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.879.996,00	82.860.177,00	(9.019.819,00)	90,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.879.996,00	82.860.177,00	(9.019.819,00)	90,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.440.000,00	10.386.500,00	(53.500,00)	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.440.000,00	10.386.500,00	(53.500,00)	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.386.500,00	(53.500,00)	99,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.817.101.600,00	2.786.818.400,00	(30.283.200,00)	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.817.101.600,00	2.786.818.400,00	(30.283.200,00)	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.817.101.600,00	2.786.818.400,00	(30.283.200,00)	98,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.327.598,00	127.030.000,00	(5.297.598,00)	95,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.700.000,00	16.035.950,00	(664.050,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.700.000,00	16.035.950,00	(664.050,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	16.035.950,00	(664.050,00)	96,02	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.800.000,00	101.314.850,00	(4.485.150,00)	95,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.800.000,00	101.314.850,00	(4.485.150,00)	95,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.800.000,00	101.314.850,00	(4.485.150,00)	95,76	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.827.598,00	9.679.200,00	(148.398,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	9.827.598,00	9.679.200,00	(148.398,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.827.598,00	9.679.200,00	(148.398,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	23.306.778.745,00	21.176.821.429,74	(2.129.957.315,26)	90,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.306.778.745,00	21.176.821.429,74	(2.129.957.315,26)	90,86	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	22.197.528.063,00	20.445.784.342,74	(1.751.743.720,26)	92,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	8.707.142.613,00	8.234.349.256,94	(472.793.356,06)	94,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.490.385.450,00	12.211.435.085,80	(1.278.950.364,20)	90,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.109.250.682,00	731.037.087,00	(378.213.595,00)	65,90	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.066.250.682,00	689.844.137,00	(376.406.545,00)	64,69	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.100.000,00	23.362.950,00	(1.737.050,00)	93,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.900.000,00	17.830.000,00	(70.000,00)	99,60	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	65.024.500.000,00	54.333.692.973,00	(10.690.807.027,00)	83,55	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.024.500.000,00	54.333.692.973,00	(10.690.807.027,00)	83,55	
	1.02.0.00.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	65.024.500.000,00	54.333.692.973,00	(10.690.807.027,00)	83,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	100.878.622.411,00	89.797.596.845,16	(11.081.025.565,84)	89,01	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3.116.094.882,00	3.116.094.280,00	(602,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.116.094.882,00	3.116.094.280,00	(602,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0008		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	3.116.094.882,00	3.116.094.280,00	(602,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	3.116.094.882,00	3.116.094.280,00	(602,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0008	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.116.094.882,00	3.116.094.280,00	(602,00)	99,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.762.527.529,00	86.681.502.565,16	(11.081.024.963,84)	88,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.184.858.000,00	28.837.618.838,00	(347.239.162,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.184.858.000,00	28.837.618.838,00	(347.239.162,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.184.858.000,00	28.837.618.838,00	(347.239.162,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	29.184.858.000,00	28.837.618.838,00	(347.239.162,00)	98,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	68.577.669.529,00	57.843.883.727,16	(10.733.785.801,84)	84,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	68.577.669.529,00	57.843.883.727,16	(10.733.785.801,84)	84,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.718.275.981,00	54.152.191.780,00	(7.566.084.201,00)	87,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	17.197.201.254,00	15.433.824.177,00	(1.763.377.077,00)	89,74	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.521.074.727,00	38.718.367.603,00	(5.802.707.124,00)	86,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	6.859.393.548,00	3.691.691.947,16	(3.167.701.600,84)	53,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.695.393.548,00	2.787.385.750,00	(2.908.007.798,00)	48,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	686.000.000,00	448.591.197,16	(237.408.802,84)	65,39	
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	478.000.000,00	455.715.000,00	(22.285.000,00)	95,33	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.635.000.000,00	678.089.487,00	(956.910.513,00)	41,47	
	1.03.0.00.0.00.01.000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.635.000.000,00	678.089.487,00	(956.910.513,00)	41,47	
	1.03.0.00.0.00.01.000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.630.000.000,00	676.361.887,00	(953.638.113,00)	41,49	
	1.03.0.00.0.00.01.000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000.000,00	1.727.600,00	(3.272.400,00	34,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	76.243.716.022,00	68.808.326.143,00	7.435.389.879,00)	90,25	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.821.042.000,00	3.788.502.838,00	(32.539.162,00)	99,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.079.942.000,00	2.067.421.140,00	(12.520.860,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai	2.079.942.000,00	2.067.421.140,00	(12.520.860,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2	BELANJA MODAL	2.079.942.000,00	2.067.421.140,00	(12.520.860,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.079.942.000,00	2.067.421.140,00	(12.520.860,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.741.100.000,00	1.721.081.698,00	(20.018.302,00)	98,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	519.350.000,00	509.452.214,00	(9.897.786,00)	98,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.2	BELANJA MODAL	519.350.000,00	509.452.214,00	(9.897.786,00)	98,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	519.350.000,00	509.452.214,00	(9.897.786,00)	98,09	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.221.750.000,00	1.211.629.484,00	(10.120.516,00)	99,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2	BELANJA MODAL	1.221.750.000,00	1.211.629.484,00	(10.120.516,00)	99,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.221.750.000,00	1.211.629.484,00	(10.120.516,00)	99,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	804.227.750,00	693.579.309,00	(110.648.441,00)	86,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	804.227.750,00	693.579.309,00	(110.648.441,00)	86,24	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22.528.000,00	2.772.050,00	(19.755.950,00)	12,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024	5.1	BELANJA OPERASI	22.528.000,00	2.772.050,00	(19.755.950,00)	12,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.528.000,00	2.772.050,00	(19.755.950,00)	12,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.927.000,00	3.091.500,00	(1.835.500,00)	62,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	4.927.000,00	3.091.500,00	(1.835.500,00)	62,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.927.000,00	3.091.500,00	(1.835.500,00)	62,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	410.858.700,00	366.470.599,00	(44.388.101,00)	89,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	326.458.700,00	286.620.599,00	(39.838.101,00)	87,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.458.700,00	286.620.599,00	(39.838.101,00)	87,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	84.400.000,00	79.850.000,00	(4.550.000,00)	94,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.400.000,00	79.850.000,00	(4.550.000,00)	94,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	365.914.050,00	321.245.160,00	(44.668.890,00)	87,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	365.914.050,00	321.245.160,00	(44.668.890,00)	87,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.914.050,00	321.245.160,00	(44.668.890,00)	87,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	44.113.500,00	7.289.700,00	(36.823.800,00)	16,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	44.113.500,00	7.289.700,00	(36.823.800,00)	16,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011		*Pembinaan dan Pemberdayaan* Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	44.113.500,00	7.289.700,00	(36.823.800,00)	16,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	44.113.500,00	7.289.700,00	(36.823.800,00)	16,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.113.500,00	7.289.700,00	(36.823.800,00)	16,52	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	628.055.354,00	307.390.628,00	(320.664.726,00)	48,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	628.055.354,00	307.390.628,00	(320.664.726,00)	48,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0028		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala	4.927.000,00	3.441.500,00	(1.485.500,00)	69,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	4.927.000,00	3.441.500,00	(1.485.500,00)	69,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.927.000,00	3.441.500,00	(1.485.500,00)	69,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033		Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	159.842.600,00	95.872.728,00	(63.969.872,00)	59,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	159.842.600,00	95.872.728,00	(63.969.872,00)	59,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.842.600,00	95.872.728,00	(63.969.872,00)	59,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.842.600,00	95.872.728,00	(63.969.872,00)	59,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	37.470.750,00	26.537.950,00	(10.932.800,00)	70,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	37.470.750,00	26.537.950,00	(10.932.800,00)	70,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.470.750,00	26.537.950,00	(10.932.800,00)	70,82	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.927.000,00	0,00	(4.927.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	4.927.000,00	0,00	(4.927.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.927.000,00	0,00	(4.927.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	79.601.654,00	70.366.550,00	(9.235.104,00)	88,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1	BELANJA OPERASI	79.601.654,00	70.366.550,00	(9.235.104,00)	88,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.601.654,00	70.366.550,00	(9.235.104,00)	88,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	336.359.850,00	111.171.900,00	(225.187.950,00)	33,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	336.359.850,00	111.171.900,00	(225.187.950,00)	33,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.359.850,00	111.171.900,00	(225.187.950,00)	33,05	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4.926.500,00	0,00	(4.926.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	4.926.500,00	0,00	(4.926.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.926.500,00	0,00	(4.926.500,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.305.980.425,00	2.747.034.399,00	(5.558.946.026,00)	33,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.305.980.425,00	2.747.034.399,00	(5.558.946.026,00)	33,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0014		Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	123.840.000,00	0,00	(123.840.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	123.840.000,00	0,00	(123.840.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.840.000,00	0,00	(123.840.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.730.585.625,00	2.485.139.756,00	(5.245.445.869,00)	32,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.888.100,00	2.069.349.556,00	(181.538.544,00)	91,93	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.01	Belanja Pegawai	61.360.000,00	14.300.000,00	(47.060.000,00)	23,31	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.189.528.100,00	2.055.049.556,00	(134.478.544,00)	93,86	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	5.479.697.525,00	415.790.200,00	(5.063.907.325,00)	7,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.479.697.525,00	415.790.200,00	(5.063.907.325,00)	7,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150.207.000,00	0,00	(150.207.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	150.207.000,00	0,00	(150.207.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.207.000,00	0,00	(150.207.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	301.347.800,00	261.894.643,00	(39.453.157,00)	86,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	301.347.800,00	261.894.643,00	(39.453.157,00)	86,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.347.800,00	261.894.643,00	(39.453.157,00)	86,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	53.357.011.493,00	52.875.771.630,00	(481.239.863,00)	99,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	53.357.011.493,00	52.875.771.630,00	(481.239.863,00)	99,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032		Pembangunan Jalan	46.716.044.543,00	46.433.767.125,00	(282.277.418,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1	BELANJA OPERASI	8.774.034.091,00	8.536.889.125,00	(237.144.966,00)	97,30	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.01	Belanja Pegawai	139.420.000,00	55.850.000,00	(83.570.000,00)	40,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.634.614.091,00	8.481.039.125,00	(153.574.966,00)	98,22	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2	BELANJA MODAL	37.942.010.452,00	37.896.878.000,00	(45.132.452,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.942.010.452,00	37.896.878.000,00	(45.132.452,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan	3.300.955.450,00	3.142.200.605,00	(158.754.845,00)	95,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.375.450,00	942.582.605,00	(157.792.845,00)	85,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.01	Belanja Pegawai	15.080.000,00	12.750.000,00	(2.330.000,00)	84,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.295.450,00	929.832.605,00	(155.462.845,00)	85,68	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	2.200.580.000,00	2.199.618.000,00	(962.000,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.200.580.000,00	2.199.618.000,00	(962.000,00)	99,96	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042		Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.800.011.500,00	1.799.963.000,00	(48.500,00)	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.011.500,00	1.799.963.000,00	(48.500,00)	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.011.500,00	1.799.963.000,00	(48.500,00)	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046		Pemeliharaan Rutin Jalan	1.540.000.000,00	1.499.840.900,00	(40.159.100,00)	97,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	1.540.000.000,00	1.499.840.900,00	(40.159.100,00)	97,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000.000,00	1.499.840.900,00	(40.159.100,00)	97,39	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	70.250.000,00	44.359.421,00	(25.890.579,00)	63,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	70.250.000,00	44.359.421,00	(25.890.579,00)	63,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	70.250.000,00	44.359.421,00	(25.890.579,00)	63,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	70.250.000,00	44.359.421,00	(25.890.579,00)	63,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.250.000,00	44.359.421,00	(25.890.579,00)	63,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	618.703.000,00	517.216.039,00	(101.486.961,00)	83,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	428.800.000,00	330.995.709,00	(97.804.291,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	428.800.000,00	330.995.709,00	(97.804.291,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	428.800.000,00	330.995.709,00	(97.804.291,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.800.000,00	330.995.709,00	(97.804.291,00)	77,19	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	189.903.000,00	186.220.330,00	(3.682.670,00)	98,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	189.903.000,00	186.220.330,00	(3.682.670,00)	98,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	189.903.000,00	186.220.330,00	(3.682.670,00)	98,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.903.000,00	186.220.330,00	(3.682.670,00)	98,06	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.594.332.500,00	7.827.182.179,00	(767.150.321,00)	91,07	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.506.007.000,00	4.386.392.048,00	(119.614.952,00)	97,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.007.000,00	4.386.392.048,00	(119.614.952,00)	97,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.506.007.000,00	4.386.392.048,00	(119.614.952,00)	97,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.506.007.000,00	4.386.392.048,00	(119.614.952,00)	97,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.637.800,00	414.685.029,00	(6.952.771,00)	98,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.995.800,00	4.995.800,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.269.000,00	233.460.000,00	(809.000,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	39.669.000,00	39.610.000,00	(59.000,00)	99,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.669.000,00	39.610.000,00	(59.000,00)	99,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	194.600.000,00	193.850.000,00	(750.000,00)	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.600.000,00	193.850.000,00	(750.000,00)	99,61	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.318.000,00	15.271.000,00	(47.000,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.318.000,00	15.271.000,00	(47.000,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.318.000,00	15.271.000,00	(47.000,00)	99,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.055.000,00	127.958.229,00	(6.096.771,00)	95,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.055.000,00	127.958.229,00	(6.096.771,00)	95,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.055.000,00	127.958.229,00	(6.096.771,00)	95,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.170.000,00	44.017.000,00	(153.000,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	44.170.000,00	44.017.000,00	(153.000,00)	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	44.170.000,00	44.017.000,00	(153.000,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.170.000,00	44.017.000,00	(153.000,00)	99,65	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.035.400.500,00	2.578.134.102,00	(457.266.398,00)	84,94	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	755.284.900,00	669.066.002,00	(86.218.898,00)	88,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	755.284.900,00	669.066.002,00	(86.218.898,00)	88,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.284.900,00	669.066.002,00	(86.218.898,00)	88,58	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.275.015.600,00	1.903.968.100,00	(371.047.500,00)	83,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.275.015.600,00	1.903.968.100,00	(371.047.500,00)	83,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.275.015.600,00	1.903.968.100,00	(371.047.500,00)	83,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.927.200,00	401.764.000,00	(183.163.200,00)	68,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.650.000,00	122.785.850,00	(158.864.150,00)	43,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	281.650.000,00	122.785.850,00	(158.864.150,00)	43,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.650.000,00	122.785.850,00	(158.864.150,00)	43,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	292.357.200,00	268.458.150,00	(23.899.050,00)	91,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	292.357.200,00	268.458.150,00	(23.899.050,00)	91,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.357.200,00	268.458.150,00	(23.899.050,00)	91,83	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.920.000,00	10.520.000,00	(400.000,00)	96,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.920.000,00	10.520.000,00	(400.000,00)	96,34	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.920.000,00	10.520.000,00	(400.000,00)	96,34	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,

DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	244.500.000,00	298.940.400,00	54.440.400,00	122,26	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	244.500.000,00	298.940.400,00	54.440.400,00	122,26	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	240.000.000,00	289.300.000,00	49.300.000,00	120,54	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.500.000,00	9.640.400,00	5.140.400,00	214,23	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	10.573.992.987,00	10.382.449.970,00	(191.543.017,00)	98,19	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	211.204.550,00	200.197.088,00	(11.007.462,00)	94,79	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.971.000,00	2.213.800,00	(757.200,00)	74,51	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.971.000,00	2.213.800,00	(757.200,00)	74,51	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.971.000,00	2.213.800,00	(757.200,00)	74,51	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.971.000,00	2.213.800,00	(757.200,00)	74,51	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.264.500,00	1.045.800,00	(218.700,00)	82,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.264.500,00	1.045.800,00	(218.700,00)	82,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.264.500,00	1.045.800,00	(218.700,00)	82,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.264.500,00	1.045.800,00	(218.700,00)	82,70	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban *Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	53.117.250,00	52.850.900,00	(266.350,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	53.117.250,00	52.850.900,00	(266.350,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.117.250,00	52.850.900,00	(266.350,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.117.250,00	52.850.900,00	(266.350,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	884.500,00	580.000,00	(304.500,00)	65,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0005		Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.500,00	580.000,00	(304.500,00)	65,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	884.500,00	580.000,00	(304.500,00)	65,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.500,00	580.000,00	(304.500,00)	65,57	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	152.967.300,00	143.506.588,00	(9.460.712,00)	93,82	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	152.967.300,00	143.506.588,00	(9.460.712,00)	93,82	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	152.967.300,00	143.506.588,00	(9.460.712,00)	93,82	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	5.1.02	*Belanja Barang dan Jasa*	152.967.300,00	143.506.588,00	(9.460.712,00)	93,82	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	35.265.000,00	33.923.700,00	(1.341.300,00)	96,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	35.265.000,00	33.923.700,00	(1.341.300,00)	96,20	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	7.613.500,00	6.366.400,00	(1.247.100,00)	83,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.613.500,00	6.366.400,00	(1.247.100,00)	83,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.613.500,00	6.366.400,00	(1.247.100,00)	83,62	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	27.651.500,00	27.557.300,00	(94.200,00)	99,66	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	27.651.500,00	27.557.300,00	(94.200,00)	99,66	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.651.500,00	27.557.300,00	(94.200,00)	99,66	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	517.774.600,00	517.719.805,00	(54.795,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	517.774.600,00	517.719.805,00	(54.795,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	517.774.600,00	517.719.805,00	(54.795,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	517.774.600,00	517.719.805,00	(54.795,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	517.774.600,00	517.719.805,00	(54.795,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.348.136.087,00	7.294.145.753,00	(53.990.334,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.348.136.087,00	7.294.145.753,00	(53.990.334,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.348.136.087,00	7.294.145.753,00	(53.990.334,00)	99,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.348.136.087,00	7.294.145.753,00	(53.990.334,00)	99,27	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	81.860.000,00	66.300.000,00	(15.560.000,00)	80,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.266.276.087,00	7.227.845.753,00	(38.430.334,00)	99,47	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.461.612.750,00	2.336.463.624,00	(125.149.126,00)	94,92	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.743.168.000,00	1.679.552.030,00	(63.615.970,00)	96,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.168.000,00	1.679.552.030,00	(63.615.970,00)	96,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.743.168.000,00	1.679.552.030,00	(63.615.970,00)	96,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.743.168.000,00	1.679.552.030,00	(63.615.970,00)	96,35	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.581.950,00	207.661.229,00	(920.721,00)	99,56	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.965.500,00	(34.500,00)	99,31	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.965.500,00	(34.500,00)	99,31	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.965.500,00	(34.500,00)	99,31	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	29.862.300,00	(137.700,00)	99,54	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	29.862.300,00	(137.700,00)	99,54	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.862.300,00	(137.700,00)	99,54	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.100.000,00	3.844.000,00	(256.000,00)	93,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.100.000,00	3.844.000,00	(256.000,00)	93,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	3.844.000,00	(256.000,00)	93,76	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.750.000,00	15.330.000,00	(420.000,00)	97,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.750.000,00	15.330.000,00	(420.000,00)	97,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.750.000,00	15.330.000,00	(420.000,00)	97,33	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000,00	16.955.000,00	(45.000,00)	99,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.955.000,00	(45.000,00)	99,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.955.000,00	(45.000,00)	99,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.731.950,00	136.704.429,00	(27.521,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	136.731.950,00	136.704.429,00	(27.521,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.731.950,00	136.704.429,00	(27.521,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.032.800,00	386.525.000,00	(58.507.800,00)	86,85	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.032.800,00	382.525.000,00	(58.507.800,00)	86,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	441.032.800,00	382.525.000,00	(58.507.800,00)	86,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.032.800,00	382.525.000,00	(58.507.800,00)	86,73	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.500.000,00	59.395.365,00	(2.104.635,00)	96,58	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	16.040.450,00	(459.550,00)	97,21	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.040.450,00	(459.550,00)	97,21	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.040.450,00	(459.550,00)	97,21	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	38.379.915,00	(1.620.085,00)	95,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	38.379.915,00	(1.620.085,00)	95,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	38.379.915,00	(1.620.085,00)	95,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.975.000,00	(25.000,00)	99,50	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.173.389.214,00	7.958.612.893,00	(214.776.321,00)	97,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	526.054.050,00	517.668.591,00	(8.385.459,00)	98,41	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.596.400,00	408.473.000,00	(8.123.400,00)	98,05	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	44.996.400,00	44.876.600,00	(119.800,00)	99,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	44.996.400,00	44.876.600,00	(119.800,00)	99,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.996.400,00	44.876.600,00	(119.800,00)	99,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	363.600.000,00	363.596.400,00	(3.600,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	363.600.000,00	363.596.400,00	(3.600,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.600.000,00	363.596.400,00	(3.600,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	96.502.150,00	96.322.000,00	(180.150,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.233.500,00	24.131.000,00	(102.500,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.233.500,00	24.131.000,00	(102.500,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.233.500,00	24.131.000,00	(102.500,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	72.268.650,00	72.191.000,00	(77.650,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	72.268.650,00	72.191.000,00	(77.650,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.268.650,00	72.191.000,00	(77.650,00)	99,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	12.955.500,00	12.873.591,00	(81.909,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12.955.500,00	12.873.591,00	(81.909,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.955.500,00	12.873.591,00	(81.909,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.955.500,00	12.873.591,00	(81.909,00)	99,37	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	315.478.050,00	315.237.100,00	(240.950,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.394.800,00	270.387.100,00	(7.700,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.394.800,00	270.387.100,00	(7.700,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	270.394.800,00	270.387.100,00	(7.700,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.394.800,00	270.387.100,00	(7.700,00)	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	7.957.000,00	7.852.000,00	(105.000,00)	98,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	7.957.000,00	7.852.000,00	(105.000,00)	98,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.957.000,00	7.852.000,00	(105.000,00)	98,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.957.000,00	7.852.000,00	(105.000,00)	98,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	6.426.250,00	6.330.000,00	(96.250,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6.426.250,00	6.330.000,00	(96.250,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.426.250,00	6.330.000,00	(96.250,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.426.250,00	6.330.000,00	(96.250,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	25.200.000,00	25.168.000,00	(32.000,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.200.000,00	25.168.000,00	(32.000,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.200.000,00	25.168.000,00	(32.000,00)	99,87	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	25.168.000,00	(32.000,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.331.857.114,00	7.125.707.202,00	(206.149.912,00)	97,19	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.242.000,00	3.126.633.582,00	(77.608.418,00)	97,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.242.000,00	3.126.633.582,00	(77.608.418,00)	97,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.204.242.000,00	3.126.633.582,00	(77.608.418,00)	97,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.204.242.000,00	3.126.633.582,00	(77.608.418,00)	97,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.456.250,00	180.288.794,00	(167.456,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.061.000,00	8.058.500,00	(2.500,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.061.000,00	8.058.500,00	(2.500,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.061.000,00	8.058.500,00	(2.500,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.443.000,00	27.389.000,00	(54.000,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.443.000,00	27.389.000,00	(54.000,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.443.000,00	27.389.000,00	(54.000,00)	99,80	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.498.000,00	7.484.000,00	(14.000,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.498.000,00	7.484.000,00	(14.000,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.498.000,00	7.484.000,00	(14.000,00)	99,81	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.054.250,00	107.957.294,00	(96.956,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	108.054.250,00	107.957.294,00	(96.956,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.054.250,00	107.957.294,00	(96.956,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.788.238.864,00	3.663.625.376,00	(124.613.488,00)	96,71	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.034.064,00	35.059.376,00	(974.688,00)	97,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.034.064,00	35.059.376,00	(974.688,00)	97,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.034.064,00	35.059.376,00	(974.688,00)	97,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.748.204.800,00	3.624.566.000,00	(123.638.800,00)	96,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.748.204.800,00	3.624.566.000,00	(123.638.800,00)	96,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.748.204.800,00	3.624.566.000,00	(123.638.800,00)	96,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.920.000,00	155.159.450,00	(3.760.550,00)	97,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	16.950.000,00	(550.000,00)	96,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	16.950.000,00	(550.000,00)	96,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.950.000,00	(550.000,00)	96,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.480.000,00	133.394.450,00	(3.085.550,00)	97,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.480.000,00	133.394.450,00	(3.085.550,00)	97,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.480.000,00	133.394.450,00	(3.085.550,00)	97,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000,00	4.815.000,00	(125.000,00)	97,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.940.000,00	4.815.000,00	(125.000,00)	97,47	
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.815.000,00	(125.000,00)	97,47	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.865.224.000,00	2.722.444.476,00	(142.779.524,00)	95,02	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	640.345.500,00	619.060.082,00	(21.285.418,00)	96,68	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.120.000,00	3.600.000,00	(1.520.000,00)	70,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	5.120.000,00	3.600.000,00	(1.520.000,00)	70,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	5.120.000,00	3.600.000,00	(1.520.000,00)	70,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	3.600.000,00	(1.520.000,00)	70,31	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	464.964.800,00	457.983.604,00	(6.981.196,00)	98,50	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0009		Penyusunan Rencana Kontijensi	42.271.000,00	40.795.664,00	(1.475.336,00)	96,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.271.000,00	40.795.664,00	(1.475.336,00)	96,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.271.000,00	40.795.664,00	(1.475.336,00)	96,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0014		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6.111.900,00	5.999.600,00	(112.300,00)	98,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	6.111.900,00	5.999.600,00	(112.300,00)	98,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.111.900,00	5.999.600,00	(112.300,00)	98,16	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	399.970.000,00	398.145.740,00	(1.824.260,00)	99,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	399.970.000,00	398.145.740,00	(1.824.260,00)	99,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.970.000,00	398.145.740,00	(1.824.260,00)	99,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.111.900,00	2.542.600,00	(3.569.300,00)	41,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	6.111.900,00	2.542.600,00	(3.569.300,00)	41,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.111.900,00	2.542.600,00	(3.569.300,00)	41,60	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	134.856.700,00	122.601.200,00	(12.255.500,00)	90,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	24.000.000,00	17.699.600,00	(6.300.400,00)	73,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	17.699.600,00	(6.300.400,00)	73,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	17.699.600,00	(6.300.400,00)	73,75	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.048.700,00	1.501.600,00	(1.547.100,00)	49,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.048.700,00	1.501.600,00	(1.547.100,00)	49,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.048.700,00	1.501.600,00	(1.547.100,00)	49,25	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.008.000,00	39.952.400,00	(1.055.600,00)	97,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	41.008.000,00	39.952.400,00	(1.055.600,00)	97,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.008.000,00	39.952.400,00	(1.055.600,00)	97,43	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1	BELANJA OPERASI	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0010		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	0,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0011		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.500.000,00	1.647.600,00	(852.400,00)	65,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.647.600,00	(852.400,00)	65,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.647.600,00	(852.400,00)	65,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	35.404.000,00	34.875.278,00	(528.722,00)	98,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.404.000,00	34.875.278,00	(528.722,00)	98,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1	BELANJA OPERASI	35.404.000,00	34.875.278,00	(528.722,00)	98,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.404.000,00	34.875.278,00	(528.722,00)	98,51	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.224.878.500,00	2.103.384.394,00	(121.494.106,00)	94,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.079.393.000,00	1.029.932.045,00	(49.460.955,00)	95,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.079.393.000,00	1.029.932.045,00	(49.460.955,00)	95,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.079.393.000,00	1.029.932.045,00	(49.460.955,00)	95,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.079.393.000,00	1.029.932.045,00	(49.460.955,00)	95,42	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.124.900,00	284.441.049,00	(10.683.851,00)	96,38	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.012.700,00	5.012.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.012.700,00	5.012.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.012.700,00	5.012.700,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.910.000,00	64.869.500,00	(40.500,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.910.000,00	64.869.500,00	(40.500,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.910.000,00	64.869.500,00	(40.500,00)	99,94	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.436.000,00	47.914.000,00	(8.522.000,00)	84,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	56.436.000,00	47.914.000,00	(8.522.000,00)	84,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.436.000,00	47.914.000,00	(8.522.000,00)	84,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.326.200,00	14.326.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.326.200,00	14.326.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.326.200,00	14.326.200,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.440.000,00	152.318.649,00	(2.121.351,00)	98,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	154.440.000,00	152.318.649,00	(2.121.351,00)	98,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.440.000,00	152.318.649,00	(2.121.351,00)	98,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.971.600,00	43.971.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	5.505.600,00	5.505.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.509.600,00	1.509.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.509.600,00	1.509.600,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.996.000,00	3.996.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.466.000,00	38.466.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	38.466.000,00	38.466.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.466.000,00	38.466.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.469.000,00	520.014.200,00	(58.454.800,00)	89,89	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.001.000,00	22.995.000,00	(6.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	23.001.000,00	22.995.000,00	(6.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.001.000,00	22.995.000,00	(6.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.468.000,00	497.019.200,00	(58.448.800,00)	89,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	555.468.000,00	497.019.200,00	(58.448.800,00)	89,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.468.000,00	497.019.200,00	(58.448.800,00)	89,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.920.000,00	225.025.500,00	(2.894.500,00)	98,73	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.920.000,00	150.025.500,00	(2.894.500,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	152.920.000,00	150.025.500,00	(2.894.500,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.920.000,00	150.025.500,00	(2.894.500,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.531.204.802,00	4.450.471.600,00	(80.733.202,00)	98,22	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	75.984.079,00	75.931.000,00	(53.079,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	75.984.079,00	75.931.000,00	(53.079,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.984.150,00	60.949.300,00	(34.850,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	60.984.150,00	60.949.300,00	(34.850,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.984.150,00	60.949.300,00	(34.850,00)	99,94	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.929,00	14.981.700,00	(18.229,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.999.929,00	14.981.700,00	(18.229,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.999.929,00	14.981.700,00	(18.229,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	400.403.823,00	397.283.398,00	(3.120.425,00)	99,22	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	341.943.823,00	338.863.398,00	(3.080.425,00)	99,10	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001		Penyediaan Permakanan	13.105.000,00	12.793.450,00	(311.550,00)	97,62	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.105.000,00	12.793.450,00	(311.550,00)	97,62	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.105.000,00	12.793.450,00	(311.550,00)	97,62	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002		Penyediaan Sandang	7.746.873,00	7.681.873,00	(65.000,00)	99,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.746.873,00	7.681.873,00	(65.000,00)	99,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.746.873,00	7.681.873,00	(65.000,00)	99,16	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003		Penyediaan Alat Bantu	9.488.750,00	9.237.050,00	(251.700,00)	97,35	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.488.750,00	9.237.050,00	(251.700,00)	97,35	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.488.750,00	9.237.050,00	(251.700,00)	97,35	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	93.450.000,00	93.165.000,00	(285.000,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	93.450.000,00	93.165.000,00	(285.000,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.450.000,00	93.165.000,00	(285.000,00)	99,70	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	76.380.500,00	76.370.500,00	(10.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	76.380.500,00	76.370.500,00	(10.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.380.500,00	76.370.500,00	(10.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.039.750,00	2.942.850,00	(96.900,00)	96,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	3.039.750,00	2.942.850,00	(96.900,00)	96,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.039.750,00	2.942.850,00	(96.900,00)	96,81	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.156.500,00	99.633.905,00	(522.595,00)	99,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	100.156.500,00	99.633.905,00	(522.595,00)	99,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.156.500,00	99.633.905,00	(522.595,00)	99,48	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.513.000,00	4.085.750,00	(427.250,00)	90,53	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.513.000,00	4.085.750,00	(427.250,00)	90,53	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.513.000,00	4.085.750,00	(427.250,00)	90,53	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010		Pemberian Layanan Kedaruratan	2.745.050,00	2.334.100,00	(410.950,00)	85,03	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	2.745.050,00	2.334.100,00	(410.950,00)	85,03	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.745.050,00	2.334.100,00	(410.950,00)	85,03	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.130.900,00	4.862.500,00	(268.400,00)	94,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	5.130.900,00	4.862.500,00	(268.400,00)	94,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.130.900,00	4.862.500,00	(268.400,00)	94,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012		Pemberian Layanan Rujukan	18.787.500,00	18.356.420,00	(431.080,00)	97,71	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	18.787.500,00	18.356.420,00	(431.080,00)	97,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.787.500,00	18.356.420,00	(431.080,00)	97,71	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	58.460.000,00	58.420.000,00	(40.000,00)	99,93	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	47.200.000,00	47.190.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.200.000,00	47.190.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	47.190.000,00	(10.000,00)	99,98	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0013		Pemberian Layanan Rujukan	11.260.000,00	11.230.000,00	(30.000,00)	99,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	11.260.000,00	11.230.000,00	(30.000,00)	99,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.260.000,00	11.230.000,00	(30.000,00)	99,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	97.362.000,00	97.042.021,00	(319.979,00)	99,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	97.362.000,00	97.042.021,00	(319.979,00)	99,67	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.999.670,00	44.986.356,00	(13.314,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.999.670,00	44.986.356,00	(13.314,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.999.670,00	44.986.356,00	(13.314,00)	99,97	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	27.363.350,00	27.196.600,00	(166.750,00)	99,39	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.363.350,00	27.196.600,00	(166.750,00)	99,39	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.363.350,00	27.196.600,00	(166.750,00)	99,39	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.998.980,00	24.859.065,00	(139.915,00)	99,44	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.998.980,00	24.859.065,00	(139.915,00)	99,44	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.998.980,00	24.859.065,00	(139.915,00)	99,44	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	77.548.450,00	76.947.800,00	(600.650,00)	99,23	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	77.548.450,00	76.947.800,00	(600.650,00)	99,23	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001		Penyediaan Makanan	49.935.000,00	49.935.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.935.000,00	49.935.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.935.000,00	49.935.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002		Penyediaan Sandang	8.804.950,00	8.669.950,00	(135.000,00)	98,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.804.950,00	8.669.950,00	(135.000,00)	98,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.804.950,00	8.669.950,00	(135.000,00)	98,47	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8.153.500,00	8.053.500,00	(100.000,00)	98,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.153.500,00	8.053.500,00	(100.000,00)	98,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.153.500,00	8.053.500,00	(100.000,00)	98,77	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.337.500,00	6.243.200,00	(94.300,00)	98,51	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.337.500,00	6.243.200,00	(94.300,00)	98,51	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.337.500,00	6.243.200,00	(94.300,00)	98,51	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005		Pelayanan Dukungan Psikososial	4.317.500,00	4.046.150,00	(271.350,00)	93,72	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.317.500,00	4.046.150,00	(271.350,00)	93,72	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.317.500,00	4.046.150,00	(271.350,00)	93,72	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.879.906.450,00	3.803.267.381,00	(76.639.069,00)	98,02	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.571.597.000,00	2.514.028.604,00	(57.568.396,00)	97,76	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.571.597.000,00	2.514.028.604,00	(57.568.396,00)	97,76	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.571.597.000,00	2.514.028.604,00	(57.568.396,00)	97,76	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.571.597.000,00	2.514.028.604,00	(57.568.396,00)	97,76	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.777.100,00	311.286.954,00	(490.146,00)	99,84	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.871.000,00	(129.000,00)	97,42	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.871.000,00	(129.000,00)	97,42	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.871.000,00	(129.000,00)	97,42	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.654.000,00	59.591.500,00	(62.500,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.654.000,00	59.591.500,00	(62.500,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.654.000,00	59.591.500,00	(62.500,00)	99,90	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000,00	10.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	10.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.499.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.712.000,00	30.671.900,00	(40.100,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.712.000,00	30.671.900,00	(40.100,00)	99,87	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.712.000,00	30.671.900,00	(40.100,00)	99,87	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.911.100,00	187.653.554,00	(257.546,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	187.911.100,00	187.653.554,00	(257.546,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.911.100,00	187.653.554,00	(257.546,00)	99,86	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.900.000,00	31.650.000,00	(250.000,00)	99,22	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.900.000,00	31.650.000,00	(250.000,00)	99,22	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	31.900.000,00	31.650.000,00	(250.000,00)	99,22	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.900.000,00	31.650.000,00	(250.000,00)	99,22	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.002.350,00	757.012.544,00	(17.989.806,00)	97,68	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.691.550,00	69.561.194,00	(2.130.356,00)	97,03	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.691.550,00	69.561.194,00	(2.130.356,00)	97,03	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.691.550,00	69.561.194,00	(2.130.356,00)	97,03	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.310.800,00	683.451.350,00	(15.859.450,00)	97,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	699.310.800,00	683.451.350,00	(15.859.450,00)	97,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.310.800,00	683.451.350,00	(15.859.450,00)	97,73	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.630.000,00	189.289.279,00	(340.721,00)	99,82	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	16.433.586,00	(66.414,00)	99,60	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.433.586,00	(66.414,00)	99,60	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.433.586,00	(66.414,00)	99,60	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.750.000,00	160.555.693,00	(194.307,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	160.750.000,00	160.555.693,00	(194.307,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.750.000,00	160.555.693,00	(194.307,00)	99,88	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.380.000,00	12.300.000,00	(80.000,00)	99,35	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	12.380.000,00	12.300.000,00	(80.000,00)	99,35	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.380.000,00	12.300.000,00	(80.000,00)	99,35	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.238.365.100,00	1.122.047.242,00	(116.317.858,00)	90,61	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	534.515.650,00	528.951.291,00	(5.564.359,00)	98,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	534.515.650,00	528.951.291,00	(5.564.359,00)	98,96	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.525.000,00	9.520.000,00	(5.000,00)	99,95	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.525.000,00	9.520.000,00	(5.000,00)	99,95	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.525.000,00	9.520.000,00	(5.000,00)	99,95	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0004		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	524.990.650,00	519.431.291,00	(5.559.359,00)	98,94	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	524.990.650,00	519.431.291,00	(5.559.359,00)	98,94	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	524.990.650,00	519.431.291,00	(5.559.359,00)	98,94	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	124.505.000,00	92.605.251,00	(31.899.749,00)	74,38	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000,00	26.250.000,00	(350.000,00)	98,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000,00	26.250.000,00	(350.000,00)	98,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.600.000,00	26.250.000,00	(350.000,00)	98,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.600.000,00	26.250.000,00	(350.000,00)	98,68	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	97.905.000,00	66.355.251,00	(31.549.749,00)	67,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.905.000,00	66.355.251,00	(31.549.749,00)	67,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	97.905.000,00	66.355.251,00	(31.549.749,00)	67,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.905.000,00	66.355.251,00	(31.549.749,00)	67,78	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	34.692.700,00	34.303.650,00	(389.050,00)	98,88	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.692.700,00	34.303.650,00	(389.050,00)	98,88	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.692.700,00	34.303.650,00	(389.050,00)	98,88	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.692.700,00	34.303.650,00	(389.050,00)	98,88	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.692.700,00	34.303.650,00	(389.050,00)	98,88	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.766.000,00	53.275.900,00	(2.490.100,00)	95,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.766.000,00	53.275.900,00	(2.490.100,00)	95,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.766.000,00	53.275.900,00	(2.490.100,00)	95,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.766.000,00	53.275.900,00	(2.490.100,00)	95,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.766.000,00	53.275.900,00	(2.490.100,00)	95,53	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	488.885.750,00	412.911.150,00	(75.974.600,00)	84,46	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.400.000,00	103.020.000,00	(380.000,00)	99,63	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	103.400.000,00	103.020.000,00	(380.000,00)	99.63	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.400.000,00	103.020.000,00	(380.000,00)	99.63	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.400.000,00	103.020.000,00	(380.000,00)	99.63	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	297.085.750,00	245.885.204,00	(51.200.546,00)	82,77	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	297.085.750,00	245.885.204,00	(51.200.546,00)	82,77	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	220.675.000,00	185.341.116,00	(35.333.884,00)	83,99	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.675.000,00	185.341.116,00	(35.333.884,00)	83,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	76.410.750,00	60.544.088,00	(15.866.662,00)	79,24	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.410.750,00	60.544.088,00	(15.866.662,00)	79,24	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000,00	64.005.946,00	(24.394.054,00)	72,40	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	64.005.946,00	(24.394.054,00)	72,40	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	64.005.946,00	(24.394.054,00)	72,40	
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	64.005.946,00	(24.394.054,00)	72,40	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : Dinas Pangan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	20.000.000,00	32.080.000,00	12.080.000,00	160,40	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20.000.000,00	32.080.000,00	12.080.000,00	160,40	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	20.000.000,00	32.080.000,00	12.080.000,00	160,40	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	20.000.000,00	32.080.000,00	12.080.000,00	160,40	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.958.313.200,00	3.850.600.917,00	(107.712.283,00)	97,28	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	196.880.250,00	193.549.778,00	(3.330.472,00)	98,31	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	63.876.150,00	62.862.850,00	(1.013.300,00)	98,41	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	15.041.500,00	14.730.450,00	(311.050,00)	97,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	15.041.500,00	14.730.450,00	(311.050,00)	97,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.041.500,00	14.730.450,00	(311.050,00)	97,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	48.834.650,00	48.132.400,00	(702.250,00)	98,56	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	48.834.650,00	48.132.400,00	(702.250,00)	98,56	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.834.650,00	48.132.400,00	(702.250,00)	98,56	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	78.004.100,00	75.686.928,00	(2.317.172,00)	97,03	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	15.002.750,00	12.957.300,00	(2.045.450,00)	86,37	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.002.750,00	12.957.300,00	(2.045.450,00)	86,37	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.750,00	12.957.300,00	(2.045.450,00)	86,37	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	63.001.350,00	62.729.628,00	(271.722,00)	99,57	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	63.001.350,00	62.729.628,00	(271.722,00)	99,57	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.001.350,00	62.729.628,00	(271.722,00)	99,57	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	187.059.300,00	185.444.400,00	(1.614.900,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	187.059.300,00	185.444.400,00	(1.614.900,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	187.059.300,00	185.444.400,00	(1.614.900,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	187.059.300,00	185.444.400,00	(1.614.900,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.059.300,00	185.444.400,00	(1.614.900,00)	99,14	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	21.187.800,00	19.292.050,00	(1.895.750,00)	91,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	21.187.800,00	19.292.050,00	(1.895.750,00)	91,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21.187.800,00	19.292.050,00	(1.895.750,00)	91,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.187.800,00	19.292.050,00	(1.895.750,00)	91,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.187.800,00	19.292.050,00	(1.895.750,00)	91,05	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.553.185.850,00	3.452.314.689,00	(100.871.161,00)	97,16	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.471.055.000,00	2.421.064.129,00	(49.990.871,00)	97,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.471.055.000,00	2.421.064.129,00	(49.990.871,00)	97,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.471.055.000,00	2.421.064.129,00	(49.990.871,00)	97,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.471.055.000,00	2.421.064.129,00	(49.990.871,00)	97,98	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.168.500,00	224.740.490,00	(428.010,00)	99,81	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.003.000,00	3.988.000,00	(15.000,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.003.000,00	3.988.000,00	(15.000,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.003.000,00	3.988.000,00	(15.000,00)	99,63	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.067.000,00	35.041.000,00	(26.000,00)	99,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.067.000,00	35.041.000,00	(26.000,00)	99,93	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.067.000,00	35.041.000,00	(26.000,00)	99,93	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000,00	6.488.000,00	(12.000,00)	99,82	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.500.000,00	6.488.000,00	(12.000,00)	99,82	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.488.000,00	(12.000,00)	99,82	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.520.000,00	10.520.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.009.000,00	12.839.700,00	(169.300,00)	98,70	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.009.000,00	12.839.700,00	(169.300,00)	98,70	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.009.000,00	12.839.700,00	(169.300,00)	98,70	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.069.500,00	155.863.790,00	(205.710,00)	99,87	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	156.069.500,00	155.863.790,00	(205.710,00)	99,87	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.069.500,00	155.863.790,00	(205.710,00)	99,87	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.200.000,00	53.750.000,00	(3.450.000,00)	93,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.200.000,00	53.750.000,00	(3.450.000,00)	93,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	57.200.000,00	53.750.000,00	(3.450.000,00)	93,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.200.000,00	53.750.000,00	(3.450.000,00)	93,97	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.822.350,00	677.512.770,00	(45.309.580,00)	93,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.500.550,00	47.393.770,00	(106.780,00)	99,78	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.500.550,00	47.393.770,00	(106.780,00)	99,78	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.500.550,00	47.393.770,00	(106.780,00)	99,78	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.321.800,00	626.119.000,00	(45.202.800,00)	93,27	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	671.321.800,00	626.119.000,00	(45.202.800,00)	93,27	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.321.800,00	626.119.000,00	(45.202.800,00)	93,27	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.940.000,00	75.247.300,00	(1.692.700,00)	97,80	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000,00	20.977.000,00	(23.000,00)	99,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	20.977.000,00	(23.000,00)	99,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	20.977.000,00	(23.000,00)	99,89	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000,00	49.330.300,00	(1.669.700,00)	96,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	49.330.300,00	(1.669.700,00)	96,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	49.330.300,00	(1.669.700,00)	96,73	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	185.259.000,00	179.179.652,00	(6.079.348,00)	96,72	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	68.000.000,00	67.559.552,00	(440.448,00)	99,35	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.000.000,00	67.559.552,00	(440.448,00)	99,35	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0003		Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	68.000.000,00	67.559.552,00	(440.448,00)	99,35	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	67.559.552,00	(440.448,00)	99,35	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	67.559.552,00	(440.448,00)	99,35	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	117.259.000,00	111.620.100,00	(5.638.900,00)	95,19	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	117.259.000,00	111.620.100,00	(5.638.900,00)	95,19	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002		Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	117.259.000,00	111.620.100,00	(5.638.900,00)	95,19	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	117.259.000,00	111.620.100,00	(5.638.900,00)	95,19	
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.259.000,00	111.620.100,00	(5.638.900,00)	95,19	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	207.050.000,00	255.636.500,00	48.586.500,00	123,46	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	207.050.000,00	255.636.500,00	48.586.500,00	123,46	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	207.000.000,00	255.543.500,00	48.543.500,00	123,45	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	50.000,00	93.000,00	43.000,00	186,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	6.583.758.275,00	6.381.732.158,39	(202.026.116,61)	96,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	40.115.000,00	40.047.900,00	(67.100,00)	99,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	40.115.000,00	40.047.900,00	(67.100,00)	99,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	40.115.000,00	40.047.900,00	(67.100,00)	99,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.115.000,00	40.047.900,00	(67.100,00)	99,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.115.000,00	40.047.900,00	(67.100,00)	99,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	234.990.015,00	230.168.066,00	(4.821.949,00)	97,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	181.897.015,00	178.410.284,00	(3.486.731,00)	98,08	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	57.503.000,00	57.114.781,00	(388.219,00)	99,32	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	42.103.000,00	42.074.281,00	(28.719,00)	99,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.103.000,00	42.074.281,00	(28.719,00)	99,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	15.400.000,00	15.040.500,00	(359.500,00)	97,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	15.040.500,00	(359.500,00)	97,67	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	46.897.000,00	45.492.400,00	(1.404.600,00)	97,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.897.000,00	45.492.400,00	(1.404.600,00)	97,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.897.000,00	45.492.400,00	(1.404.600,00)	97,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	77.497.015,00	75.803.103,00	(1.693.912,00)	97,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	77.497.015,00	75.803.103,00	(1.693.912,00)	97,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.497.015,00	75.803.103,00	(1.693.912,00)	97,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	53.093.000,00	51.757.782,00	(1.335.218,00)	97,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	53.093.000,00	51.757.782,00	(1.335.218,00)	97,49	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.593.000,00	47.866.350,00	(726.650,00)	98,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.593.000,00	47.866.350,00	(726.650,00)	98,50	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	3.891.432,00	(608.568,00)	86,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	3.891.432,00	(608.568,00)	86,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.113.377.800,00	1.035.310.784,39	(78.067.015,61)	92,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.113.377.800,00	1.035.310.784,39	(78.067.015,61)	92,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.113.377.800,00	1.035.310.784,39	(78.067.015,61)	92,99	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.099.877.800,00	1.022.345.534,39	(77.532.265,61)	92,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.099.877.800,00	1.022.345.534,39	(77.532.265,61)	92,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	13.500.000,00	12.965.250,00	(534.750,00)	96,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	12.965.250,00	(534.750,00)	96,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.005.000,00	14.273.200,00	(731.800,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	15.005.000,00	14.273.200,00	(731.800,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.005.000,00	14.273.200,00	(731.800,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.005.000,00	14.273.200,00	(731.800,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.005.000,00	14.273.200,00	(731.800,00)	95,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.053.000,00	63.755.100,00	(297.900,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.053.000,00	63.755.100,00	(297.900,00)	99,53	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	32.371.000,00	32.272.100,00	(98.900,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	32.371.000,00	32.272.100,00	(98.900,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.371.000,00	32.272.100,00	(98.900,00)	99,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31.682.000,00	31.483.000,00	(199.000,00)	99,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	31.682.000,00	31.483.000,00	(199.000,00)	99,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.682.000,00	31.483.000,00	(199.000,00)	99,37	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	5.001.000,00	4.580.600,00	(420.400,00)	91,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.001.000,00	4.580.600,00	(420.400,00)	91,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5.001.000,00	4.580.600,00	(420.400,00)	91,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.001.000,00	4.580.600,00	(420.400,00)	91,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.001.000,00	4.580.600,00	(420.400,00)	91,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.025.022.360,00	1.012.744.598,00	(12.277.762,00)	98,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.025.022.360,00	1.012.744.598,00	(12.277.762,00)	98,80	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	274.767.060,00	263.352.700,00	(11.414.360,00)	95,85	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.159.000,00	15.011.700,00	(147.300,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.159.000,00	15.011.700,00	(147.300,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	259.608.060,00	248.341.000,00	(11.267.060,00)	95,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.000.000,00	189.900.000,00	(11.100.000,00)	94,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.060,00	49.841.000,00	(159.060,00)	99,68	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.608.000,00	8.600.000,00	(8.000,00)	99,91	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	750.255.300,00	749.391.898,00	(863.402,00)	99,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	747.155.300,00	746.291.898,00	(863.402,00)	99,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.155.300,00	746.291.898,00	(863.402,00)	99,88	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.022.000,00	4.555.300,00	(466.700,00)	90,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.022.000,00	4.555.300,00	(466.700,00)	90,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.022.000,00	4.555.300,00	(466.700,00)	90,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.022.000,00	4.555.300,00	(466.700,00)	90,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.022.000,00	4.555.300,00	(466.700,00)	90,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.225.000,00	14.992.700,00	(232.300,00)	98,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.225.000,00	14.992.700,00	(232.300,00)	98,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.225.000,00	14.992.700,00	(232.300,00)	98,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.225.000,00	14.992.700,00	(232.300,00)	98,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	14.992.700,00	(232.300,00)	98,47	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	28.488.000,00	28.256.400,00	(231.600,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		Pengelolaan Sampah	28.488.000,00	28.256.400,00	(231.600,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0018		Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	28.488.000,00	28.256.400,00	(231.600,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	28.488.000,00	28.256.400,00	(231.600,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.488.000,00	28.256.400,00	(231.600,00)	99,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.037.459.100,00	3.933.047.510,00	(104.411.590,00)	97,41	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.521.000,00	2.309.432.235,00	(58.088.765,00)	97,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.367.521.000,00	2.309.432.235,00	(58.088.765,00)	97,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.367.521.000,00	2.309.432.235,00	(58.088.765,00)	97,55	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2,367,521,000,00	2,309,432,235,00	(58,088,765,00)	97,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320,358,800,00	319,071,709,00	(1,287,091,00)	99,60	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,880,400,00	30,499,580,00	(380,820,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30,880,400,00	30,499,580,00	(380,820,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30,880,400,00	30,499,580,00	(380,820,00)	98,77	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,003,000,00	44,768,000,00	(235,000,00)	99,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45,003,000,00	44,768,000,00	(235,000,00)	99,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45,003,000,00	44,768,000,00	(235,000,00)	99,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,001,000,00	8,961,500,00	(39,500,00)	99,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9,001,000,00	8,961,500,00	(39,500,00)	99,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,001,000,00	8,961,500,00	(39,500,00)	99,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,750,000,00	29,196,600,00	(553,400,00)	98,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	29,750,000,00	29,196,600,00	(553,400,00)	98,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29,750,000,00	29,196,600,00	(553,400,00)	98,14	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16,823,700,00	16,821,140,00	(2,560,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16,823,700,00	16,821,140,00	(2,560,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,823,700,00	16,821,140,00	(2,560,00)	99,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188,900,700,00	188,824,889,00	(75,811,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	188,900,700,00	188,824,889,00	(75,811,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188,900,700,00	188,824,889,00	(75,811,00)	99,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39,700,000,00	38,128,500,00	(1,571,500,00)	96,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39,700,000,00	38,128,500,00	(1,571,500,00)	96,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	39,700,000,00	38,128,500,00	(1,571,500,00)	96,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,700,000,00	38,128,500,00	(1,571,500,00)	96,04	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,231,065,300,00	1,189,961,766,00	(41,103,534,00)	96,66	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000,00	4,000,000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4,000,000,00	4,000,000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000,00	4,000,000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47,477,300,00	46,635,366,00	(841,934,00)	98,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47,477,300,00	46,635,366,00	(841,934,00)	98,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47,477,300,00	46,635,366,00	(841,934,00)	98,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,160,000,00	8,160,000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8,160,000,00	8,160,000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8,160,000,00	8,160,000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,171,428,000,00	1,131,166,400,00	(40,261,600,00)	96,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1,171,428,000,00	1,131,166,400,00	(40,261,600,00)	96,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,171,428,000,00	1,131,166,400,00	(40,261,600,00)	96,56	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78,814,000,00	76,453,300,00	(2,360,700,00)	97,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17,000,000,00	16,903,750,00	(96,250,00)	99,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17,000,000,00	16,903,750,00	(96,250,00)	99,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17,000,000,00	16,903,750,00	(96,250,00)	99,43	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41,750,000,00	39,561,550,00	(2,188,450,00)	94,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	41,750,000,00	39,561,550,00	(2,188,450,00)	94,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41,750,000,00	39,561,550,00	(2,188,450,00)	94,76	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,064,000,00	19,988,000,00	(76,000,00)	99,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20,064,000,00	19,988,000,00	(76,000,00)	99,62	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20,064,000,00	19,988,000,00	(76,000,00)	99,62	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.245.810.794,00	4.162.710.345,00	(83.100.449,00)	98,04	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	44.613.550,00	43.633.000,00	(980.550,00)	97,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	44.613.550,00	43.633.000,00	(980.550,00)	97,80	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8.523.000,00	8.319.500,00	(203.500,00)	97,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.523.000,00	8.319.500,00	(203.500,00)	97,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.523.000,00	8.319.500,00	(203.500,00)	97,61	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	36.090.550,00	35.313.500,00	(777.050,00)	97,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.090.550,00	35.313.500,00	(777.050,00)	97,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.090.550,00	35.313.500,00	(777.050,00)	97,85	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.000.000,00	199.045.356,00	(954.644,00)	99,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	199.045.356,00	(954.644,00)	99,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004		Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000,00	199.045.356,00	(954.644,00)	99,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.045.356,00	(954.644,00)	99,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.045.356,00	(954.644,00)	99,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	35.222.000,00	35.190.733,00	(31.267,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.021.000,00	19.989.733,00	(31.267,00)	99,84	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.521.000,00	12.509.733,00	(11.267,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.521.000,00	12.509.733,00	(11.267,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.521.000,00	12.509.733,00	(11.267,00)	99,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)	99,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)	99,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.480.000,00	(20.000,00)	99,73	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.201.000,00	15.201.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.201.000,00	15.201.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.201.000,00	15.201.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.201.000,00	15.201.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.965.975.244,00	3.884.841.256,00	(81.133.988,00)	97,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.573.942.000,00	2.514.082.069,00	(59.859.931,00)	97,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.573.942.000,00	2.514.082.069,00	(59.859.931,00)	97,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.573.942.000,00	2.514.082.069,00	(59.859.931,00)	97,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.573.942.000,00	2.514.082.069,00	(59.859.931,00)	97,67	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.013.900,00	588.674.352,00	(3.339.548,00)	99,44	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.498.200,00	18.494.200,00	(4.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.498.200,00	18.494.200,00	(4.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.498.200,00	18.494.200,00	(4.000,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.068.000,00	285.925.936,00	(142.064,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	286.068.000,00	285.925.936,00	(142.064,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	286.068.000,00	285.925.936,00	(142.064,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.665.000,00	18.663.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.665.000,00	18.663.000,00	(2.000,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.665.000,00	18.663.000,00	(2.000,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.449.100,00	16.440.762,00	(8.338,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.449.100,00	16.440.762,00	(8.338,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.449.100,00	16.440.762,00	(8.338,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.333.600,00	249.150.454,00	(3.183.146,00)	98,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	252.333.600,00	249.150.454,00	(3.183.146,00)	98,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.333.600,00	249.150.454,00	(3.183.146,00)	98,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.140.000,00	101.830.000,00	(310.000,00)	99,70	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	49.040.000,00	49.000.000,00	(40.000,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.640.000,00	27.600.000,00	(40.000,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.640.000,00	27.600.000,00	(40.000,00)	99,86	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.100.000,00	52.830.000,00	(270.000,00)	99,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	53.100.000,00	52.830.000,00	(270.000,00)	99,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.100.000,00	52.830.000,00	(270.000,00)	99,49	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.409.000,00	351.887.982,00	(12.521.018,00)	96,56	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.926.092,00	(1.073.908,00)	78,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	3.926.092,00	(1.073.908,00)	78,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.926.092,00	(1.073.908,00)	78,52	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.710.000,00	82.209.740,00	(2.500.260,00)	97,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.710.000,00	82.209.740,00	(2.500.260,00)	97,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.710.000,00	82.209.740,00	(2.500.260,00)	97,05	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.699.000,00	265.752.150,00	(8.946.850,00)	96,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	274.699.000,00	265.752.150,00	(8.946.850,00)	96,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.699.000,00	265.752.150,00	(8.946.850,00)	96,74	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.470.344,00	328.366.853,00	(5.103.491,00)	98,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	16.198.243,00	(301.757,00)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	16.198.243,00	(301.757,00)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.198.243,00	(301.757,00)	98,17	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002		Penyedlaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000,00	61.103.412,00	(2.896.588,00)	95,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	61.103.412,00	(2.896.588,00)	95,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	61.103.412,00	(2.896.588,00)	95,47	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.990.000,00	36.907.650,00	(82.350,00)	99,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	36.990.000,00	36.907.650,00	(82.350,00)	99,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.990.000,00	36.907.650,00	(82.350,00)	99,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	215.980.344,00	214.157.548,00	(1.822.796,00)	99,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	215.980.344,00	214.157.548,00	(1.822.796,00)	99,16	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	215.980.344,00	214.157.548,00	(1.822.796,00)	99,16	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.780.953.850,00	4.635.014.363,00	(145.939.487,00)	96,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	32.989.900,00	32.203.900,00	(786.000,00)	97,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	32.989.900,00	32.203.900,00	(786.000,00)	97,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15.200.900,00	14.552.900,00	(648.000,00)	95,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.200.900,00	14.552.900,00	(648.000,00)	95,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.200.900,00	14.552.900,00	(648.000,00)	95,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.789.000,00	17.651.000,00	(138.000,00)	99,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.789.000,00	17.651.000,00	(138.000,00)	99,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.789.000,00	17.651.000,00	(138.000,00)	99,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	534.465.600,00	529.067.495,00	(5.398.105,00)	98,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	534.465.600,00	529.067.495,00	(5.398.105,00)	98,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	350.441.800,00	347.254.235,00	(3.187.565,00)	99,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.441.800,00	347.254.235,00	(3.187.565,00)	99,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.441.800,00	347.254.235,00	(3.187.565,00)	99,09	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	127.842.200,00	127.256.160,00	(586.040,00)	99,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	127.842.200,00	127.256.160,00	(586.040,00)	99,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.842.200,00	127.256.160,00	(586.040,00)	99,54	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	56.181.600,00	54.557.100,00	(1.624.500,00)	97,11	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	56.181.600,00	54.557.100,00	(1.624.500,00)	97,11	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.181.600,00	54.557.100,00	(1.624.500,00)	97,11	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	957.000.000,00	956.852.990,00	(147.010,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	957.000.000,00	956.852.990,00	(147.010,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	897.000.000,00	896.873.090,00	(126.910,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	897.000.000,00	896.873.090,00	(126.910,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	897.000.000,00	896.873.090,00	(126.910,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.000.000,00	59.979.900,00	(20.100,00)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	59.979.900,00	(20.100,00)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	59.979.900,00	(20.100,00)	99,97	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.256.498.350,00	3.116.889.978,00	(139.608.372,00)	95,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.435.420.000,00	2.371.838.801,00	(63.581.199,00)	97,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.435.420.000,00	2.371.838.801,00	(63.581.199,00)	97,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.435.420.000,00	2.371.838.801,00	(63.581.199,00)	97,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.435.420.000,00	2.371.838.801,00	(63.581.199,00)	97,39	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.776.200,00	312.528.936,00	(247.264,00)	99,92	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.589.200,00	6.585.000,00	(4.200,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.589.200,00	6.585.000,00	(4.200,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.589.200,00	6.585.000,00	(4.200,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.837.500,00	37.792.500,00	(45.000,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.837.500,00	37.792.500,00	(45.000,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.837.500,00	37.792.500,00	(45.000,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.898.000,00	14.880.000,00	(18.000,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.898.000,00	14.880.000,00	(18.000,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.898.000,00	14.880.000,00	(18.000,00)	99,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.410.000,00	20.357.000,00	(53.000,00)	99,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.410.000,00	20.357.000,00	(53.000,00)	99,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.410.000,00	20.357.000,00	(53.000,00)	99,74	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.903.500,00	24.902.300,00	(1.200,00)	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.903.500,00	24.902.300,00	(1.200,00)	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.903.500,00	24.902.300,00	(1.200,00)	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.138.000,00	208.012.136,00	(125.864,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	208.138.000,00	208.012.136,00	(125.864,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.138.000,00	208.012.136,00	(125.864,00)	99,94	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.517.150,00	304.382.291,00	(73.134.859,00)	80,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.498.400,00	33.774.691,00	(3.723.709,00)	90,07	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.498.400,00	33.774.691,00	(3.723.709,00)	90,07	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.498.400,00	33.774.691,00	(3.723.709,00)	90,07	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.018.750,00	264.607.600,00	(69.411.150,00)	79,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	334.018.750,00	264.607.600,00	(69.411.150,00)	79,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.018.750,00	264.607.600,00	(69.411.150,00)	79,22	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.785.000,00	128.139.950,00	(2.645.050,00)	97,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	14.995.000,00	(1.505.000,00)	90,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	14.995.000,00	(1.505.000,00)	90,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	14.995.000,00	(1.505.000,00)	90,88	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.795.000,00	103.919.950,00	(875.050,00)	99,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	104.795.000,00	103.919.950,00	(875.050,00)	99,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.795.000,00	103.919.950,00	(875.050,00)	99,16	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000,00	9.225.000,00	(265.000,00)	97,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.490.000,00	9.225.000,00	(265.000,00)	97,21	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.490.000,00	9.225.000,00	(265.000,00)	97,21	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.119.970.000,00	4.024.031.810,00	(95.938.190,00)	97,67	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	222.000.000,00	220.473.550,00	(1.526.450,00)	99,31	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	30.000.000,00	28.473.550,00	(1.526.450,00)	94,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	30.000.000,00	28.473.550,00	(1.526.450,00)	94,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	28.473.550,00	(1.526.450,00)	94,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	28.473.550,00	(1.526.450,00)	94,91	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	192.000.000,00	192.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.684.470.000,00	2.598.782.260,00	(85.687.740,00)	96,81	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.200.600.000,00	1.169.360.250,00	(31.239.750,00)	97,40	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008		Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	135.505.250,00	(4.494.750,00)	96,79	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	135.505.250,00	(4.494.750,00)	96,79	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	135.505.250,00	(4.494.750,00)	96,79	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	545.600.000,00	524.870.000,00	(20.730.000,00)	96,20	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	545.600.000,00	524.870.000,00	(20.730.000,00)	96,20	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	545.600.000,00	524.870.000,00	(20.730.000,00)	96,20	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000,00	162.250.000,00	(2.750.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	165.000.000,00	162.250.000,00	(2.750.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	162.250.000,00	(2.750.000,00)	98,33	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	149.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.985.000,00	(15.000,00)	99,99	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	196.750.000,00	(3.250.000,00)	98,38	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	196.750.000,00	(3.250.000,00)	98,38	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	196.750.000,00	(3.250.000,00)	98,38	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	898.620.000,00	844.172.010,00	(54.447.990,00)	93,94	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.600.000,00	21.474.900,00	(125.100,00)	99,42	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.600.000,00	21.474.900,00	(125.100,00)	99,42	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.474.900,00	(125.100,00)	99,42	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	857.220.000,00	802.907.110,00	(54.312.890,00)	93,66	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	857.220.000,00	802.907.110,00	(54.312.890,00)	93,66	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	857.220.000,00	802.907.110,00	(54.312.890,00)	93,66	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000,00	19.790.000,00	(10.000,00)	99,95	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.800.000,00	19.790.000,00	(10.000,00)	99,95	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.790.000,00	(10.000,00)	99,95	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	429.250.000,00	429.250.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	425.500.000,00	425.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	425.500.000,00	425.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.500.000,00	425.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.213.500.000,00	1.204.776.000,00	(8.724.000,00)	99,28	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	291.276.000,00	(8.724.000,00)	97,09	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	291.276.000,00	(8.724.000,00)	97,09	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	291.276.000,00	(8.724.000,00)	97,09	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	291.276.000,00	(8.724.000,00)	97,09	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	913.500.000,00	913.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.000.000,00	435.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	478.500.000,00	478.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	478.500.000,00	478.500.000,00	0,00	100,00	
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.500.000,00	478.500.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : Dinas Perhubungan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	32.000.000,00	23.400.010,00	(8.599.990,00)	73,12	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.000.000,00	23.400.010,00	(8.599.990,00)	73,12	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	32.000.000,00	23.400.010,00	(8.599.990,00)	73,12	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.419.026.170,00	11.863.338.737,00	(555.687.433,00)	95,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	428.149.020,00	427.274.100,00	(874.920,00)	99,79	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	144.236.470,00	143.903.900,00	(332.570,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	64.376.720,00	64.254.700,00	(122.020,00)	99,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.986.000,00	29.874.700,00	(111.300,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.986.000,00	29.874.700,00	(111.300,00)	99,62	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	34.390.720,00	34.380.000,00	(10.720,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.390.720,00	34.380.000,00	(10.720,00)	99,96	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	79.859.750,00	79.649.200,00	(210.550,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	79.859.750,00	79.649.200,00	(210.550,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.859.750,00	79.649.200,00	(210.550,00)	99,73	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	187.411.400,00	186.975.500,00	(435.900,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	187.411.400,00	186.975.500,00	(435.900,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1	BELANJA OPERASI	187.411.400,00	186.975.500,00	(435.900,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.411.400,00	186.975.500,00	(435.900,00)	99,76	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	96.501.150,00	96.394.700,00	(106.450,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	96.501.150,00	96.394.700,00	(106.450,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.501.150,00	96.394.700,00	(106.450,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.501.150,00	96.394.700,00	(106.450,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.990.877.150,00	11.436.064.637,00	(554.812.513,00)	95,37	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.605.279.000,00	2.542.651.682,00	(62.627.318,00)	97,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.279.000,00	2.542.651.682,00	(62.627.318,00)	97,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.605.279.000,00	2.542.651.682,00	(62.627.318,00)	97,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.605.279.000,00	2.542.651.682,00	(62.627.318,00)	97,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.811.500,00	314.496.162,00	(315.338,00)	99,89	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.759.000,00	15.736.500,00	(22.500,00)	99,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.759.000,00	15.736.500,00	(22.500,00)	99,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.759.000,00	15.736.500,00	(22.500,00)	99,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.503.000,00	7.503.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.840.000,00	11.839.800,00	(200,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.840.000,00	11.839.800,00	(200,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.840.000,00	11.839.800,00	(200,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.589.500,00	262.296.862,00	(292.638,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	262.589.500,00	262.296.862,00	(292.638,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.589.500,00	262.296.862,00	(292.638,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.800.000,00	63.500.000,00	(300.000,00)	99,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.800.000,00	63.500.000,00	(300.000,00)	99,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	63.800.000,00	63.500.000,00	(300.000,00)	99,52	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.800.000,00	63.500.000,00	(300.000,00)	99,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.760.419.000,00	8.294.281.615,00	(466.137.385,00)	94,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.220.748.800,00	6.138.052.865,00	(82.695.935,00)	98,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.220.748.800,00	6.138.052.865,00	(82.695.935,00)	98,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.220.748.800,00	6.138.052.865,00	(82.695.935,00)	98,67	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.535.670.200,00	2.152.228.750,00	(383.441.450,00)	84,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.535.670.200,00	2.152.228.750,00	(383.441.450,00)	84,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.535.670.200,00	2.152.228.750,00	(383.441.450,00)	84,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.567.650,00	221.135.178,00	(25.432.472,00)	89,68	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.737.650,00	216.305.178,00	(25.432.472,00)	89,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	241.737.650,00	216.305.178,00	(25.432.472,00)	89,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.737.650,00	216.305.178,00	(25.432.472,00)	89,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	25.000.000,00	4.300.000,00	(20.700.000,00)	17,19	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25.000.000,00	4.300.000,00	(20.700.000,00)	17,19	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	25.000.000,00	4.300.000,00	(20.700.000,00)	17,19	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.841.534.474,00	5.641.490.314,00	(200.044.160,00)	96,58	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.721.955.450,00	1.709.421.007,00	(12.534.443,00)	99,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.721.955.450,00	1.709.421.007,00	(12.534.443,00)	99,27	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	281.505.550,00	279.166.600,00	(2.338.950,00)	99,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	281.505.550,00	279.166.600,00	(2.338.950,00)	99,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	281.505.550,00	279.166.600,00	(2.338.950,00)	99,17	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006		Pelayanan Informasi Publik	26.717.500,00	26.453.100,00	(264.400,00)	99,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.717.500,00	26.453.100,00	(264.400,00)	99,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.717.500,00	26.453.100,00	(264.400,00)	99,01	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007		Layanan Hubungan Media	1.335.189.000,00	1.333.419.502,00	(1.769.498,00)	99,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	1.335.189.000,00	1.333.419.502,00	(1.769.498,00)	99,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.335.189.000,00	1.333.419.502,00	(1.769.498,00)	99,87	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	52.554.400,00	50.430.905,00	(2.123.495,00)	95,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	52.554.400,00	50.430.905,00	(2.123.495,00)	95,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.554.400,00	50.430.905,00	(2.123.495,00)	95,96	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.989.000,00	19.950.900,00	(6.038.100,00)	76,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	25.989.000,00	19.950.900,00	(6.038.100,00)	76,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.989.000,00	19.950.900,00	(6.038.100,00)	76,77	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.03.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.579.024,00	3.932.069.307,00	(187.509.717,00)	95,45	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	2.365.528.000,00	2.296.348.976,00	(69.179.024,00)	97,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.365.528.000,00	2.296.348.976,00	(69.179.024,00)	97,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.365.528.000,00	2.296.348.976,00	(69.179.024,00)	97,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.365.528.000,00	2.296.348.976,00	(69.179.024,00)	97,08	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.697.200,00	157.519.815,00	(11.177.385,00)	93,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.000,00	1.845.000,00	(1.150.000,00)	61,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.995.000,00	1.845.000,00	(1.150.000,00)	61,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.995.000,00	1.845.000,00	(1.150.000,00)	61,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.310.000,00	22.289.000,00	(21.000,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.310.000,00	22.289.000,00	(21.000,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.310.000,00	22.289.000,00	(21.000,00)	99,91	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.554.500,00	4.396.000,00	(1.158.500,00)	79,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.554.500,00	4.396.000,00	(1.158.500,00)	79,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.554.500,00	4.396.000,00	(1.158.500,00)	79,14	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.536.000,00	11.865.000,00	(671.000,00)	94,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.536.000,00	11.865.000,00	(671.000,00)	94,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.536.000,00	11.865.000,00	(671.000,00)	94,65	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.180.600,00	12.597.500,00	(2.583.100,00)	82,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.180.600,00	12.597.500,00	(2.583.100,00)	82,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.180.600,00	12.597.500,00	(2.583.100,00)	82,98	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.121.100,00	104.527.315,00	(5.593.785,00)	94,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	110.121.100,00	104.527.315,00	(5.593.785,00)	94,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.121.100,00	104.527.315,00	(5.593.785,00)	94,92	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.957.424,00	1.328.339.166,00	(67.618.258,00)	95,16	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	911.887.824,00	900.178.566,00	(11.709.258,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	911.887.824,00	900.178.566,00	(11.709.258,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	911.887.824,00	900.178.566,00	(11.709.258,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.480.000,00	1.200.000,00	(4.280.000,00)	21,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.480.000,00	1.200.000,00	(4.280.000,00)	21,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	1.200.000,00	(4.280.000,00)	21,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	474.589.600,00	422.960.600,00	(51.629.000,00)	89,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	474.589.600,00	422.960.600,00	(51.629.000,00)	89,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.589.600,00	422.960.600,00	(51.629.000,00)	89,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.396.400,00	149.861.350,00	(39.535.050,00)	79,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	11.741.400,00	(5.758.600,00)	67,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	11.741.400,00	(5.758.600,00)	67,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	11.741.400,00	(5.758.600,00)	67,09	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	38.000.000,00	32.191.950,00	(5.808.050,00)	84,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	32.191.950,00	(5.808.050,00)	84,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	32.191.950,00	(5.808.050,00)	84,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.354.750,00	15.503.000,00	(26.851.750,00)	36,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.354.750,00	15.503.000,00	(26.851.750,00)	36,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.354.750,00	15.503.000,00	(26.851.750,00)	36,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.550.000,00	(450.000,00)	99,40	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.541.650,00	15.875.000,00	(666.650,00)	95,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.541.650,00	15.875.000,00	(666.650,00)	95,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.541.650,00	15.875.000,00	(666.650,00)	95,97	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	90.800.000,00	105.560.000,00	14.760.000,00	116,25
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.800.000,00	105.560.000,00	14.760.000,00	116,25
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	90.800.000,00	105.560.000,00	14.760.000,00	116,25
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.843.626.010,00	3.659.800.692,00	(183.825.318,00)	95,22
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	39.841.700,00	39.812.950,00	(28.750,00)	99,93
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.841.700,00	39.812.950,00	(28.750,00)	99,93
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.841.700,00	39.812.950,00	(28.750,00)	99,93
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.841.700,00	39.812.950,00	(28.750,00)	99,93
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.841.700,00	39.812.950,00	(28.750,00)	99,93
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA	63.815.250,00	63.527.050,00	(288.200,00)	99,55
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	63.815.250,00	63.527.050,00	(288.200,00)	99,55
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002		Pemberdayaan Melalui Kemitraan	20.205.250,00	20.167.050,00	(38.200,00)	99,81
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.205.250,00	20.167.050,00	(38.200,00)	99,81
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.205.250,00	20.167.050,00	(38.200,00)	99,81
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	43.610.000,00	43.360.000,00	(250.000,00)	99,43
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.610.000,00	43.360.000,00	(250.000,00)	99,43
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.610.000,00	43.360.000,00	(250.000,00)	99,43
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.739.969.060,00	3.556.460.692,00	(183.508.368,00)	95,09
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	2.434.528.160,00	2.361.836.369,00	(72.691.791,00)	97,01
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.434.528.160,00	2.361.836.369,00	(72.691.791,00)	97,01
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.434.528.160,00	2.361.836.369,00	(72.691.791,00)	97,01
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.434.528.160,00	2.361.836.369,00	(72.691.791,00)	97,01
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.480.750,00	236.784.119,00	(696.631,00)	99,71
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.022.000,00	4.865.000,00	(157.000,00)	96,87
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.022.000,00	4.865.000,00	(157.000,00)	96,87
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.022.000,00	4.865.000,00	(157.000,00)	96,87
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan	15.002.000,00	14.951.500,00	(50.500,00)	99,66
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.002.000,00	14.951.500,00	(50.500,00)	99,66
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.000,00	14.951.500,00	(50.500,00)	99,66
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.805.000,00	9.527.520,00	(277.480,00)	97,17
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.805.000,00	9.527.520,00	(277.480,00)	97,17
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.805.000,00	9.527.520,00	(277.480,00)	97,17
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.556.000,00	14.436.000,00	(120.000,00)	99,18
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	14.556.000,00	14.436.000,00	(120.000,00)	99,18
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.556.000,00	14.436.000,00	(120.000,00)	99,18
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.308.800,00	14.299.900,00	(8.900,00)	99,94
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.308.800,00	14.299.900,00	(8.900,00)	99,94
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.308.800,00	14.299.900,00	(8.900,00)	99,94
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.786.950,00	178.704.199,00	(82.751,00)	99,95
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	178.786.950,00	178.704.199,00	(82.751,00)	99,95
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.786.950,00	178.704.199,00	(82.751,00)	99,95
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	124.114.000,00	122.969.500,00	(1.144.500,00)	99,08
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin	124.114.000,00	122.969.500,00	(1.144.500,00)	99,08
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	124.114.000,00	122.969.500,00	(1.144.500,00)	99,08
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.475.000,00	77.600.000,00	(875.000,00)	98,88
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.639.000,00	45.369.500,00	(269.500,00)	99,41

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.806.150,00	751.996.954,00	(108.809.196,00)	87,36	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.999.950,00	224.751.604,00	(6.248.346,00)	97,30	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	230.999.950,00	224.751.604,00	(6.248.346,00)	97,30	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.999.950,00	224.751.604,00	(6.248.346,00)	97,30	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.006.200,00	521.445.350,00	(102.560.850,00)	83,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	624.006.200,00	521.445.350,00	(102.560.850,00)	83,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	624.006.200,00	521.445.350,00	(102.560.850,00)	83,56	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.040.000,00	82.873.750,00	(166.250,00)	99,80	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	14.980.800,00	(19.200,00)	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.980.800,00	(19.200,00)	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.980.800,00	(19.200,00)	99,87	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000,00	52.852.950,00	(147.050,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.000.000,00	52.852.950,00	(147.050,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.000.000,00	52.852.950,00	(147.050,00)	99,72	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.040.000,00	15.040.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.340.694.650,00	4.265.247.603,00	(75.447.047,00)	98,26	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	393.061.350,00	391.942.161,00	(1.119.189,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.061.350,00	391.942.161,00	(1.119.189,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	393.061.350,00	391.942.161,00	(1.119.189,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	393.061.350,00	391.942.161,00	(1.119.189,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.061.350,00	391.942.161,00	(1.119.189,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	159.676.000,00	158.931.492,00	(744.508,00)	99,53	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	159.676.000,00	158.931.492,00	(744.508,00)	99,53	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	114.672.350,00	114.349.137,00	(323.213,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	114.672.350,00	114.349.137,00	(323.213,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.672.350,00	114.349.137,00	(323.213,00)	99,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	45.003.650,00	44.582.355,00	(421.295,00)	99,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	45.003.650,00	44.582.355,00	(421.295,00)	99,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.003.650,00	44.582.355,00	(421.295,00)	99,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	580.092.000,00	579.793.200,00	(298.800,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	580.092.000,00	579.793.200,00	(298.800,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.013.000,00	86.977.200,00	(35.800,00)	99,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	87.013.000,00	86.977.200,00	(35.800,00)	99,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.013.000,00	86.977.200,00	(35.800,00)	99,96	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	319.052.000,00	318.811.350,00	(240.650,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	319.052.000,00	318.811.350,00	(240.650,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.052.000,00	318.811.350,00	(240.650,00)	99,92	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		Pengawasan Penanaman Modal	174.027.000,00	174.004.650,00	(22.350,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	174.027.000,00	174.004.650,00	(22.350,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.027.000,00	174.004.650,00	(22.350,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.207.865.300,00	3.134.580.750,00	(73.284.550,00)	97,72	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.914.667.000,00	1.863.660.239,00	(51.006.761,00)	97,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.914.667.000,00	1.863.660.239,00	(51.006.761,00)	97,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.914.667.000,00	1.863.660.239,00	(51.006.761,00)	97,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.914.667.000,00	1.863.660.239,00	(51.006.761,00)	97,34	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.470.000,00	14.254.300,00	(215.700,00)	98,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.470.000,00	14.254.300,00	(215.700,00)	98,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.470.000,00	14.254.300,00	(215.700,00)	98,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	14.254.300,00	(215.700,00)	98,51	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.237.150,00	510.100.112,00	(137.038,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.455.250,00	5.451.450,00	(3.800,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.455.250,00	5.451.450,00	(3.800,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.455.250,00	5.451.450,00	(3.800,00)	99,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.986.000,00	51.959.000,00	(27.000,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.986.000,00	51.959.000,00	(27.000,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.986.000,00	51.959.000,00	(27.000,00)	99,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.336.250,00	20.330.500,00	(5.750,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.336.250,00	20.330.500,00	(5.750,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.336.250,00	20.330.500,00	(5.750,00)	99,97	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.239.000,00	30.175.000,00	(64.000,00)	99,79	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.239.000,00	30.175.000,00	(64.000,00)	99,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.239.000,00	30.175.000,00	(64.000,00)	99,79	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.696.500,00	36.696.400,00	(100,00)	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.696.500,00	36.696.400,00	(100,00)	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.696.500,00	36.696.400,00	(100,00)	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.524.150,00	365.487.762,00	(36.388,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	365.524.150,00	365.487.762,00	(36.388,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.524.150,00	365.487.762,00	(36.388,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.725.000,00	99.791.700,00	(2.933.300,00)	97,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.725.000,00	99.791.700,00	(2.933.300,00)	97,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	102.725.000,00	99.791.700,00	(2.933.300,00)	97,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.725.000,00	99.791.700,00	(2.933.300,00)	97,14	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.945.450,00	486.953.849,00	(15.991.601,00)	96,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.139.050,00	101.926.099,00	(3.212.951,00)	96,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.139.050,00	101.926.099,00	(3.212.951,00)	96,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.139.050,00	101.926.099,00	(3.212.951,00)	96,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.660.000,00	15.650.000,00	(10.000,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	15.660.000,00	15.650.000,00	(10.000,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	15.650.000,00	(10.000,00)	99,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.346.400,00	364.577.750,00	(12.768.650,00)	96,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	377.346.400,00	364.577.750,00	(12.768.650,00)	96,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.346.400,00	364.577.750,00	(12.768.650,00)	96,62	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.820.700,00	159.820.550,00	(3.000.150,00)	98,16	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.500.000,00	21.252.250,00	(247.750,00)	98,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	21.252.250,00	(247.750,00)	98,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.252.250,00	(247.750,00)	98,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	38.351.300,00	(2.148.700,00)	94,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	38.351.300,00	(2.148.700,00)	94,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	38.351.300,00	(2.148.700,00)	94,69	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.820.700,00	100.217.000,00	(603.700,00)	99,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	100.820.700,00	100.217.000,00	(603.700,00)	99,40	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.820.700,00	100.217.000,00	(603.700,00)	99,40	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000		5	BELANJA DAERAH	12.651.935.874,00	12.209.519.193,00	(442.416.681,00)	96,50	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.458.174.774,00	6.287.821.294,00	(170.353.480,00)	97,36	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.935.879.374,00	5.776.907.474,00	(158.971.900,00)	97,32	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5.935.879.374,00	5.776.907.474,00	(158.971.900,00)	97,32	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.935.879.374,00	5.776.907.474,00	(158.971.900,00)	97,32	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	48.600.000,00	47.950.000,00	(650.000,00)	98,66	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.494.779.374,00	4.456.457.474,00	(38.321.900,00)	99,14	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.392.500.000,00	1.272.500.000,00	(120.000.000,00)	91,38	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	522.295.400,00	510.913.820,00	(11.381.580,00)	97,82	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	522.295.400,00	510.913.820,00	(11.381.580,00)	97,82	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	522.295.400,00	510.913.820,00	(11.381.580,00)	97,82	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	482.295.400,00	470.913.820,00	(11.381.580,00)	97,64	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.926.408.550,00	2.797.034.509,00	(129.374.041,00)	95,57	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.926.408.550,00	2.797.034.509,00	(129.374.041,00)	95,57	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0001		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.006.650,00	41.714.850,00	(8.291.800,00)	83,41	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	50.006.650,00	41.714.850,00	(8.291.800,00)	83,41	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.006.650,00	41.714.850,00	(8.291.800,00)	83,41	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.876.401.900,00	2.755.319.659,00	(121.082.241,00)	95,79	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.859.601.900,00	2.738.519.659,00	(121.082.241,00)	95,76	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	900.000,00	750.000,00	(150.000,00)	83,33	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.693.701.900,00	2.592.769.659,00	(100.932.241,00)	96,25	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	165.000.000,00	145.000.000,00	(20.000.000,00)	87,87	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	68.969.000,00	56.722.200,00	(12.246.800,00)	82,24	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	68.969.000,00	56.722.200,00	(12.246.800,00)	82,24	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0001		Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	68.969.000,00	56.722.200,00	(12.246.800,00)	82,24	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	68.969.000,00	56.722.200,00	(12.246.800,00)	82,24	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.969.000,00	56.722.200,00	(12.246.800,00)	82,24	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.198.383.550,00	3.067.941.190,00	(130.442.360,00)	95,92	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.207.091.000,00	2.134.979.695,00	(72.111.305,00)	96,73	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.207.091.000,00	2.134.979.695,00	(72.111.305,00)	96,73	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.207.091.000,00	2.134.979.695,00	(72.111.305,00)	96,73	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.207.091.000,00	2.134.979.695,00	(72.111.305,00)	96,73	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.876.950,00	163.847.450,00	(1.029.500,00)	99,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.879.000,00	(121.000,00)	97,57	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.879.000,00	(121.000,00)	97,57	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.879.000,00	(121.000,00)	97,57	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.915.500,00	(84.500,00)	99,43	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.915.500,00	(84.500,00)	99,43	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.915.500,00	(84.500,00)	99,43	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.503.000,00	7.486.000,00	(17.000,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.503.000,00	7.486.000,00	(17.000,00)	99,77	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.503.000,00	7.486.000,00	(17.000,00)	99,77	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	16.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.998.000,00	(2.000,00)	99,98	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.599.600,00	10.582.100,00	(17.500,00)	99,83	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.599.600,00	10.582.100,00	(17.500,00)	99,83	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.599.600,00	10.582.100,00	(17.500,00)	99,83	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.774.350,00	108.986.850,00	(787.500,00)	99,28	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.774.350,00	108.986.850,00	(787.500,00)	99,28	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.774.350,00	108.986.850,00	(787.500,00)	99,28	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	770.915.600,00	716.477.645,00	(54.437.955,00)	92,93	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.960.000,00	(40.000,00)	99,00	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.407.600,00	150.961.760,00	(14.445.840,00)	91,26	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	165.407.600,00	150.961.760,00	(14.445.840,00)	91,26	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.407.600,00	150.961.760,00	(14.445.840,00)	91,26	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.380.000,00	11.240.000,00	(140.000,00)	98,76	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.380.000,00	11.240.000,00	(140.000,00)	98,76	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	11.240.000,00	(140.000,00)	98,76	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.128.000,00	550.315.885,00	(39.812.115,00)	93,25	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	590.128.000,00	550.315.885,00	(39.812.115,00)	93,25	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.128.000,00	550.315.885,00	(39.812.115,00)	93,25	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.500.000,00	52.636.400,00	(2.863.600,00)	94,84	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	16.341.000,00	(1.159.000,00)	93,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	16.341.000,00	(1.159.000,00)	93,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.341.000,00	(1.159.000,00)	93,37	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000,00	36.295.400,00	(1.704.600,00)	95,51	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	36.295.400,00	(1.704.600,00)	95,51	
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	36.295.400,00	(1.704.600,00)	95,51	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	21.124.000,00	19.118.750,00	(2.005.250,00)	90,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	21.124.000,00	19.118.750,00	(2.005.250,00)	90,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.124.000,00	19.118.750,00	(2.005.250,00)	90,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.124.000,00	19.118.750,00	(2.005.250,00)	90,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.124.000,00	19.118.750,00	(2.005.250,00)	90,51	
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.124.000,00	19.118.750,00	(2.005.250,00)	90,51	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		5	BELANJA DAERAH	43.721.650,00	30.990.297,00	(12.731.353,00)	70,88	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	43.721.650,00	30.990.297,00	(12.731.353,00)	70,88	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.721.650,00	30.990.297,00	(12.731.353,00)	70,88	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003		Membangun Metadata Statistik Sektoral	18.801.500,00	14.218.547,00	(4.582.953,00)	75,62	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.801.500,00	14.218.547,00	(4.582.953,00)	75,62	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.801.500,00	14.218.547,00	(4.582.953,00)	75,62	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	24.920.150,00	16.771.750,00	(8.148.400,00)	67,30	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.920.150,00	16.771.750,00	(8.148.400,00)	67,30	
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.920.150,00	16.771.750,00	(8.148.400,00)	67,30	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.970.497.214,00	1.844.677.885,00	(125.819.329,00)	93,61	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	190.328.000,00	186.948.800,00	(3.379.200,00)	98,22	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	190.328.000,00	186.948.800,00	(3.379.200,00)	98,22	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	10.328.000,00	6.948.800,00	(3.379.200,00)	67,28	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.328.000,00	6.948.800,00	(3.379.200,00)	67,28	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.328.000,00	6.948.800,00	(3.379.200,00)	67,28	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.649.728.214,00	1.528.032.785,00	(121.695.429,00)	92,62	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	879.976.964,00	875.393.185,00	(4.583.779,00)	99,47	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	879.976.964,00	875.393.185,00	(4.583.779,00)	99,47	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	879.976.964,00	875.393.185,00	(4.583.779,00)	99,47	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	10.100.000,00	10.000.000,00	(100.000,00)	99,00	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	869.876.964,00	865.393.185,00	(4.483.779,00)	99,48	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	327.274.650,00	320.849.500,00	(6.425.150,00)	98,03	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0003		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	327.274.650,00	320.849.500,00	(6.425.150,00)	98,03	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	327.274.650,00	320.849.500,00	(6.425.150,00)	98,03	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.274.650,00	221.065.600,00	(6.209.050,00)	97,26	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	99.783.900,00	(216.100,00)	99,78	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	442.476.600,00	331.790.100,00	(110.686.500,00)	74,98	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0003		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	442.476.600,00	331.790.100,00	(110.686.500,00)	74,98	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	442.476.600,00	331.790.100,00	(110.686.500,00)	74,98	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.476.600,00	331.790.100,00	(10.686.500,00)	96,87	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	130.441.000,00	129.696.300,00	(744.700,00)	99,42	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	130.441.000,00	129.696.300,00	(744.700,00)	99,42	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	130.441.000,00	129.696.300,00	(744.700,00)	99,42	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	130.441.000,00	129.696.300,00	(744.700,00)	99,42	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.441.000,00	29.696.300,00	(744.700,00)	97,55	
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.765.166.710,00	3.671.855.338,00	(93.311.372,00)	97,52	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	629.952.590,00	621.634.150,00	(8.318.440,00)	98,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	580.802.590,00	574.219.150,00	(6.583.440,00)	98,87	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	532.631.340,00	526.345.750,00	(6.285.590,00)	98,82	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.235.100,00	137.221.250,00	(3.013.850,00)	97,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.235.100,00	137.221.250,00	(3.013.850,00)	97,85	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	392.396.240,00	389.124.500,00	(3.271.740,00)	99,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.900.000,00	87.950.000,00	(1.950.000,00)	97,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.496.240,00	226.304.500,00	(1.191.740,00)	99,48	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	74.870.000,00	(130.000,00)	99,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	48.171.250,00	47.873.400,00	(297.850,00)	99,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	48.171.250,00	47.873.400,00	(297.850,00)	99,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.171.250,00	47.873.400,00	(297.850,00)	99,38	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.150.000,00	47.415.000,00	(1.735.000,00)	96,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	49.150.000,00	47.415.000,00	(1.735.000,00)	96,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	49.150.000,00	47.415.000,00	(1.735.000,00)	96,47	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	27.415.000,00	(1.735.000,00)	94,05	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.135.214.120,00	3.050.221.188,00	(84.992.932,00)	97,29	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.186.912.000,00	2.126.857.377,00	(60.054.623,00)	97,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.186.912.000,00	2.126.857.377,00	(60.054.623,00)	97,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.186.912.000,00	2.126.857.377,00	(60.054.623,00)	97,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.186.912.000,00	2.126.857.377,00	(60.054.623,00)	97,25	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.741.100,00	238.525.314,00	(2.215.786,00)	99,08	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.688.900,00	15.638.800,00	(50.100,00)	99,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.688.900,00	15.638.800,00	(50.100,00)	99,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.688.900,00	15.638.800,00	(50.100,00)	99,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.739.000,00	35.669.000,00	(70.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.739.000,00	35.669.000,00	(70.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.739.000,00	35.669.000,00	(70.000,00)	99,80	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.158.400,00	23.652.400,00	(506.000,00)	97,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	24.158.400,00	23.652.400,00	(506.000,00)	97,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.158.400,00	23.652.400,00	(506.000,00)	97,91	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.458.000,00	19.878.000,00	(580.000,00)	97,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.458.000,00	19.878.000,00	(580.000,00)	97,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.458.000,00	19.878.000,00	(580.000,00)	97,16	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.040.000,00	10.500.000,00	(540.000,00)	95,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.040.000,00	10.500.000,00	(540.000,00)	95,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	10.500.000,00	(540.000,00)	95,11	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.656.800,00	133.187.114,00	(469.686,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	133.656.800,00	133.187.114,00	(469.686,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.656.800,00	133.187.114,00	(469.686,00)	99,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.850.000,00	90.350.000,00	(1.500.000,00)	98,37	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.850.000,00	74.350.000,00	(1.500.000,00)	98,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	75.850.000,00	74.350.000,00	(1.500.000,00)	98,02	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.850.000,00	74.350.000,00	(1.500.000,00)	98,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.829.700,00	342.928.867,00	(17.900.833,00)	95,04	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.798.500,00	64.597.667,00	(1.200.833,00)	98,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	65.798.500,00	64.597.667,00	(1.200.833,00)	98,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.798.500,00	64.597.667,00	(1.200.833,00)	98,17	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.031.200,00	276.331.200,00	(16.700.000,00)	94,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	293.031.200,00	276.331.200,00	(16.700.000,00)	94,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.031.200,00	276.331.200,00	(16.700.000,00)	94,30	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.881.320,00	251.559.630,00	(3.321.690,00)	98,70	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000,00	15.956.980,00	(43.020,00)	99,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	15.956.980,00	(43.020,00)	99,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.956.980,00	(43.020,00)	99,73	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.120.000,00	50.611.650,00	(2.508.350,00)	95,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.120.000,00	50.611.650,00	(2.508.350,00)	95,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.120.000,00	50.611.650,00	(2.508.350,00)	95,28	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.980.000,00	16.750.000,00	(230.000,00)	98,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.980.000,00	16.750.000,00	(230.000,00)	98,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	16.750.000,00	(230.000,00)	98,65	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.781.320,00	168.241.000,00	(540.320,00)	99,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	168.781.320,00	168.241.000,00	(540.320,00)	99,68	
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.781.320,00	168.241.000,00	(540.320,00)	99,68	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	117.530.000,00	107.916.017,00	(9.613.983,00)	91,82	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	117.530.000,00	107.916.017,00	(9.613.983,00)	91,82	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	112.226.000,00	103.070.217,00	(9.155.783,00)	91,84	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	71.655.000,00	66.241.317,00	(5.413.683,00)	92,44	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	71.655.000,00	66.241.317,00	(5.413.683,00)	92,44	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.655.000,00	66.241.317,00	(5.413.683,00)	92,44	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	12.887.000,00	11.662.300,00	(1.224.700,00)	90,50	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.887.000,00	11.662.300,00	(1.224.700,00)	90,50	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.887.000,00	11.662.300,00	(1.224.700,00)	90,50	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27.684.000,00	25.166.600,00	(2.517.400,00)	90,91	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	27.684.000,00	25.166.600,00	(2.517.400,00)	90,91	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.684.000,00	25.166.600,00	(2.517.400,00)	90,91	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5.304.000,00	4.845.800,00	(458.200,00)	91,36	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5.304.000,00	4.845.800,00	(458.200,00)	91,36	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.304.000,00	4.845.800,00	(458.200,00)	91,36	
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.304.000,00	4.845.800,00	(458.200,00)	91,36	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : Dinas Pangan dan Perikanan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	867.824.600,00	857.388.887,00	(10.435.713,00)	98,80	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	807.091.100,00	797.564.437,00	(9.526.663,00)	98,82	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	807.091.100,00	797.564.437,00	(9.526.663,00)	98,82	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	637.007.650,00	629.328.781,00	(7.678.869,00)	98,79	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	637.007.650,00	629.328.781,00	(7.678.869,00)	98,79	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	607.007.650,00	599.328.781,00	(7.678.869,00)	98,73	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	170.083.450,00	168.235.656,00	(1.847.794,00)	98,91	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	158.683.450,00	157.135.656,00	(1.547.794,00)	99,02	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.683.450,00	157.135.656,00	(1.547.794,00)	99,02	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2	BELANJA MODAL	11.400.000,00	11.100.000,00	(300.000,00)	97,37	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.400.000,00	11.100.000,00	(300.000,00)	97,37	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.002.500,00	14.651.200,00	(351.300,00)	97,66	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	15.002.500,00	14.651.200,00	(351.300,00)	97,66	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15.002.500,00	14.651.200,00	(351.300,00)	97,66	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.002.500,00	14.651.200,00	(351.300,00)	97,66	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.002.500,00	14.651.200,00	(351.300,00)	97,66	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	45.731.000,00	45.173.250,00	(557.750,00)	98,78	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45.731.000,00	45.173.250,00	(557.750,00)	98,78	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.731.000,00	45.173.250,00	(557.750,00)	98,78	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.731.000,00	45.173.250,00	(557.750,00)	98,78	
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.731.000,00	45.173.250,00	(557.750,00)	98,78	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
	2.22.3.26.2.19.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	5.750.000,00	3.400.000,00	(2.350.000,00)	59,13	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000		5	BELANJA DAERAH	471.652.800,00	455.988.945,00	(15.663.855,00)	96,67	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.376.000,00	14.583.600,00	(3.792.400,00)	79,36	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02.2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.376.000,00	14.583.600,00	(3.792.400,00)	79,36	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02.2.03.0006		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.376.000,00	14.583.600,00	(3.792.400,00)	79,36	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.376.000,00	14.583.600,00	(3.792.400,00)	79,36	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.376.000,00	14.583.600,00	(3.792.400,00)	79,36	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	103.980.000,00	103.775.183,00	(204.817,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03.2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	103.980.000,00	103.775.183,00	(204.817,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03.2.01.0006		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	103.980.000,00	103.775.183,00	(204.817,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	103.980.000,00	103.775.183,00	(204.817,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.980.000,00	103.775.183,00	(204.817,00)	99,80	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	349.296.800,00	337.630.162,00	(11.666.638,00)	96,65	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	349.296.800,00	337.630.162,00	(11.666.638,00)	96,65	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	349.296.800,00	337.630.162,00	(11.666.638,00)	96,65	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	349.296.800,00	337.630.162,00	(11.666.638,00)	96,65	
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.296.800,00	337.630.162,00	(11.666.638,00)	96,65	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : Dinas Pertanian

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	105.000.000,00	94.980.000,00	(10.020.000,00)	90,45	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	105.000.000,00	94.980.000,00	(10.020.000,00)	90,45	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	105.000.000,00	94.980.000,00	(10.020.000,00)	90,45	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	20.512.690.371,00	17.465.505.291,00	(3.047.185.080,00)	85,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.905.218.050,00	923.959.954,00	(981.258.096,00)	48,50	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	24.225.000,00	24.133.100,00	(91.900,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	24.225.000,00	24.133.100,00	(91.900,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.225.000,00	24.133.100,00	(91.900,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	24.133.100,00	(91.900,00)	99,62	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	607.964.050,00	553.892.554,00	(54.071.496,00)	91,11	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	359.890.000,00	319.868.664,00	(40.021.336,00)	88,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	359.890.000,00	319.868.664,00	(40.021.336,00)	88,88	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	358.690.000,00	318.668.664,00	(40.021.336,00)	88,84	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	248.074.050,00	234.023.890,00	(14.050.160,00)	94,34	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	248.074.050,00	234.023.890,00	(14.050.160,00)	94,34	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.074.050,00	204.023.890,00	(14.050.160,00)	93,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	5.1.05	Belanja Hibah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.004.000,00	18.845.900,00	(158.100,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0002		Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.004.000,00	18.845.900,00	(158.100,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.004.000,00	18.845.900,00	(158.100,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.004.000,00	18.845.900,00	(158.100,00)	99,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.254.025.000,00	327.088.400,00	(926.936.600,00)	26,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004		Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.254.025.000,00	327.088.400,00	(926.936.600,00)	26,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.254.025.000,00	327.088.400,00	(926.936.600,00)	26,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	950.000,00	800.000,00	(150.000,00)	84,21	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.075.000,00	326.288.400,00	(926.786.600,00)	26,04	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.414.842.351,00	3.586.240.350,00	(1.828.602.001,00)	66,23	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.838.280.000,00	76.566.500,00	(1.761.713.500,00)	4,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.838.280.000,00	76.566.500,00	(1.761.713.500,00)	4,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.838.280.000,00	76.566.500,00	(1.761.713.500,00)	4,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.838.280.000,00	76.566.500,00	(1.761.713.500,00)	4,17	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	3.576.562.351,00	3.509.673.850,00	(66.888.501,00)	98,13	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.477.128.351,00	3.410.603.850,00	(66.524.501,00)	98,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.477.128.351,00	3.410.603.850,00	(66.524.501,00)	98,09	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.462.728.351,00	3.396.203.850,00	(66.524.501,00)	98,08	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	99.434.000,00	99.070.000,00	(364.000,00)	99,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	99.434.000,00	99.070.000,00	(364.000,00)	99,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.434.000,00	99.070.000,00	(364.000,00)	99,63	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	66.961.300,00	66.801.050,00	(160.250,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	66.961.300,00	66.801.050,00	(160.250,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.961.300,00	66.801.050,00	(160.250,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	66.961.300,00	66.801.050,00	(160.250,00)	99,76	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.961.300,00	66.801.050,00	(160.250,00)	99,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	13.700.000,00	13.652.000,00	(48.000,00)	99,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	13.700.000,00	13.652.000,00	(48.000,00)	99,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.700.000,00	13.652.000,00	(48.000,00)	99,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.700.000,00	13.652.000,00	(48.000,00)	99,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	13.652.000,00	(48.000,00)	99,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	378.867.620,00	378.828.650,00	(38.970,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	378.867.620,00	378.828.650,00	(38.970,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	126.796.400,00	126.778.150,00	(18.250,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	126.796.400,00	126.778.150,00	(18.250,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.796.400,00	126.778.150,00	(18.250,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	252.071.220,00	252.050.500,00	(20.720,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	252.071.220,00	252.050.500,00	(20.720,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.071.220,00	252.050.500,00	(20.720,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.733.101.050,00	12.496.023.287,00	(237.077.763,00)	98,14	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.430.899.000,00	10.261.643.112,00	(169.255.888,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.430.899.000,00	10.261.643.112,00	(169.255.888,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.430.899.000,00	10.261.643.112,00	(169.255.888,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	10.430.899.000,00	10.261.643.112,00	(169.255.888,00)	98,38	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.213.450,00	502.835.644,00	(377.806,00)	99,92	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.920.000,00	59.877.000,00	(43.000,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	59.920.000,00	59.877.000,00	(43.000,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.920.000,00	59.877.000,00	(43.000,00)	99,93	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.280.000,00	17.279.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	17.279.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	17.279.000,00	(1.000,00)	99,99	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.774.000,00	51.774.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.774.000,00	51.774.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.774.000,00	51.774.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.375.000,00	27.254.100,00	(120.900,00)	99,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	27.375.000,00	27.254.100,00	(120.900,00)	99,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.375.000,00	27.254.100,00	(120.900,00)	99,56	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.864.450,00	335.651.544,00	(212.906,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	335.864.450,00	335.651.544,00	(212.906,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.864.450,00	335.651.544,00	(212.906,00)	99,94	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.475.468.600,00	1.409.548.487,00	(65.920.113,00)	95,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.188.000,00	118.351.837,00	(3.836.163,00)	96,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	122.188.000,00	118.351.837,00	(3.836.163,00)	96,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.188.000,00	118.351.837,00	(3.836.163,00)	96,86	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.150.000,00	29.145.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.150.000,00	29.145.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.150.000,00	29.145.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.130.600,00	1.258.051.650,00	(62.078.950,00)	95,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.320.130.600,00	1.258.051.650,00	(62.078.950,00)	95,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.320.130.600,00	1.258.051.650,00	(62.078.950,00)	95,30	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.520.000,00	321.996.044,00	(1.523.956,00)	99,53	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.811.033,00	(188.967,00)	98,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.811.033,00	(188.967,00)	98,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.811.033,00	(188.967,00)	98,65	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.520.000,00	308.185.011,00	(1.334.989,00)	99,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	309.520.000,00	308.185.011,00	(1.334.989,00)	99,57	
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.520.000,00	308.185.011,00	(1.334.989,00)	99,57	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	183.598.050,00	182.942.094,00	(655.956,00)	99,64	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	121.211.300,00	120.897.250,00	(314.050,00)	99,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	121.211.300,00	120.897.250,00	(314.050,00)	99,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	121.211.300,00	120.897.250,00	(314.050,00)	99,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	121.211.300,00	120.897.250,00	(314.050,00)	99,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.211.300,00	120.897.250,00	(314.050,00)	99,74	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.174.500,00	10.102.400,00	(72.100,00)	99,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.174.500,00	10.102.400,00	(72.100,00)	99,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.174.500,00	10.102.400,00	(72.100,00)	99,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.174.500,00	10.102.400,00	(72.100,00)	99,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.174.500,00	10.102.400,00	(72.100,00)	99,29	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	52.212.250,00	51.942.444,00	(269.806,00)	99,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	52.212.250,00	51.942.444,00	(269.806,00)	99,48	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	44.794.250,00	44.647.244,00	(147.006,00)	99,67	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.794.250,00	44.647.244,00	(147.006,00)	99,67	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.794.250,00	44.647.244,00	(147.006,00)	99,67	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.418.000,00	7.295.200,00	(122.800,00)	98,34	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.418.000,00	7.295.200,00	(122.800,00)	98,34	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.418.000,00	7.295.200,00	(122.800,00)	98,34	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	117.058.800,00	116.915.297,00	(143.503,00)	99,88	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	109.757.050,00	109.626.847,00	(130.203,00)	99,88	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	109.757.050,00	109.626.847,00	(130.203,00)	99,88	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11.747.000,00	11.715.800,00	(31.200,00)	99,73	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.747.000,00	11.715.800,00	(31.200,00)	99,73	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.747.000,00	11.715.800,00	(31.200,00)	99,73	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	98.010.050,00	97.911.047,00	(99.003,00)	99,90	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	98.010.050,00	97.911.047,00	(99.003,00)	99,90	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.010.050,00	97.911.047,00	(99.003,00)	99,90	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	7.301.750,00	7.288.450,00	(13.300,00)	99,82	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	7.301.750,00	7.288.450,00	(13.300,00)	99,82	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7.301.750,00	7.288.450,00	(13.300,00)	99,82	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.301.750,00	7.288.450,00	(13.300,00)	99,82	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.301.750,00	7.288.450,00	(13.300,00)	99,82	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	13.980.000,00	11.237.500,00	(2.742.500,00)	80,38	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.980.000,00	11.237.500,00	(2.742.500,00)	80,38	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	13.980.000,00	11.237.500,00	(2.742.500,00)	80,38	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.166.434.600,00	4.059.549.128,00	(106.885.472,00)	97,43	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.166.434.600,00	4.059.549.128,00	(106.885.472,00)	97,43	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.314.126.000,00	3.250.853.891,00	(63.272.109,00)	98,09	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.314.126.000,00	3.250.853.891,00	(63.272.109,00)	98,09	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.314.126.000,00	3.250.853.891,00	(63.272.109,00)	98,09	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.314.126.000,00	3.250.853.891,00	(63.272.109,00)	98,09	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.249.900,00	255.399.950,00	(849.950,00)	99,67	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.031.900,00	5.031.900,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.031.900,00	5.031.900,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.031.900,00	5.031.900,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.412.000,00	35.340.000,00	(72.000,00)	99,80	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.412.000,00	35.340.000,00	(72.000,00)	99,80	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.412.000,00	35.340.000,00	(72.000,00)	99,80	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.100.000,00	17.070.000,00	(30.000,00)	99,82	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.100.000,00	17.070.000,00	(30.000,00)	99,82	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	17.070.000,00	(30.000,00)	99,82	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan	15.048.000,00	14.948.500,00	(99.500,00)	99,34	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.048.000,00	14.948.500,00	(99.500,00)	99,34	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.048.000,00	14.948.500,00	(99.500,00)	99,34	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.658.000,00	183.009.550,00	(648.450,00)	99,65	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	183.658.000,00	183.009.550,00	(648.450,00)	99,65	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.658.000,00	183.009.550,00	(648.450,00)	99,65	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.750.000,00	81.700.000,00	(1.050.000,00)	98,73	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	100,00	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.250.000,00	61.200.000,00	(1.050.000,00)	98,31	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	62.250.000,00	61.200.000,00	(1.050.000,00)	98,31	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.250.000,00	61.200.000,00	(1.050.000,00)	98,31	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.038.700,00	425.010.037,00	(37.028.663,00)	91,99	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.995.500,00	45.015.787,00	(12.979.713,00)	77,62	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	57.995.500,00	45.015.787,00	(12.979.713,00)	77,62	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.995.500,00	45.015.787,00	(12.979.713,00)	77,62	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.043.200,00	379.994.250,00	(24.048.950,00)	94,05	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	404.043.200,00	379.994.250,00	(24.048.950,00)	94,05	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.043.200,00	379.994.250,00	(24.048.950,00)	94,05	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.270.000,00	43.585.250,00	(4.684.750,00)	90,29	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000,00	2.440.250,00	(1.559.750,00)	61,01	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	2.440.250,00	(1.559.750,00)	61,01	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.440.250,00	(1.559.750,00)	61,01	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000,00	32.945.000,00	(3.055.000,00)	91,51	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.000.000,00	32.945.000,00	(3.055.000,00)	91,51	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	32.945.000,00	(3.055.000,00)	91,51	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.270.000,00	8.200.000,00	(70.000,00)	99,15	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.270.000,00	8.200.000,00	(70.000,00)	99,15	
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.270.000,00	8.200.000,00	(70.000,00)	99,15	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.118.954.300,00	932.925.873,00	(186.028.427,00)	83,37	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	23.957.600,00	23.220.400,00	(737.200,00)	96,92	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	23.957.600,00	23.220.400,00	(737.200,00)	96,92	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	23.957.600,00	23.220.400,00	(737.200,00)	96,92	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	23.957.600,00	23.220.400,00	(737.200,00)	96,92	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.957.600,00	23.220.400,00	(737.200,00)	96,92	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	51.462.150,00	50.304.000,00	(1.158.150,00)	97,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	51.462.150,00	50.304.000,00	(1.158.150,00)	97,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	51.462.150,00	50.304.000,00	(1.158.150,00)	97,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.462.150,00	50.304.000,00	(1.158.150,00)	97,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.462.150,00	50.304.000,00	(1.158.150,00)	97,75	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	95.433.350,00	93.579.959,00	(1.853.391,00)	98,06	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	46.596.350,00	46.490.350,00	(106.000,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002		Pelayanan antar Kerja	46.596.350,00	46.490.350,00	(106.000,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	46.596.350,00	46.490.350,00	(106.000,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.596.350,00	46.490.350,00	(106.000,00)	99,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	48.837.000,00	47.089.609,00	(1.747.391,00)	96,42	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	48.837.000,00	47.089.609,00	(1.747.391,00)	96,42	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	48.837.000,00	47.089.609,00	(1.747.391,00)	96,42	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.837.000,00	47.089.609,00	(1.747.391,00)	96,42	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	948.101.200,00	765.821.514,00	(182.279.686,00)	80,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.870.000,00	18.448.400,00	(421.600,00)	97,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan	18.870.000,00	18.448.400,00	(421.600,00)	97,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	18.870.000,00	18.448.400,00	(421.600,00)	97,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.870.000,00	18.448.400,00	(421.600,00)	97,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	929.231.200,00	747.373.114,00	(181.858.086,00)	80,43	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.851.650,00	34.924.303,00	(2.927.347,00)	92,27	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.851.650,00	34.924.303,00	(2.927.347,00)	92,27	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.851.650,00	34.924.303,00	(2.927.347,00)	92,27	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	26.515.550,00	22.478.355,00	(4.037.195,00)	84,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	26.515.550,00	22.478.355,00	(4.037.195,00)	84,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.515.550,00	22.478.355,00	(4.037.195,00)	84,77	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	864.864.000,00	689.970.456,00	(174.893.544,00)	79,78	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	864.864.000,00	689.970.456,00	(174.893.544,00)	79,78	
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.864.000,00	689.970.456,00	(174.893.544,00)	79,78	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : Sekretariat Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	80.000.000,00	126.050.000,00	46.050.000,00	157,56	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.000.000,00	126.050.000,00	46.050.000,00	157,56	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	80.000.000,00	126.050.000,00	46.050.000,00	157,56	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	36.510.944.634,00	34.946.055.803,00	(1.564.888.831,00)	95,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.958.434.900,00	5.930.645.444,00	(27.789.456,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	339.405.550,00	328.000.289,00	(11.405.261,00)	96,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001		Penataan Administrasi *Pemerintahan*	85.272.000,00	83.302.704,00	(1.969.296,00)	97,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.272.000,00	83.302.704,00	(1.969.296,00)	97,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.272.000,00	83.302.704,00	(1.969.296,00)	97,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	101.238.350,00	92.946.283,00	(8.292.067,00)	91,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.738.350,00	85.446.283,00	(8.292.067,00)	91,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.738.350,00	85.446.283,00	(8.292.067,00)	91,15	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	152.895.200,00	151.751.302,00	(1.143.898,00)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	152.895.200,00	151.751.302,00	(1.143.898,00)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.895.200,00	151.751.302,00	(1.143.898,00)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.863.027.450,00	4.850.730.967,00	(12.296.483,00)	99,75	
4.01	*4.01.0.00.0.00.01.0000*	*4.01.02.2.02.0001*		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental *Spiritual*	*4.863.027.450,00*	*4.850.730.967,00*	*(12.296.483,00)*	*99,75*	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.863.027.450,00	4.850.730.967,00	(12.296.483,00)	99,75	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.163.027.450,00	4.150.905.808,00	(12.121.642,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	700.000.000,00	699.825.159,00	(174.841,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	710.312.000,00	709.531.402,00	(780.598,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	413.412.850,00	412.981.094,00	(431.756,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	413.412.850,00	412.981.094,00	(431.756,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.412.850,00	412.981.094,00	(431.756,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002		Fasilitasi Bantuan Hukum	191.416.650,00	191.267.508,00	(149.142,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	191.416.650,00	191.267.508,00	(149.142,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.416.650,00	191.267.508,00	(149.142,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	105.482.500,00	105.282.800,00	(199.700,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.482.500,00	105.282.800,00	(199.700,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.482.500,00	105.282.800,00	(199.700,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	45.689.900,00	42.382.786,00	(3.307.114,00)	92,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45.689.900,00	42.382.786,00	(3.307.114,00)	92,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	45.689.900,00	42.382.786,00	(3.307.114,00)	92,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.689.900,00	42.382.786,00	(3.307.114,00)	92,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.153.090.550,00	1.144.499.424,00	(8.591.126,00)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	363.651.900,00	362.382.317,00	(1.269.583,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	363.651.900,00	362.382.317,00	(1.269.583,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	363.651.900,00	362.382.317,00	(1.269.583,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.651.900,00	362.382.317,00	(1.269.583,00)	99,65	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	266.594.000,00	265.582.944,00	(1.011.056,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	54.663.000,00	54.452.700,00	(210.300,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.663.000,00	54.452.700,00	(210.300,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.663.000,00	54.452.700,00	(210.300,00)	99,62	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	148.102.000,00	147.528.480,00	(573.520,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	148.102.000,00	147.528.480,00	(573.520,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.102.000,00	147.528.480,00	(573.520,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.829.000,00	63.601.764,00	(227.236,00)	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.829.000,00	63.601.764,00	(227.236,00)	99,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.829.000,00	63.601.764,00	(227.236,00)	99,64	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	503.326.450,00	497.149.263,00	(6.177.187,00)	98,77	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	241.555.100,00	239.583.608,00	(1.971.492,00)	99,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	241.555.100,00	239.583.608,00	(1.971.492,00)	99,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	96.500.000,00	95.610.000,00	(890.000,00)	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.055.100,00	143.973.608,00	(1.081.492,00)	99,25	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	184.420.450,00	181.414.850,00	(3.005.600,00)	98,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	184.420.450,00	181.414.850,00	(3.005.600,00)	98,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.420.450,00	181.414.850,00	(3.005.600,00)	98,37	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	77.350.900,00	76.150.805,00	(1.200.095,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.350.900,00	76.150.805,00	(1.200.095,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.350.900,00	76.150.805,00	(1.200.095,00)	98,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	19.518.200,00	19.384.900,00	(133.300,00)	99,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	19.518.200,00	19.384.900,00	(133.300,00)	99,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.518.200,00	19.384.900,00	(133.300,00)	99,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.518.200,00	19.384.900,00	(133.300,00)	99,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.399.419.184,00	27.870.910.935,00	(1.528.508.249,00)	94,80	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.454.625.000,00	7.270.642.180,00	(183.982.820,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.454.625.000,00	7.270.642.180,00	(183.982.820,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.454.625.000,00	7.270.642.180,00	(183.982.820,00)	97,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.370.325.000,00	7.186.382.180,00	(183.942.820,00)	97,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.300.000,00	84.260.000,00	(40.000,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000,00	230.686.373,00	(4.313.627,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000,00	230.686.373,00	(4.313.627,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	235.000.000,00	230.686.373,00	(4.313.627,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.000.000,00	230.686.373,00	(4.313.627,00)	98,16	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.941.139.800,00	4.900.302.175,00	(40.837.625,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	206.831.500,00	206.810.500,00	(21.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	206.831.500,00	206.810.500,00	(21.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.831.500,00	206.810.500,00	(21.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.610.800,00	262.560.316,00	(50.484,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	262.610.800,00	262.560.316,00	(50.484,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.610.800,00	262.560.316,00	(50.484,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	196.995.000,00	196.995.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	196.995.000,00	196.995.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.995.000,00	196.995.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.798.044.000,00	1.797.428.010,00	(615.990,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.798.044.000,00	1.797.428.010,00	(615.990,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.798.044.000,00	1.797.428.010,00	(615.990,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.760.000,00	85.760.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	85.760.000,00	85.760.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.760.000,00	85.760.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.390.898.500,00	2.350.748.349,00	(40.150.151,00)	98,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	2.390.898.500,00	2.350.748.349,00	(40.150.151,00)	98,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.390.898.500,00	2.350.748.349,00	(40.150.151,00)	98,32	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.144.717.690,00	2.479.846.450,00	(664.871.240,00)	78,86	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	477.353.250,00	474.825.000,00	(2.528.250,00)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	110.900.000,00	110.900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.900.000,00	110.900.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	366.453.250,00	363.925.000,00	(2.528.250,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	366.453.250,00	363.925.000,00	(2.528.250,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.667.364.440,00	2.005.021.450,00	(662.342.990,00)	75,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2	BELANJA MODAL	2.667.364.440,00	2.005.021.450,00	(662.342.990,00)	75,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.667.364.440,00	2.005.021.450,00	(662.342.990,00)	75,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.755.673.664,00	6.390.007.419,00	(365.666.245,00)	94,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.750.000,00	46.310.000,00	(440.000,00)	99,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.750.000,00	46.310.000,00	(440.000,00)	99,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.750.000,00	46.310.000,00	(440.000,00)	99,06	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	968.891.064,00	877.551.883,00	(91.339.181,00)	90,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	968.891.064,00	877.551.883,00	(91.339.181,00)	90,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	968.891.064,00	877.551.883,00	(91.339.181,00)	90,57	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.812.000.000,00	1.789.937.936,00	(22.062.064,00)	98,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.812.000.000,00	1.789.937.936,00	(22.062.064,00)	98,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.000.000,00	1.789.937.936,00	(22.062.064,00)	98,78	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.928.032.600,00	3.676.207.600,00	(251.825.000,00)	93,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.928.032.600,00	3.676.207.600,00	(251.825.000,00)	93,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.928.032.600,00	3.676.207.600,00	(251.825.000,00)	93,59	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.252.500,00	1.346.169.964,00	(114.082.536,00)	92,19	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.455.000,00	171.740.568,00	(73.714.432,00)	69,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	245.455.000,00	171.740.568,00	(73.714.432,00)	69,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.455.000,00	171.740.568,00	(73.714.432,00)	69,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.997.500,00	1.071.604.234,00	(29.393.266,00)	97,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.100.997.500,00	1.071.604.234,00	(29.393.266,00)	97,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.997.500,00	1.071.604.234,00	(29.393.266,00)	97,33	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.800.000,00	102.825.162,00	(10.974.838,00)	90,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	113.800.000,00	102.825.162,00	(10.974.838,00)	90,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.800.000,00	102.825.162,00	(10.974.838,00)	90,36	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	879.392.000,00	751.421.076,00	(127.970.924,00)	85,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.892.000,00	124.687.154,00	(96.204.846,00)	56,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	220.892.000,00	124.687.154,00	(96.204.846,00)	56,45	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	180.892.000,00	94.687.154,00	(86.204.846,00)	52,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	75,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198.500.000,00	198.252.782,00	(247.218,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	198.500.000,00	198.252.782,00	(247.218,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.500.000,00	198.252.782,00	(247.218,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	28.485.140,00	(31.514.860,00)	47,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	28.485.140,00	(31.514.860,00)	47,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	28.485.140,00	(31.514.860,00)	47,48	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	400.000.000,00	399.996.000,00	(4.000,00)	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	412.321.000,00	406.776.000,00	(5.545.000,00)	98,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	412.321.000,00	406.776.000,00	(5.545.000,00)	98,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	412.321.000,00	406.776.000,00	(5.545.000,00)	98,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.321.000,00	406.776.000,00	(5.545.000,00)	98,66	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi	253.398.600,00	252.676.536,00	(722.064,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	79.100.000,00	78.857.518,00	(242.482,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.100.000,00	78.857.518,00	(242.482,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.100.000,00	78.857.518,00	(242.482,00)	99,69	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	76.800.100,00	76.438.664,00	(361.436,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.800.100,00	76.438.664,00	(361.436,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.800.100,00	76.438.664,00	(361.436,00)	99,53	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	97.498.500,00	97.380.354,00	(118.146,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	97.498.500,00	97.380.354,00	(118.146,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.498.500,00	97.380.354,00	(118.146,00)	99,88	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.862.898.930,00	3.842.382.762,00	(20.516.168,00)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001		Fasilitasi Keprotokolan	3.862.898.930,00	3.842.382.762,00	(20.516.168,00)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.862.898.930,00	3.842.382.762,00	(20.516.168,00)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.862.898.930,00	3.842.382.762,00	(20.516.168,00)	99,47	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : Sekretariat DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	48.425.539.686,00	46.592.012.129,00	(1.833.527.557,00)	96,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.788.372.300,00	27.259.704.330,00	(528.667.970,00)	98,10	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.531.455.000,00	8.233.447.684,00	(298.007.316,00)	96,51	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.140.855.000,00	8.035.327.684,00	(105.527.316,00)	98,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.140.855.000,00	8.035.327.684,00	(105.527.316,00)	98,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.140.855.000,00	8.035.327.684,00	(105.527.316,00)	98,70	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	390.600.000,00	198.120.000,00	(192.480.000,00)	50,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	390.600.000,00	198.120.000,00	(192.480.000,00)	50,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	390.600.000,00	198.120.000,00	(192.480.000,00)	50,72	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.667.930.000,00	3.600.896.281,00	(67.033.719,00)	98,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS	818.948.000,00	802.935.965,00	(16.012.035,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	818.948.000,00	802.935.965,00	(16.012.035,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.948.000,00	802.935.965,00	(16.012.035,00)	98,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	818.948.000,00	799.673.279,00	(19.274.721,00)	97,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	818.948.000,00	799.673.279,00	(19.274.721,00)	97,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	818.948.000,00	799.673.279,00	(19.274.721,00)	97,65	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		Pembahasan APBD	677.464.500,00	660.872.841,00	(16.591.659,00)	97,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	677.464.500,00	660.872.841,00	(16.591.659,00)	97,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.464.500,00	660.872.841,00	(16.591.659,00)	97,55	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		Pembahasan APBD Perubahan	677.464.500,00	663.258.300,00	(14.206.200,00)	97,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	677.464.500,00	663.258.300,00	(14.206.200,00)	97,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.464.500,00	663.258.300,00	(14.206.200,00)	97,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	675.105.000,00	674.155.896,00	(949.104,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	675.105.000,00	674.155.896,00	(949.104,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.105.000,00	674.155.896,00	(949.104,00)	99,86	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.557.058.550,00	4.463.259.034,00	(93.799.516,00)	97,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001		Orientasi DPRD	802.077.000,00	761.322.836,00	(40.754.164,00)	94,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	802.077.000,00	761.322.836,00	(40.754.164,00)	94,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	802.077.000,00	761.322.836,00	(40.754.164,00)	94,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		Pendalaman Tugas DPRD	2.100.881.550,00	2.057.731.598,00	(43.149.952,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.100.881.550,00	2.057.731.598,00	(43.149.952,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.881.550,00	2.057.731.598,00	(43.149.952,00)	97,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.654.100.000,00	1.644.204.600,00	(9.895.400,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.654.100.000,00	1.644.204.600,00	(9.895.400,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.654.100.000,00	1.644.204.600,00	(9.895.400,00)	99,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.031.928.750,00	10.962.101.331,00	(69.827.419,00)	99,37	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.782.575.750,00	10.757.724.331,00	(24.851.419,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.782.575.750,00	10.757.724.331,00	(24.851.419,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.782.575.750,00	10.757.724.331,00	(24.851.419,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Reses	249.353.000,00	204.377.000,00	(44.976.000,00)	81,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	249.353.000,00	204.377.000,00	(44.976.000,00)	81,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.353.000,00	204.377.000,00	(44.976.000,00)	81,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.637.167.386,00	19.332.307.799,00	(1.304.859.587,00)	93,68	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.283.223.072,00	2.119.756.479,00	(163.466.593,00)	92,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.283.223.072,00	2.119.756.479,00	(163.466.593,00)	92,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.283.223.072,00	2.119.756.479,00	(163.466.593,00)	92,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.283.223.072,00	2.119.756.479,00	(163.466.593,00)	92,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.041.194.950,00	1.980.700.035,00	(60.494.915,00)	97,04	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.941.750,00	50.183.500,00	(1.758.250,00)	96,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	51.941.750,00	50.183.500,00	(1.758.250,00)	96,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.941.750,00	50.183.500,00	(1.758.250,00)	96,61	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	522.904.000,00	519.520.260,00	(3.383.740,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	522.904.000,00	519.520.260,00	(3.383.740,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.904.000,00	519.520.260,00	(3.383.740,00)	99,35	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	176.593.000,00	176.181.000,00	(412.000,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	176.593.000,00	176.181.000,00	(412.000,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.593.000,00	176.181.000,00	(412.000,00)	99,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	525.650.000,00	508.852.000,00	(16.798.000,00)	96,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	525.650.000,00	508.852.000,00	(16.798.000,00)	96,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.650.000,00	508.852.000,00	(16.798.000,00)	96,80	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	368.359.200,00	332.440.000,00	(35.919.200,00)	90,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	368.359.200,00	332.440.000,00	(35.919.200,00)	90,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.359.200,00	332.440.000,00	(35.919.200,00)	90,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.747.000,00	393.523.275,00	(2.223.725,00)	99,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	395.747.000,00	393.523.275,00	(2.223.725,00)	99,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	395.747.000,00	393.523.275,00	(2.223.725,00)	99,44	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	996.200.000,00	940.580.000,00	(55.620.000,00)	94,42	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	800.000.000,00	746.000.000,00	(54.000.000,00)	93,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2	BELANJA MODAL	800.000.000,00	746.000.000,00	(54.000.000,00)	93,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	800.000.000,00	746.000.000,00	(54.000.000,00)	93,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.200.000,00	194.580.000,00	(1.620.000,00)	99,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	196.200.000,00	194.580.000,00	(1.620.000,00)	99,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.200.000,00	194.580.000,00	(1.620.000,00)	99,17	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.613.868.840,00	1.465.561.367,00	(148.307.473,00)	90,81	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.000.000,00	55.500.000,00	(500.000,00)	99,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.000.000,00	55.500.000,00	(500.000,00)	99,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	55.500.000,00	(500.000,00)	99,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.664.840,00	290.630.067,00	(47.034.773,00)	86,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	337.664.840,00	290.630.067,00	(47.034.773,00)	86,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.664.840,00	290.630.067,00	(47.034.773,00)	86,07	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.220.204.000,00	1.119.431.300,00	(100.772.700,00)	91,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.220.204.000,00	1.119.431.300,00	(100.772.700,00)	91,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.220.204.000,00	1.119.431.300,00	(100.772.700,00)	91,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.329.550,00	669.974.058,00	(224.355.492,00)	74,91	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000,00	181.888.258,00	(168.111.742,00)	51,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	181.888.258,00	(168.111.742,00)	51,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	181.888.258,00	(168.111.742,00)	51,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.950.000,00	70.739.300,00	(16.210.700,00)	81,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.950.000,00	70.739.300,00	(16.210.700,00)	81,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.950.000,00	70.739.300,00	(16.210.700,00)	81,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.322.500,00	169.806.500,00	(9.516.000,00)	94,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	179.322.500,00	169.806.500,00	(9.516.000,00)	94,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.322.500,00	169.806.500,00	(9.516.000,00)	94,69	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.057.050,00	247.540.000,00	(30.517.050,00)	89,02	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	250.057.050,00	220.540.000,00	(29.517.050,00)	88,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.057.050,00	220.540.000,00	(29.517.050,00)	88,20	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	96,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	27.000.000,00	(1.000.000,00)	96,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.525.925.974,00	11.926.117.860,00	(599.808.114,00)	95,21	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.826.925.974,00	11.234.697.860,00	(592.228.114,00)	94,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.826.925.974,00	11.234.697.860,00	(592.228.114,00)	94,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.826.925.974,00	11.234.697.860,00	(592.228.114,00)	94,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	699.000.000,00	691.420.000,00	(7.580.000,00)	98,92	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	699.000.000,00	691.420.000,00	(7.580.000,00)	98,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.000.000,00	691.420.000,00	(7.580.000,00)	98,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	282.425.000,00	229.618.000,00	(52.807.000,00)	81,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	282.425.000,00	229.618.000,00	(52.807.000,00)	81,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	282.425.000,00	229.618.000,00	(52.807.000,00)	81,30	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.425.000,00	229.618.000,00	(52.807.000,00)	81,30	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.474.523.850,00	4.259.998.162,00	(214.525.688,00)	95,20	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	750.739.100,00	682.974.273,00	(67.764.827,00)	90,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	704.207.900,00	640.770.373,00	(63.437.527,00)	90,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	71.371.550,00	50.025.200,00	(21.346.350,00)	70,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	71.371.550,00	50.025.200,00	(21.346.350,00)	70,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.371.550,00	50.025.200,00	(21.346.350,00)	70,09	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	632.836.350,00	590.745.173,00	(42.091.177,00)	93,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	632.836.350,00	590.745.173,00	(42.091.177,00)	93,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	632.836.350,00	590.745.173,00	(42.091.177,00)	93,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.708.200,00	24.807.300,00	(900.900,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.708.200,00	24.807.300,00	(900.900,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.708.200,00	24.807.300,00	(900.900,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.708.200,00	24.807.300,00	(900.900,00)	96,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.823.000,00	17.396.600,00	(3.426.400,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.823.000,00	17.396.600,00	(3.426.400,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	20.823.000,00	17.396.600,00	(3.426.400,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.823.000,00	17.396.600,00	(3.426.400,00)	83,54	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	356.178.600,00	354.413.952,00	(1.764.648,00)	99,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	174.999.900,00	174.378.102,00	(621.798,00)	99,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.634.000,00	30.219.300,00	(414.700,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.634.000,00	30.219.300,00	(414.700,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.634.000,00	30.219.300,00	(414.700,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.365.900,00	144.158.802,00	(207.098,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	144.365.900,00	144.158.802,00	(207.098,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.365.900,00	144.158.802,00	(207.098,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	24.997.500,00	24.458.950,00	(538.550,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.997.500,00	24.458.950,00	(538.550,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.997.500,00	24.458.950,00	(538.550,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.997.500,00	24.458.950,00	(538.550,00)	97,84	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	156.181.200,00	155.576.900,00	(604.300,00)	99,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.000.000,00	69.668.000,00	(332.000,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.668.000,00	(332.000,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.668.000,00	(332.000,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.181.200,00	85.908.900,00	(272.300,00)	99,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	86.181.200,00	85.908.900,00	(272.300,00)	99,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.181.200,00	85.908.900,00	(272.300,00)	99,68	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.367.606.150,00	3.222.609.937,00	(144.996.213,00)	95,69	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.795.000,00	2.411.565.417,00	(101.229.583,00)	95,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.512.795.000,00	2.411.565.417,00	(101.229.583,00)	95,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.512.795.000,00	2.411.565.417,00	(101.229.583,00)	95,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.512.795.000,00	2.411.565.417,00	(101.229.583,00)	95,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.656.000,00	294.934.897,00	(20.721.103,00)	93,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.237.500,00	14.228.500,00	(9.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.237.500,00	14.228.500,00	(9.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.237.500,00	14.228.500,00	(9.000,00)	99,93	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.228.000,00	36.208.500,00	(19.500,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	36.228.000,00	36.208.500,00	(19.500,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.228.000,00	36.208.500,00	(19.500,00)	99,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.939.000,00	48.935.800,00	(3.200,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.939.000,00	48.935.800,00	(3.200,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.939.000,00	48.935.800,00	(3.200,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.613.700,00	18.607.700,00	(6.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.613.700,00	18.607.700,00	(6.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.613.700,00	18.607.700,00	(6.000,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.587.800,00	154.904.397,00	(20.683.403,00)	88,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	175.587.800,00	154.904.397,00	(20.683.403,00)	88,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.587.800,00	154.904.397,00	(20.683.403,00)	88,22	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.125.000,00	49.805.000,00	(320.000,00)	99,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.125.000,00	49.805.000,00	(320.000,00)	99,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	50.125.000,00	49.805.000,00	(320.000,00)	99,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.125.000,00	49.805.000,00	(320.000,00)	99,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.530.150,00	422.991.544,00	(20.538.606,00)	95,36	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.613.350,00	99.257.694,00	(3.355.656,00)	96,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	102.613.350,00	99.257.694,00	(3.355.656,00)	96,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.613.350,00	99.257.694,00	(3.355.656,00)	96,72	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.880.000,00	33.880.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.036.800,00	283.853.850,00	(17.182.950,00)	94,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	301.036.800,00	283.853.850,00	(17.182.950,00)	94,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.036.800,00	283.853.850,00	(17.182.950,00)	94,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.500.000,00	43.313.079,00	(2.186.921,00)	95,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	16.114.484,00	(885.516,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	16.114.484,00	(885.516,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	16.114.484,00	(885.516,00)	94,79	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000,00	27.198.595,00	(1.301.405,00)	95,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.500.000,00	27.198.595,00	(1.301.405,00)	95,43	
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	27.198.595,00	(1.301.405,00)	95,43	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	560.203.000,00	552.006.261,00	(8.196.739,00)	98,53	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	560.203.000,00	552.006.261,00	(8.196.739,00)	98,53	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	487.072.100,00	480.411.623,00	(6.660.477,00)	98,63	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013		Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	153.567.000,00	149.049.937,00	(4.517.063,00)	97,05	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	153.567.000,00	149.049.937,00	(4.517.063,00)	97,05	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.567.000,00	149.049.937,00	(4.517.063,00)	97,05	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0014		Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	333.505.100,00	331.361.686,00	(2.143.414,00)	99,35	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	333.505.100,00	331.361.686,00	(2.143.414,00)	99,35	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.505.100,00	331.361.686,00	(2.143.414,00)	99,35	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	73.130.900,00	71.594.638,00	(1.536.262,00)	97,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	73.130.900,00	71.594.638,00	(1.536.262,00)	97,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	73.130.900,00	71.594.638,00	(1.536.262,00)	97,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.130.900,00	71.594.638,00	(1.536.262,00)	97,89	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : Badan Keuangan Daerah

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	936.843.918.435,00	904.955.667.520,79	(31.888.250.914,21)	96,60	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.053.185.417,00	42.503.459.604,79	(1.549.725.812,21)	96,48	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.01	Pajak Daerah	26.432.781.411,00	25.092.743.485,78	(1.340.037.925,22)	94,93	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	83.000.000,00	86.408.500,00	3.408.500,00	104,10	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.347.929.006,00	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.189.475.000,00	11.976.378.613,01	(213.096.386,09)	98,25	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	880.926.579.803,00	850.689.858.617,00	(30.236.721.186,00)	96,56	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	796.228.371.644,00	792.448.801.416,00	(3.779.570.228,00)	99,52	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	(26.457.150.958,00)	68,76	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.864.153.215,00	11.762.349.299,00	(101.803.916,00)	99,14	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00	71.350.441,00	(28.649.559,00)	71,35	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.764.153.215,00	11.690.998.858,00	(73.154.357,00)	99,37	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	133.926.049.190,00	131.886.723.637,00	(2.039.325.553,00)	98,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	123.824.144.340,00	122.311.911.666,00	(1.512.232.674,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.134.365.000,00	2.116.448.843,00	(17.916.157,00)	99,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	190.753.450,00	190.066.700,00	(686.750,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	190.753.450,00	190.066.700,00	(686.750,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.753.450,00	190.066.700,00	(686.750,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	244.594.250,00	243.601.600,00	(992.650,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	244.594.250,00	243.601.600,00	(992.650,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.594.250,00	243.601.600,00	(992.650,00)	99,59	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	591.553.500,00	587.100.584,00	(4.452.916,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	591.553.500,00	587.100.584,00	(4.452.916,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	591.553.500,00	587.100.584,00	(4.452.916,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.032.725.000,00	1.026.544.259,00	(6.180.741,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.032.725.000,00	1.026.544.259,00	(6.180.741,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.032.725.000,00	1.026.544.259,00	(6.180.741,00)	99,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	74.738.800,00	69.135.700,00	(5.603.100,00)	92,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.738.800,00	69.135.700,00	(5.603.100,00)	92,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.738.800,00	69.135.700,00	(5.603.100,00)	92,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	528.685.100,00	513.672.993,00	(15.012.107,00)	97,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	68.524.550,00	67.033.200,00	(1.491.350,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	68.524.550,00	67.033.200,00	(1.491.350,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.524.550,00	67.033.200,00	(1.491.350,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	460.160.550,00	446.639.793,00	(13.520.757,00)	97,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	460.160.550,00	446.639.793,00	(13.520.757,00)	97,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.160.550,00	446.639.793,00	(13.520.757,00)	97,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	438.847.950,00	437.968.476,00	(879.474,00)	99,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	51.865.000,00	51.646.896,00	(218.104,00)	99,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	51.865.000,00	51.646.896,00	(218.104,00)	99,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.865.000,00	51.646.896,00	(218.104,00)	99,57	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	105.394.000,00	105.108.950,00	(285.050,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.394.000,00	105.108.950,00	(285.050,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.394.000,00	105.108.950,00	(285.050,00)	99,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	264.425.200,00	264.168.030,00	(257.170,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	264.425.200,00	264.168.030,00	(257.170,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.425.200,00	264.168.030,00	(257.170,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	17.163.750,00	17.044.600,00	(119.150,00)	99,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.163.750,00	17.044.600,00	(119.150,00)	99,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.163.750,00	17.044.600,00	(119.150,00)	99,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	120.551.425.790,00	119.073.778.343,00	(1.477.647.447,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	117.551.425.790,00	116.588.258.056,00	(963.167.734,00)	99,18	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.299.960.000,00	1.273.115.592,00	(26.844.408,00)	97,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.960.000,00	1.273.115.592,00	(26.844.408,00)	97,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	116.251.465.790,00	115.315.142.464,00	(936.323.326,00)	99,19	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.920.693.150,00	1.984.369.824,00	(936.323.326,00)	67,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	113.330.772.640,00	113.330.772.640,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	(514.479.713,00)	82,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	(514.479.713,00)	82,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	(514.479.713,00)	82,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	170.820.500,00	170.043.011,00	(777.489,00)	99,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	34.304.000,00	33.827.312,00	(476.688,00)	98,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.304.000,00	33.827.312,00	(476.688,00)	98,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.304.000,00	33.827.312,00	(476.688,00)	98,61	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	136.516.500,00	136.215.699,00	(300.801,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	136.516.500,00	136.215.699,00	(300.801,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.516.500,00	136.215.699,00	(300.801,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	349.934.250,00	338.648.034,00	(11.286.216,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	349.934.250,00	338.648.034,00	(11.286.216,00)	96,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.177.750,00	38.435.500,00	(1.742.250,00)	95,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	40.177.750,00	38.435.500,00	(1.742.250,00)	95,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.177.750,00	38.435.500,00	(1.742.250,00)	95,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005		Penatausahaan Barang Milik Daerah	95.596.000,00	93.852.999,00	(1.743.001,00)	98,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	95.596.000,00	93.852.999,00	(1.743.001,00)	98,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.596.000,00	93.852.999,00	(1.743.001,00)	98,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006		Inventarisasi Barang Milik Daerah	71.338.000,00	68.110.541,00	(3.227.459,00)	95,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.338.000,00	68.110.541,00	(3.227.459,00)	95,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.338.000,00	68.110.541,00	(3.227.459,00)	95,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	142.822.500,00	138.248.994,00	(4.573.506,00)	96,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	142.822.500,00	138.248.994,00	(4.573.506,00)	96,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.822.500,00	138.248.994,00	(4.573.506,00)	96,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.234.298.450,00	1.206.722.997,00	(27.575.453,00)	97,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.234.298.450,00	1.206.722.997,00	(27.575.453,00)	97,76	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	472.022.250,00	464.406.496,00	(7.615.754,00)	98,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	472.022.250,00	464.406.496,00	(7.615.754,00)	98,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.022.250,00	464.406.496,00	(7.615.754,00)	98,38	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	74.816.700,00	74.721.490,00	(95.210,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	74.816.700,00	74.721.490,00	(95.210,00)	99,87	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.816.700,00	74.721.490,00	(95.210,00)	99,87	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	212.333.000,00	209.114.599,00	(3.218.401,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	212.333.000,00	209.114.599,00	(3.218.401,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.333.000,00	209.114.599,00	(3.218.401,00)	98,48	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	454.847.500,00	443.632.612,00	(11.214.888,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	454.847.500,00	443.632.612,00	(11.214.888,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.847.500,00	443.632.612,00	(11.214.888,00)	97,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.279.000,00	14.847.800,00	(5.431.200,00)	73,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	20.279.000,00	14.847.800,00	(5.431.200,00)	73,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.279.000,00	14.847.800,00	(5.431.200,00)	73,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.517.672.150,00	8.029.440.940,00	(488.231.210,00)	94,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.337.367.000,00	5.986.865.624,00	(350.501.376,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.337.367.000,00	5.986.865.624,00	(350.501.376,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.337.367.000,00	5.986.865.624,00	(350.501.376,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.337.367.000,00	5.986.865.624,00	(350.501.376,00)	94,46	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.654.750,00	801.368.116,00	(7.286.634,00)	99,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.997.000,00	12.963.500,00	(33.500,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.997.000,00	12.963.500,00	(33.500,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.997.000,00	12.963.500,00	(33.500,00)	99,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.391.000,00	163.372.000,00	(19.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	163.391.000,00	163.372.000,00	(19.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.391.000,00	163.372.000,00	(19.000,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.027.900,00	56.011.500,00	(16.400,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	56.027.900,00	56.011.500,00	(16.400,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.027.900,00	56.011.500,00	(16.400,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.290.000,00	58.210.000,00	(7.080.000,00)	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	65.290.000,00	58.210.000,00	(7.080.000,00)	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.290.000,00	58.210.000,00	(7.080.000,00)	89,15	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.950.000,00	200.949.100,00	(900,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	200.950.000,00	200.949.100,00	(900,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.950.000,00	200.949.100,00	(900,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.998.850,00	309.862.016,00	(136.834,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	309.998.850,00	309.862.016,00	(136.834,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.998.850,00	309.862.016,00	(136.834,00)	99,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	334.651.200,00	323.437.200,00	(11.214.000,00)	96,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	37.277.200,00	37.277.200,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.277.200,00	37.277.200,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	297.374.000,00	286.160.000,00	(11.214.000,00)	96,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	297.374.000,00	286.160.000,00	(11.214.000,00)	96,22	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.600.000,00	247.860.000,00	(10.740.000,00)	95,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	38.774.000,00	38.300.000,00	(474.000,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.608.800,00	699.775.908,00	(74.832.892,00)	90,33	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.721.100,00	(278.900,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.721.100,00	(278.900,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.721.100,00	(278.900,00)	97,21	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.600.000,00	250.126.608,00	(21.473.392,00)	92,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	271.600.000,00	250.126.608,00	(21.473.392,00)	92,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.600.000,00	250.126.608,00	(21.473.392,00)	92,09	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.989.200,00	22.978.600,00	(13.010.600,00)	63,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	35.989.200,00	22.978.600,00	(13.010.600,00)	63,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.989.200,00	22.978.600,00	(13.010.600,00)	63,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.019.600,00	416.949.600,00	(40.070.000,00)	91,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	457.019.600,00	416.949.600,00	(40.070.000,00)	91,23	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.019.600,00	416.949.600,00	(40.070.000,00)	91,23	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.390.400,00	217.994.092,00	(44.396.308,00)	83,08	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	10.156.050,00	(3.843.950,00)	72,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	10.156.050,00	(3.843.950,00)	72,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	10.156.050,00	(3.843.950,00)	72,54	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.730.400,00	180.338.042,00	(40.392.358,00)	81,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	220.730.400,00	180.338.042,00	(40.392.358,00)	81,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.730.400,00	180.338.042,00	(40.392.358,00)	81,70	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.660.000,00	27.500.000,00	(160.000,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	27.660.000,00	27.500.000,00	(160.000,00)	99,42	
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.660.000,00	27.500.000,00	(160.000,00)	99,42	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	45.655.539.477,00	46.430.539.477,05	775.000.000,05	101,69	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	0,05	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	0,05	100,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	775.000.000,00	0,00	(775.000.000,00)	0,00	
	5.02.0.00.0.00.01.0000		6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	775.000.000,00	0,00	(775.000.000,00)	0,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.450.934.720,00	5.204.675.792,00	(246.258.928,00)	95,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.330.065.800,00	1.200.699.746,00	(129.366.054,00)	90,27	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	406.231.800,00	400.868.042,00	(5.363.758,00)	98,68	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	11.420.000,00	11.381.879,00	(38.121,00)	99,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.420.000,00	11.381.879,00	(38.121,00)	99,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.420.000,00	11.381.879,00	(38.121,00)	99,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	367.306.800,00	362.172.963,00	(5.133.837,00)	98,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	367.306.800,00	362.172.963,00	(5.133.837,00)	98,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.306.800,00	362.172.963,00	(5.133.837,00)	98,60	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6.990.000,00	6.872.200,00	(117.800,00)	98,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.990.000,00	6.872.200,00	(117.800,00)	98,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	6.872.200,00	(117.800,00)	98,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.513.000,00	11.451.200,00	(61.800,00)	99,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.513.000,00	11.451.200,00	(61.800,00)	99,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.513.000,00	11.451.200,00	(61.800,00)	99,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011		Pengelolaan Data Kepegawaian	9.002.000,00	8.989.800,00	(12.200,00)	99,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.002.000,00	8.989.800,00	(12.200,00)	99,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.002.000,00	8.989.800,00	(12.200,00)	99,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02		Mutasi dan Promosi ASN	49.607.000,00	47.281.900,00	(2.325.100,00)	95,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001		Pengelolaan Mutasi ASN	5.007.000,00	3.326.000,00	(1.681.000,00)	66,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.007.000,00	3.326.000,00	(1.681.000,00)	66,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.007.000,00	3.326.000,00	(1.681.000,00)	66,43	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.600.000,00	43.955.900,00	(644.100,00)	98,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	44.600.000,00	43.955.900,00	(644.100,00)	98,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.600.000,00	43.955.900,00	(644.100,00)	98,56	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	787.811.000,00	667.430.918,00	(120.380.082,00)	84,72	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	24.747.000,00	22.596.042,00	(2.150.958,00)	91,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.747.000,00	22.596.042,00	(2.150.958,00)	91,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.747.000,00	22.596.042,00	(2.150.958,00)	91,31	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002		Pengelolaan Assessment Center	215.968.000,00	162.833.349,00	(53.134.651,00)	75,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	215.968.000,00	162.833.349,00	(53.134.651,00)	75,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.968.000,00	162.833.349,00	(53.134.651,00)	75,40	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	544.673.000,00	479.615.327,00	(65.057.673,00)	88,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	544.673.000,00	479.615.327,00	(65.057.673,00)	88,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.673.000,00	479.615.327,00	(65.057.673,00)	88,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.423.000,00	2.386.200,00	(36.800,00)	98,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.423.000,00	2.386.200,00	(36.800,00)	98,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.423.000,00	2.386.200,00	(36.800,00)	98,48	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	86.416.000,00	85.118.886,00	(1.297.114,00)	98,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.640.000,00	8.610.000,00	(30.000,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.640.000,00	8.610.000,00	(30.000,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.610.000,00	(30.000,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	66.032.000,00	65.038.786,00	(993.214,00)	98,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	66.032.000,00	65.038.786,00	(993.214,00)	98,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.032.000,00	65.038.786,00	(993.214,00)	98,50	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11.744.000,00	11.470.100,00	(273.900,00)	97,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	11.744.000,00	11.470.100,00	(273.900,00)	97,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.744.000,00	11.470.100,00	(273.900,00)	97,67	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.120.868.920,00	4.003.976.046,00	(116.892.874,00)	97,16	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.293.000,00	30.239.500,00	(53.500,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.293.000,00	30.239.500,00	(53.500,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.293.000,00	30.239.500,00	(53.500,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.293.000,00	30.239.500,00	(53.500,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.482.877.000,00	3.393.801.127,00	(89.075.873,00)	97,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.482.877.000,00	3.393.801.127,00	(89.075.873,00)	97,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.482.877.000,00	3.393.801.127,00	(89.075.873,00)	97,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.482.877.000,00	3.393.801.127,00	(89.075.873,00)	97,44	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.759.750,00	248.406.704,00	(7.353.046,00)	97,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.464.000,00	11.464.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.464.000,00	11.464.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.464.000,00	11.464.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.869.000,00	28.845.000,00	(24.000,00)	99,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.869.000,00	28.845.000,00	(24.000,00)	99,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.869.000,00	28.845.000,00	(24.000,00)	99,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.835.000,00	8.835.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.253.000,00	20.251.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.253.000,00	20.251.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.253.000,00	20.251.000,00	(2.000,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.660.000,00	23.630.200,00	(29.800,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	23.660.000,00	23.630.200,00	(29.800,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.660.000,00	23.630.200,00	(29.800,00)	99,87	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.678.750,00	155.381.504,00	(7.297.246,00)	95,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	162.678.750,00	155.381.504,00	(7.297.246,00)	95,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.678.750,00	155.381.504,00	(7.297.246,00)	95,51	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.300.000,00	44.150.000,00	(1.150.000,00)	97,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.300.000,00	44.150.000,00	(1.150.000,00)	97,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	45.300.000,00	44.150.000,00	(1.150.000,00)	97,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.300.000,00	44.150.000,00	(1.150.000,00)	97,46	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.589.170,00	224.406.075,00	(17.183.095,00)	92,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.790.770,00	45.085.875,00	(9.704.895,00)	82,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.790.770,00	45.085.875,00	(9.704.895,00)	82,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.790.770,00	45.085.875,00	(9.704.895,00)	82,29	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.798.400,00	175.320.200,00	(7.478.200,00)	95,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	182.798.400,00	175.320.200,00	(7.478.200,00)	95,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.798.400,00	175.320.200,00	(7.478.200,00)	95,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.050.000,00	62.972.640,00	(2.077.360,00)	96,81	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	16.558.290,00	(941.710,00)	94,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	16.558.290,00	(941.710,00)	94,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	16.558.290,00	(941.710,00)	94,62	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000,00	21.404.750,00	(1.095.250,00)	95,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	21.404.750,00	(1.095.250,00)	95,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	21.404.750,00	(1.095.250,00)	95,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.050.000,00	25.009.600,00	(40.400,00)	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	25.050.000,00	25.009.600,00	(40.400,00)	99,84	
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	25.009.600,00	(40.400,00)	99,84	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	306.646.000,00	270.703.164,00	(35.942.836,00)	88,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	306.646.000,00	270.703.164,00	(35.942.836,00)	88,28	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	1.670.000,00	1.445.650,00	(224.350,00)	86,57	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.670.000,00	1.445.650,00	(224.350,00)	86,57	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.670.000,00	1.445.650,00	(224.350,00)	86,57	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	1.445.650,00	(224.350,00)	86,57	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	304.976.000,00	269.257.514,00	(35.718.486,00)	88,29	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	304.976.000,00	269.257.514,00	(35.718.486,00)	88,29	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	304.976.000,00	269.257.514,00	(35.718.486,00)	88,29	
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	304.976.000,00	269.257.514,00	(35.718.486,00)	88,29	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : Inspektorat Kabupaten

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	7.419.560.006,00	6.981.266.226,00	(438.293.780,00)	94,09	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	610.950.300,00	559.565.527,00	(51.384.773,00)	91,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	572.891.250,00	535.475.677,00	(37.415.573,00)	93,47	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	58.942.050,00	57.558.300,00	(1.383.750,00)	97,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.942.050,00	57.558.300,00	(1.383.750,00)	97,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.942.050,00	57.558.300,00	(1.383.750,00)	97,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	61.925.000,00	58.098.950,00	(3.826.050,00)	93,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	61.925.000,00	58.098.950,00	(3.826.050,00)	93,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.925.000,00	58.098.950,00	(3.826.050,00)	93,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		Reviu Laporan Kinerja	82.605.000,00	79.603.500,00	(3.001.500,00)	96,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	82.605.000,00	79.603.500,00	(3.001.500,00)	96,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.605.000,00	79.603.500,00	(3.001.500,00)	96,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		Reviu Laporan Keuangan	81.115.000,00	80.265.550,00	(849.450,00)	98,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	81.115.000,00	80.265.550,00	(849.450,00)	98,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.115.000,00	80.265.550,00	(849.450,00)	98,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		Pengawasan Desa	108.645.000,00	104.157.500,00	(4.487.500,00)	95,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	108.645.000,00	104.157.500,00	(4.487.500,00)	95,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.645.000,00	104.157.500,00	(4.487.500,00)	95,87	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006		Kerja Sama Pengawasan Internal	119.871.700,00	103.117.577,00	(16.754.123,00)	86,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	119.871.700,00	103.117.577,00	(16.754.123,00)	86,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.871.700,00	103.117.577,00	(16.754.123,00)	86,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	59.787.500,00	52.674.300,00	(7.113.200,00)	88,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	59.787.500,00	52.674.300,00	(7.113.200,00)	88,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.787.500,00	52.674.300,00	(7.113.200,00)	88,10	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.059.050,00	24.089.850,00	(13.969.200,00)	63,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.059.050,00	24.089.850,00	(13.969.200,00)	63,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	38.059.050,00	24.089.850,00	(13.969.200,00)	63,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.059.050,00	24.089.850,00	(13.969.200,00)	63,30	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	984.499.000,00	890.227.177,00	(94.271.823,00)	90,42	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	93.353.000,00	88.302.120,00	(5.050.880,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	93.353.000,00	88.302.120,00	(5.050.880,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	93.353.000,00	88.302.120,00	(5.050.880,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.353.000,00	88.302.120,00	(5.050.880,00)	94,59	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		Pendampingan dan Asistensi	891.146.000,00	801.925.057,00	(89.220.943,00)	89,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	435.901.000,00	377.309.361,00	(58.591.639,00)	86,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	435.901.000,00	377.309.361,00	(58.591.639,00)	86,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	435.901.000,00	377.309.361,00	(58.591.639,00)	86,56	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	171.882.000,00	170.127.092,00	(1.754.908,00)	98,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	171.882.000,00	170.127.092,00	(1.754.908,00)	98,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.882.000,00	170.127.092,00	(1.754.908,00)	98,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	283.363.000,00	254.488.604,00	(28.874.396,00)	89,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	283.363.000,00	254.488.604,00	(28.874.396,00)	89,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.363.000,00	254.488.604,00	(28.874.396,00)	89,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.824.110.706,00	5.531.473.522,00	(292.637.184,00)	94,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.233.000,00	57.209.650,00	(3.023.350,00)	94,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.233.000,00	57.209.650,00	(3.023.350,00)	94,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.233.000,00	57.209.650,00	(3.023.350,00)	94,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.233.000,00	57.209.650,00	(3.023.350,00)	94,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.226.000,00	3.132.605.727,00	(71.620.273,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.226.000,00	3.132.605.727,00	(71.620.273,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.204.226.000,00	3.132.605.727,00	(71.620.273,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.204.226.000,00	3.132.605.727,00	(71.620.273,00)	97,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	429.440.000,00	424.146.712,00	(5.293.288,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	429.440.000,00	424.146.712,00	(5.293.288,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	429.440.000,00	424.146.712,00	(5.293.288,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.440.000,00	424.146.712,00	(5.293.288,00)	98,77	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	587.561.156,00	553.243.818,00	(34.317.338,00)	94,16	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.777.000,00	12.756.000,00	(21.000,00)	99,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.777.000,00	12.756.000,00	(21.000,00)	99,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.777.000,00	12.756.000,00	(21.000,00)	99,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.782.000,00	54.826.696,00	(955.304,00)	98,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	55.782.000,00	54.826.696,00	(955.304,00)	98,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.782.000,00	54.826.696,00	(955.304,00)	98,29	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.584.600,00	54.923.000,00	(661.600,00)	98,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.484.600,00	9.923.000,00	(561.600,00)	94,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.484.600,00	9.923.000,00	(561.600,00)	94,64	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	45.100.000,00	45.000.000,00	(100.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.100.000,00	45.000.000,00	(100.000,00)	99,78	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	24.991.000,00	(9.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.991.000,00	(9.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.991.000,00	(9.000,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.995.000,00	19.990.000,00	(5.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.995.000,00	19.990.000,00	(5.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	19.990.000,00	(5.000,00)	99,97	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.422.556,00	385.757.122,00	(32.665.434,00)	92,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	418.422.556,00	385.757.122,00	(32.665.434,00)	92,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	418.422.556,00	385.757.122,00	(32.665.434,00)	92,19	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.002.975.000,00	961.300.000,00	(41.675.000,00)	95,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	850.000.000,00	817.000.000,00	(33.000.000,00)	96,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	850.000.000,00	817.000.000,00	(33.000.000,00)	96,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000,00	817.000.000,00	(33.000.000,00)	96,12	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.225.000,00	144.300.000,00	(4.925.000,00)	96,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	149.225.000,00	144.300.000,00	(4.925.000,00)	96,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.225.000,00	144.300.000,00	(4.925.000,00)	96,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.240.400,00	291.695.732,00	(117.544.668,00)	71,28	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.497.400,00	79.435.652,00	(20.061.748,00)	79,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	99.497.400,00	79.435.652,00	(20.061.748,00)	79,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.497.400,00	79.435.652,00	(20.061.748,00)	79,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000,00	14.914.230,00	(15.770,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.930.000,00	14.914.230,00	(15.770,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	14.914.230,00	(15.770,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.813.000,00	195.345.850,00	(97.467.150,00)	66,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	292.813.000,00	195.345.850,00	(97.467.150,00)	66,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.813.000,00	195.345.850,00	(97.467.150,00)	66,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.435.150,00	111.271.883,00	(19.163.267,00)	85,31	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	11.455.357,00	(6.044.643,00)	65,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	11.455.357,00	(6.044.643,00)	65,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	11.455.357,00	(6.044.643,00)	65,46	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000,00	53.728.937,00	(10.271.063,00)	83,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	53.728.937,00	(10.271.063,00)	83,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	53.728.937,00	(10.271.063,00)	83,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.935.150,00	46.087.589,00	(2.847.561,00)	94,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	48.935.150,00	46.087.589,00	(2.847.561,00)	94,18	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.935.150,00	46.087.589,00	(2.847.561,00)	94,18	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Pulau Punjung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	116,66	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	116,66	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.500.000,00	500.000,00	116,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.259.238.500,00	2.195.817.966,00	(63.420.534,00)	97,19	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	47.685.000,00	47.370.000,00	(315.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan	47.685.000,00	47.370.000,00	(315.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	47.685.000,00	47.370.000,00	(315.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.585.000,00	13.270.000,00	(315.000,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.585.000,00	13.270.000,00	(315.000,00)	97,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.211.553.500,00	2.148.447.966,00	(63.105.534,00)	97,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	1.865.213.000,00	1.818.508.317,00	(46.704.683,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.865.213.000,00	1.818.508.317,00	(46.704.683,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.865.213.000,00	1.818.508.317,00	(46.704.683,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.865.213.000,00	1.818.508.317,00	(46.704.683,00)	97,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat	145.118.500,00	143.047.975,00	(2.070.525,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1.991.000,00	1.936.500,00	(54.500,00)	97,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.991.000,00	1.936.500,00	(54.500,00)	97,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.000,00	1.936.500,00	(54.500,00)	97,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.828.000,00	16.606.995,00	(221.005,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.828.000,00	16.606.995,00	(221.005,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.828.000,00	16.606.995,00	(221.005,00)	98,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah	6.636.000,00	6.586.000,00	(50.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.636.000,00	6.586.000,00	(50.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.636.000,00	6.586.000,00	(50.000,00)	99,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.900.000,00	34.898.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.900.000,00	34.898.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00	34.898.000,00	(2.000,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.610.000,00	10.470.000,00	(140.000,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.610.000,00	10.470.000,00	(140.000,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.610.000,00	10.470.000,00	(140.000,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.153.500,00	72.550.480,00	(1.603.020,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	74.153.500,00	72.550.480,00	(1.603.020,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.153.500,00	72.550.480,00	(1.603.020,00)	97,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.222.000,00	170.114.074,00	(13.107.926,00)	92,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000,00	9.491.024,00	(8.976,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	9.491.024,00	(8.976,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	9.491.024,00	(8.976,00)	99,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.330.000,00	3.300.000,00	(30.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.330.000,00	3.300.000,00	(30.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.330.000,00	3.300.000,00	(30.000,00)	99,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.892.000,00	155.823.050,00	(13.068.950,00)	92,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.892.000,00	155.823.050,00	(13.068.950,00)	92,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.892.000,00	155.823.050,00	(13.068.950,00)	92,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000,00	16.777.600,00	(1.222.400,00)	93,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.451.500,00	(548.500,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.451.500,00	(548.500,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.451.500,00	(548.500,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	3.326.100,00	(673.900,00)	83,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.326.100,00	(673.900,00)	83,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.326.100,00	(673.900,00)	83,15	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Sitiung

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	1.750.000,00	2.000.000,00	250.000,00	114,28	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.750.000,00	2.000.000,00	250.000,00	114,28	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	1.750.000,00	2.000.000,00	250.000,00	114,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.970.561.800,00	1.920.430.459,00	(50.131.341,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.620.700,00	14.585.650,00	(35.050,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.620.700,00	14.585.650,00	(35.050,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001		*Peningkatan Partisipasi Masyarakat* dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.620.700,00	14.585.650,00	(35.050,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.620.700,00	14.585.650,00	(35.050,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.620.700,00	14.585.650,00	(35.050,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.7.04.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.7.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.7.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.830.000,00	13.761.800,00	(68.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.830.000,00	13.761.800,00	(68.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.830.000,00	13.761.800,00	(68.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.830.000,00	13.761.800,00	(68.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.830.000,00	13.761.800,00	(68.200,00)	99,51	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.938.111.100,00	1.888.083.009,00	(50.028.091,00)	97,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.626.487.000,00	1.581.282.368,00	(45.204.632,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.626.487.000,00	1.581.282.368,00	(45.204.632,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.626.487.000,00	1.581.282.368,00	(45.204.632,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.626.487.000,00	1.581.282.368,00	(45.204.632,00)	97,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.324.900,00	187.545.191,00	(1.779.709,00)	99,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.368.500,00	2.368.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.368.500,00	2.368.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.368.500,00	2.368.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.314.000,00	14.309.000,00	(5.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.314.000,00	14.309.000,00	(5.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.314.000,00	14.309.000,00	(5.000,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.130.000,00	54.622.150,00	(507.850,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.130.000,00	54.622.150,00	(507.850,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.130.000,00	54.622.150,00	(507.850,00)	99,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan	7.799.700,00	7.799.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.799.700,00	7.799.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.799.700,00	7.799.700,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.712.700,00	93.445.841,00	(1.266.859,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.712.700,00	93.445.841,00	(1.266.859,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.712.700,00	93.445.841,00	(1.266.859,00)	98,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	*BELANJA OPERASI*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.300.000,00	15.250.000,00	(50.000,00)	99,67	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.999.200,00	104.005.450,00	(2.993.750,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.670.000,00	8.666.250,00	(3.750,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.670.000,00	8.666.250,00	(3.750,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	8.666.250,00	(3.750,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.329.200,00	93.339.200,00	(2.990.000,00)	96,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	96.329.200,00	93.339.200,00	(2.990.000,00)	96,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.329.200,00	93.339.200,00	(2.990.000,00)	96,90	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Koto Baru

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	4.750.000,00	2.750.000,00	237,50	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	4.750.000,00	2.750.000,00	237,50	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	4.750.000,00	2.750.000,00	237,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	2.052.789.950,00	1.985.274.892,00	(67.515.058,00)	96,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	*7.01.0.00.0.00.03.0000*	*7.01.02.2.04*		*Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	*3.455.000,00*	*2.555.000,00*	*(900.000,00)*	*73,95*	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.344.900,00	13.344.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	13.344.900,00	13.344.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.344.900,00	13.344.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.344.900,00	13.344.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.344.900,00	13.344.900,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.455.000,00	2.555.000,00	(900.000,00)	73,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.625.000,00	4.305.000,00	(320.000,00)	93,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.625.000,00	4.305.000,00	(320.000,00)	93,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.625.000,00	4.305.000,00	(320.000,00)	93,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.625.000,00	4.305.000,00	(320.000,00)	93,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.625.000,00	4.305.000,00	(320.000,00)	93,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.027.910.050,00	1.962.514.992,00	(65.395.058,00)	96,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	1.525.550.000,00	1.482.843.455,00	(42.706.545,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.525.550.000,00	1.482.843.455,00	(42.706.545,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.525.550.000,00	1.482.843.455,00	(42.706.545,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.525.550.000,00	1.482.843.455,00	(42.706.545,00)	97,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.417.250,00	198.456.705,00	(960.545,00)	99,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.999.000,00	(1.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.856.000,00	34.842.000,00	(14.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	34.856.000,00	34.842.000,00	(14.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.856.000,00	34.842.000,00	(14.000,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	7.499.900,00	(100,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.499.900,00	(100,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.499.900,00	(100,00)	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.061.250,00	139.115.805,00	(945.445,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	140.061.250,00	139.115.805,00	(945.445,00)	99,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.061.250,00	139.115.805,00	(945.445,00)	99,32	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.942.800,00	261.525.112,00	(21.417.688,00)	92,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.998.000,00	4.195.312,00	(802.688,00)	83,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.998.000,00	4.195.312,00	(802.688,00)	83,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.998.000,00	4.195.312,00	(802.688,00)	83,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.944.800,00	255.329.800,00	(20.615.000,00)	92,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	275.944.800,00	255.329.800,00	(20.615.000,00)	92,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.944.800,00	255.329.800,00	(20.615.000,00)	92,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000,00	19.689.720,00	(310.280,00)	98,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	13.815.720,00	(184.280,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.815.720,00	(184.280,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.815.720,00	(184.280,00)	98,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	3.874.000,00	(126.000,00)	96,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.874.000,00	(126.000,00)	96,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.874.000,00	(126.000,00)	96,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Sungai Rumbai

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	6.475.000,00	10.750.000,00	4.275.000,00	166,02	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.475.000,00	10.750.000,00	4.275.000,00	166,02	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.475.000,00	10.750.000,00	4.275.000,00	166,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	1.626.463.950,00	1.578.590.161,00	(47.873.789,00)	97,06	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	2.875.000,00	2.835.000,00	(40.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.875.000,00	2.835.000,00	(40.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.875.000,00	2.835.000,00	(40.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.875.000,00	2.835.000,00	(40.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	2.835.000,00	(40.000,00)	98,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.605.143.950,00	1.557.310.161,00	(47.833.789,00)	97,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat*	*1.315.498.000,00*	*1.274.427.682,00*	*(41.070.318,00)*	*96,88*	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.315.498.000,00	1.274.427.682,00	(41.070.318,00)	96,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.315.498.000,00	1.274.427.682,00	(41.070.318,00)	96,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.315.498.000,00	1.274.427.682,00	(41.070.318,00)	96,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.169.150,00	141.076.130,00	(93.020,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	534.000,00	513.000,00	(21.000,00)	96,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	*BELANJA OPERASI*	*534.000,00*	*513.000,00*	*(21.000,00)*	*96,07*	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	534.000,00	513.000,00	(21.000,00)	96,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.390.000,00	7.384.000,00	(6.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.390.000,00	7.384.000,00	(6.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.390.000,00	7.384.000,00	(6.000,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.475.000,00	3.475.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.691.000,00	28.689.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.691.000,00	28.689.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.691.000,00	28.689.000,00	(2.000,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan	4.387.800,00	4.387.500,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.387.800,00	4.387.500,00	(300,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.387.800,00	4.387.500,00	(300,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.691.350,00	96.627.630,00	(63.720,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	96.691.350,00	96.627.630,00	(63.720,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.691.350,00	96.627.630,00	(63.720,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.400.000,00	15.000.000,00	(400.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.400.000,00	15.000.000,00	(400.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	15.400.000,00	15.000.000,00	(400.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.400.000,00	15.000.000,00	(400.000,00)	97,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.576.800,00	111.488.799,00	(5.088.001,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.779.400,00	8.601.399,00	(178.001,00)	97,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.779.400,00	8.601.399,00	(178.001,00)	97,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.779.400,00	8.601.399,00	(178.001,00)	97,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	995.000,00	(5.000,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.197.400,00	100.292.400,00	(4.905.000,00)	95,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	105.197.400,00	100.292.400,00	(4.905.000,00)	95,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.197.400,00	100.292.400,00	(4.905.000,00)	95,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.500.000,00	15.317.550,00	(1.182.450,00)	92,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	8.808.450,00	(191.550,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.808.450,00	(191.550,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.808.450,00	(191.550,00)	97,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000,00	6.509.100,00	(990.900,00)	86,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	6.509.100,00	(990.900,00)	86,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	6.509.100,00	(990.900,00)	86,79	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Sembilan Koto

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.661.455.000,00	1.516.607.037,00	(144.847.963,00)	91,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.510.000,00	5.480.000,00	(30.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.510.000,00	5.480.000,00	(30.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001		*Peningkatan Partisipasi Masyarakat* dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.510.000,00	5.480.000,00	(30.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.510.000,00	5.480.000,00	(30.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	5.480.000,00	(30.000,00)	99,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.160.000,00	2.140.000,00	(20.000,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02		*Koordinasi Penerapan dan Penegakan* Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.160.000,00	2.140.000,00	(20.000,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.160.000,00	2.140.000,00	(20.000,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.160.000,00	2.140.000,00	(20.000,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.160.000,00	2.140.000,00	(20.000,00)	99,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.470.000,00	(30.000,00)	98,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.650.785.000,00	1.506.017.037,00	(144.767.963,00)	91,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	1.211.855.000,00	1.080.569.315,00	(131.285.685,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.211.855.000,00	1.080.569.315,00	(131.285.685,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.211.855.000,00	1.080.569.315,00	(131.285.685,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.211.855.000,00	1.080.569.315,00	(131.285.685,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.080.000,00	159.638.092,00	(3.441.908,00)	97,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.022.500,00	2.020.000,00	(2.500,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.022.500,00	2.020.000,00	(2.500,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.022.500,00	2.020.000,00	(2.500,00)	99,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	12.506.000,00	12.082.000,00	(424.000,00)	96,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.506.000,00	12.082.000,00	(424.000,00)	96,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.506.000,00	12.082.000,00	(424.000,00)	96,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.871.000,00	4.144.000,00	(727.000,00)	85,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.871.000,00	4.144.000,00	(727.000,00)	85,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.871.000,00	4.144.000,00	(727.000,00)	85,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.713.000,00	31.323.000,00	(1.390.000,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	32.713.000,00	31.323.000,00	(1.390.000,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.713.000,00	31.323.000,00	(1.390.000,00)	95,75	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.686.100,00	7.674.062,00	(12.038,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.686.100,00	7.674.062,00	(12.038,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.686.100,00	7.674.062,00	(12.038,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.281.400,00	102.395.030,00	(886.370,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	103.281.400,00	102.395.030,00	(886.370,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.281.400,00	102.395.030,00	(886.370,00)	99,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.281.400,00	102.395.030,00	(886.370,00)	99,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.270.200,00	111.296.000,00	(974.200,00)	99,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.300.000,00	11.500.000,00	(800.000,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	12.300.000,00	11.500.000,00	(800.000,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.300.000,00	11.500.000,00	(800.000,00)	93,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.970.200,00	99.796.000,00	(174.200,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	99.970.200,00	99.796.000,00	(174.200,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.970.200,00	99.796.000,00	(174.200,00)	99,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.329.800,00	132.003.800,00	(8.326.000,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.046.000,00	3.060.000,00	(1.986.000,00)	60,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.046.000,00	3.060.000,00	(1.986.000,00)	60,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.046.000,00	3.060.000,00	(1.986.000,00)	60,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.383.800,00	127.043.800,00	(6.340.000,00)	95,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	133.383.800,00	127.043.800,00	(6.340.000,00)	95,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.383.800,00	127.043.800,00	(6.340.000,00)	95,25	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.250.000,00	22.509.830,00	(740.170,00)	96,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.250.000,00	1.621.950,00	(628.050,00)	72,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.250.000,00	1.621.950,00	(628.050,00)	72,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	1.621.950,00	(628.050,00)	72,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.500.000,00	17.487.880,00	(12.120,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.500.000,00	17.487.880,00	(12.120,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.487.880,00	(12.120,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.400.000,00	(100.000,00)	97,14	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Timpeh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.500.000,00	2.750.000,00	250.000,00	110,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.500.000,00	2.750.000,00	250.000,00	110,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000,00	2.750.000,00	250.000,00	110,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		5	BELANJA DAERAH	1.325.442.750,00	1.194.469.284,00	(130.973.466,00)	90,12	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.029.950,00	26.727.350,00	(302.600,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.029.950,00	26.727.350,00	(302.600,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001		*Peningkatan Partisipasi Masyarakat* dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.029.950,00	26.727.350,00	(302.600,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.029.950,00	26.727.350,00	(302.600,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.029.950,00	26.727.350,00	(302.600,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.959.000,00	42.597.430,00	(361.570,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.959.000,00	42.597.430,00	(361.570,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	42.959.000,00	42.597.430,00	(361.570,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	42.959.000,00	42.597.430,00	(361.570,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.959.000,00	42.597.430,00	(361.570,00)	99,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.255.453.800,00	1.125.144.504,00	(130.309.296,00)	89,62	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02		*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*989.815.150,00*	*946.700.254,00*	*(43.114.896,00)*	*95,64*	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	989.815.150,00	946.700.254,00	(43.114.896,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	989.815.150,00	946.700.254,00	(43.114.896,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	989.815.150,00	946.700.254,00	(43.114.896,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.938.650,00	32.881.450,00	(11.057.200,00)	74,83	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.798.650,00	31.741.450,00	(11.057.200,00)	74,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	42.798.650,00	31.741.450,00	(11.057.200,00)	74,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.798.650,00	31.741.450,00	(11.057.200,00)	74,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.700.000,00	131.469.800,00	(33.230.200,00)	79,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.976.400,00	11.193.000,00	(15.783.400,00)	41,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.976.400,00	11.193.000,00	(15.783.400,00)	41,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.976.400,00	11.193.000,00	(15.783.400,00)	41,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	137.723.600,00	120.276.800,00	(17.446.800,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	137.723.600,00	120.276.800,00	(17.446.800,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.723.600,00	120.276.800,00	(17.446.800,00)	87,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	14.093.000,00	(42.907.000,00)	24,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.000.000,00	14.093.000,00	(42.907.000,00)	24,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	57.000.000,00	14.093.000,00	(42.907.000,00)	24,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	14.093.000,00	(42.907.000,00)	24,72	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Koto Salak

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		5	BELANJA DAERAH	1.221.976.200,00	1.171.730.313,00	(50.245.887,00)	95,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan *kepada Camat*	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	7.680.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang *Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan* Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.209.046.200,00	1.158.800.313,00	(50.245.887,00)	95,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	890.455.000,00	848.497.733,00	(41.957.267,00)	95,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	890.455.000,00	848.497.733,00	(41.957.267,00)	95,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	890.455.000,00	848.497.733,00	(41.957.267,00)	95,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	890.455.000,00	848.497.733,00	(41.957.267,00)	95,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.063.100,00	137.601.880,00	(461.220,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.034.000,00	11.034.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.034.000,00	11.034.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.034.000,00	11.034.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.016.000,00	6.016.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.016.000,00	6.016.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.016.000,00	6.016.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.200.000,00	28.180.000,00	(20.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	28.200.000,00	28.180.000,00	(20.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.180.000,00	(20.000,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.819.100,00	5.595.000,00	(224.100,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.819.100,00	5.595.000,00	(224.100,00)	96,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.819.100,00	5.595.000,00	(224.100,00)	96,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.849.000,00	84.631.880,00	(217.120,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.849.000,00	84.631.880,00	(217.120,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.849.000,00	84.631.880,00	(217.120,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.600.000,00	27.350.000,00	(250.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000,00	27.350.000,00	(250.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	27.600.000,00	27.350.000,00	(250.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000,00	27.350.000,00	(250.000,00)	99,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.958.100,00	128.622.000,00	(6.336.100,00)	95,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.162.500,00	5.371.400,00	(791.100,00)	87,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.162.500,00	5.371.400,00	(791.100,00)	87,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.162.500,00	5.371.400,00	(791.100,00)	87,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.045.600,00	121.500.600,00	(5.545.000,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	127.045.600,00	121.500.600,00	(5.545.000,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.045.600,00	121.500.600,00	(5.545.000,00)	95,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.970.000,00	16.728.700,00	(1.241.300,00)	93,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000,00	8.496.600,00	(503.400,00)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	8.496.600,00	(503.400,00)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.496.600,00	(503.400,00)	94,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.250.000,00	3.732.100,00	(517.900,00)	87,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.250.000,00	3.732.100,00	(517.900,00)	87,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	3.732.100,00	(517.900,00)	87,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.720.000,00	4.500.000,00	(220.000,00)	95,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.720.000,00	4.500.000,00	(220.000,00)	95,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.500.000,00	(220.000,00)	95,34	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Asam Jujuhan

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		5	BELANJA DAERAH	1.160.033.000,00	1.097.530.544,00	(62.502.456,00)	94,61	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.900.000,00	950.000,00	(950.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.900.000,00	950.000,00	(950.000,00)	50,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	0,00	(350.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.550.000,00	950.000,00	(600.000,00)	61,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.550.000,00	950.000,00	(600.000,00)	61,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	950.000,00	(600.000,00)	61,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.180.000,00	9.180.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	0,00	(700.000,00)	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.148.253.000,00	1.087.400.544,00	(60.852.456,00)	94,70	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	789.739.000,00	747.692.816,00	(42.046.184,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	789.739.000,00	747.692.816,00	(42.046.184,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	789.739.000,00	747.692.816,00	(42.046.184,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	789.739.000,00	747.692.816,00	(42.046.184,00)	94,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.947.000,00	167.461.128,00	(9.485.872,00)	94,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.666.100,00	2.665.400,00	(700,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.666.100,00	2.665.400,00	(700,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.666.100,00	2.665.400,00	(700,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.726.000,00	5.726.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.726.000,00	5.726.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.726.000,00	5.726.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.152.000,00	48.438.000,00	(4.714.000,00)	91,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	53.152.000,00	48.438.000,00	(4.714.000,00)	91,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.152.000,00	48.438.000,00	(4.714.000,00)	91,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.948.900,00	6.760.000,00	(1.188.900,00)	85,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.948.900,00	6.760.000,00	(1.188.900,00)	85,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.948.900,00	6.760.000,00	(1.188.900,00)	85,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.554.000,00	89.971.728,00	(3.582.272,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	93.554.000,00	89.971.728,00	(3.582.272,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.554.000,00	89.971.728,00	(3.582.272,00)	96,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.067.000,00	152.330.250,00	(6.736.750,00)	95,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.045.000,00	3.008.250,00	(36.750,00)	98,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.045.000,00	3.008.250,00	(36.750,00)	98,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	3.008.250,00	(36.750,00)	98,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.022.000,00	147.322.000,00	(6.700.000,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	154.022.000,00	147.322.000,00	(6.700.000,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.022.000,00	147.322.000,00	(6.700.000,00)	95,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.000,00	19.916.350,00	(2.583.650,00)	88,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)	90,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)	90,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	15.000.000,00	(1.500.000,00)	90,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	4.916.350,00	(1.083.650,00)	81,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	4.916.350,00	(1.083.650,00)	81,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	4.916.350,00	(1.083.650,00)	81,94	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan KECAMATAN
Organisasi Kecamatan Koto Besar

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		Dasar Hukum
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	100,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	100,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
	1.04.2.10.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		5	BELANJA DAERAH	1.837.788.600,00	1.792.779.213,00	(45.009.387,00)	97,55	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.275.000,00	9.275.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	7.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.815.213.600,00	1.770.204.213,00	(45.009.387,00)	97,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat	1.512.660.000,00	1.469.234.763,00	(43.425.237,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1.512.660.000,00	1.469.234.763,00	(43.425.237,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.512.660.000,00	1.469.234.763,00	(43.425.237,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.512.660.000,00	1.469.234.763,00	(43.425.237,00)	97,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat	144.976.800,00	144.976.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan	14.442.600,00	14.442.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.442.600,00	14.442.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.442.600,00	14.442.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	6.310.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.312.000,00	24.312.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.312.000,00	24.312.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.312.000,00	24.312.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.294.100,00	5.294.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.294.100,00	5.294.100,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.294.100,00	5.294.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.578.100,00	91.578.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	91.578.100,00	91.578.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.578.100,00	91.578.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.826.800,00	135.530.050,00	(1.296.750,00)	99,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.158.000,00	8.131.250,00	(26.750,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.158.000,00	8.131.250,00	(26.750,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.158.000,00	8.131.250,00	(26.750,00)	99,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.168.800,00	125.898.800,00	(1.270.000,00)	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	127.168.800,00	125.898.800,00	(1.270.000,00)	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.168.800,00	125.898.800,00	(1.270.000,00)	99,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.250.000,00	15.962.600,00	(287.400,00)	98,23	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000,00	11.232.600,00	(267.400,00)	97,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.500.000,00	11.232.600,00	(267.400,00)	97,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.232.600,00	(267.400,00)	97,67	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000,00	730.000,00	(20.000,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	750.000,00	730.000,00	(20.000,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	730.000,00	(20.000,00)	97,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Padang Laweh

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		5	BELANJA DAERAH	1.187.281.800,00	1.139.101.310,00	(48.180.490,00)	95,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.945.000,00	9.945.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.172.386.800,00	1.124.206.310,00	(48.180.490,00)	95,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	846.427.000,00	805.963.120,00	(40.463.880,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	846.427.000,00	805.963.120,00	(40.463.880,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	846.427.000,00	805.963.120,00	(40.463.880,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	846.427.000,00	805.963.120,00	(40.463.880,00)	95,22	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.657.400,00	149.347.990,00	(309.410,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.906.800,00	1.906.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.906.800,00	1.906.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.906.800,00	1.906.800,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.256.500,00	13.256.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.256.500,00	13.256.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.256.500,00	13.256.500,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.251.000,00	7.240.000,00	(11.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.251.000,00	7.240.000,00	(11.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.251.000,00	7.240.000,00	(11.000,00)	99,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.004.400,00	8.004.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.004.400,00	8.004.400,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.004.400,00	8.004.400,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.588.700,00	93.290.290,00	(298.410,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	93.588.700,00	93.290.290,00	(298.410,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.588.700,00	93.290.290,00	(298.410,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.800.000,00	43.660.000,00	(2.140.000,00)	95,33	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	23.160.000,00	(1.840.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	23.160.000,00	(1.840.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	23.160.000,00	(1.840.000,00)	92,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.800.000,00	20.500.000,00	(300.000,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	20.800.000,00	20.500.000,00	(300.000,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.800.000,00	20.500.000,00	(300.000,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.002.400,00	105.086.650,00	(4.915.750,00)	95,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.595.000,00	1.589.250,00	(5.750,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.595.000,00	1.589.250,00	(5.750,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.595.000,00	1.589.250,00	(5.750,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.407.400,00	101.497.400,00	(4.910.000,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	106.407.400,00	101.497.400,00	(4.910.000,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.407.400,00	101.497.400,00	(4.910.000,00)	95,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.500.000,00	20.148.550,00	(351.450,00)	98,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000,00	13.333.600,00	(166.400,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.333.600,00	(166.400,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.333.600,00	(166.400,00)	98,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	5.814.950,00	(185.050,00)	96,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.814.950,00	(185.050,00)	96,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.814.950,00	(185.050,00)	96,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : Kecamatan Tiumang

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		5	BELANJA DAERAH	1.439.253.800,00	1.388.346.439,00	(50.907.361,00)	96,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.010.000,00	7.010.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.310.000,00	4.310.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.690.000,00	11.690.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.414.553.800,00	1.363.646.439,00	(50.907.361,00)	96,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.015.854.000,00	975.467.766,00	(40.386.234,00)	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.015.854.000,00	975.467.766,00	(40.386.234,00)	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.015.854.000,00	975.467.766,00	(40.386.234,00)	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.015.854.000,00	975.467.766,00	(40.386.234,00)	96,02	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.989.700,00	158.784.700,00	(205.000,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.214.600,00	2.214.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.214.600,00	2.214.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.214.600,00	2.214.600,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.509.000,00	17.509.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.509.000,00	17.509.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.509.000,00	17.509.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.963.000,00	6.963.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	6.963.000,00	6.963.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.963.000,00	6.963.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.530.000,00	37.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.530.000,00	37.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.530.000,00	37.530.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.885.100,00	9.885.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.885.100,00	9.885.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.885.100,00	9.885.100,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.888.000,00	84.683.000,00	(205.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	84.888.000,00	84.683.000,00	(205.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.888.000,00	84.683.000,00	(205.000,00)	99,76	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.600.000,00	27.500.000,00	(100.000,00)	99,64	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.600.000,00	27.500.000,00	(100.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	27.600.000,00	27.500.000,00	(100.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.600.000,00	27.500.000,00	(100.000,00)	99,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.700.100,00	181.420.373,00	(9.279.727,00)	95,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.499.900,00	5.920.173,00	(2.579.727,00)	69,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.499.900,00	5.920.173,00	(2.579.727,00)	69,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.499.900,00	5.920.173,00	(2.579.727,00)	69,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.200.200,00	173.500.200,00	(6.700.000,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	180.200.200,00	173.500.200,00	(6.700.000,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.200.200,00	173.500.200,00	(6.700.000,00)	96,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.410.000,00	20.473.600,00	(936.400,00)	95,63	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000,00	10.833.600,00	(166.400,00)	98,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.000.000,00	10.833.600,00	(166.400,00)	98,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	10.833.600,00	(166.400,00)	98,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000,00	4.000.000,00	(750.000,00)	84,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.750.000,00	4.000.000,00	(750.000,00)	84,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.000.000,00	(750.000,00)	84,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.660.000,00	5.640.000,00	(20.000,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.660.000,00	5.640.000,00	(20.000,00)	99,65	
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	5.640.000,00	(20.000,00)	99,65	

PEMERINTAH KAB. DHARMASRAYA

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	25.830.743.200,00	25.671.779.522,00	(158.963.678,00)	99,38	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.118.334.500,00	1.114.907.441,00	(3.427.059,00)	99,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.118.334.500,00	1.114.907.441,00	(3.427.059,00)	99,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.380.000,00	19.193.600,00	(2.186.400,00)	89,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.380.000,00	19.193.600,00	(2.186.400,00)	89,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.380.000,00	19.193.600,00	(2.186.400,00)	89,77	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16.945.500,00	16.724.300,00	(221.200,00)	98,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.945.500,00	16.724.300,00	(221.200,00)	98,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.945.500,00	16.724.300,00	(221.200,00)	98,69	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008		Pembentukan Paskibraka	1.080.009.000,00	1.078.989.541,00	(1.019.459,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.080.009.000,00	1.078.989.541,00	(1.019.459,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.009.000,00	1.078.989.541,00	(1.019.459,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.739.662.200,00	22.675.718.507,00	(63.943.693,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	22.739.662.200,00	22.675.718.507,00	(63.943.693,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.705.857.500,00	22.641.933.007,00	(63.924.493,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	22.705.857.500,00	22.641.933.007,00	(63.924.493,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.142.500,00	55.106.459,00	(36.041,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	22.650.715.000,00	22.586.826.548,00	(63.888.452,00)	99,72	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33.804.700,00	33.785.500,00	(19.200,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.804.700,00	33.785.500,00	(19.200,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.804.700,00	33.785.500,00	(19.200,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	45.412.500,00	44.282.950,00	(1.129.550,00)	97,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45.412.500,00	44.282.950,00	(1.129.550,00)	97,51	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.991.000,00	14.012.050,00	(978.950,00)	93,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.991.000,00	14.012.050,00	(978.950,00)	93,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.991.000,00	14.012.050,00	(978.950,00)	93,47	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.421.500,00	30.270.900,00	(150.600,00)	99,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.421.500,00	30.270.900,00	(150.600,00)	99,50	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.421.500,00	30.270.900,00	(150.600,00)	99,50	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	500.427.550,00	482.247.771,00	(18.179.779,00)	96,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	500.427.550,00	482.247.771,00	(18.179.779,00)	96,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500.427.550,00	482.247.771,00	(18.179.779,00)	96,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	500.427.550,00	482.247.771,00	(18.179.779,00)	96,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.427.550,00	482.247.771,00	(18.179.779,00)	96,37	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.426.906.450,00	1.354.622.853,00	(72.283.597,00)	94,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.000.504.000,00	941.277.179,00	(59.226.821,00)	94,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.504.000,00	941.277.179,00	(59.226.821,00)	94,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.504.000,00	941.277.179,00	(59.226.821,00)	94,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.504.000,00	941.277.179,00	(59.226.821,00)	94,08	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.361.800,00	143.208.050,00	(153.750,00)	99,89	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.000,00	1.970.900,00	(20.100,00)	98,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.991.000,00	1.970.900,00	(20.100,00)	98,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.991.000,00	1.970.900,00	(20.100,00)	98,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.859.000,00	13.859.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.859.000,00	13.859.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.859.000,00	13.859.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.908.000,00	5.908.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.908.000,00	5.908.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.908.000,00	5.908.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.175.000,00	18.175.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.095.800,00	9.095.600,00	(200,00)	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.095.800,00	9.095.600,00	(200,00)	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.095.800,00	9.095.600,00	(200,00)	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.333.000,00	94.199.550,00	(133.450,00)	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	94.333.000,00	94.199.550,00	(133.450,00)	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.333.000,00	94.199.550,00	(133.450,00)	99,86	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.500.000,00	49.350.000,00	(2.150.000,00)	95,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel	22.300.000,00	22.000.000,00	(300.000,00)	98,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	22.300.000,00	22.000.000,00	(300.000,00)	98,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.300.000,00	22.000.000,00	(300.000,00)	98,65	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.200.000,00	27.350.000,00	(1.850.000,00)	93,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	29.200.000,00	27.350.000,00	(1.850.000,00)	93,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.200.000,00	27.350.000,00	(1.850.000,00)	93,66	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.040.650,00	173.733.074,00	(10.307.576,00)	94,40	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.450,00	15.067.874,00	(2.932.576,00)	83,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.450,00	15.067.874,00	(2.932.576,00)	83,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.450,00	15.067.874,00	(2.932.576,00)	83,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.820.200,00	151.445.200,00	(7.375.000,00)	95,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	158.820.200,00	151.445.200,00	(7.375.000,00)	95,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.820.200,00	151.445.200,00	(7.375.000,00)	95,36	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000,00	47.054.550,00	(445.450,00)	99,06	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.750.000,00	1.344.550,00	(405.450,00)	76,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.344.550,00	(405.450,00)	76,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.344.550,00	(405.450,00)	76,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.750.000,00	45.710.000,00	(40.000,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	45.750.000,00	45.710.000,00	(40.000,00)	99,91	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	45.710.000,00	(40.000,00)	99,91	

LAMPIRAN I.4

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.

LAMPIRAN I.4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TANGGUNG ANGGARAN 2024

KAB. DHARMASRAYA

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	577.362.688.782	524.181.400.728,74	105.108.836.619	95.121.782.806,16	0	0,00	0	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	292.219.135.236	254.186.289.291,00	27.882.470.154	27.628.454.125,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan	292.219.135.236	254.186.289.291,00	27.882.470.154	27.628.454.125,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	248.051.752.036	239.912.442.867,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	245.610.916.486	238.042.669.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	245.610.916.486	238.042.669.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.714.950	353.064.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.997.000	9.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.579.000	83.579.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	14.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.719.000	43.719.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.451.200	69.866.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.968.750	131.903.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.978.340.600	1.413.438.554,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144.735.000	133.363.754,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.605.600	1.271.074.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.780.000	103.270.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.500.000	70.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.280.000	16.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	43.684.039.850	13.802.476.218,00	27.882.470.154	27.628.454.125,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.460.678.149	5.446.848.053,00	19.269.796.690	19.051.802.936,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0,00	432.000.000	431.400.700,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	794.811.391	787.503.899,00	2.775.721.970	2.767.190.462,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	160.900.000	160.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	405.600.000	390.879.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.185.800.000	1.104.706.900,00	2.142.214.000	2.106.780.200,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2.550.142.000	2.224.889.328,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	150.000.000	148.455.000,00	25.000.000	24.940.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	33.919.650	33.888.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.229.500	16.445.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	603.325.000	600.354.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.482.721.507	0,00	5.270.360.780	5.270.360.780,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	0,00	1.305.600.000	1.264.673.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	7.437.600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	410.927.500	356.917.865,00	3.111.876.250	3.072.873.794,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	200.000.000	199.698.221,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.000.000	9.851.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	201.364.000	153.834.585,00	3.440.523.690	3.362.256.779,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	11.161.036.001	10.963.006.831,00	7.352.148.964	7.336.381.954,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0	0,00	982.521.000	981.528.361,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	746.994.000	744.893.000,00	817.481.680	807.735.109,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	246.726.000	218.483.247,00	2.216.099.700	2.211.346.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	207.184.000	207.123.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	284.600.000	284.519.000,00	551.400.000	551.320.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.648.500.000	1.523.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	129.176.000	126.824.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	115.760.500	114.985.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	17.136.500	16.388.488,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	201.612.900	199.740.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.730.902.101	7.701.195.896,00	2.316.662.584	2.316.662.584,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.104.000	2.220.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	11.524.000	11.524.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	10.000.000	8.662.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0,00	260.800.000	260.666.900,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.999.665.050	5.748.171.230,00	647.685.800	638.560.261,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	658.059.000	618.822.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0	0,00	89.618.400	89.235.166,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	0	0,00	48.600.000	48.323.980,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	494.863.400	400.534.831,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	250.000.000	247.060.000,00	300.000.000	295.578.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20.995.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	28.127.000	28.104.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	178.249.000	178.099.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	99.971.650	99.954.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.269.400.000	4.175.596.216,00	12.200.000	8.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0	0,00	197.267.400	196.823.115,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.062.660.650	967.170.000,00	612.838.700	601.708.974,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	18.520.000	17.895.000,00	467.682.500	464.832.500,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25.508.000	21.796.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	112.599.150	112.466.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	883.194.500	792.285.000,00	25.665.000	17.815.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	22.839.000	22.727.000,00	119.491.200	119.061.474,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	428.756.850	423.017.397,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	213.756.900	208.211.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	211.656.900	208.211.253,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	214.999.950	214.806.144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	214.999.950	214.806.144,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	54.586.500	48.352.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	54.586.500	48.352.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	19.586.500	13.352.809,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.0.00.0.00.01.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35.000.000	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	232.600.218.498	220.368.754.393	27.382.174.488	22.797.380.643	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kesehatan	106.356.386.254	104.775.182.293	12.637.435.376	11.852.620.997	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	68.758.402.996	68.195.487.059,00	21.702.598	20.979.200,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	65.410.581.800	64.899.850.184,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.379.767.000	64.871.520.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.326.800	6.209.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.488.000	22.119.856,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.838.500	32.176.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6.503.500	5.062.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.335.000	27.114.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	269.061.100	262.044.048,00	11.875.000	11.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.616.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.080.000	41.665.000,00	10.675.000	10.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.995.000	9.943.000,00	1.200.000	700.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	14.738.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.900	19.849.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.986.200	171.232.148,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.923.421.596	2.884.065.077,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.879.996	82.860.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.440.000	10.386.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.817.101.600	2.786.818.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.500.000	117.350.800,00	9.827.598	9.679.200,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.700.000	16.035.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.800.000	101.314.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	9.827.598	9.679.200,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	35.345.015.358	34.527.445.133,00	12.615.732.778	11.831.641.797,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	7.249.384.518	7.001.874.606,00	12.368.559.478	11.589.180.897,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	22.246.000	0,00	538.320.000	500.090.435,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	333.715.358	332.339.493,00	11.540.239.478	10.814.590.462,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	290.000.000	274.500.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	219.080.900	189.126.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.560.003.660	6.369.274.080,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	114.338.600	111.134.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.715.660.490	27.183.737.748,00	247.173.300	242.460.900,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.733.000	204.220.342,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	187.520.800	113.336.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	312.183.850	201.951.198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	245.416.000	231.256.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	50.000.000	44.657.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	78.001.000	75.639.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	33.401.000	29.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	228.197.140	220.726.129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	135.125.000	131.359.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	50.000.000	48.390.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	348.509.900	343.921.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	50.000.000	47.473.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	41.000.000	34.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	141.000.000	135.126.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	562.585.000	560.774.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	250.000.000	247.405.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97.010.000	96.366.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	59.400.000	57.994.554,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	174.490.000	174.028.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.440.170.400	23.170.285.858,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	45.830.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	617.243.500	577.699.366,00	42.025.000	42.025.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	161.051.700	159.719.882,00	205.148.300	200.435.900,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	45.000.000	43.206.020,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak *Diharapkan (Kejadian Bruta*n Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	27.060.000	26.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	110.132.000	108.975.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	54.430.200	51.843.405,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	131.012.250	115.101.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	131.012.250	115.101.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	248.958.100	226.731.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	248.958.100	226.731.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.518.846.900	1.450.689.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	461.937.400	438.005.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	461.937.400	438.005.631,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.909.500	1.012.683.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.056.909.500	1.012.683.989,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	372.331.000	363.319.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	57.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	57.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	308.601.000	306.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	308.601.000	306.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	361.790.000	238.241.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.270.000	149.808.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	251.270.000	149.808.481,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	110.520.000	88.433.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	110.520.000	88.433.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai	7.556.778.798	6.754.913.545	4.059.716.000	3.554.254.502	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.806.778.798	6.050.744.299,00	399.716.000	148.318.170,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	6.806.778.798	6.050.744.299,00	399.716.000	148.318.170,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.806.778.798	6.050.744.299,00	399.716.000	148.318.170,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	750.000.000	704.169.246,00	3.660.000.000	3.405.936.332,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	704.169.246,00	3.660.000.000	3.405.936.332,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	750.000.000	704.169.246,00	3.660.000.000	3.405.936.332,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002		Puskesmas Sungai Rumbai	2.519.033.840	2.477.394.211	40.350.000	40.161.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.467.591.840	1.438.057.148,00	40.350.000	40.161.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.467.591.840	1.438.057.148,00	40.350.000	40.161.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.467.591.840	1.438.057.148,00	40.350.000	40.161.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.051.442.000	1.039.337.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.051.442.000	1.039.337.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0002	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.051.442.000	1.039.337.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003		Puskesmas Koto Besar	1.886.941.741	1.626.362.514	65.000.000	31.405.998	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.115.627.741	957.899.928,99	65.000.000	31.405.998,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.115.627.741	957.899.928,99	65.000.000	31.405.998,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.115.627.741	957.899.928,99	65.000.000	31.405.998,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	771.314.000	668.462.586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	771.314.000	668.462.586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0003	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	771.314.000	668.462.586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004		Puskesmas Sungai Limau	1.446.432.348	1.305.791.753	26.000.000	1.850.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	487.226.348	468.550.227,00	26.000.000	1.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	487.226.348	468.550.227,00	26.000.000	1.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	487.226.348	468.550.227,00	26.000.000	1.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	959.206.000	837.241.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	959.206.000	837.241.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0004	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	959.206.000	837.241.526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005		Puskesmas Koto Baru	3.117.959.788	2.780.604.942	59.000.000	43.914.930	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.007.194.788	1.791.118.400,00	59.000.000	43.914.930,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.007.194.788	1.791.118.400,00	59.000.000	43.914.930,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.007.194.788	1.791.118.400,00	59.000.000	43.914.930,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.110.765.000	989.486.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.110.765.000	989.486.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0005	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.110.765.000	989.486.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006		Puskesmas Tlumang	1.652.278.551	1.576.045.154	22.584.682	18.819.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	747.782.551	736.924.215,00	22.584.682	18.819.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	747.782.551	736.924.215,00	22.584.682	18.819.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	747.782.551	736.924.215,00	22.584.682	18.819.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	904.496.000	839.120.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	904.496.000	839.120.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0006	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	904.496.000	839.120.939,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007		Puskesmas Padang Laweh	1.333.185.024	1.288.951.925	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	632.723.024	615.180.982,00	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	632.723.024	615.180.982,00	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	632.723.024	615.180.982,00	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	700.462.000	673.770.943,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.462.000	673.770.943,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0007	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	700.462.000	673.770.943,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008		Puskesmas Sitiung I	2.820.247.922	2.558.214.767	100.000.000	86.674.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.835.222.922	1.720.377.023,00	100.000.000	86.674.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.835.222.922	1.720.377.023,00	100.000.000	86.674.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.835.222.922	1.720.377.023,00	100.000.000	86.674.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	985.025.000	837.837.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	985.025.000	837.837.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0008	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	985.025.000	837.837.744,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009		Puskesmas Timpeh	1.932.575.240	1.833.486.424	44.000.000	41.413.040	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.023.608.240	935.770.024,75	44.000.000	41.413.040,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.023.608.240	935.770.024,75	44.000.000	41.413.040,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.023.608.240	935.770.024,75	44.000.000	41.413.040,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	908.967.000	897.716.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	908.967.000	897.716.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0009	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	908.967.000	897.716.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010		Puskesmas Gunung Medan	1.506.572.867	1.448.283.399	17.900.000	17.830.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	784.319.867	765.560.344,00	17.900.000	17.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	784.319.867	765.560.344,00	17.900.000	17.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	784.319.867	765.560.344,00	17.900.000	17.830.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	722.253.000	682.723.055,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	722.253.000	682.723.055,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0010	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	722.253.000	682.723.055,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011		Puskesmas Sitiung II	1.583.708.645	1.543.918.109	94.200.000	94.183.500	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	857.963.445	857.897.687,00	94.200.000	94.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	857.963.445	857.897.687,00	94.200.000	94.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	857.963.445	857.897.687,00	94.200.000	94.183.500,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	725.745.200	686.020.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	725.745.200	686.020.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0011	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	725.745.200	686.020.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012		Puskesmas Beringin Sakti	1.215.093.570	1.087.756.528	8.000.000	4.884.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	546.142.570	529.967.637,00	8.000.000	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	546.142.570	529.967.637,00	8.000.000	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	546.142.570	529.967.637,00	8.000.000	4.884.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	668.951.000	557.788.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	668.951.000	557.788.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0012	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	668.951.000	557.788.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013		Puskesmas Silago	1.717.056.545	1.678.982.743	31.000.000	28.265.499	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN *PEMERINTAHAN DAERAH* KABUPATEN/KOTA	891.254.545	881.486.596,00	31.000.000	28.265.499,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	891.254.545	881.486.596,00	31.000.000	28.265.499,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	891.254.545	881.486.596,00	31.000.000	28.265.499,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	825.802.000	797.496.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan *Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	825.802.000	797.496.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0013	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	825.802.000	797.496.147,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014		Puskesmas Sungai Dareh	2.928.175.232	2.724.432.591	153.500.000	126.703.950	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.875.133.232	1.705.381.632,00	153.500.000	126.703.950,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.875.133.232	1.705.381.632,00	153.500.000	126.703.950,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.875.133.232	1.705.381.632,00	153.500.000	126.703.950,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.053.042.000	1.019.050.959,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.053.042.000	1.019.050.959,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0014	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.053.042.000	1.019.050.959,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015		Puskesmas Sialang	1.548.693.904	1.436.147.453	40.000.000	38.614.000	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN *PEMERINTAHAN DAERAH* KABUPATEN/KOTA	845.385.904	766.641.705,00	40.000.000	38.614.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	845.385.904	766.641.705,00	40.000.000	38.614.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	845.385.904	766.641.705,00	40.000.000	38.614.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	703.308.000	669.505.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	703.308.000	669.505.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0015	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	703.308.000	669.505.748,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017		Laboratorium Kesehatan Daerah	575.964.248	482.475.423	0	0	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	273.572.248	224.226.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	273.572.248	224.226.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	273.572.248	224.226.494,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02	*PROGRAM PEMENUHAN* UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	*302.392.000*	*258.248.929,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	302.392.000	258.248.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0017	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	302.392.000	258.248.929,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000		Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh	90.903.133.981	82.989.810.618	9.975.488.430	6.807.786.227	0	0	0	0
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.903.133.981	82.989.810.618,00	6.859.393.548	3.691.691.947,16	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.184.858.000	28.837.618.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.184.858.000	28.837.618.838,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.718.275.981	54.152.191.780,00	6.859.393.548	3.691.691.947,16	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.718.275.981	54.152.191.780,00	6.859.393.548	3.691.691.947,16	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	0,00	3.116.094.882	3.116.094.280,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	3.116.094.882	3.116.094.280,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02	1.02.0.00.0.00.02.0000	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	0	0,00	3.116.094.882	3.116.094.280,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.477.216.045	24.189.820.105	49.766.499.977	44.618.506.038	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	26.477.216.045	24.189.820.105	49.766.499.977	44.618.506.038	0	0	0	0
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.355.562.500	7.589.315.179,00	238.770.000	237.867.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.190.000	2.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.190.000	2.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.506.007.000	4.386.392.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.007.000	4.386.392.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.037.800	220.835.029,00	194.600.000	193.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.995.800	4.995.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.669.000	39.610.000,00	194.600.000	193.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.318.000	15.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.050.000	7.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.950.000	25.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.055.000	127.958.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	44.170.000	44.017.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	44.170.000	44.017.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.035.400.500	2.578.134.102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.100.000	5.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	755.284.900	669.066.002,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.275.015.600	1.903.968.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.927.200	401.764.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.650.000	122.785.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	292.357.200	268.458.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.920.000	10.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	0,00	3.821.042.000	3.788.502.838,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	2.079.942.000	2.067.421.140,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	0	0,00	2.079.942.000	2.067.421.140,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	1.741.100.000	1.721.081.698,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0,00	519.350.000	509.452.214,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0,00	1.221.750.000	1.211.629.484,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	719.827.750	613.729.309,00	84.400.000	79.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	719.827.750	613.729.309,00	84.400.000	79.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22.528.000	2.772.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.927.000	3.091.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	326.458.700	286.620.599,00	84.400.000	79.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	365.914.050	321.245.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	44.113.500	7.289.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	44.113.500	7.289.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	44.113.500	7.289.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	628.055.354	307.390.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	628.055.354	307.390.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	4.927.000	3.441.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan *Lumpur Tinja*	159.842.600	95.872.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	37.470.750	26.537.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	4.927.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	79.601.654	70.366.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	336.359.850	111.171.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	4.926.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.826.282.900	2.331.244.199,00	5.479.697.525	415.790.200,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2.826.282.900	2.331.244.199,00	5.479.697.525	415.790.200,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Hurul Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	123.840.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsusian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.250.888.100	2.069.349.556,00	5.479.697.525	415.790.200,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150.207.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	301.347.800	261.894.643,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	13.214.421.041	12.779.275.630,00	40.142.590.452	40.096.496.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	13.214.421.041	12.779.275.630,00	40.142.590.452	40.096.496.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	8.774.034.091	8.536.889.125,00	37.942.810.452	37.896.878.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	1.100.375.450	942.582.605,00	2.200.580.000	2.199.618.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	1.800.011.500	1.799.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.540.000.000	1.499.840.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	70.250.000	44.359.421,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	*1.03.0.00.0.00.01.0000*	*1.03.11.2.01*	*Penyelenggaraan Pelatihan* Tenaga Terampil Konstruksi	*70.250.000*	*44.359.421,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	70.250.000	44.359.421,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	618.703.000	517.716.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	428.800.000	330.995.709,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	428.800.000	330.995.709,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	189.903.000	186.220.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	189.903.000	186.220.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.570.662.987	10.379.119.970	3.330.000	3.330.000	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.570.662.987	10.379.119.970	3.330.000	3.330.000	0	0	0	0
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.458.282.750	2.333.133.624,00	3.330.000	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.743.168.000	1.679.552.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.743.168.000	1.679.552.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.581.950	207.661.229,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi *Listrik/Penerangan Bangunan* Kantor	5.000.000	4.965.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	29.862.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.100.000	3.844.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.750.000	15.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.000.000	16.955.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.731.950	136.704.429,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	3.330.000	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	3.330.000	3.330.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.032.800	386.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.032.800	382.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.500.000	59.395.365,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.040.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	38.379.915,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.975.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	211.204.550	200.197.088,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.971.000	2.213.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2.971.000	2.213.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.264.500	1.045.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	1.264.500	1.045.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	53.117.250	52.850.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	53.117.250	52.850.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	884.500	580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	884.500	580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	152.967.300	143.506.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	152.967.300	143.506.588,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	35.265.000	33.923.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	35.265.000	33.923.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	7.613.500	6.366.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	27.651.500	27.557.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	517.774.600	517.719.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	517.774.600	517.719.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	517.774.600	517.719.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.348.136.087	7.294.145.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	7.348.136.087	7.294.145.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.01.0000	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.348.136.087	7.294.145.753,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.996.151.214	10.638.595.369	42.462.000	42.462.000	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.173.389.214	7.958.612.893	0	0	0	0	0	0
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.331.857.114	7.125.707.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.242.000	3.126.633.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.242.000	3.126.633.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.456.250	180.288.794,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.061.000	8.058.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.443.000	27.389.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.498.000	7.484.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.400.000	14.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.054.250	107.957.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.788.238.864	3.663.625.376,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.034.064	35.059.376,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.748.204.800	3.624.566.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.920.000	155.159.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	16.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan *Perizinan Kendaraan Dinas* Operasional atau Lapangan	136.480.000	133.394.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000	4.815.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	526.054.050	517.668.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	416.596.400	408.473.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	44.996.400	44.876.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	363.600.000	363.596.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar *dalam rangka Dampak* Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	8.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	96.502.150	96.322.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	24.233.500	24.131.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	72.268.650	72.191.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	12.955.500	12.873.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	12.955.500	12.873.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	315.478.050	315.237.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.394.800	270.387.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.394.800	270.387.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	7.957.000	7.852.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	7.957.000	7.852.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	6.426.250	6.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	6.426.250	6.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	25.200.000	25.168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.200.000	25.168.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.01.0000	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	5.500.000	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.822.762.000	2.679.982.476	42.462.000	42.462.000	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.182.416.500	2.060.922.394,00	42.462.000	42.462.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.079.393.000	1.029.932.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.079.393.000	1.029.932.045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295.124.900	284.441.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.012.700	5.012.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.910.000	64.869.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.436.000	47.914.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.326.200	14.326.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.440.000	152.318.649,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.509.600	1.509.600,00	42.462.000	42.462.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	1.509.600	1.509.600,00	3.996.000	3.996.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	38.466.000	38.466.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.469.000	520.014.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.001.000	22.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	555.468.000	497.019.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.920.000	225.025.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.920.000	150.025.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	640.345.500	619.060.082,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	5.120.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	5.120.000	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	464.964.800	457.983.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	42.271.000	40.795.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	6.111.900	5.999.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	399.970.000	398.145.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.111.900	2.542.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	134.856.700	122.601.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	24.000.000	17.699.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.048.700	1.501.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	41.008.000	39.952.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	61.800.000	61.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	2.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.500.000	1.647.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	35.404.000	34.875.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.02.0000	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	35.404.000	34.875.278,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.499.304.802	4.418.821.600	31.900.000	31.650.000	0	0	0	0
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.499.304.802	4.418.821.600	31.900.000	31.650.000	0	0	0	0
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.848.006.450	3.771.617.381,00	31.900.000	31.650.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.571.597.000	2.514.028.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.571.597.000	2.514.028.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.777.100	311.286.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.871.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.654.000	59.591.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.500.000	10.499.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.712.000	30.671.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	187.911.100	187.653.554,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	31.900.000	31.650.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	31.900.000	31.650.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.002.350	757.012.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.691.550	69.561.194,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	699.310.800	683.451.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.630.000	189.289.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.433.586,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.750.000	160.555.693,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.380.000	12.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	75.984.079	75.931.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	75.984.079	75.931.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.984.150	60.949.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	14.999.929	14.981.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	400.403.823	397.283.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	341.943.823	338.863.398,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	13.105.000	12.793.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	7.746.873	7.681.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	9.488.750	9.237.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.400.000	7.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	93.450.000	93.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	76.380.500	76.370.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.039.750	2.942.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.156.500	99.633.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	4.513.000	4.085.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	2.745.050	2.334.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.130.900	4.862.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	18.787.500	18.356.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	58.460.000	58.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	47.200.000	47.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan	11.260.000	11.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	97.362.000	97.042.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	97.362.000	97.042.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.999.670	44.986.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	27.363.350	27.196.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	24.998.980	24.859.065,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	77.548.450	76.947.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	77.548.450	76.947.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	49.935.000	49.935.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	8.804.950	8.669.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	8.153.500	8.053.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.337.500	6.243.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.2.08.2.14.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	4.317.500	4.046.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	69.390.664.137	66.792.675.168	1.855.577.134	1.809.522.018	0	0	0	0
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.118.954.300	932.925.873	0	0	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1.118.954.300	932.925.873	0	0	0	0	0	0
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	23.957.600	23.220.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	23.957.600	23.220.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	23.957.600	23.220.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	51.462.150	50.304.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	51.462.150	50.304.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	51.462.150	50.304.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	95.433.350	93.579.959,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	46.596.350	46.490.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	46.596.350	46.490.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	48.837.000	47.089.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	48.837.000	47.089.609,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	948.101.200	765.821.514,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	18.870.000	18.448.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	18.870.000	18.448.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	929.231.200	747.373.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.851.650	34.924.303,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	26.515.550	22.478.355,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	3.32.2.07.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	864.864.000	689.970.456,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.161.954.350	1.061.503.154	76.410.750	60.544.088	0	0	0	0
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.161.954.350	1.061.503.154	76.410.750	60.544.088	0	0	0	0
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	534.515.650	528.951.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	534.515.650	528.951.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9.525.000	9.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	524.990.650	519.431.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	124.505.000	92.605.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000	26.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.600.000	26.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	97.905.000	66.355.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.905.000	66.355.251,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	34.692.700	34.303.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.692.700	34.303.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34.692.700	34.303.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.766.000	53.275.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.766.000	53.275.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	55.766.000	53.275.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	412.475.000	352.367.062,00	76.410.750	60.544.088,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.400.000	103.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	103.400.000	103.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.675.000	185.341.116,00	76.410.750	60.544.088,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	220.675.000	185.341.116,00	76.410.750	60.544.088,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	88.400.000	64.005.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000	64.005.946,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.901.113.200	3.796.850.917	57.200.000	53.750.000	0	0	0	0
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	3.901.113.200	3.796.850.917	57.200.000	53.750.000	0	0	0	0
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN *PEMERINTAHAN DAERAH* KABUPATEN/KOTA	3.495.985.850	3.398.564.689,00	57.200.000	53.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.471.055.000	2.421.064.129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.471.055.000	2.421.064.129,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.168.500	224.740.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.003.000	3.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.067.000	35.041.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000	6.488.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.520.000	10.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.009.000	12.839.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.069.500	155.863.790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	57.200.000	53.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	57.200.000	53.750.000,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	722.822.350	677.512.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.500.550	47.393.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.321.800	626.119.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.940.000	75.247.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.000.000	20.977.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	49.330.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.940.000	4.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	196.880.250	193.549.778,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	63.876.150	62.862.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	15.041.500	14.730.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	48.834.650	48.132.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan *Cadangan Pangan* Kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	55.000.000	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	78.004.100	75.686.928,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	15.002.750	12.957.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	63.001.350	62.729.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	187.059.300	185.444.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	187.059.300	185.444.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	187.059.300	185.444.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	21.187.800	19.292.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	21.187.800	19.292.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.25.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	21.187.800	19.292.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	185.259.000	179.179.652	0	0	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	185.259.000	179.179.652	0	0	0	0	0	0
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	68.000.000	67.559.552,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	68.000.000	67.559.552,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	68.000.000	67.559.552,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	117.259.000	111.620.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	117.259.000	111.620.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.01.0000	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	117.259.000	111.620.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG *LINGKUNGAN HIDUP*	6.247.950.215	6.060.265.476	335.808.060	321.466.682	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		Dinas Lingkungan Hidup	6.247.950.215	6.060.265.476	335.808.060	321.466.682	0	0	0	0
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.997.759.100	3.894.919.010,00	39.700.000	38.128.500,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.521.000	2.309.432.235,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.367.521.000	2.309.432.235,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.358.800	319.071.709,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.880.400	30.499.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.003.000	44.768.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.001.000	8.961.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.750.000	29.196.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.823.700	16.821.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.900.700	188.824.889,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	39.700.000	38.128.500,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	39.700.000	38.128.500,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.231.065.300	1.189.961.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.477.300	46.635.366,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.160.000	8.160.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.171.428.000	1.131.166.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.814.000	76.453.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000	16.903.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.750.000	39.561.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.064.000	19.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	40.115.000	40.047.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	40.115.000	40.047.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	40.115.000	40.047.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	215.090.015	211.236.134,00	19.900.000	18.931.932,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	166.497.015	163.369.784,00	15.400.000	15.040.500,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	42.183.000	42.074.281,00	15.400.000	15.040.500,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	46.897.000	45.492.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	77.497.015	75.803.103,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	48.593.000	47.866.350,00	4.500.000	3.891.432,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	48.593.000	47.866.350,00	4.500.000	3.891.432,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.099.877.800	1.022.345.534,39	13.500.000	12.965.250,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.099.877.800	1.022.345.534,39	13.500.000	12.965.250,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.099.877.800	1.022.345.534,39	13.500.000	12.965.250,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.005.000	14.273.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	15.005.000	14.273.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.005.000	14.273.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.053.000	63.755.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.053.000	63.755.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	32.371.000	32.272.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31.682.000	31.483.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	5.001.000	4.580.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	5.001.000	4.580.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	5.001.000	4.580.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	762.314.300	761.303.598,00	262.708.060	251.441.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	762.314.300	761.303.598,00	262.708.060	251.441.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	15.159.000	15.011.700,00	259.608.060	248.341.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	747.155.300	746.291.898,00	3.100.000	3.100.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	5.022.000	4.555.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.022.000	4.555.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	5.022.000	4.555.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	15.225.000	14.992.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	15.225.000	14.992.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	15.225.000	14.992.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	28.488.000	28.256.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	28.488.000	28.256.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	28.488.000	28.256.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.955.330.450	3.874.322.797	290.480.344	288.387.548	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.955.330.450	3.874.322.797	290.480.344	288.387.548	0	0	0	0
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.675.494.900	3.596.453.708,00	290.480.344	288.387.548,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.573.942.000	2.514.082.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.573.942.000	2.514.082.069,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	592.013.900	588.674.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.498.200	18.494.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	286.068.000	285.925.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.665.000	18.663.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.449.100	16.440.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	252.333.600	249.150.454,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	27.640.000	27.600.000,00	74.500.000	74.230.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	27.640.000	27.600.000,00	21.400.000	21.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	53.100.000	52.830.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.409.000	351.887.982,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.926.092,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.710.000	82.209.740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	274.699.000	265.752.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.490.000	114.209.305,00	215.980.344	214.157.548,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	16.198.243,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	61.103.412,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.990.000	36.907.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	215.980.344	214.157.548,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	44.613.550	43.633.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	44.613.550	43.633.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	8.523.000	8.319.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	36.090.550	35.313.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	200.000.000	199.045.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	200.000.000	199.045.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	200.000.000	199.045.356,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	35.222.000	35.190.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.021.000	19.989.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12.521.000	12.509.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000	7.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.201.000	15.201.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	15.201.000	15.201.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4.780.953.850	4.635.014.363	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.780.953.850	4.635.014.363	0	0	0	0	0	0
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.256.498.350	3.116.889.978,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.435.420.000	2.371.838.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.435.420.000	2.371.838.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.776.200	312.528.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.589.200	6.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.837.500	37.792.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.898.000	14.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.410.000	20.357.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.903.500	24.902.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.138.000	208.012.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.517.150	304.382.291,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.498.400	33.774.691,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.018.750	264.607.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.785.000	128.139.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	14.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.795.000	103.919.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.490.000	9.225.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	32.989.900	32.203.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01	*Fasilitasi Kerja Sama antar Desa*	32.989.900	32.203.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	15.200.900	14.552.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	17.789.000	17.651.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	534.465.600	529.067.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	534.465.600	529.067.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	350.441.800	347.254.235,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	127.842.200	127.256.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	56.181.600	54.557.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	957.000.000	956.852.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	957.000.000	956.852.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	897.000.000	896.873.090,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	60.000.000	59.979.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.119.970.000	4.024.031.810	0	0	0	0	0	0
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.119.970.000	4.024.031.810	0	0	0	0	0	0
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	222.000.000	220.473.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	30.000.000	28.473.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	30.000.000	28.473.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	192.000.000	192.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	132.000.000	132.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.684.470.000	2.598.782.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.200.600.000	1.169.360.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	135.505.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	545.600.000	524.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	165.000.000	162.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	149.985.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	196.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	156.000.000	156.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	156.000.000	156.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	898.620.000	844.172.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.600.000	21.474.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	857.220.000	802.907.110,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.800.000	19.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	429.250.000	429.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	3.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	425.500.000	425.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.213.500.000	1.204.776.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000	291.276.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	291.276.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	913.500.000	913.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	435.000.000	435.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	1.06.2.08.2.14.01.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	478.500.000	478.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12.320.835.450	11.765.458.737	98.190.720	97.880.000	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		Dinas Perhubungan	12.320.835.450	11.765.458.737	98.190.720	97.880.000	0	0	0	0
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.927.077.150	11.372.564.637,00	63.800.000	63.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.605.279.000	2.542.651.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.605.279.000	2.542.651.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.811.500	314.496.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.759.000	15.736.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.503.000	7.503.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.120.000	12.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.840.000	11.839.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	262.589.500	262.296.862,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	63.800.000	63.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	63.800.000	63.500.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.760.419.000	8.294.281.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.220.748.800	6.138.052.865,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.535.670.200	2.152.228.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.567.650	221.135.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.737.650	216.305.178,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.830.000	4.830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	383.758.300	392.894.100,00	34.390.720	34.380.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	109.845.750	109.523.900,00	34.390.720	34.380.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	29.986.000	29.874.700,00	34.390.720	34.380.000,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	79.859.750	79.649.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	187.411.400	186.975.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	187.411.400	186.975.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	96.501.150	96.394.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	96.501.150	96.394.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.841.534.474	5.641.490.314	0	0	0	0	0	0
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	5.841.534.474	5.641.490.314	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.119.579.024	3.932.069.307,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.365.528.000	2.296.348.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.365.528.000	2.296.348.976,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.697.200	157.519.815,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.000	1.845.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.310.000	22.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.554.500	4.396.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.536.000	11.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.180.600	12.597.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.121.100	104.527.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.395.957.424	1.328.339.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	911.887.824	900.178.566,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.480.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	474.589.600	422.960.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.396.400	149.861.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	11.741.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	32.191.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.354.750	15.503.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000	74.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.541.650	15.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.721.955.450	1.709.421.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.721.955.450	1.709.421.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	281.505.550	279.166.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	26.717.500	26.453.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	1.335.189.000	1.333.419.502,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	52.554.400	50.430.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.989.000	19.950.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.719.512.010	3.536.831.192	124.114.000	122.969.500	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	3.719.512.010	3.536.831.192	124.114.000	122.969.500	0	0	0	0
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.615.855.060	3.433.491.192,00	124.114.000	122.969.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.434.528.160	2.361.836.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.434.528.160	2.361.836.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.480.750	236.784.119,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.022.000	4.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.002.000	14.951.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.805.000	9.527.520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.556.000	14.436.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.308.800	14.299.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.786.950	178.704.199,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	124.114.000	122.969.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	124.114.000	122.969.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	860.806.150	751.996.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.800.000	5.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.999.950	224.751.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624.006.200	521.445.358,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.040.000	82.873.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000	14.980.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.000.000	52.852.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.040.000	15.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	39.841.700	39.812.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.841.700	39.812.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39.841.700	39.812.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	63.815.250	63.527.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan *Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	63.815.250	63.527.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	20.205.250	20.167.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	43.610.000	43.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.137.148.950	4.065.238.903	203.545.700	200.008.700	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.137.148.950	4.065.238.903	203.545.700	200.008.700	0	0	0	0
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.004.319.600	2.934.572.050,00	203.545.700	200.008.700,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.914.667.000	1.863.660.239,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.914.667.000	1.863.660.239,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.470.000	14.254.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.470.000	14.254.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.237.150	510.100.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.455.250	5.451.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.986.000	51.959.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.336.250	20.330.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.239.000	30.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.696.500	36.696.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.524.150	365.487.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	102.725.000	99.791.700,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	102.725.000	99.791.700,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	502.945.450	486.953.849,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.800.000	4.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.139.050	101.926.099,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.660.000	15.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.346.400	364.577.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.000.000	59.603.550,00	100.820.700	100.217.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.500.000	21.252.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000	38.351.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	100.820.700	100.217.000,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	393.061.350	391.942.161,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	393.061.350	391.942.161,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	393.061.350	391.942.161,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	159.676.000	158.931.492,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	159.676.000	158.931.492,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	114.672.350	114.349.137,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	45.003.650	44.582.355,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	580.092.000	579.793.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	580.092.000	579.793.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	87.013.000	86.977.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	319.052.000	318.811.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	174.027.000	174.004.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.970.497.214	1.844.677.885	0	0	0	0	0	0
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.970.497.214	1.844.677.885	0	0	0	0	0	0
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	190.328.000	186.948.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	190.328.000	186.948.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	10.328.000	6.948.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	180.000.000	180.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.649.728.214	1.528.032.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	879.976.964	875.393.185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	879.976.964	875.393.185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	327.274.650	320.849.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	327.274.650	320.849.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	442.476.600	331.790.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	442.476.600	331.790.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	130.441.000	129.696.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	130.441.000	129.696.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	130.441.000	129.696.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	43.721.650	30.990.297	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	43.721.650	30.990.297	0	0	0	0	0	0
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	43.721.650	30.990.297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.721.650	30.990.297,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	18.801.500	14.218.547,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	24.920.150	16.771.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	21.124.000	19.118.750	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika	21.124.000	19.118.750	0	0	0	0	0	0
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	21.124.000	19.118.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.124.000	19.118.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.21	2.16.2.20.2.21.01.0000	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.124.000	19.118.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.635.135.874	12.192.719.193	16.800.000	16.800.000	0	0	0	0
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	12.635.135.874	12.192.719.193	16.800.000	16.800.000	0	0	0	0
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.198.383.550	3.067.941.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.207.091.000	2.134.979.695,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.207.091.000	2.134.979.695,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.876.950	163.847.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.879.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.915.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.503.000	7.486.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	16.998.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.599.600	10.582.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.774.350	108.986.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	770.915.600	716.477.645,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.407.600	150.961.760,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.380.000	11.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	590.128.000	550.315.885,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.500.000	52.636.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	16.341.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.000.000	36.295.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	6.458.174.774	6.287.821.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.935.879.374	5.776.907.474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	5.935.879.374	5.776.907.474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	522.295.400	510.913.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	522.295.400	510.913.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.909.608.550	2.780.234.509,00	16.800.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.909.608.550	2.780.234.509,00	16.800.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.006.650	41.714.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.859.601.900	2.738.519.659,00	16.800.000	16.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	68.969.000	56.722.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	68.969.000	56.722.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	2.22.3.26.2.19.01.0000	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	68.969.000	56.722.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.112.139.150	3.024.139.838	653.027.560	647.715.500	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.112.139.150	3.024.139.838	653.027.560	647.715.500	0	0	0	0
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.874.582.800	2.791.630.188,00	260.631.320	258.591.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.186.912.000	2.126.857.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.186.912.000	2.126.857.377,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.741.100	238.525.314,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.688.900	15.638.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.739.000	35.669.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.158.400	23.652.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.458.000	19.878.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.040.000	10.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.656.800	133.187.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	91.850.000	90.350.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	16.000.000	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	75.850.000	74.350.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.829.700	342.928.867,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.798.500	64.597.667,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.031.200	276.331.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.100.000	83.318.630,00	168.781.320	168.241.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.000.000	15.956.980,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.120.000	50.611.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.980.000	16.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	168.781.320	168.241.000,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	237.556.350	232.509.650,00	392.396.240	389.124.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	188.406.350	185.094.650,00	392.396.240	389.124.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.235.100	137.221.250,00	392.396.240	389.124.500,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	48.171.250	47.873.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.150.000	47.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	49.150.000	47.415.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	117.530.000	107.916.017	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	117.530.000	107.916.017	0	0	0	0	0	0
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	117.530.000	107.916.017,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	112.226.000	103.070.217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	71.655.000	66.241.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	12.887.000	11.662.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27.684.000	25.166.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	5.304.000	4.845.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	5.304.000	4.845.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26.230.809.721	23.051.189.642	88.450.000	87.100.000	0	0	0	0
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	856.424.600	846.288.887	11.400.000	11.100.000	0	0	0	0
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000		Dinas Pangan dan Perikanan	856.424.600	846.288.887	11.400.000	11.100.000	0	0	0	0
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	795.691.100	786.464.437,00	11.400.000	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	795.691.100	786.464.437,00	11.400.000	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	637.007.650	629.328.781,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	158.683.450	157.135.656,00	11.400.000	11.100.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.002.500	14.651.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	15.002.500	14.651.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	15.002.500	14.651.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	45.731.000	45.173.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	45.731.000	45.173.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	2.09.3.25.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.731.000	45.173.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	471.652.800	455.988.945	0	0	0	0	0	0

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	471.652.800	455.988.945	0	0	0	0	0	0
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	18.376.000	14.583.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.376.000	14.583.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	18.376.000	14.583.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	103.980.000	103.775.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	103.980.000	103.775.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	103.980.000	103.775.183,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	349.296.800	337.630.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	349.296.800	337.630.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.22.3.26.2.19.01.0000	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	349.296.800	337.630.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	20.512.690.371	17.465.505.291	0	0	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000		Dinas Pertanian	20.512.690.371	17.465.505.291	0	0	0	0	0	0
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.733.101.050	12.496.023.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.430.899.000	10.261.643.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.430.899.000	10.261.643.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	503.213.450	502.835.644,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	11.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.920.000	59.877.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.280.000	17.279.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.774.000	51.774.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	27.375.000	27.254.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.864.450	335.651.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.475.468.600	1.409.548.487,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.188.000	118.351.837,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.150.000	29.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.320.130.600	1.258.051.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.520.000	321.996.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	13.811.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.520.000	308.185.011,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.905.218.050	923.959.954,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	24.225.000	24.133.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	24.225.000	24.133.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	607.964.050	553.892.554,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	359.890.000	319.868.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	248.074.050	234.023.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.004.000	18.845.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	19.004.000	18.845.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.254.025.000	327.088.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.254.025.000	327.088.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.414.842.351	3.586.240.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.838.280.000	76.566.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.838.280.000	76.566.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.576.562.351	3.509.673.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.477.128.351	3.410.603.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	99.434.000	99.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	66.961.300	66.801.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	66.961.300	66.801.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.961.300	66.801.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	13.700.000	13.652.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	13.700.000	13.652.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	13.700.000	13.652.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	378.867.620	378.828.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	378.867.620	378.828.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	126.796.400	126.778.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	3.27.0.00.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	252.071.220	252.050.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	183.598.050	182.942.094	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	183.598.050	182.942.094	0	0	0	0	0	0
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	121.211.300	120.897.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	121.211.300	120.897.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	121.211.300	120.897.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.174.500	10.102.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	10.174.500	10.102.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10.174.500	10.102.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	52.212.250	51.942.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	52.212.250	51.942.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	44.794.250	44.647.244,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	7.418.000	7.295.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	117.058.800	116.915.297	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	117.058.800	116.915.297	0	0	0	0	0	0
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	109.757.050	109.626.847,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	109.757.050	109.626.847,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	11.747.000	11.715.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	98.010.050	97.911.047,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	7.301.750	7.288.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk *IUI, IPUI, IUKI* dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	7.301.750	7.288.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	7.301.750	7.288.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	4.089.384.600	3.983.549.128	77.050.000	76.000.000	0	0	0	0
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4.089.384.600	3.983.549.128	77.050.000	76.000.000	0	0	0	0
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.089.384.600	3.983.549.128,00	77.050.000	76.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.314.126.000	3.250.853.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.314.126.000	3.250.853.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	256.249.900	255.399.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.031.900	5.031.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.412.000	35.340.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.100.000	17.070.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.048.000	14.948.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.658.000	183.009.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.700.000	5.700.000,00	77.050.000	76.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.700.000	5.700.000,00	14.800.000	14.800.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	62.250.000	61.200.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.038.700	425.010.037,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.995.500	45.015.787,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	404.043.200	379.994.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.270.000	43.585.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	2.440.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.000.000	32.945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	3.32.2.07.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.270.000	8.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	80.870.966.630	78.194.041.482	4.065.517.690	3.344.026.450	0	0	0	0
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	33.469.626.944	32.569.609.353	3.041.317.690	2.376.446.450	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat Daerah	33.469.626.944	32.569.609.353	3.041.317.690	2.376.446.450	0	0	0	0
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.365.601.494	25.501.964.485,00	3.033.817.690	2.368.946.450,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.454.625.000	7.270.642.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.454.625.000	7.270.642.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	235.000.000	230.686.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	235.000.000	230.686.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.941.139.800	4.900.302.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	206.831.500	206.810.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	262.610.800	262.560.316,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	196.995.000	196.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.798.044.000	1.797.428.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.760.000	85.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.390.898.500	2.350.748.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110.900.000	110.900.000,00	3.033.817.690	2.368.946.450,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.900.000	110.900.000,00	366.453.250	363.925.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	2.667.364.440	2.005.021.450,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.755.673.664	6.390.007.419,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	46.750.000	46.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	968.891.064	877.551.883,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.812.000.000	1.789.937.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.928.032.600	3.676.207.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.460.252.500	1.346.169.964,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.455.000	171.740.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.997.500	1.071.604.234,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.800.000	102.825.162,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	879.392.000	751.421.076,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	220.892.000	124.687.154,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	198.500.000	198.252.782,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	28.485.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	399.996.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	412.321.000	406.776.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	412.321.000	406.776.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	253.398.600	252.676.536,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	79.100.000	78.857.518,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	76.800.100	76.438.664,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	97.498.500	97.380.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.862.898.930	3.842.382.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	3.862.898.930	3.842.382.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.950.934.900	5.923.145.444,00	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	331.905.550	320.500.289,00	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	85.272.000	83.302.704,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	93.738.350	85.446.283,00	7.500.000	7.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	152.895.200	151.751.302,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.863.027.450	4.850.730.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.863.027.450	4.850.730.967,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	710.312.000	709.531.402,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	413.412.850	412.981.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	191.416.650	191.267.508,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	105.482.500	105.282.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	45.689.900	42.382.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	45.689.900	42.382.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.153.090.550	1.144.499.424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	363.651.900	362.382.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	363.651.900	362.382.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	266.594.000	265.582.944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	54.663.000	54.452.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	148.102.000	147.528.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	63.829.000	63.601.764,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	503.326.450	497.149.263,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	241.555.100	239.583.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	184.420.450	181.414.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	77.350.900	76.150.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	19.518.200	19.384.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0000	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	19.518.200	19.384.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	47.401.339.686	45.624.432.129	1.024.200.000	967.580.000	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		Sekretariat DPRD	47.401.339.686	45.624.432.129	1.024.200.000	967.580.000	0	0	0	0
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.612.967.386	18.364.727.799,00	1.024.200.000	967.580.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.283.323.072	2.119.756.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.283.223.072	2.119.756.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.041.194.950	1.980.700.035,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.941.750	50.183.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	522.904.000	519.520.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	176.593.000	176.181.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	525.650.000	508.852.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	368.359.200	332.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395.747.000	393.523.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	996.200.000	940.580.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0,00	800.000.000	746.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	196.200.000	194.580.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.613.868.840	1.465.561.367,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.000.000	55.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.664.840	290.630.067,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.220.204.000	1.119.431.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.329.550	642.974.058,00	28.000.000	27.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	181.888.258,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.950.000	70.739.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.322.500	169.806.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.057.050	220.540.000,00	28.000.000	27.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12.525.925.974	11.926.117.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.826.925.974	11.234.697.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	699.000.000	691.420.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	282.425.000	229.618.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	282.425.000	229.618.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.788.372.300	27.259.704.330,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.531.455.000	8.233.447.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	8.140.855.000	8.035.327.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	390.600.000	198.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.667.930.000	3.600.896.281,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	818.948.000	802.935.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	818.948.000	799.673.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	677.464.500	660.872.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	677.464.500	663.258.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	675.105.000	674.155.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	4.557.058.550	4.463.259.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	802.077.000	761.322.836,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.100.881.550	2.057.731.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.654.100.000	1.644.204.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	11.031.928.750	10.962.101.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.782.575.750	10.757.724.331,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	249.353.000	204.377.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25.009.154.770	23.928.552.065	457.736.200	444.892.200	3.000.000.000	2.485.520.287	116.251.465.790	115.315.142.464
5.01			PERENCANAAN	4.424.398.850	4.210.193.162	50.125.000	49.805.000	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	4.424.398.850	4.210.193.162	50.125.000	49.805.000	0	0	0	0
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.317.481.150	3.172.804.937,00	50.125.000	49.805.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.512.795.000	2.411.565.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.512.795.000	2.411.565.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	315.656.000	294.934.897,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.237.500	14.228.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.228.000	36.208.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.939.000	48.935.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.050.000	22.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.613.700	18.607.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.587.800	154.904.397,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	50.125.000	49.805.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	50.125.000	49.805.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.530.150	422.991.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.613.350	99.257.694,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.880.000	33.880.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	301.036.800	283.853.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.500.000	43.313.079,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000	16.114.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.500.000	27.198.595,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	750.739.100	682.974.273,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	704.207.900	640.770.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	71.371.550	50.025.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	632.836.350	590.745.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.708.200	24.807.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.708.200	24.807.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.823.000	17.396.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	20.823.000	17.396.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	356.178.600	354.413.952,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	174.999.900	174.378.102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.634.000	30.219.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	144.365.900	144.158.802,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	24.997.500	24.458.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.997.500	24.458.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	156.181.200	155.576.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	70.000.000	69.668.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	86.181.200	85.908.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	14.312.272.200	13.735.123.686	362.311.200	350.937.200	3.000.000.000	2.485.520.287	116.251.465.790	115.315.142.464
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000		Badan Keuangan Daerah	14.312.272.200	13.735.123.686	362.311.200	350.937.200	3.000.000.000	2.485.520.287	116.251.465.790	115.315.142.464
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.155.360.950	7.678.503.740,00	362.311.200	350.937.200,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.337.367.000	5.986.865.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.337.367.000	5.986.865.624,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	808.654.750	801.368.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.997.000	12.963.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	163.391.000	163.372.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.027.900	56.011.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.290.000	58.210.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	200.950.000	200.949.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.998.850	309.862.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	334.651.200	323.437.200,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	37.277.200	37.277.200,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	297.374.000	286.160.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	774.608.800	699.775.908,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.721.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.600.000	250.126.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.989.200	22.978.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	457.019.600	416.949.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.730.400	190.494.082,00	27.660.000	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	10.156.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.730.400	180.338.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	27.660.000	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.572.678.550	4.511.248.915,00	0	0,00	3.000.000.000	2.485.520.287,00	116.251.465.790	115.315.142.464,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.134.365.000	2.116.448.843,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	190.753.450	190.066.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	244.594.250	243.601.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	591.553.500	587.100.584,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.032.725.000	1.026.544.259,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	74.738.800	69.135.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	528.685.100	513.672.993,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	68.524.550	67.033.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	460.160.550	446.639.793,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	438.847.950	437.968.476,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	51.865.000	51.646.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	105.394.000	105.108.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	264.425.200	264.168.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	17.163.750	17.044.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.299.960.000	1.273.115.592,00	0	0,00	3.000.000.000	2.485.520.287,00	116.251.465.790	115.315.142.464,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1.299.960.000	1.273.115.592,00	0	0,00	0	0,00	116.251.465.790	115.315.142.464,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0	0,00	3.000.000.000	2.485.520.287,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	170.820.500	170.043.011,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	34.304.000	33.827.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	136.516.500	136.215.699,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	349.934.250	338.648.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	349.934.250	338.648.034,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	40.177.750	38.435.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	95.596.000	93.852.999,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	71.338.000	68.110.541,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	142.822.500	138.248.994,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.234.298.450	1.206.722.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.234.298.450	1.206.722.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	472.022.250	464.406.496,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	74.816.700	74.721.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	212.333.000	209.114.599,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	454.847.500	443.632.612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.01.0000	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.279.000	14.847.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	5.405.634.720	5.160.525.792	45.300.000	44.150.000	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.405.634.720	5.160.525.792	45.300.000	44.150.000	0	0	0	0
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.075.568.920	3.959.826.046,00	45.300.000	44.150.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.293.000	30.239.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.293.000	30.239.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.482.877.000	3.393.801.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.482.877.000	3.393.801.127,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.759.750	248.406.704,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.464.000	11.464.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.869.000	28.845.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.835.000	8.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.253.000	20.251.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.660.000	23.630.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.678.750	155.381.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	45.300.000	44.150.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	45.300.000	44.150.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.589.170	224.406.075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.790.770	45.085.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.798.400	175.320.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.050.000	62.972.640,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	16.558.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000	21.404.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.050.000	25.009.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.330.065.800	1.200.699.746,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	406.231.800	400.868.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	11.420.000	11.381.879,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	367.306.800	362.172.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6.990.000	6.872.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	11.513.000	11.451.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	9.002.000	8.989.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	49.607.000	47.281.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	5.007.000	3.326.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	44.600.000	43.955.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	787.811.000	667.430.918,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	24.747.000	22.596.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	215.968.000	162.833.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	544.673.000	479.615.327,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.423.000	2.386.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	86.416.000	85.118.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8.640.000	8.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	66.032.000	65.038.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	11.744.000	11.470.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	306.646.000	270.703.164	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	306.646.000	270.703.164	0	0	0	0	0	0
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	306.646.000	270.703.164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.670.000	1.445.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.670.000	1.445.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	304.976.000	269.257.514,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.04	5.03.5.04.0.00.01.0000	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan *Pengembangan Kompetensi bagi* Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	304.976.000	269.257.514,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	560.203.000	552.006.261	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000		Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	560.203.000	552.006.261	0	0	0	0	0	0
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	560.203.000	552.006.261,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	487.072.190	480.411.623,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	153.567.000	149.049.937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	333.505.190	331.361.686,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	73.130.900	71.594.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5.01.5.05.0.00.01.0000	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	73.130.900	71.594.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.326.299.856	5.928.878.637	1.093.260.150	1.052.387.589	0	0	0	0
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	6.326.299.856	5.928.878.637	1.093.260.150	1.052.387.589	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Kabupaten	6.326.299.856	5.928.878.637	1.093.260.150	1.052.387.589	0	0	0	0
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.730.850.556	4.479.085.933,00	1.093.260.150	1.052.387.589,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.233.000	57.209.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.233.000	57.209.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.204.226.000	3.132.605.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.204.226.000	3.132.605.727,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	429.440.000	424.146.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	429.440.000	424.146.712,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.461.156	508.243.818,00	45.100.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.777.000	12.756.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.782.000	54.826.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.484.600	9.923.000,00	45.100.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.991.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.995.000	19.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	418.422.556	385.757.122,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.750.000	0,00	999.225.000	961.300.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	850.000.000	817.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	3.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	149.225.000	144.300.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.240.400	291.695.732,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.497.400	79.435.652,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.930.000	14.914.230,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.813.000	195.345.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.500.000	65.184.294,00	48.935.150	46.087.589,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000	11.455.357,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.000.000	53.728.937,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	48.935.150	46.087.589,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	610.950.300	559.565.527,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	572.891.250	535.475.677,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	58.942.050	57.558.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	61.925.000	58.098.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	*6.01.0.00.0.00.01.0000*	*6.01.02.2.01.0003*	*Reviu Laporan Kinerja*	*82.605.000*	*79.603.500,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	81.115.000	80.265.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	108.645.000	104.157.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	119.871.700	103.117.577,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	59.787.500	52.674.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.059.050	24.089.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.059.050	24.089.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	984.499.000	890.227.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	93.353.000	88.302.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	93.353.000	88.302.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	891.146.000	801.925.057,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	435.901.000	377.309.361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	171.882.000	170.127.092,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	283.363.000	254.488.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	17.459.715.150	16.702.021.618	282.570.200	278.656.000	0	0	0	0
7.01			KECAMATAN	17.459.715.150	16.702.021.618	282.570.200	278.656.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		Kecamatan Pulau Punjung	2.225.138.500	2.161.717.966	34.100.000	34.100.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.211.553.500	2.148.447.966,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.865.213.000	1.818.508.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.865.213.000	1.818.508.317,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.118.500	143.047.975,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.000	1.936.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.828.000	16.606.995,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.636.000	6.586.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.900.000	34.898.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.610.000	10.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.153.500	72.550.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.222.000	170.114.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000	9.491.024,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.330.000	3.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.892.000	155.823.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.000.000	16.777.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	13.451.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	3.326.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.585.000	13.270.000,00	34.100.000	34.100.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.585.000	13.270.000,00	34.100.000	34.100.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.585.000	13.270.000,00	34.100.000	34.100.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		Kecamatan Sitiung	1.955.261.800	1.905.180.459	15.300.000	15.250.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.922.811.100	1.872.833.009,00	15.300.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.626.487.000	1.581.282.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.626.487.000	1.581.282.368,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.324.900	187.545.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.368.500	2.368.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.314.000	14.309.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.130.000	54.622.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.799.700	7.799.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.712.700	93.445.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	15.300.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	15.300.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.999.200	104.005.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.670.000	8.666.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.329.200	93.339.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	14.620.700	14.585.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14.620.700	14.585.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.620.700	14.585.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.7.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.7.04.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.830.000	13.761.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.830.000	13.761.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.830.000	13.761.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		Kecamatan Koto Baru	2.052.789.950	1.985.274.892	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.027.910.050	1.962.514.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.525.550.000	1.482.843.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.525.550.000	1.482.843.455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.417.250	198.456.705,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.999.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.856.000	34.842.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.499.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.061.250	139.115.805,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.942.800	261.525.112,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.998.000	4.195.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.944.800	255.329.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000	19.689.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000	13.815.720,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000	3.874.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.455.000	2.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.455.000	2.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.455.000	2.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.344.900	13.344.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.344.900	13.344.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.344.900	13.344.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.455.000	2.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.455.000	2.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.455.000	2.555.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.625.000	4.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.625.000	4.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.625.000	4.305.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		Kecamatan Sungai Rumbai	1.611.063.950	1.563.590.161	15.400.000	15.000.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.589.743.950	1.542.310.161,00	15.400.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.315.498.000	1.274.427.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.315.498.000	1.274.427.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.169.150	141.076.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	534.000	513.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.390.000	7.384.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.475.000	3.475.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.691.000	28.689.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.387.800	4.387.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.691.350	96.627.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	15.400.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	15.400.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.576.800	111.488.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000	1.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.778.400	8.601.399,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.197.400	100.292.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.500.000	15.317.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000	8.808.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.500.000	6.509.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.550.000	1.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.550.000	1.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	700.000	700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	850.000	850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.860.000	13.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.860.000	13.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.860.000	13.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.875.000	2.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.875.000	2.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.875.000	2.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.035.000	3.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.035.000	3.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.035.000	3.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		Kecamatan Sembilan Koto	1.549.184.800	1.405.311.037	112.270.200	111.296.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.538.514.800	1.394.721.037,00	112.270.200	111.296.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.211.855.000	1.080.569.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.211.855.000	1.080.569.315,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.080.000	159.638.092,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.022.500	2.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.506.000	12.082.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.871.000	4.144.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.713.000	31.323.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.686.100	7.674.062,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.281.400	102.395.030,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	112.270.200	111.296.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	12.300.000	11.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0,00	99.970.200	99.796.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.329.800	132.003.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.900.000	1.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.046.000	3.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.383.800	127.043.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.250.000	22.509.830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.250.000	1.621.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.500.000	17.487.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	3.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.510.000	5.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	5.510.000	5.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.510.000	5.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.160.000	2.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.160.000	2.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.160.000	2.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.500.000	1.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.500.000	1.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.500.000	1.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000		Kecamatan Timpeh	1.325.442.750	1.194.469.284	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.255.453.800	1.125.144.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	989.815.150	946.700.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	989.815.150	946.700.254,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.938.650	32.881.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.140.000	1.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.798.650	31.741.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.700.000	131.469.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.976.400	11.193.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	137.723.600	120.276.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000	14.093.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.000.000	14.093.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.029.950	26.727.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	27.029.950	26.727.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27.029.950	26.727.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	42.959.000	42.597.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	42.959.000	42.597.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.06.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	42.959.000	42.597.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000		Kecamatan Koto Salak	1.194.376.200	1.144.380.313	27.600.000	27.350.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.161.446.200	1.131.450.313,00	27.600.000	27.350.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	890.455.000	848.497.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	890.455.000	848.497.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.063.100	137.601.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.145.000	2.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.034.000	11.034.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.016.000	6.016.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.200.000	28.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.819.100	5.595.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.849.000	84.631.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	27.600.000	27.350.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	27.600.000	27.350.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.958.100	128.622.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750.000	1.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.162.500	5.371.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.045.600	121.500.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.970.000	16.728.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.000.000	8.496.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.250.000	3.732.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.720.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.850.000	2.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.850.000	2.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.650.000	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.680.000	7.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.680.000	7.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.680.000	7.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.07.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000		Kecamatan Asam Jujuhan	1.160.033.000	1.097.530.544	0	0	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.148.253.000	1.087.400.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	789.739.000	747.692.816,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	789.739.000	747.692.816,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.947.000	167.461.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.666.100	2.665.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.900.000	13.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.726.000	5.726.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.152.000	48.438.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.948.900	6.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.554.000	89.971.728,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.067.000	152.330.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.045.000	3.008.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.022.000	147.322.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.000	19.916.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.500.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	4.916.350,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.900.000	950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.900.000	950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	350.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.550.000	950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.180.000	9.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.180.000	9.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.180.000	9.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.08.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	700.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000		Kecamatan Koto Besar	1.833.288.600	1.788.279.213	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.810.713.600	1.765.794.213,00	4.500.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.512.660.000	1.469.234.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.512.660.000	1.469.234.763,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.976.800	144.976.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.040.000	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.442.600	14.442.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.310.000	6.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.312.000	24.312.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.294.100	5.294.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.578.100	91.578.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	4.500.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	4.500.000	4.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.826.800	135.530.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.158.000	8.131.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.168.800	125.898.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.250.000	15.962.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.500.000	11.232.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750.000	730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.950.000	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.950.000	1.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	750.000	750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.275.000	9.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.275.000	9.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.275.000	9.275.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.630.000	3.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3.630.000	3.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.630.000	3.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.720.000	7.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan* Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.720.000	7.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.09.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.720.000	7.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000		Kecamatan Padang Laweh	1.141.481.800	1.095.441.310	45.800.000	43.660.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.126.586.800	1.080.546.310,00	45.800.000	43.660.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	846.427.000	805.963.120,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	846.427.000	805.963.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.657.400	149.347.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.906.800	1.906.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.256.500	13.256.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.251.000	7.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.650.000	25.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.004.400	8.004.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.588.700	93.290.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	45.800.000	43.660.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	25.000.000	23.160.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	20.800.000	20.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.002.400	105.086.650,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.595.000	1.589.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.407.400	101.497.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik* Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.500.000	20.148.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.500.000	13.333.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	5.814.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan *Mesin Lainnya*	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.550.000	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2.550.000	2.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.350.000	1.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.945.000	9.945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	9.945.000	9.945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.945.000	9.945.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.10.0000	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000		Kecamatan Tiumang	1.411.653.800	1.360.846.439	27.600.000	27.500.000	0	0	0	0
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.386.953.800	1.336.146.439,00	27.600.000	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.015.854.000	975.467.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.015.854.000	975.467.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.989.700	158.784.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.214.600	2.214.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.509.000	17.509.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.963.000	6.963.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.530.000	37.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.885.100	9.885.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84.888.000	84.683.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	27.600.000	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	27.600.000	27.500.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.700.100	181.420.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.499.900	5.920.173,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.200.200	173.500.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.410.000	20.473.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	10.833.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.750.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.660.000	5.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.010.000	7.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.010.000	7.010.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	2.700.000	2.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	4.310.000	4.310.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	11.690.000	11.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	11.690.000	11.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.690.000	11.690.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.11.0000	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	25.779.243.200	25.622.429.522	51.500.000	49.350.000	0	0	0	0
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.779.243.200	25.622.429.522	51.500.000	49.350.000	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.779.243.200	25.622.429.522	51.500.000	49.350.000	0	0	0	0
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.375.406.450	1.305.272.853,00	51.500.000	49.350.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.000.504.000	941.277.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.504.000	941.277.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	143.361.800	143.208.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.000	1.970.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.859.000	13.859.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.908.000	5.908.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.175.000	18.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.095.800	9.095.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.333.000	94.199.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	51.500.000	49.350.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	22.300.000	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	29.200.000	27.350.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.040.650	173.733.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.450	15.067.874,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.720.000	4.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.820.200	151.445.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000	47.054.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.750.000	1.344.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.750.000	45.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.118.334.500	1.114.907.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.118.334.500	1.114.907.441,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.380.000	19.193.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16.945.500	16.724.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	1.080.009.000	1.078.989.541,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	22.739.662.200	22.675.718.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	22.739.662.200	22.675.718.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22.705.857.500	22.641.933.007,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	33.804.700	33.785.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	45.412.500	44.282.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	45.412.500	44.282.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	14.991.000	14.012.050,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Kode			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30.421.500	30.270.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	500.427.550	482.247.771,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	500.427.550	482.247.771,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500.427.550	482.247.771,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	828.429.541.746	783.179.544.263,13	113.003.447.993	102.187.717.063,16	3.000.000.000	2.485.520.287,00	116.251.465.790	115.315.142.464,00

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023
1	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	46.430.539.477,05	41.912.532.080,16
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	46.430.539.477,05	41.912.532.080,16
Subtotal	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05
Subtotal	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	4.085.069.988,55	46.430.539.477,05

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	3	4	5	6
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	27.218.922.589,78	25.421.181.413,50	1.797.741.176,28	7,07
Pendapatan Retribusi Daerah	70.063.061.076,91	2.666.970.194,83	67.396.090.882,08	2.527,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.863.659.575,00	4.833.766.156,00	6.029.893.419,00	124,75
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	11.939.130.310,51	84.053.511.659,66	(72.114.381.349,15)	(85,80)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	120.084.773.552,20	116.975.429.423,99	3.109.344.128,21	2,66
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT- DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	13.843.113.000,00	16.388.039.000,00	(2.544.926.000,00)	(15,53)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	32.094.396.000,00	23.557.584.900,00	8.536.811.100,00	36,24
Dana Alokasi Umum (DAU)	512.944.707.932,00	489.147.246.531,00	23.797.461.401,00	4,87
Dana Alokasi Khusus (DAK)	166.360.138.484,00	183.418.901.715,00	(17.058.763.231,00)	(9,30)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	725.242.355.416,00	712.511.772.146,00	12.730.583.270,00	1,79
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Penyesuaian	76.065.729.000,00	63.086.878.000,00	12.978.851.000,00	20,57
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	76.065.729.000,00	63.086.878.000,00	12.978.851.000,00	20,57
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.031.100.836,00	57.399.969.113,00	4.631.131.723,00	8,07
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	62.031.100.836,00	57.399.969.113,00	4.631.131.723,00	8,07
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	863.339.185.252,00	832.998.619.259,00	30.340.565.993,00	3,64
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	27.250.662.781,79	95.523.246.218,85	(68.272.583.437,06)	(71,47)
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	11.691.354.470	0,00	11.691.354.470,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	38.942.017.251,79	95.523.246.218,85	(56.581.228.967,06)	(59,23)
JUMLAH PENDAPATAN	1.022.365.976.055,99	1.045.497.294.901,84	(23.131.318.845,85)	(2,21)

URAIAN	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	(%)
1	3	4	5	6
BEBAN				
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	459.854.645.158,04	374.678.693.388,09	85.175.951.769,95	22,73
Beban Persediaan	100.041.670.605,50	120.216.633.694,53	(20.174.963.089,03)	(16,78)
Beban Jasa	122.893.828.449,15	101.399.153.391,17	21.494.675.057,98	21,20
Beban Sewa	5.782.869.796,00	4.654.019.879,00	1.128.849.917,00	24,26
Beban Pemeliharaan	12.080.586.952,00	13.938.757.696,00	(1.858.170.744,00)	(13,33)
Beban Perjalanan Dinas	62.205.866.889,00	61.363.605.826,00	842.261.063,00	1,37
Beban Hibah	35.212.246.757,00	28.767.442.546,00	6.444.804.211,00	22,40
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan/Amortisasi	183.081.156.800,42	183.181.549.190,29	(100.392.389,87)	(0,05)
Beban Penyisihan Piutang	2.619.299.693,24	2.086.794.260,39	532.505.432,85	25,52
Beban Transfer	115.200.007.844,00	109.181.400.614,00	6.018.607.230,00	5,51
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	1.098.972.178.944,35	999.468.050.485,47	99.504.128.458,88	9,96
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(76.606.202.888,36)	46.029.244.416,37	(122.635.447.304,73)	(266,43)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	380.744.000,00	564.764.285,00	(184.020.285,00)	(32,58)
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	380.744.000,00	564.764.285,00	(184.020.285,00)	(32,58)
Jumlah Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	(76.225.458.888,36)	46.594.008.701,37	(122.819.467.589,73)	(263,59)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	2.485.520.287,00	3.924.380.709,00	(1.438.860.422,00)	(36,66)
Jumlah Pos Luar Biasa	2.485.520.287,00	3.924.380.709,00	(1.438.860.422,00)	(36,66)
SURPLUS/DEFISIT LO	(78.710.979.175,36)	42.669.627.992,37	(121.380.607.167,73)	(284,47)

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	2024	2023
1	3	4
Ekuitas Awal	2.505.772.587.186,13	2.458.059.251.659,61
Surplus/Defisit-LO	(78.710.979.175,36)	42.669.627.992,37
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
a Koreksi Persediaan	0,00	0,00
b Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
C Lain-lain	(5.895.416.545,20)	5.043.707.534
Ekuitas Akhir	2.421.166.191.465,57	2.505.772.587.186,13

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN V

NERACA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	SALDO 31 DES 2024	SALDO 31 DES 2023
1	3	4
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	1.714.291.612,49	38.613.691.376,09
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.144.119,00
Kas di Bendahara Penerimaan	6.925.010,00	0,00
Kas di BLUD	1.272.541.885,06	4.558.804.440,96
Kas di BOS	36.378.712,00	21.743.185,00
Kas Lainnya	1.054.932.769,00	3.240.615.649,00
Setara Kas	0,00	0,00
Piutang Pajak	25.474.630.116,00	40.215.979.303,00
Penyisihan Piutang Pajak	(15.864.849.434,96)	(30.635.258.580,82)
Piutang Pajak Netto	9.609.780.681,04	9.580.720.722,18
Piutang Retribusi	6.774.178.699,00	1.143.451.911,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.305.862.079,55)	(888.109.288,00)
Piutang Retribusi Netto	5.468.316.619,45	255.342.623,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	13.588.890,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(27.646.597,30)	(67.944,45)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	5.501.672.861,70	13.520.945,55
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	6.818.492.334,53	10.974.350.629,14
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(3.041.699.022,11)	(2.964.852.215,80)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	3.776.793.312,42	8.009.498.413,34
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	15.091.731.000,00	3.084.000
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	21.749.014.918,00	17.958.971.283,00
Piutang Pendapatan Lainnya	459.480,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(2.297,40)	0,00
Piutang Lainnya Netto	457.183	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	274.605.153,94	214.617.938,50
Persediaan	46.962.340.588,12	34.728.826.947,97
Jumlah Aset Lancar	**112.519.782.305,82**	**117.202.581.643,59**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
Investasi Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	28.952.000.000,00	28.952.000.000,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Investasi Permanen	28.952.000.000,00	28.952.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	28.952.000.000,00	28.952.000.000,00
ASET TETAP		
Tanah	643.176.924.008,00	643.277.190.582,00
Peralatan dan Mesin	457.431.418.474,76	438.393.703.299,76
Gedung dan Bangunan	1.129.495.528.240,53	1.076.301.011.447,98
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.511.485.488.792,33	1.474.867.532.577,16
Aset Tetap Lainnya	48.963.924.243,00	44.898.465.176,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.970.751.677,00	14.752.739.322,00

URAIAN	SALDO 31 DES 2024	SALDO 31 DES 2023
1	3	4
Akumulasi Penyusutan	(1.527.992.628.347,13)	(1.362.023.205.760,32)
Aset Tetap Setelah Akumulasi Penyusutan	2.265.531.407.088,49	2.330.467.436.644,58
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi	287.907.729,00	287.907.729,00
Aset Tak Berwujud	4.557.476.277,00	4.444.306.277,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.873.514.683,00)	(2.566.804.283,00)
Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi	1.683.961.594,00	1.877.501.994,00
Aset Lain-Lain	225.626.423.917,27	206.655.459.416,44
Penyusutan Aset Lain-Lain	(182.859.988.190,62)	(168.544.341.799,44)
Aset Lain-Lain Setelah Penyusutan	42.766.435.726,65	38.111.117.617,00
Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	1.156.963.000,00	7.386.327.000,00
Jumlah Aset Lainnya	45.895.268.049,65	47.662.854.340,00
JUMLAH ASET	2.452.898.457.443,96	2.524.284.872.628,17
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	140.789.551,00	654.558.374,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.032.855.895,36	64.227.368,27
Utang Belanja	23.667.417.832,03	12.902.296.999,77
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	31.732.265.978,39	18.512.285.442,04
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	31.732.265.978,39	18.512.285.442,04
EKUITAS		
EKUITAS	2.421.166.191.465,57	2.505.772.587.186,13
JUMLAH EKUITAS	2.421.166.191.465,57	2.505.772.587.186,13
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.452.898.457.443,96	2.524.284.872.628,17

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR ..... TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	25.092.743.485,78	23.692.000.465,50
Penerimaan Retribusi Daerah	65.941.537.340,00	2.449.560.848,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	4.832.210.107,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	11.607.295.741,01	84.446.210.485,15
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	14.676.153.000,00	15.830.852.055,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	22.402.073.000,00	19.414.761.014,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	512.944.707.932,00	489.147.246.531,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	166.360.138.484,00	183.418.901.715,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	76.065.729.000,00	63.086.878.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.241.057.201,00	48.627.484.675,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	71.350.441,00	1.991.137.370,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	11.690.998.858,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	970.441.713.488,79	936.937.243.265,65
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	454.911.665.442,94	373.990.257.238,36
Pembayaran Barang	304.013.952.063,19	278.076.015.874,40
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	34.253.926.757,00	28.767.442.546,00
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	2.485.520.287,00	3.924.380.709,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.762.449.469,00	1.107.049.776,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	221.920.355,00	110.265.502,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	113.330.772.640,00	108.235.636.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	910.980.207.014,13	794.211.047.645,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	59.461.506.474,66	142.726.195.619,89
Arus Kas dari Aktifitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	339.947.100,00	570.547.100,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	40.794.000,00	5.500.000,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	380.741.100,00	576.047.100,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	24.237.257.450,00	39.031.009.865,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	28.954.072.575,16	45.091.507.154,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	45.054.989.838,00	50.167.680.309,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	3	4
Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.810.397.200,00	2.751.538.825,00
Perolehan Aset Lainnya	131.000.000,00	242499170
Jumlah Arus Keluar Kas	102.187.717.063,16	137.284.235.323,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(101.806.975.963,16)	(136.708.188.223,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Masuk Kas		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	51.634.990.982,81	51.634.990.982,81
Penerimaan Kas	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	51.634.990.982,81	51.634.990.982,81
Arus Keluar Kas		
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.453.142.290,00	51.750.795.250,81
Jumlah Arus Keluar Kas	56.453.142.290,00	51.750.795.250,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(4.818.151.307,19)	(115.804.268,00)
Kenaikan/Penurunan Kas	(42.359.853.791,50)	4.402.203.128,89
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	38.616.835.495,09	34.291.745.810,17
Saldo Awal Kas di BLUD	4.558.804.440,96	7.568.677.529,99
Saldo Awal Kas di Dana BOS	21.743.185,00	52.108.740,00
Saldo Awal Kas Lainnya	3.240.615.649,00	123.263.561,00

URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	3	4
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	1.714.291.612,49	38.613.691.376,09
Saldo Akhir Kas di BLUD	1.272.541.885,06	4.558.804.440,96
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.144.119
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.925.010	0,00
Saldo Akhir Kas di Dana BOS	36.378.712,00	21.743.185,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	1.054.932.769,00	3.240.615.649,00
Saldo Akhir Kas	4.085.069.988,55	46.437.998.770,05

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Informasi Umum

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas, setiap pengelola keuangan Negara wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan secara tertip dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dimaksud disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat dan atau golongan tertentu.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tidak hanya bertanggung jawab dalam hal keuangan (*financial accountability*) tetapi juga kaidah-kaidah yang baik (*best practices*), serta bertanggung jawab atas kinerja dari dana yang telah dialokasikan (*performance accountability*), dalam bentuk efektifitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah guna pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Governance and Clean Government*.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selaku Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK RI setelah direviu oleh Inspektorat untuk dilakukan Audit dan diberikan opini sebelum disampaikan kepada DPRD Kabupaten Dharmasraya dalam pembahasan rapat paripurna antara Eksekutif dan Legislatif.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 disusun dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD dan SKPKD selaku Entitas Akuntansi. Laporan Keuangan dimaksud disusun dan disajikan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam

pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
3. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
4. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah; dan
6. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 23 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
32. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
33. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya;
34. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;

35. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud;
36. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
37. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
38. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
39. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
40. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
41. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
42. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah;
43. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
44. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

D. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para *stake holder* secara luas, tidak terbatas pada kepentingan tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan ini untuk menghindari kesalahpahaman dan multitafsir bagi pembaca dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan dengan tujuan :

1. Laporan keuangan mudah dipahami;
2. Menghindari kesalahpahaman;
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting;
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas; dan
5. Pengungkapan paripurna *(full disclosure)*.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

A. Informasi Umum
B. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
C. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
D. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Kinerja APBD**

A. Ekonomi Makro
B. Kebijakan Keuangan Daerah
C. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

A. Penjelasan Atas Kinerja Dan Posisi Keuangan
B. Hambatan Dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Bab IV **Kebijakan Akuntansi**

A. Entitas Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
B. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
D. Kebijakan Akuntansi

Bab V **Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

A. Laporan Realisasi Anggaran
B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
C. Neraca
D. Laporan Operasional
E. Laporan Arus Kas
F. Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**

A. Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya
B. Susunan Perangkat Daerah
C. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Bab VII **Penutup**

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

A. Kerangka Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam pada Kebijakan Umum Anggaran menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Kabupaten Dharmasraya yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global, yaitu PDRB dan pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita,

Adapun indikator ekonomi makro dapat diuraikan sebagai berikut:

A.1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Berdasarkan perhitungannya maka PDRB ini dibagi menjadi 3 (tiga) PDRB terdiri dari PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Pada penyusunan kebijakan anggaran Tahun 2024, Perkembangan Nilai PDRB dilihat berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai dan kontribusi PDRB ADHB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2023

No	Lapangan Usaha	Nilai		Kontribusi		Pertumbuhan	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.299.422,19	2.367.214,83	**28,60**	**28,22**	2,00	2,95
B	Pertambangan dan Penggalian	471.522,92	482.551,36	5,86	5,75	1,50	2,34
C	Industri Pengolahan	443.531,47	451.345,14	5,52	5,38	1,62	1,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.286,50	1.339,00	0,02	0,02	3,36	4,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	937,76	929,51	0,01	0,01	(2,27)	(0,88)
F	Konstruksi	1.041.880,71	1.105.433,18	**12,96**	**13,18**	2,04	6,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.167.863,63	1.229.913,25	**14,53**	**14,66**	5,84	5,31
H	Transportasi dan Pergudangan	489.640,49	516.409,91	6,09	6,16	4,38	5,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.227,72	72.718,24	0,85	0,87	15,50	6,58
J	Informasi dan Komunikasi	738.918,55	797.144,62	9,19	9,50	6,29	**7,88**
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	172.541,37	179.267,21	2,15	2,14	5,70	3,90
L	Real Estat	169.356,62	179.855,13	2,11	2,14	4,03	6,20
M,N	Jasa Perusahaan	1.499,94	1.596,68	0,02	0,02	6,63	6,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	537.434,64	546.615,39	6,68	6,52	**15,90**	1,71
P	Jasa Pendidikan	220.604,87	225.103,33	2,74	2,68	4,56	2,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151.263,04	161.542,80	1,88	1,93	4,39	6,80
R, S, T, U	Jasa lainnya	63.757,40	68.167,17	0,79	0,81	11,46	6,92
TOTAL		8.039.689,82	8.387.146,76	100	100	4,26	4,32

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2023

Nilai PDRB ADHK di tahun 2023 terus memperlihatkan angka peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dilihat berdasarkan kontribusi, 3 (tiga) sektor yang memiliki kontribusi tertinggi yaitu pada; (1) sektor pertanian; (2) sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan (3) kontruksi. Selanjutnya pertumbuhan PDRB

ADHK terbesar yaitu pada: (1) sektor Informasi dan Komunikasi: (2) jasa lainnya; dan (3) akomodasi.

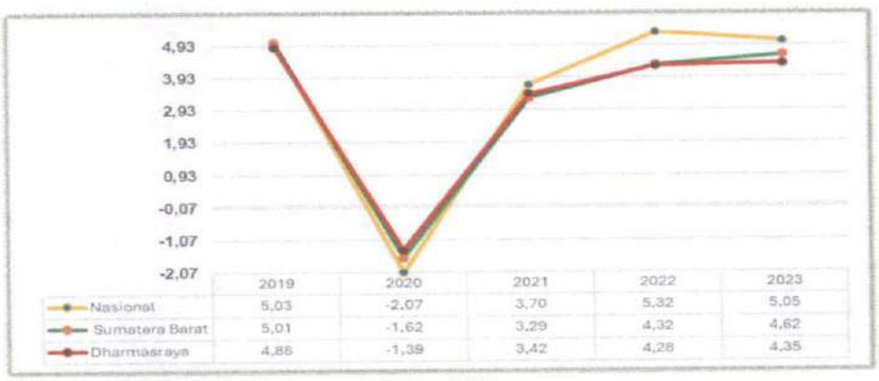
Untuk kontribusi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi. Pada tahun 2022 sebesar 28,60%, kemudian pada tahun 2023 terjadi perlambatan sehingga kontribusi sektr pertanian menjadi 28,22%. Perlambatan ini terjadi tidak signifikan karena naiknya kontribusi sektor konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Ditinjau dari pertumbuhan sektor PDBR di atas, justru pertumbuhan tertinggi bukan terletak pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar, sehingga pada jangka waktu panjang dan menengah Dharmasraya akan mengalami perubahan sektor pembentuk PDRB.

A.2. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan perkembangan PDRB ADHK Tahun 2000, indikator ini digunakan untuk untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah. Perbandingan Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Pertumbuhan PDRB/PDB Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional
Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,03	-2,07	3,70	5,32	5,05
Sumatera Barat	5,01	-1,62	3,29	4,32	4,62
Dharmasraya	4,86	-1,39	3,42	4,28	4,35

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pertumbuhan PDRB/PDB secara nasional, Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 tumbuh melambat, bahkan terkontraksi (pertumbuhan negatif) di tahun 2020. Pertumbuhan PDRB/PDB tahun 2022 tumbuh positif melanjutkan tren pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi covid19, meskipun tahun 2023 kembali terjadi perlambatan dari 5,32 persen menjadi 5,05 persen. Kinerja pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB terkontraksi (mengalami pertumbuhan negatif), namun pasca covid-19 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif dan mengalami percepatan sampai tahun 2022.

A.3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau disebut juga dengan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan atau dikakategorikan penduduk miskin. Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Kemiskinan (Persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2023 hampir bersamaan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat, serta kedua daerah ini lebih baik dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan di tahun 2023 tingkat kemiskinan Dharmasraya sebesar 5,56 persen atau sedikit di bawah Provinsi Sumatera Barat (5,95%).

Selanjutnya sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi nol persen di tahun 2024 ini melalui program pemberdayaan di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat serta di tingkat pemerintah daerah.

Adapun definisi dari kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ditentukan menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antar negara dan antar waktu.

Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680,00 per keluarga per bulan. Jika dibandingkan dengan data kemiskinan biasa. Adapun data kemiskinan ektrim di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan nagari dan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Penduduk Miskin Ektrim (Rumah Tangga) menurut Kecamatan dan Nagari

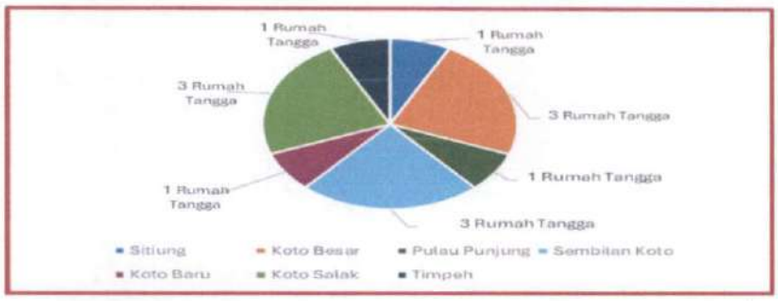
No.	Kecamatan	Nagari	Jumlah (Rumah Tangga)
1	Sitiung	Sitiung	1
2	Koto Besar	Abai Siat	3
3	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	1
4	Sembilan Koto	Banai	3
5	Koto Baru	Sialang Gaung	1
6	Koto Salak	- Pulau Mainan	2
		- Ampalu	1
7	Timpeh	Taratak Tinggi	1
Total Tahun 2023			13
Tahun 2022			4.324
1 April 2024			0

Sumber : Dinas SOSP3APPKB, Tahun 2024

Berdasarkan data kemiskinan ektrim yang dikeluarkan oleh Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 yaitu 4.324 rumah tangga. Tahun 2023 dari data yang dikeluarkan oleh P3KE, pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi dan validasi ke setiap rumah tangga yang tercatat dalam P3KE. Dari hasil verifikasi dan validasi tersebut, jumlah rumah tangga yang termasuk pada miskin ektrim berjumlah sebanyak 13 rumah tangga yang tersebar di 7 kecamatan. Dari jumlah 52 nagari, masih terdapat 8 nagari yang memiliki penduduk miskin eksrim atau terdapat 46 nagari yang terbebas dari penduduk miskin ektrim.

Selanjutnya dilihat dari jumlah penduduk miskin ektrim berdasarkan kecamatan, maka jumlah penduduk miskin ektrim terbanyak ada di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan sembilan Koto dan Kecamatan Koto Salak, masing-masing sebanyak 3 rumah tangga, dan untuk kecamatan lainnya masing-masing 1 rumah tangga. Untuk lebih jelasnya jumlah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3
Grafik Jumlah Penduduk Miskin Ektrim Berdasarkan Kecamatan



Sesuai dengan Surat Kepustusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/112/KPTS-BUP/2024 tentang Penghapusan data Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 tanggal 1 April 2024. Artinya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Dharmasraya sudah pada angka 0 atau sudah tidak ada lagi rumah tangga yang berada pada kemiskinan ekstrem.

A.4. Indeks Gini (Gini Rasio)

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dalam menerapkan kebijakan, maka nilai rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Untuk lebih jelasnya gini rasio Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Grafik Gini Rasio (Indeks)



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	0,380	0,385	0,381	0,381	0,388
Sumatera Barat	0,307	0,301	0,300	0,292	0,280
Dharmasraya	0,278	0,280	0,266	0,287	0,291

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Untuk capaian rasio gini, capaian Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan nasional, artinya ketimpangan pendapatan tidak sebesar nasional. Dilihat berdasarkan data tahun 2022, gini rasio Kabupaten Dharmasraya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Tetapi pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Dharmasraya naik menjadi 0,291 dan lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,280.

A.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase sejumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Untuk lebih jelasnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32
Sumatera Barat	5,33	6,88	6,52	6,26	5,94
Dharmasraya	5,08	5,31	6,00	6,23	6,22

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, tahun 2024

Capaian TPT Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 hingga tahun 2021 berada di bawah nasional dan provinsi. Namun memasuki tahun 2022 dan 2023 kondisinya berada di atas nasional. Namun demikian hal ini diharapkan ke depan tidak akan lebih buruk mengingat masih tingginya daya serap sektor pertanian serta sektor pendukung lainnya seperti sektor industri dan sektor perdagangan yang juga memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah perekonomian daerah, serta masih tumbuhnya perekonomian daerah cukup baik.

A.6. Indeks Pembangunan Manusia

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*)

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Konsep pembangunan manusia sebagai ukuran pencapaian hasil pembangunan menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya yaitu manusia sebagai penerima akhir dari hasil-hasil pembangunan. Angka IPM mengindikasikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan.

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah.

IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:

1) Rendah: IPM < 60;
2) Sedang: 60 ≤ IPM < 70;
3) Tinggi: 70 ≤ IPM < 80;
4) Sangat tinggi: IPM ≥ 80.

Perkembangan IPM secara nasional, provinsi, serta Kabupaten Dharmasraya dari Tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat dari Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,92	71,94	73,16	73,77	74,39
Sumatera Barat	72,39	72,38	74,56	75,16	75,64
Dharmasraya	71,52	71,51	72,65	73,19	73,87

Sumber BPS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa IPM Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada kategori tinggi, namun apabila dibandingkan pada ketiga wilayah tersebut maka IPM Kabupaten Dharmasraya berada di bawah rata-rata IPM Nasional dan Provinsi. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Dharmasraya masih berada di bawah kemajuan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

Dari sisi relevansi, kecenderungan perkembangan Kabupaten Dharmasraya sejalan dengan perkembangan IPM Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Apabila dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, maka posisi IPM Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat melalui Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	2019*	2020*	2021**	2022**	2023**	Ranking
Kepulauan Mentawai	61,26	61,09	63.98	64.83	65.79	19
Pesisir Selatan	70,08	69,90	71.01	71.72	72.24	13
Kab.Solok	69,08	69,08	70.60	71.39	71.92	17
Sijunjung	67,66	67,74	70.48	71.32	72.30	12
Tanah Datar	72,14	72,33	74.14	74.87	75.57	8
Padang Pariaman	70,59	70,61	72.92	73.67	74.54	9
Agam	72,37	72,46	73.20	73.84	74.44	10
Lima Puluh Kota	69,67	69,47	71.03	71.64	72.05	15
Pasaman	66,46	66,64	68.48	69.12	69.85	18
Solok Selatan	68,94	69,04	70.88	71.36	72.24	13
Dharmasraya	71,52	71,51	72.65	73.19	73.87	11
Pasaman Barat	68,21	68,49	70.57	71.39	72.03	16
Padang	82,68	82,82	83.30	83.69	83.98	1
Kota Solok	78,38	78,29	78.53	79.35	79.66	6
Sawahlunto	72,39	72,64	74.35	75.21	75.91	7
Padang Panjang	78,00	77,93	78.52	79.28	79.76	4
Bukittinggi	80,71	80,58	80.79	81.52	81.88	2
Payakumbuh	78,95	78,90	79.24	79.70	80.14	3
Pariaman	76,70	76,90	78.72	79.31	79.76	4

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Keterangan :

* = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Proyeksi SP2010)

** = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota (UHH Hasil Long Form SP2020)

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2023 masih mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar loncatan perkembangan IPM rata-rata kabupaten/kota lain. Ditinjau dari perbandingan kab/kota, maka Dharmasraya berada di peringkat 11 dari 19 kab/kota atau peringkat 3 dibandingkan kabupaten lain, dan berada di bawah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

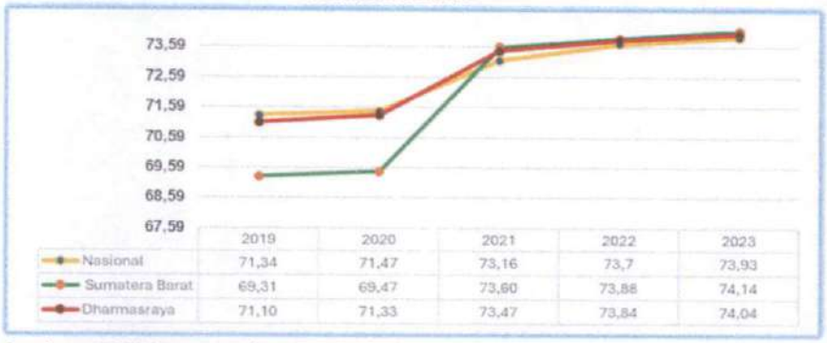
1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

a. Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)

Umur Harapan Hidup Saat Lahir atau disebut juga dengan Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus

diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Perbandingan data usia harapan hidup Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7
Usia Harapan Hidup Saat Lahir Nasional, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	71,34	71,47	73,16	73,7	73,93
Sumatera Barat	69,31	69,47	73,60	73,88	74,14
Dharmasraya	71,10	71,33	73,47	73,84	74,04

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

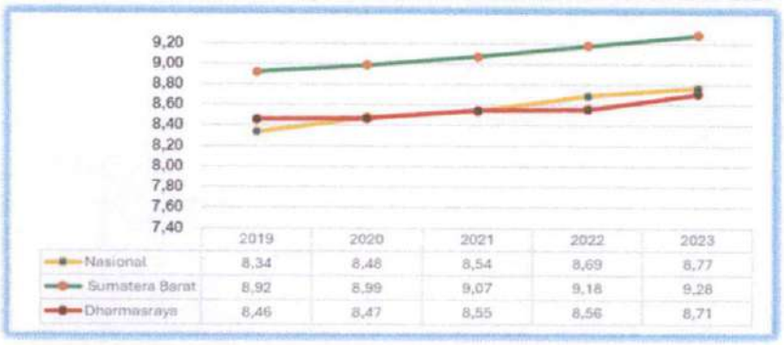
Pencapaian IPM di Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari dimensi umur panjang dan sehat diukur dari indikator angka harapan hidup saat lahir (AHH) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 74,04 tahun. Selama periode 2019-2023, walaupun relatif lambat, AHH mengalami pertumbuhan sebesar 1,03% atau meningkat 2,94 tahun. Artinya, harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi, hal ini disebabkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Dharmasraya dan peningkatanan kualitas sarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

UHH Kabupaten Dharmasraya diatas rata-rata nasional namun meskipun dari angka capaian berada dibawah rata-rata provinsi, namun perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya capaian pembangunan bidang kesehatan Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional, tidak jauh berbeda atau beriringan dengan capaian provinsi.

b. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Perbandingan data rata-rata lama sekolah di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.8
Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77
Sumatera Barat	8,92	8,99	9,07	9,18	9,28
Dharmasraya	8,46	8,47	8,55	8,56	8,71

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa dari tahun 2019 – 2023, RLS Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 8,46, sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 8,71 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berada pada usia 25 ke atas dalam menjalani pendidikan formal belum menamatkan jenjang SMP.

Berbeda dibandingkan dengan dimensi kesehatan, RLS Kabupaten Dharmasraya hanya mengalami sedikit kenaikan dari 8,56 tahun menjadi 8,71 tahun. Sehingga posisi Dharmasraya jauh di bawah nasional serta berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, begitu juga dengan tahun 2023.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk yang berusia 7 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perbandingan data harapan lama sekolah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.9.

Gambar 2.9
Harapan Lama Sekolah Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15
Sumatera Barat	14,01	14,02	14,09	14,10	14,11
Dharmasraya	12,42	12,43	12,44	12,51	12,68

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas, HLS Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2023 sebesar 12,68 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau

setara dengan Diploma I, lebih lama dibandingkan dengan anak berusia sama di tahun 2023.

Dibandingkan dengan HLS nasional dan provinsi, maka HLS Kabupaten Dharmasraya masih berada paiing rendah, begitu juga ditinjau dari perkembangan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga masih menunjukkan perkembangan yang rendah.

Berdasarkan dimensi pengetahuan untuk indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang masih relatif rendah sehingga hal ini mempengaruhi percepatan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya.

Sehubungan dengan relatif rendahnya capaian IPM serta lambatnya perkembangan pada dimensi pendidkan, maka perlu strategi serta menjadi prioritas pembangunan yang lebih efektif dalam mendorong indikator-indikator pembangunan bidang pendidikan. Dengan dijadikannya bidang pendidikan sebagai prioritas pembangunan maka diharapkan IPM Dharmasraya dapat didongkrak untuk bersaing dalam pencapaian IPM tingkat Provinsi.

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Perbandingan data pengeluaran per kapita Kabupaten Dharmasraya, Provinsi dan Nasional tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023
(ribu rupiah/ orang/ tahun)



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	11.289	11.013	11.156	11.479	11.899
Sumatera Barat	10.925	10.733	10.790	11.130	11.380
Dharmasraya	11.431	11.273	11.324	11.650	11.901

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2024

Berdasarkan grafik terlihat bahwa angka pengeluaran perkapita di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2019 – 2023 berfluktuatif. Hal ini terlihat dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,58%, sementara dari tahun 2019-2020 mengalami perlambatan sebesar -0,16%. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023. Peningkatan ini merupakan implikasi dari peningkatan upah gaji yang diterima seperti kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Faktor pendorong lain yang meningkatkan konsumsi adalah peningkatan inflasi atas barang dan jasa sehingga memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbeda dengan 3 (tiga) indikator pembentuk IPM Kabupaten Dharmasraya lainnya, pengeluaran per kapita diseseuaikan jauh lebih baik dengan capaian Provinsi dan sudah setara dengan perkembangan nasional.

B. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya serta asumsi/potensi yang akan mempengaruhi kondisi keuangan daerah.

B.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

B.1.1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

A. Kebijakan peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah

1) melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya
2) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
5) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
6) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
7) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

B. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kebijakan dilakukan dengan memperhatikan rasionalitas melalui perhitungan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan. Disamping itu juga memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

Kebijakan tersebut antar lain :

1) Menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
2) Menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
3) Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

C. Lain-lain PAD Yang Sah yang dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, meliputi :

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima:

1) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya;
2) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
3) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan;
4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

B.1.2. Kebijakan Pendapatan Transfer

A. Dana Perimbangan

a) Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat berupa DBH – Pajak, DBH – CHT, dan DBH - SDA, untuk Tahun 2024, penganggarannya DBH – Pajak, DBH – CHT, dan DBH - SDA mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
b) Dana Alokasi Umum (DAU) Yang tidak ditentukan Penggunaanya, untuk Tahun 2024 penganggarannya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
c) Dana Alokasi Umum (DAU) Yang ditentukan Penggunaanya, untuk Tahun 2024 penganggarannya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
d) Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik untuk Tahun 2024 penganggarannya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
e) Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik untuk Tahun 2024 penganggarannya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
f) Dana Transfer Dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun 2024 penganggarannya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.
g) Dana Transfer Dana Desa untuk Tahun 2024 penganggarannya mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun 2023.

h) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

i) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, Dana Transfer Khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

j) Jika Peraturan Presiden tentang Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

B. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, untuk Tahun 2024 Penganggaranna didasarkan pada alokasi yang ditetapkan berdasarkan penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023.

B.1.4. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

A. Pendapatan Hibah.

Penganggaran hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga yang tidak mengikat dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian hukum pendapatan dimaksud atau didasari pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi hibah dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima hibah yang penganggarannya pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan diuraikan ke dalam jenis objek dan rincian objek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

B. Dana Darurat

Pendapatan Dana Darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2024.

B.2. Kebijakan Belanja Daerah

Struktur belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaranntuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

B.2.1. Belanja Operasi, terdiri dari:

Belanja operasi digunakan antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja Pegawai

Gaji dan Tunjangan yang terdiri dari gaji pokok pns/uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan pph/tunjangan khusus, termasuk tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas pnsd, pembulatan gaji, iuran asuransi jaminan kesehatan, uang paket, tunjangan badan musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan badan anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan perumahan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang operasional pimpinan dprd, tunjangan badan legislasi, tunjangan profesi guru pnsd, tambahan penghasilan guru pnsd, tunjangan transportasi, tunjangan reses.

Tambahan Penghasilan PNS terdiri dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja. Selain Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai, Belanja Pegawai juga berisi alokasi belanja untuk Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. Sedangkan belanja gaji PPPK akan disesuaikan dengan alokasi DAU yang diitentukan.

Iuran Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Asuransi Jaminan Kematian, Honorarium ASN, Honorarium Non PNS, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS Belanja Pegawai BOK, Honorarium Pelayanan Kesehatan, Uang Lembur. Selain itu dalam belanja pegawai juga dialokasikan anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

c) **Belanja Bunga**

Belanja bunga pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

d) **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi pada tahun 2024 tidak dialokasikan.

e) **Belanja Hibah**

Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemeritah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, PKK), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya serta hibah untuk pelaksanaan Pileg dan Pilkada yang akkan dilaksanakan di tahun 2024

Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

f) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial ditambah untuk bantuan pangan non tunai yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan keluarga miskin.

B.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan antara lain untuk belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringanya, dan belanja aset tetap lainnya.

B.2.3. Belanja Tak Terduga

Belanja ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya tidak biasa, tidak bisa diprediksikan dan atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan biaya administrasi pelaksanaan DAK.

B.2.4. Belanja Transfer, terdiri dari:

a) Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari kabupaten ke Pemerintah Desa dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol

Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Parpol dihitung berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber

penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

Pengelolaran pembiayan tahun 2024 dialokasikan untuk pembiayaan Kerjasama Antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Penerangan jalan Umum, serta penambahan pembiayaan untuk penambahan modal kepada BUMD.

C. Asumsi - Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD

C.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024.

Sejalan dengan telah melandainya kasus covid-19 sepanjang tahun 2021 serta diikuti oleh membaiknya indikator makro daerah di tahun 2022, sehingga berdampak pada capaian indikator makro yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021-2026. Lebih jelasnya realisasi indikator makro tahun 2020-2022 dan proyeksi tahun 2023 hingga tahun 2024 yang diserakan dengan kebijakan RPJMD maupun target yang ditetapkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2.4
Kondisi Ekonomi Makro Kab. Dharmasraya Tahun 2021- 2022 dan proyeksi tahun 2023-2024

No	Indikator	Realisasi		Proyeksi					
				2023			2024		
		2021	2022	RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.	RPJMD	RKPD Prov*	RKPD Kab.
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	3,42	4,28	4,2	4,4	4,4	4,5	4,84	4,5
2	PDRB Perkapita ADHB (Juta rupiah)	46,52	52,12	44,79	55,85	54,06	45.76	59,85	55,95
3	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,63	5,56	6,02	6,27	5,5	5,97	6,20	5,4
4	Gini Rasio	0,268	0,287	0,260	0,286	0,285	0,255	0,286	0,284
5	Tingkat Pengangguran terbuka (persen)	5,00	6,23	5,49	5,77	5,77	5,29	5,3	5,3
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,76	72,30	71,98	72,69	72,5	72,13	73,01	73,01

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2023, dan hasil analisis Tim Penyusun RKPD Tahun 2023

Keterangan :

* = Proyeksi indikator makro

Berdasarkan hasil evaluasi capaian 6 (enam) indikator ekonomi makro Kabupaten Dharmasraya, maka dapat dijelaskan debagai berikut :

1. Pertumbuhan PDRB, berdasarkan perkembangan PDRB tahun 2021-2022 maka target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2023 mengikuti target yang ditetapkan oleh provinsi, namun untuk target tahun 2024 sesuai dengan target RPJMD, atau lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat terhadap Kabupaten Dharmasraya.
2. PDRB perkapita, perkembangan PDRB nilai PDRB ADHB hingga tahun 2022 selalu menunjukkan pertambahan rata-rata sebesar Rp 500.000 ingga Rp 700.000 setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 terjadinya penurunan PDRB perkapita yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Sehingga untuk tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan masing-masing sebesar Rp 54,6 juta dan 55,95 juta. Angka ini lebih tinggi

dibandingkan dengan target yang terdapat dalam RPJMD namun masih lebih rendah dari target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat

3. Tingkat kemiskinan, capaian kemiskinan kabupaten dharmasraya hingga tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2023 maupun target 2024, sehingga target RKPD tahun 2023 dan tahun 2024 ditargetkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 dengan mempertimbangkan adanya perbaikan indikator-indikator makro pembangunan 2 tahun terakhir.. adapun target tingkat kemiskinan tahun 2023 dan tahun 2024 lebih optimis dibandingkan target RPJMD maupun target RKPD provinsi Sumatera Barat

4. Gini rasio, gini rasio sebagai indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan masyarakat, dilihat dari perkembangan 2 tahun terkahir maka terlihat adanya perbaikan menuju pemerataan pendapatan antar kelompok pendapatan penduduk. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diiringi oleh turunnya kesenjangan pendapatan merupakan indikasi kuat pada turunnya angka kemiskinan daerah, sehingga diharapkan pembangunan daerah semakin dapat dirasakan oleh penduduk Kabupaten Dharmasraya

5. Tingkat Pengangguran Terbuka, meskipun tingkat pengangguran di Kabupaten Dharmasraya berfluktuasi, namun angka ini relatif masih lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Sebagian angka pengangguran disebabkan oleh adanya perubahan status masyarakat yang berpindah status dari pelajar/ mahasiswa menjadi pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja atau berwiraswasta. Sehingga salah satu strategi untuk mengatasi pengangguran di Dharmasraya adalah dengan penyediaan informasi lapangan kerja bagi pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh pencaker tersebut. Adapun target target TPT Tahun 2023 dan tahun 2024 mengikuti target yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten Dharmasraya

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2023, sehingga target yang ditetapkan untuk tahun 2023 maupun tahun 2024 lebih optimis dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya atau mendekati terhadap target yang ditetapkan oleh Provinsi terhadap tahun 2023, sedangkan untuk target 2024 sama dengan target yang telah ditetapkan Provinsi untuk Kabupaten Dharmasraya.

C.2. Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024

Postur makro fiskal 2024 diarahkan dengan mempertimbangkan defisit kembali pada maksimal 3 persen PDB, namun pelaksanaan konsolidasi fiskal yang akomodatif tetap diperlukan untuk pemantapan recovery dan transformasi ekonomi.

Postur makro fiskal tahun 2024 diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi, dengan mempertimbangkan (1) penyelesaian agenda pembangunan, (2) Major Project dan janji Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara; serta (3) penyelenggaraan pemilihan Presiden RI (pelaksanaan tahun politik). Berdasarkan arah besar kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2024 diuraikan sebagai berikut

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah ditargetkan mencapai 11,8–12,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 9,9–10,2

persen PDB dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,9–2,2 persen PDB. Untuk mencapai target tersebut diperlukan perluasan sumber penerimaan pajak dalam mendukung keberlanjutan Sumber Daya Alam. Di sisi lain, reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan perlu dilakukan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta mengoptimalkan PNBP. Kebijakan pendapatan negara diarahkan melalui:

1) Akselerasi reformasi kebijakan dan sistem administrasi perpajakan untuk secara gradual menggeser struktur penerimaan pajak sejalan dengan perubahan struktur ekonomi yang lebih produktif;
2) Penggalian sumber-sumber penerimaan pajak yang dapat mengurangi ketergantungan pada SDA dan mendukung transisi energi; serta
3) optimalisasi PNBP dari pemanfaatan aset negara dan layanan pemerintah.

2. Belanja Negara

Pada tahun 2024, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,0–15,0 persen PDB, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 10,4–11,4 persen PDB dan TKD sebesar 3,5–3,7 persen PDB. Kebijakan Belanja Negara (Belanja K/L, Non-K/L, dan TKD) dilakukan dengan tetap menjaga kualitas belanja (wise and better spending) agar lebih efisien, produktif, dan bersifat countercyclical untuk menjadi enabler yang kuat bagi percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi berfokus pada SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

3. Defisit dan Pembiayaan Anggaran

Pada tahun 2024, defisit diarahkan sebesar 2,2–2,6 persen PDB. Defisit anggaran diarahkan konsolidatif namun tetap mempertimbangkan (1) perkiraan penerimaan pajak tahun 2023 yang dipengaruhi normalisasi harga komoditas; (2) kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi dalam rangka penyelesaian janji presiden/agenda pembangunan; serta (3) arahan pada tahun 2024 yaitu pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi. Kebijakan tersebut menjadi pertimbangan pada kebijakan pembiayaan anggaran sebagai berikut:

1) Pemanfaatan utang pemerintah yang lebih produktif untuk prioritas pembangunan, dikelola secara prudent dan akuntabel;
2) Peningkatan inovasi pembiayaan, didukung pendalaman pasar keuangan yang kondusif dan melibatkan multi stakeholders, serta mendorong pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sustainable dan lebih masif; serta
3) Pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Special Vehicle Purpose (SVP) yang tepat dan efisien.

D. Pencapaian Target Kinerja APBD

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

1. APBD Awal Tahun 2024
   a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 23 Desember 2023;

b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 23 Desember 2023;

2. Pergeseran I APBD Tahun 2024

   Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 25 Maret 2024;

   Perubahan dilakukan didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

   a. bahwa dengan adanya perubahan nama jenis dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dilakukan penyesuaian nama jenis dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
   b. Adanya Pekerjaan yang belum selesai tahun 2023 sumber dana DAK sub kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Rumah Sakit yang dilanjutkan pekerjaan tahun 2024 dengan penambahan waktu, maka dianggarkan kembali pada akun belanja yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang didasari butir C.2. b.5).a).(5).(d). vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. Pergeseran II APBD Tahun 2024

   Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 4 April 2024

   Perubahan dilakukan bahwa adanya Sisa Lebih Perhitungan dan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023, guna untuk memenuhi pelaporan ke Kementerian Keuangan maka harus dianggarkan kembali pada sub kegitan DAU Yang ditentukan Penggunaannya. Anggaran SiLPA atas pekerjaan yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan pada Bidang yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang didasari butir D.1.g.e).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

4. Pergeseran III APBD Tahun 2024

   Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 26 April 2024

   Perubahan dilakukan bahwa dengan adanya kesalahan entrain pendapatan pada Perubahan Kedua atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dimana realisasi pendapatan melebihi dari anggaran sehingga berpengaruh tidak bisanya di validasi untuk penetapan DPPA SKPD.

5. APBD Perubahan Tahun 2024

   a. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dengan penetapan tanggal 31 Oktober 2024;

   b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 31 Oktober 2024.

   Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 161 ayat (2) menyebutkan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi :

   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
   b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
   c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
   d. Keadaan darurat; dan/atau
   e. Keadaan luar biasa.

Ringkasan Perubahan atas pos Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan TA 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2023

Uraian	JUMLAH (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2024	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	APBD-P 2024		
	PERDA No. 7 Tahun 2023	PERBUP No. 4 Tahun 2024	PERBUP No. 5 Tahun 2024	PERBUP No. 6 Tahun 2024	PERDA No. 3 Tahun 2024	(Rp)	%
	29/12/2023	25/03/2024	04/04/2024	26/04/2024	31/10/2024		
1	2	3	4	5	6	7=6-2	8
PENDAPATAN	964.168.007.612	964.168.007.612	964.168.007.612	967.183.726.511	1.015.028.916.052	50.860.908.440	105,28
BELANJA	1.075.361.835.025	1.078.445.652.408	1.082.684.511.648	1.082.953.094.896	1.060.684.455.529	(14.677.379.496)	98,64
SURPLUS/ (DEFISIT)	(111.193.827.413)	(114.277.644.796)	(118.516.504.036)	(115.769.368.385)	(45.655.539.477)	65.538.287.936	41,06
PEMBIAYAAN	111.193.827.413	114.277.644.796	118.516.504.036	115.769.368.385	45.655.539.477	(65.538.287.936)	41,06
SILPA	-	-	-	-	-	-	

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp1.015.028.916.052,00 yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp122.238.183.034,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp880.926.579.803,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp11.864.153.215,00.

Rencana penerimaan sejumlah tersebut, akan digunakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp1.060.684.455.529,00 direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Operasi Rp 828.429.541.746,00
- Belanja Modal Rp 113.003.447.993,00
- Belanja Tidak Terduga Rp 3.000.000.000,00
- Belanja Transfer Rp 116.251.465.790,00

Kekurangan dana untuk membiayai belanja daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp45.655.539.477,00 akan di danai dari SiLPA Tahun Lalu sebesar Rp45.655.539.477,00.

Tabel 3.1

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2024

URAIAN	APBD TA. 2024	REALISASI	%
Pendapatan	1.015.028.916.052,00	970.829.566.108,79	95,65
Belanja	1.060.684.455.529,00	1.013.183.077.945,29	95,52
Surflus/Defisit	(45.655.539.477,00)	(42.353.511.836,50)	92,77

Realisasi Capaian Kinerja Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp970.829.566.108,79 atau sebesar 95,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.015.028.916.052,00. Adapun rincian realisasi Pendapatan Daerah per OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD TA 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	60.200.000,00	68.761.428,00	114,22
2	Dinas Kesehatan	10.621.487.617,00	9.802.903.770,00	92,29
3	Rumah Sakit Umum Daerah	65.024.500.000,00	54.333.692.973,00	83,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.635.000.000,00	678.089.487,00	41,47
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	244.500.000,00	298.940.400,00	122,27
6	Dinas Pangan Perikanan	20.000.000,00	32.080.000,00	160,40
7	Dinas Lingkungan Hidup	207.050.000,00	255.636.500,00	123,47
8	Dinas Perhubungan	32.000.000,00	16.475.000,00	51,48
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	4.300.000,00	17,20
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	90.800.000,00	105.560.000,00	116,26
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, pemuda dan Olahraga	5.750.000,00	3.400.000,00	59,13
12	Dinas Pertanian	105.000.000,00	94.980.000,00	90,46
13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	11.237.500,00	80,38
14	Badan Keuangan Daerah	936.843.918.435,00	904.969.704.050,79	96,60

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%
15	Sekretariat Daerah	80.000.000,00	126.050.000,00	157,56
16	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.500.000,00	116,67
17	Kecamatan Sitiung	1.750.000,00	2.000.000,00	114,29
18	Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	4.750.000,00	237,50
19	Kecamatan Sungai Rumbai	6.475.000,00	10.750.000,00	166,02
20	Kecamatan IX Koto	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
21	Kecamatan Timpeh	2.500.000,00	2.750.000,00	110,00
22	Kecamatan Koto Besar	2.005.000,00	2.005.000,00	100,00
	Jumlah	1.015.028.916.052,00	970.829.566.108,79	95,65

Selanjutnya realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.013.183.077.945,29 atau 95,52% dari nilai anggaran sebesar Rp1.060.684.455.529,00. Adapun rincian realisasi Belanja Daerah per OPD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja APBD Kabupaten Dharmasraya Per SKPD Tahun Anggaran 2024

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	320.101.605.390,00	310.607.135.346,00	97,03
2	Dinas Kesehatan	159.103.770.575,00	153.368.538.191,74	96,40
3	Rumah Sakit Umum Daerah	100.878.622.411,00	89.797.596.845,16	89,02
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	76.243.716.022,00	68.808.326.143,00	90,25
5	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10.759.251.987,00	10.561.629.622,00	98,16
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.173.389.214,00	7.958.612.893,00	97,37
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengedalian Penduduk dan keluarga Berencana	9.889.539.902,00	9.596.550.652,00	97,04
8	Dinas Pangan Perikanan	4.826.137.800,00	4.707.989.804,00	97,55
9	Dinas Lingkungan Hidup	6.583.758.275,00	6.381.732.158,39	96,93
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.245.810.794,00	4.162.710.345,00	98,04
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.780.953.850,00	4.635.014.363,00	96,95
12	Dinas Perhubungan	12.419.026.170,00	11.863.338.737,00	95,53
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.906.380.124,00	5.691.599.361,00	96,36
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	4.144.282.860,00	3.959.658.083,00	95,55
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	4.340.694.650,00	4.265.247.603,00	98,26
16	Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	15.094.085.888,00	14.510.186.023,00	96,13
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.882.696.710,00	3.779.771.355,00	97,35
18	Dinas Pertanian	20.512.690.371,00	17.465.505.291,00	85,14
19	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	5.285.388.900,00	4.992.475.001,00	94,46
20	Inspektorat Kabupaten	7.419.560.006,00	6.981.266.226,00	94,09
21	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.034.726.850,00	4.812.004.423,00	95,58
22	Badan Keuangan Daerah	133.926.049.190,00	131.886.723.637,00	98,48
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.757.580.720,00	5.475.378.956,00	95,10
24	Sekretariat Daerah	36.510.944.634,00	34.946.055.803,00	95,71
25	Sekretariat DPRD	48.425.539.686,00	46.592.012.129,00	96,21
26	Kecamatan Pulau Punjung	2.259.238.500,00	2.195.817.966,00	97,19

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN TA 2024 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)	%
27	Kecamatan Situng	1.970.561.800,00	1.920.430.459,00	97,46
28	Kecamatan Koto Baru	2.052.789.950,00	1.985.274.892,00	96,71
29	Kecamatan Sungai Rumbai	1.626.463.950,00	1.578.590.161,00	97,06
30	Kecamatan IX Koto	1.661.455.000,00	1.516.607.037,00	91,28
31	Kecamatan Timpeh	1.325.442.750,00	1.194.469.284,00	90,12
32	Kecamatan Koto Salak	1.221.976.200,00	1.171.730.313,00	95,89
33	Kecamatan Asam Jujuhan	1.160.033.000,00	1.097.530.544,00	94,61
34	Kecamatan Koto Besar	1.837.788.600,00	1.792.779.213,00	97,55
35	Kecamatan Padang Laweh	1.187.281.800,00	1.139.101.310,00	95,94
36	Kecamatan Tiumang	1.439.253.800,00	1.388.346.439,00	96,46
37	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.830.743.200,00	25.671.779.522,00	99,38
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.865.224.000,00	2.722.444.476,00	95,02
	Jumlah	**1.060.684.455.529,00**	**1.013.181.960.607,29**	**95,52**

Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas, maka dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlihat pada ringkasan realasasi APBD pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Dharmasraya TA 2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/ KURANG
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	122.238.183.034,00	108.377.358.192,79	88,66	(13.860.824.841,21)
PENDAPATAN TRANSFER	880.926.579.803,00	850.689.858.617,00	96,57	(30.236.721.186,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	11.864.153.215,00	11.762.349.299,00	99,14	(101.803.916,00)
JUMLAH PENDAPATAN	**1.015.028.916.052,00**	**970.829.566.108,79**	**95,65**	**(44.199.349.943,21)**
BELANJA	**1.060.684.455.529,00**	**1.013.181.960.607,29**	**95,52**	**47.502.494.921,71**
BELANJA OPERASI	828.429.541.746,00	793.193.580.793,13	95,75	35.235.960.952,87
BELANJA MODAL	113.003.447.993,00	102.187.717.063,16	90,43	10.815.730.929,84
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	82,85	514.479.713,00
TRANSFER	116.251.465.790,00	115.315.142.464,00	99,19	936.323.326,00
SURPLUS/(DEFISIT)	**(45.655.539.477,00)**	**(42.352.394.498,50)**	**(92,77)**	**3.303.144.978,50**
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	46.430.539.477,00	46.430.539.477,05	100,00	0,05
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	775.000.000,00	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	**45.655.539.477,00**	**46.430.539.477,05**	**101,70**	775.000.000,05
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	**4.078.144.978,55**		**4.078.144.978,55**

B. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan daerah antara lain :

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan yang ada di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan perolehan pendapatan;
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait pengelolaan pendapatan;
4. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, akan dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, baik dalam lingkungan pemerintahan, pengusaha maupun masyarakat;
2. Menjaga akurasi data potensi pajak dengan tetap konsisten melaksanakan pemantauan dan pembinaan;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap memperhatikan dinamika perkembangan sosial ekonomi masyarakat;
4. Melakukan pembenahan dan pengembangan internal kelembagaan secara terus menerus dalam mendukung kualitas pelayanan.

Adapun permasalahan umum belanja daerah yang dihadapi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang digunakan untuk belanja program dan kegiatan prioritas masih kurang besar dibandingkan kebutuhan belanja yang disediakan;
2. Belum optimalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam upaya efisiensi penggunaan belanja atas dana yang disediakan dalam anggaran;
3. Masih kurang pahamnya tertib administrasi pengelolaan keuangan pada masing-masing SKPD.

Guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia melalui skala prioritas anggaran;
2. Peningkatan penyerapan dana masing-masing SKPD melalui mekanisme pencairan dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2024 masih ada beberapa kegiatan yang capaian kinerja keuangannya masih rendah, dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.
Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Keuangan Tahun 2024

NO	KODE REKENING	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
1	1 01 01	DINAS PENDIDIKAN				
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8.104.000,00	2.220.600,00	27,40	Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan sub kegiatan ini ditambahkan pada saat perubahan APBD 2024 sebagai pemenuhan SPM bidang pendidikan
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	20.995.000,00	0,00	0,00	Adanya perubahan sub kegiatan belanja pada anggaran perubahan dan keterbatasan SDM serta waktu dalam pelaksanaan kegiatan
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2.100.000,00	0,00	0,00	keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan sub kegiatan ini ditambahkan pada saat perubahan APBD 2024 sebagai pemenuhan SPM bidang pendidikan
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	19.586.500,00	13.352.809,00	68,17	Adanya efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu dalam pelaksaan kegiatan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.824.605.600,00	1.271.074.800,00	69,66	Adanya pengurangan pembayaran gaji tenaga non ASN,dalam rangka efisiensi anggaran
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN				
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	251.270.000,00	149.808.481,00	59,62	Ada Dana bersumber DAK NF tahun 2024 sebanyak Rp101.270.000,00 untuk alokasi Akreditasi Lokus Puskesmas Silago dan Padang laweh yang di pindahkan ke rekening ini, tapi setelah di koordinasikan dengan Kementerian Kesehatan, dana tersebut tidak bisa digunakan karena sesuai Juknis hanya untuk akreditasi. Namun 2 (dua) Puskesmas tersebut sudah terakreditasi pada tahun 2023 menggunakan dana APBD.
3	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG				
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	22.528.000,00	2.772.050,00	12,30	Secara umum tidak ada kendala, kegiatan terlaksana 100 % yang tidak terlaksana hanya berupa belanja perjalanan dinas untuk berkoordinasi dengan Dinas PU di Provinsi terkait kegiatan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun 2025, sehingga terjadi efisiensi pada belanja pendukung kegiatan.

NO	KODE REKENING	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.927.000,00	3.091.500,00	62.75	Secara umum tidak ada kendala, kegiatan terlaksana 100 % , yang tidak tereasi hanya belanja perjalanan dinas untuk Melakukan koordinasi dengan Dinas PU di Provinsi Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun 2025 Tidak ada permasalahan, dan terlaksana sesuai target (efisiensi pada belanja pendukung kegiatan)
	1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	44.113.500,00	7.289.700,00	16.52	Melakukan Sosialisasi dan FGD Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan Tidak ada permasalahan, dan terlaksana sesuai target (efisiensi pada belanja pendukung kegiatan)
	1.03.05.2.01.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	4.927.000,00	3.441.500,00	69.85	Adanya efisiensi pada belanja perjalanan dinas terkait kegiatan Pembangunan Instalasi Pengelohan Lumpur Tinja (IPLT)
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	159.842.600,00	95.872.728,00	59.98	Merupakan kegiatan SPM dengan melakukan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di kabupaten Dharmasraya,adanya efisiensi pada belanja perbaikan kendaraan.
	1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD	37.470.750,00	26.537.950,00	70.82	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai target sehingga terjadi efisensi dan Penghematan anggaran pada kegiatanPemeriksaan Sampel Air Limbah IPAL.
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Limbah Domestik (SPALD)	336.359.850,00	111.171.900,00	33.05	Ada Belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Pembangunan Tangki Septik Individual Setempat yang tidak terlaksana sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	123.840.000,00	0,00	0,00	Pendataan Huruf Daftar Nomor (HDN) Bangunan Gedung Negara Kabupaten Dharmasraya tidak terlaksana karena belum ada Pedoman penyusunan HDNo untuk Kabupaten Dharmasraya
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.730.585.625,00	2.485.139.756,00	32.15	Belanja Retensi Mesjid Agung tidak di realisasikan Rp4.891.202.700,00 (Empat miliar
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	150.207.000,00	0,00	0,00	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung tidak terlaksana karena ada perbedaan skema pembayaran di DPA dengan konsultan (Tenaga Ahli)
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	70.250.000,00	44.359.421,00	63.15	Pelatihan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis tidak terlaksana karena ada pengurangan anggaran
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	281.650.000,00	122.785.850,00	43.60	Belanja pajak Kendaraan di UPT Alkal tidak terealisasi karena denda yang belum di bayarkan, karena tidak tersedianya

NO	KODE REKENING	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				anggaran Untuk membayar denda kendaraan tersebut , agar pembayaran pajak bisa dilaksanakan denda yang belum di bayar tidak di pungut lagi/ dihapuskan
4	**1.05.02**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	5.120.000,00	3.600.000,00	70,31	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.111.900,00	2.542.600,00	41,60	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	24.000.000,00	17.699.600,00	73,75	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.048.700,00	1.501.600,00	49,25	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	2.500.000,00	0,00	0,00	kegiatan ini terlaksana sesuai kondisi dilapangan, untuk tahun 2024 tidak ada pengaduan dari masyarakat tentang bencana alam Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.500.000,00	1.647.600,00	65,90	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
5	**2.06.08.03**	**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
	2.08.03.2.02.0002	koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.905.000,00	66.355.251,00	67,78	Masih rendahnya minat dan kesadaran perempuan untuk melapor, dimana perempuan enggan untuk melapor karena takut masalahnya diketahui oleh orang banyak dan menjadi bahan omongan orang sekitar sehingga membuat korban (perempuan) menjadi malu
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	88.400.000,00	64.005.946,00	72,40	Karena kurangnya minat peserta dalam mengikuti sosialisasi sehingga terjadinya efisiensi Anggaran
6	**2.16.01**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.480.000,00	1.200.000,00	21,90	Karena tidak ada perbaikan barang inventaris yang rusak dan dapat ditingkatkan kelayakan pakainya sehingga terjadi efisiensi dan Penghematan anggaran 2.16.01.2.08.0003
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.000,00	1.845.000,00	61,60	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran 2.16.01.2.06.0001

NO	KODE REKENING	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.354.750,00	15.503.000,00	36,60	Penawaran pengisian videotron dilakukan ke perusahaan swasta yang terletak di Kab. Dharmasraya secara kolektif langsung beberapa perusahaan, sehingga terjadi efiensi biaya
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	11.741.400,00	67,09	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	24.920.150,00	16.771.750,00	67,30	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
7	**2.19.01**	**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**				
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	10.328.000,00	6.948.800,00	67,28	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran pada biaya Perjalanan Dinas
	2.19.03.2.05.0003	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	442.476.600,00	331.790.100,00	74,98	Hibah uang KORMI sebesar Rp. 100.000.000,- tidak terealisasi, disebabkan tidak adanya permintaan pencairan dari organisasi bersangkutan
8	**3.27.02**	**DINAS PERTANIAN**				
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.254.025.000,00	327.088.400,00	26,08	Kelompok penerima yang memenuhi syarat teknis dan administratif hanya 10 kelompok dari 13 kelompok yang diusulkan dan sudah dilaporkan melalui laporan staf tanggal 18 Oktober 2024.
						Pihak penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai akhir kontrak. dari 60 ekor sapi pengadaan hanya 24 ekor sapi yang sampai ke kelompok, namun di lapangan kelompok sudah menyediakan kandang dan berharap dapat direalisasikan ditahun 2025.
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.838.280.000,00	76.566.500,00	4,17	Juknis kegiatan pendataan sawit rakyat STDB dan pembinaan dan dampingan ISPO baru disampaikan di akhir November 2024 sehingga waktu hanya tersisa satu bulan dan tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan. Resiko apabila tidak mengikuti juknis yang berlaku yaitu daerah harus mengembalikan dana yang sudah terpakai.
9.	**4.01.01**	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kantor atau Bangunan Lainnya	245.455.000,00	171.740.568,00	69,97	Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan yang digunakan oleh Bupati yang pemeliharaannya ada yang ditanggung oleh klaim asuransi sehingga terjadi penghematan dan efisiensi anggaran

NO	KODE REKENING	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	28.485.140,00	47,48	Adanya efisiensi anggaran pada Medical Chec Up Bupati
10	5.01.05	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**				
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	71.371.550,00	50.025.200,00	70,09	Adanya efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
11	5.02.01	**BADAN KEUANGAN DAERAH**				
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	35.969.200,00	22.978.600,00	63,85	Tidak ada hambatan/kendala, capaian ini merupakan hasil dari efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan terhadap genset dimana pada tahun 2024 anggaran genset digunakan untuk bahan bahan bakar saja
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	10.156.050,00	72,54	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.279.000,00	14.847.800,00	73,22	Secara umum kegiatan terlaksana sesuai terget sehingga terjadi efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
12	6.01.01	**INSPEKTORAT KABUPATEN**				
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	38.059.050,00	24.089.850,00	63,30	Pemeriksaan khusus merupakan instruksi/ permintaan pejabat berwenang atau rekomendasi pemeriksaan sebelumnya (komprehensif/ ketaatan) yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus. Semakin tinggi pemeriksaan khusus/kasus, maka kondisi tersebut menggambarkan tingginya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan dan/atau tingginya pelanggaran disiplin PNS
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	292.813.000,00	195.345.850,00	66,71	Karena Adanya 1 (satu) orang THL Mengundurkan diri di pertegahan tahun
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00	11.455.357,00	65,46	Kendaraan Dinas Jabatan hanya melakukan service rutin sehingga terjadi efisiensi dan penghematan dalam penggunaan anggaran
13	7 01 03	**KECAMATAN KOTO BARU**				
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3.455.000,00	2.555.000,00	73,95	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran karena honor narasumber hanya satu jam menyampaikan materi, jadi dibayarkan hanya 50 %

NO	KODE REKENING	OPD	ANGGARAN	REALISASI	%	HAMBATAN / KENDALA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Nonperizinan	3.455.000,00	2.555.000,00	73,95	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran karena honor narasumber hanya satu jam menyampaikan materi, jadi dibayarkan hanya 50 %
14	**7 01 05**	**KECAMATAN SEMBILAN KOTO**				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.046.000,00	3.060.000,00	60,64	Pembayaran lisrik rumah dinas dibayar oleh orang yang menempati (PPK Kec), sehingga terjadi efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran.
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.250.000,00	1.621.950,00	72,09	Pajak kendaraan dulu 8 (delapan) unit, sekarang menjadi 6 (enam) unit, karena 2 (dua) unit rusak berat dan sudah diserahkan ke Pemda,
15	**7 01 06**	**KECAMATAN TIMPEH**				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.976.400,00	11.193.000,00	41,49	Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tidak tercapainya realisasi karena penganggaran berdasarkan pada anggaran tahun sebelumnya,bukan berdasarkan realisasi dari anggaran sebelumnya.
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.000.000,00	14.093.000,00	24,72	Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tidak tercapainya realisasi karena efisiensi dan penghematan anggaran
16	**7 01 08**	**KECAMATAN ASAM JUJUHAN**				
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	350.000,00	0,00	0,00	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.550.000,00	950.000,00	61,29	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	700.000,00	0,00	0,00	Adanya efisiensi dan penghematan penggunaan anggaran

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur akuntansi pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Organisasi pemerintah daerah yang bertindak sebagai kantor pusat adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan yang bertindak sebagai kantor cabang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemilihan struktur ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 189 ayat (1) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebanyak 37 SKPD yaitu :

1) Dinas Pendidikan
2) Dinas Kesehatan
3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
7) Dinas Pangan dan Perikanan
8) Dinas Lingkungan Hidup
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11) Dinas Perhubungan
12) Dinas Komunikasi Dan Informatika
13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
16) Dinas Perpustakaan Kearsipan
17) Dinas Pertanian
18) Dinas Transmisgrasi dan Tenaga Kerja
19) Inspektorat Kabupaten
20) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
21) Badan Keuangan Daerah
22) Kecamatan Pulau Punjung
23) Kecamatan Sitiung
24) Kecamatan Koto Baru
25) Kecamatan Sungai Rumbai
26) Kecamatan IX Koto
27) Kecamatan Timpeh
28) Kecamatan Koto Salak
29) Kecamatan Asam Jujuhan
30) Kecamatan Koto Besar
31) Kecamatan Padang Laweh
32) Kecamatan Tiumang

33) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34) Sekretariat Daerah
35) Sekretariat DPRD
36) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
37) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah entitas akuntansi pada tahun 2024 berkurang 1 dari jumlah 38 entitas pada tahun 2023, menjadi 37 entitas pada tahun 2024. RSUD Sungai Dareh pada Tahun 2024 bukan merupakan SKPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 89 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah. Ketentuan pasal 3 ayat (3) menjabarkan bahwa UPTD RSUD Sungai Dareh dipimpin oleh Direktur RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga tehitung Tahun 2024, secara teknis RSUD Sungai Dareh merupakan UPTD dibawah Dinas Kesehatan dan bukan merupakan SKPD.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai entitas pelaporan, menyusun Laporan Keuangan yang disusun oleh SKPKD, terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah disusun merupakan gabungan dari seluruh Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD sebagai PPKD/Bendahara Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemda.

- *Angka Realisasi Pendapatan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah menurut kelompok pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah atas seluruh penerimaan uang yang masuk pada Rekening Kas Daerah dan ditambah dengan realisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana BOSP Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari 147 SD Negeri, 33 SMP Negeri, 16 TK Negeri dan 1 SLB, tidak melalui Rekening Kas Daerah.

  Adapun BLUD yang dikelola sebanyak 17, yaitu:
  1. BLUD RSUD Sungai Dareh.
  2. BLUD RSUD Sungai Rumbai
  3. BLUD Puskesmas Sungai Rumbai.
  4. BLUD Puskesmas Sungai Limau.
  5. BLUD Puskesmas Sitiung II.
  6. BLUD Puskesmas Padang Laweh.
  7. BLUD Puskesmas Sungai Dareh.
  8. BLUD Puskesmas Silago.
  9. BLUD Puskesmas Gunung Medan.
  10. BLUD Puskesmas Sitiung I.
  11. BLUD Puskesmas Koto Baru.
  12. BLUD Puskesmas Timpeh.
  13. BLUD Puskesmas Sialang.
  14. BLUD Puskesmas Tiumang.
  15. BLUD Puskesmas Koto Besar
  16. BLUD Puskesmas Beringin Sakti
  17. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

- *Angka Realisasi Belanja* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kompilasi realisasi belanja seluruh entitas (SKPD), dimana pengguna anggaran bertanggungjawab atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakan. Sedangkan data realisasi pengeluaran kas daerah yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah berfungsi sebagai kontrol melalui rekonsiliasi dengan SKPKD, ditambah dengan realisasi belanja BLUD sebanyak 17 BLUD dan Dana BOSP Satuan Pendidikan yang terdiri dari 147 SD Negeri, 33 SMP Negeri, 16 TK Negeri dan 1 SLB, yang tidak melalui rekening Kas Daerah.

- *Angka Realisasi Pembiayaan* yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Daerah.

b. Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

   Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

   Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat di masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

   - Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
   - Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

   Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang di haruskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- ***basis kas*** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- ***basis akrual*** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos (akun) dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos (akun) dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dinyatakan dalam mata uang rupiah.

D. Kebijakan Akuntansi

D.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

a. Umum

Definisi Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Klasifikasi pendapatan dapat dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) Pajak Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah.
   b) Retribusi Daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang retribusi daerah.
   c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan BLUD, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*), Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah, Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pendapatan Transfer

   Merupakan pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
   a) Pendapatan Transfer berdasarkan jenis pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
   b) Pendapatan Transfer dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   c) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa yang pengalokasiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   d) Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik. DHB dan DAU

merupakan kategori dari Dana transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori Dana Transfer Khusus.

e) Insentif Fiskal (DIF) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
f) Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
h) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri atas Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

a) Pendapatan hibah berupa uang, barang, dan/jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, kelompok masyarakat/perorangan dalam negeri, badan/lembaga/organisasi dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
b) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c) Kelompok dana darurat yang berasal dari pemerintah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, diakui pada saat:

1) kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2) kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD. Apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD, maka kas di Bendahara Penerimaan yang pada akhir periode pelaporan belum disetorkan ke RKUD tidak diakui sebagai pendapatan LRA, tapi diakui sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan.
3) Kas diterima SKPD atas nama BUD yang dapat digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: pendapatan dana BLUD, pendapatan dana BOSP, dan pendapatan BOK Puskesmas.
4) Kas diterima SKPD yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran SKPD, dengan syarat SKPD penerima

wajib melaporkannya kepada BUD. Contoh: Dana Hibah yang diterima SKPD dari Kementrian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pihak Lainnya.

5) Kas diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Contoh: pendapatan daerah yang diterima oleh Bank Persepsi yang belum disetorkan ke RKUD pada akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

1) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah.

1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

a. Umum

1. Definisi

Definisi *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Perbedaan mendasar antara pendapatan-LO dan pendapatan-LRA terletak pada basis pencatatan yang digunakan. Pendapatan-LO akan dilaporkan di dalam Laporan Operasional dengan basis akrual, sedangkan pendapatan-LRA akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas.

2. Klasifikasi

Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada lima kelompok pendapatan daerah yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO;
2) Pendapatan Transfer-LO;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO;
4) Surplus Non Operasional-LO;
5) Pendapatan Luar Biasa-LO.

b. Pengakuan

Pengakuan Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayarannya secara tunai (realized).

Pengakuan Pendapatan-LO tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

a. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
b. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
c. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pengakuan pendapatan-LO ini dapat terjadi di SKPKD dan SKPD.

c. Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai pendapatan brutonya (tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pajak/retribusi yang dibayarkan oleh wajib pajak/retribusi daerah, dan yang dicantumkan dalam SKPDKB/ SKRDKB dan SKPDKBT/SKRDKBT.
3. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official assessment*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan. Dasar penetapan nilai dalam SKPD/SKRD atau dokumen yang dipersamakan mengacu pada Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati Dharmasraya.
4. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses eksekusi jaminan dicatat sebesar nilai jaminan yang dapat direalisasikan.
5. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil dijual, bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
6. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
7. Pendapatan Operasional Non Pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
8. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

9. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
10. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
11. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

d. Penyajian

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

e. Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian Pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO antara lain adalah:

1. Perbandingan dengan periode yang lalu;
2. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
3. Rincian lebih lanjut oendaoatan–LO menurut sumber pendapatan;
4. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
5. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang mempengaruhi jumlah Pendapatan-LO;
7. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
8. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

a. Umum

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas daerah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.

Sedangkan klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, seperti belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah daerah, belanja kantor dan lembaga teknis daerah.

b. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1) terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi

di SKPD dan SKPKD bagi pengeluaran yang menggunakan SP2D Langsung;

2) khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran di SKPD dan SKPKD pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
3) dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

c. Pengukuran

Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pengeluaran kas yang menggunakan SP2D Langsung dan atau sejumlah pengeluaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan atau PPK SKPD untuk pengeluaran kas melalui rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

d. Penilaian

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan klasifikasi ekonomi.

e. Penyajian

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi Bagan Akun Standar (BAS).

f. Pengungkapan

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.4. Kebijakan Akuntansi Beban

a. Umum

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2. Klasifikasi

Beban dapat diklasifikasikan menurut ekonomi. Klasifikasi beban menurut ekonomi diklasifikasikan berdasarkan jenis terdiri dari:

a. Beban Operasi – LO, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Lain-lain;
b. Beban Transfer, terdiri dari : Beban Bagi Hasil dan Beban Bantuan Keuangan.

b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. (Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi).

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat dalam satuan rupiah sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Pengungkapan

Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam Laporan Operasional dan rinciannya lebih lanjut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
2. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Umum

1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam pengganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan terdiri dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pembiayaan hanya dapat dilakukan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan BLUD.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan

   Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, penerimaan

pinjaman daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pembentukan Dana Cadangan, hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b. Pengakuan

1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.
2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

c. Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) dan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
3. Informasi lainnya yang diangggap perlu.

D.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

a. Umum

1. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang

wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan kas di BLUD.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a) Saldo Rekening Kas Daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran daerah.
b) Setara Kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito tidak lebih dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas Pemerintah Daerah terdiri dari kas di Kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan, kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BLUD, kas Dana BOS, kas Dana Kapitasi pada FKTP, kas lainnya, dan Setara Kas.

b. Pengakuan

Penambahan Kas Daerah dicatat pada saat diterima di RKUD yang berasal dari:

1. penyetoran PAD dari Bendahara Penerimaan;
2. penyetoran pengembalian sisa UYHD dari Bendahara Pengeluaran;
3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
5. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pengeluaran Kas Daerah dicatat pada saat dikeluarkan dari RKUD yang digunakan untuk:

1. uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. pembayaran tagihan pihak ketiga;
3. pembayaran belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bunga, belanja subsidi;
4. transfer belanja daerah terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;
5. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah dan pemberian pinjaman; dan
6. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam Saldo Kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan ke pihak ketiga berupa utang PFK.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Jika kas memenuhi definisi aset lancar, yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan dan memenuhi definisi kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, maka uang tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lancar. Uang pada aset lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

D.7. Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Umum

1. Definisi

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a) Piutang Pendapatan daerah

Timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan daerah pada umumnya terjadi

karena adanya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemerintah daerah telah memberikan jasa atau produk atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul tunggakan pendapatan daerah yang terdiri dari Piutang Pendapatan Asli Daerah (piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain PAD yang sah) dan Piutang Pendapatan Transfer (piutang transfer pemerintah pusat dan piutang transfer antar daerah).

b) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul karena adanya pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian jasa/fasilitas yang terdiri dari: Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.

3. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dengan menetapkan persentase piutang yang tidak tertagih untuk semua jenis piutang yang terlebih dahulu ditetapkan umur piutang dan kualitas piutang lancar, kurang lancar, diragukan ataupun macet.

4. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah beban yang belum merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi pemerintah daerah sudah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut diakui sebagai pembayaran dimuka dan termasuk dalam aset lancar.

Atas pengeluaran beban dibayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban tersebut.

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak.
4. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net reliazable value) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

d. Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang satu sampai dengan tiga tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
   a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
   a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah *(official assessment)* dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak likuid; dan/atau

d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria.
   a. Umur piutang satu sampai dengan tiga tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria.
   a. Umur piutang tiga sampai dengan lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria.
   a. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang satu sampai dengan tiga bulan;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang tiga sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.

f. Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
   a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   c) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
   d) Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
2. Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

3. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
4. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D.8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Umum

1. Definisi

   Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Klasifikasi

   Persediaan merupakan aset yang berupa:
   a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor dan sebagainya, Persediaan Bahan/Material seperti Persediaan Bahan Baku Bangunan;
   b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan bahan baku pembuatan benih.
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

b. Pengakuan

1. Pengakuan Persediaan

   Persediaan diakui pada saat:
   a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
   b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah;
   c) akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

2. Pengakuan Beban Persediaan

   Pengakuan beban persediaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

   Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan pengakuan beban persediaan dengan pendekatan Aset artinya mengakui beban persediaan ketika persediaan tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Pendekatan ini digunakan untuk persediaan yang akan digunakan selama satu periode akuntansi atau untuk berjaga-jaga.

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

3. Selisih Persediaan

   Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak.

   Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang tidak normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

c. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
4. Persediaan akhir periode dinilai dengan menggunakan metode periodik dengan harga menggunakan metode FIFO (First In First Out), kecuali persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

d. Metode Pencatatan

1. Metode Periodik

   Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

   Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
2. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di rsud dan sebagainya. dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan pengukuran menggunakan rumus biaya rata-rata tertimbang.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerapkan sistem pencatatan dengan metode perpetual, yaitu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar yang berlaku untuk semua SKPD

e. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan.

a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan;
b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang/daluwarsa.

D.9. Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Umum

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, seperti bunga, dividen dan royalti, dan/atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualikan secara bebas/dicairkan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas untuk meningkatkan produktivitas aset. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

1) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

2) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau

3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (BSI);
3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
4) Reksa dana.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Non permanen

   Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

2) Investasi Permanen

   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau melepas investasi.

   Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

   a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik pemerintah daerah;

   b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

1) Obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah;
2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
4) Investasi non permanen lainnya.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga. Penyertaan modal berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal pada perusahaan bukan perseroan terbatas atau lembaga/organisasi tertentu.

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (assurance) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi yang nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal suatu investasi diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau bukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, dapat menggunakan nilai estimasi yang layak.

c. Pengukuran

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek
   a) Investasi dalam bentuk surat berharga.
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu enam bulan.
2. Pengukuran investasi jangka panjang
   a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b) Investasi non permanen
      1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
4) Investasi dalam rangka kebijakan nasional yang akan dilepas/dijual dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu nilai pelepasan/penjualan dikurangi dengan biaya pelepasan.
5) Investasi dalam bentuk tagihan dicatat sebesar nilai investasi dikurangi penyisihan tak tertagih.

c) Nilai investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.

3. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Akuntansi Investasi

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya.

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20%.

2. Metode ekuitas

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Metode ini digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah daerah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan investasi pemerintah daerah lebih dari 50%.

   Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima tidak termasuk dividen dalam bentuk saham, yang akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20%, menggunakan metode biaya.
b) Kepemilikan 20 sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki

pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

e. Pengakuan Hasil Investasi

Hasil investasi diakui sebagai berikut:

1. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividen) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
2. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
3. Hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan penambah nilai investasi pada neraca.

   Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam laporan realisasi anggaran.

   Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak menambah nilai investasi pemerintah daerah, sehingga tidak diakui sebagai pendapatan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah daerah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah daerah akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negative tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

f. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

Pelepasan investasi pemerintah dapat berbentuk penjualan aset investasi, pertukaran dengan aset lain, kompensasi utang pemerintah, hibah dan donasi, pembebasan utang bagi penerbit efek obligasi, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya diakui sebagai surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

g. Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir dan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (contra account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.

Kriteria kolektibilitas beserta penyisihannya untuk dana bergulir yang disalurkan sebagai berikut:

No.	Kriteria	Kondisi	% Penyisihan
1	Lancar	Tidak Terjadi tunggakan	0,5%
2	Kurang Lancar	Tunggakan 1 tahun	10%
3	Diragukan	Tunggakan 1 - 3 tahun	50%
4	Macet	Lebih dari 3 tahun	100%

h. Penyajian di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non permanen dan Investasi Permanen.

i. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang memiliki harga pasar;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi;
7. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya, saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
8. Perubahan pos investasi.
9. Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh yang signifikan yang mengakibatkan perubahan metode ekuitas.

D.10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Umum

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.

c. Klasifikasi Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;

   Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Peralatan dan Mesin;

   Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, rambu-rambu, peralatan olahraga dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Gedung dan Bangunan

   Mencakup seluruh bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan tugu titik kontrol yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok bangunan gedung adalah bangunan gedung kantor, bangunan kesehatan, bangunan gedung tempat ibadah, rumah negara dan taman. Gedung dan bangunan ini tidak

mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

   Mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

   Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud.

   Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

   a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
   c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

5. Aset Tetap Lainnya

   Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan non digital (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Khusus untuk hewan, ikan dan tanaman, sesuai dengan kebijakan kapitalisasi aset tetap, disajikan secara ekstrakomptabel dan tidak disajikan di neraca.

   Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

   Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

d. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikkannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah.

Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, perubahan/koreksi, penghentian atau penggunaan kembali, dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut:
Perolehan adalah suatu transaksi perolehan Aset Tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan. Perolehan aset tetap antara lain mencakup transaksi pembelian, transfer masuk, hibah masuk, dan perolehan lainnya.
Perubahan/koreksi adalah transaksi yang berdampak pada perubahan nilai dan/atau kuantitas Aset Tetap. Yang termasuk perubahan/koreksi aset tetap antara lain transaksi pengembangan nilai, penyesuaian/koreksi nilai/kuantitas, dan penyusutan.
Penghentian adalah suatu transaksi untuk menghentikan Aset Tetap dari penggunaan aktif, sehingga Aset Tetap tersebut dipindahkan ke pos Aset Lainnya. Sedangkan penggunaan kembali adalah suatu transaksi untuk mengembalikan aset yang telah dihentikan sebelumnya menjadi aset aktif. Aset yang digunakan kembali dipindahkan dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap.
Pelepasan Aset Tetap antara lain terdiri dari transaksi penghapusan, penjualan, pemusnahan, penyertaan modal pemerintah, hibah keluar, dan transfer keluar. Aset Tetap yang dilepaskan dieliminasi dari neraca, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.

e. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat,biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.

Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia

pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.

2. **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya peolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp1.000.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00 maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan BMD.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

3. **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, pajak honor tim,biaya perjalanan dinas. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai satuan minimum perolehan gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00. artinya, jika nilai perolehan gedung dan bangunan kurang dari Rp20.000.000,00 maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan dalam Laporan BMD dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

   Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

   Biaya perolehan untuk jalan, irigasi, dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi,dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

   Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

   Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

5. **Aset Tetap Lainnya**

   Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

   Pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.000.000,00, sedangkan untuk buku perpustakaan sebesar Rp 0,00 keatas.

   Aset Tetap Lainnya berupa barang bercorak kesenian/ kebudayaan disusutkan secara garis lurus sedangkan untuk hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

6. **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

   KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

   Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolalehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk

keperluan bangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya penjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara karena kondisi *force majeur*, maka biaya pinjaman tidak dikapitalisasi sebagai aset, tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan, dan apabila disebabkan oleh hal-hal yang tidak bersifat *force majeur*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset.

f. Penyajian

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati

g. Hal-Hal Khusus Tentang Aset Tetap

1. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Aset Tetap

Setelah aset diperoleh, Pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) seperti belanja rehabilitasi dan lain sejenisnya. Sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) seperti belanja pemeliharan.

Pembedaan antara *capital expenditure* atau *revenue expenditure* selain dari menambah manfaat atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran yang disebut dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset) yang dapat diklasifikasi sebagai aset tetap. Kriteria suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) setelah perolehan pada aset tetap

peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 dan untuk gedung dan bangunan adalah Rp20.000.000,00.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kerja. Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlukan sebagai biaya (*expense*).

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan, berupa pengembangan (*peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut*) dan penggantian utama (*memperbaharui bagian aset tetap*).

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidak pastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, seperti pembangunan tanggul lumpur, tanggul pemecah gelombang, tanggul penahan lahar dan lain sejenisnya tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan biasa (*expense*).
Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhauld* dan *renovasi* berpedoman pada Peraturan Bupati.

2. Pertukaran Aset Tetap

Pertukaran atau tukar menukar adalah pengalihan aset tetap dari suatu entitas kepada entitas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lannya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan denganjumlah setiap kas atau kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Ada bebarapa alasan yang menyebabkan pemerintah daerah perlu melakukan pertukaran, yaitu:

- Adanya aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang lokasinya tidak sesuai dengan tata ruang/tata kota;
- Adanya aset tetap yang tidak dimanfaatkan secara optimal;
- Upaya penyatuan aset tetap yang lokasinya terpencar;
- Pelaksanaan rencana strategis pemerintah;
- Adanya aset tetap selain tanah dan/atau bangunan yang sudah usang;
- Tidak tersedia dananya untuk pengadaan baru.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeliminasi aset tersebut dari Neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.

Biaya dari pos pertukaran aset diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

3. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Eliminasi Aset Tetap dari neraca dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindah tanganan, dan dilakukan dengan cara:

a. Dijual;
b. Dipertukarkan;
c. Dihibahkan; atau
d. Dijadikan penyertaan modal daerah.

4. Renovasi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu prosuksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya.

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait.

Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk pengecatan gedung, suku cadang dan lain sejenisnya, merupakan pengeluaran yang subtansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan SKPD dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. *Renovasi aset tetap milik sendiri,* merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi aset.

b. *Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan,*

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca dan SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. *Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan* yang meliputi renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya dan renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Sama halnya dengan huruf b diatas dan apabila pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini diserahkan pada pemilik sesuai Berita Acara Penyerahan/dokumen yang dipersamakan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca SKPD dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

5. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

a. Reklasifikasi Aset Tetap

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, hal ini yang disebut sebagai reklasifikasi aset.

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode palaporan.

b. Koreksi Aset Tetap

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tegantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

6. **Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistemasis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah metode garis lurus (straight line method). Metode ini menetapkan beban penyusutan untuk masing-masing periode waktu tertentu adalah konstan berdasarkan umur ekonomi dan atau umur penggunaan aset tetap, dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

h. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Kebijakan Akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
3. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   a. Penambahan aset (pembelian, hibah/donasi, pertukaran, reklasifikasi dan lain-lain);
   b. Pengurangan aset (penjualan, penghapusan, reklasifikasi dan lain-lain);
   c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d. Mutasi aset tetap lainnya.
4. Informasi penyusutan, meliputi:
   a. Nilai penyusutan;
   b. Metode penyusutan yang digunakan;
   c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
5. Untuk KDP perlu diungkapkan:
   a. Rincian kontrak KDP berikut tingkat penyelesaiannya dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan;
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
6. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

D.11. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Umum

1 Definisi

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah.

2 Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Peruntukan dana cadangan

biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga, dan lainnya.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan harus diungkapkan dan dirinci menurut peruntukannya.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian di Laporan Keuangan

Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

D.12. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Amortisasi

a. Umum

1. Definisi

   Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain.

Tujuan

a) Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya. Masalah utama akuntansi untuk aset lainnya adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tak berwujud.
b) Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset lainnya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Kode Akun	Uraian
1.5.	**ASET LAINNYA**
1.5.01.	**Tagihan Jangka Panjang**
1.5.01.01.	Tagihan Penjualan Angsuran
1.5.01.02.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.5.02.	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**
1.5.02.01.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1.5.03.	**Aset Tidak Berwujud**
1.5.3.01.	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1.5.04.	**Aset Lain-lain**
1.5.4.01.	Aset Lain-lain
1.5.05.	**Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1.5.06.	**Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**
1.5.06.01.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang;
b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

b. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

   a) Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah/dan pihak lain sesuai peraturan yang berlaku.

   b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah.

      Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat terbit SJTJM atau Surat Keputusan pejabat berwenang. SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

   a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

      Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

   b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

      Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

   c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

      Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS

tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. *Hak* Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (*intangible asset-work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah.
    1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    2) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Budaya/Sejarah Tak Berwujud *(Intagible Heritage Asset)*

ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten, maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

5. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.

Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu ATB terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

a. Metode Amortisasi

   Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.

b. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Terbatas

   Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dan lain-lain) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek.

   Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:

   1) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
   2) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut, dan nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut, serta besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.

   Untuk ATB dengan masa manfaat terbatas, umur ekonomis diatur sebagai berikut:

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Software	5
2.	Hak paten atau hak cipta	5
3.	Lisensi dan franchise	5
4.	Hasil kajian/penelitian	5

c. Amortisasi untuk ATB dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

   Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan masa manfaat yang tak terbatas, dan lain-lain) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas.

6. Aset Lain-lain

   Yang termasuk dalam kategori aset lain-lain antara lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan atau aset tetap yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi aset

tetap direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat (nilai perolehan aset tetap yang direklasifikasi beserta akumulasi penyusutannya) atau nilai bukunya. Tidak ada lagi pembebanan penyusutan untuk aset lain-lain tersebut.

7. Penurunan Nilai *(Impairment)*

Suatu aset turun nilainya jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun, atau kapan pun terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Penghentian dan Pelepasan ATB

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan, dengan cara:

a. dijual;
b. dipertukarkan;
c. dihibahkan; atau
d. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi

memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan di dalam CaLK.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;
b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. Dokumen penting/pendukung;
d. informasi lainnya yang penting.

D.13. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Umum

1. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan..

2. Klasifikasi

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang pajak, utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Pos-pos kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut.

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Utang Pinjaman Jangka Pendek
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang kepada Pemerintah Pusat
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
	Utang kepada Masyarakat

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misalnya pemerintah daerah

memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

c. **Pengukuran**

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode dan harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh: utang taspen, iuran jaminan dan sebagainya yang bersifat transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Utang pajak adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah pusat sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang pajak diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengukuran Utang Bunga
   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
   Pendapatan diterima dimuka yang dicatat sebagai utang adalah selisih antara pendapatan diterima dimuka yang telah diterima pemerintah daerah dengan jumlah yang benar-benar menjadi kewajiban (beban) pihak ketiga untuk membayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun pelaporan keuangan
5. Pengukuran Utang Belanja
   Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
   Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
6. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
   Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar (yang diharapkan dibayar paling lama 12 bulan) yang tidak termasuk dalam kategori yang ada.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu.

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca di sisi pasiva.

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pajak SKPD/pemerintah berdasarkan rincian utang pajak dan tanggal jatuh temponya;
4. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
5. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
6. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   a. Pengurangan pinjaman;
   b. Modifikasi persyaratan utang;
   c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
7. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
8. Biaya pinjaman:
   a. Perlakuan biaya pinjaman;
   b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan
9. Informasi Penting Lainnya

D.14. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

a. Definisi

Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar BLUD.

b. Karakteristik dan Prinsip BLUD

BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
e. Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
f. Memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
g. Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya;
h. Mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah
i. Laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.

Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya.

c. Pengakuan Akun Laporan Keuangan

1) Pendapatan- LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
3) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan BUD.
4) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan BUD.
5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
   - saat timbulnya hak atas pendapatan; dan
   - Pendapatan direalisasi.
6) Pendapatan – LO pada BLUD yang diakui pada saat pendapatan direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
7) Pendapatan – LO pada BLUD diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
8) Beban pada BLUD diakui pada saat:
   - Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
   - terjadinya konsumsi aset pada saat terjadinya peralihan hak pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
   - Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

d. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan

1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahinya.
3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD
4) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada laporan Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahinya.
6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
7) Terhadap konsolidasi Laporan Keuangan BLUD kedalam laporan keuangan entitas yang membawahinya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik.
8) Akun-akun timbal balik meliputi pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan.
9) Dikecualikan terhadap akun-akun timbal balik adalah akun –akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

V.A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA bertujuan untuk memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan yaitu perbandingan antara anggaran dan realisasi yang menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA juga berguna untuk menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2024

Uraian	JUMLAH (Rp)					Bertambah / (Berkurang)	
	APBD Murni 2024	Pergeseran I	Pergeseran II	Pergeseran III	APBD-P 2024		
	PERDA No. 7 Tahun 2023	PERBUP No. 4 Tahun 2024	PERBUP No. 5 Tahun 2024	PERBUP No. 6 Tahun 2024	PERDA No. 3 Tahun 2024	(Rp)	%
	29/12/2023	25/03/2024	04/04/2024	26/04/2024	31/10/2024		
1	2	3	4	5	6	7=6-2	8
PENDAPATAN	964.168.007.612	964.168.007.612	964.168.007.612	967.183.726.511	1.015.028.916.052	50.860.908.440	105,28
BELANJA	1.075.361.835.025	1.078.445.652.408	1.082.684.511.648	1.082.953.094.896	1.060.684.455.529	(14.677.379.496)	98,64
SURPLUS/ (DEFISIT)	(111.193.827.413)	(114.277.644.796)	(118.516.504.036)	(115.769.368.385)	(45.655.539.477)	65.538.287.936	41,06
PEMBIAYAAN	111.193.827.413	114.277.644.796	118.516.504.036	115.769.368.385	45.655.539.477	(65.538.287.936)	41,06
SILPA	-	-	-	-	-	-	

6. APBD Awal Tahun 2024
   c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 23 Desember 2023;
   d. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 23 Desember 2023;

7. Pergeseran I APBD Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 25 Maret 2024;

Perubahan dilakukan didasari oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. bahwa dengan adanya perubahan nama jenis dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dilakukan penyesuaian nama jenis dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
b. Adanya Pekerjaan yang belum selesai tahun 2023 sumber dana DAK sub kegiatan Rehab dan Pemeliharaan Rumah Sakit yang dilanjutkan pekerjaan tahun 2024 dengan penambahan waktu, maka dianggarkan kembali pada akun belanja yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang didasari butir C.2. b.5).a).(5).(d). vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

8. Pergeseran II APBD Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 4 April 2024

Perubahan dilakukan bahwa adanya Sisa Lebih Perhitungan dan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023, guna untuk memenuhi pelaporan ke Kementerian Keuangan maka harus dianggarkan kembali pada sub kegitan DAU Yang ditentukan Penggunaannya. Anggaran SiLPA atas pekerjaan yang didanai oleh Dana Alokasi Umum (DAU) Yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan pada Bidang yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang didasari butir D.1.g.e).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

9. Pergeseran III APBD Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 26 April 2024

Perubahan dilakukan bahwa dengan adanya kesalahan entrain pendapatan pada Perubahan Kedua atas atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dimana realisasi pendapatan melebihi dari anggaran sehingga berpengaruh tidak bisanya di validasi untuk penetapan DPPA SKPD.

10.APBD Perubahan Tahun 2024

c. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dengan penetapan tanggal 31 Oktober 2024;

d. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan penetapan tanggal 31 Oktober 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.	**Pendapatan Daerah**	**970.822.454.588,79**	**937.513.290.365,65**

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.015.028.916.052,00 dengan realisasi sebesar Rp970.822.454.588,79 atau 95,64% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp937.513.290.365,65 maka terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp33.309.164.223,14 atau 3,55%.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Dalam upaya optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 oleh Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/380/KPTS-BUP/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/369/KPTS-BUP/2023 tentang Penetapan Target Penerimaan Pendapatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024.

Realisasi pendapatan daerah Tahun 2024 dan 2023 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan Asli Daerah	122.238.183.034,00	108.370.246.672,79	88,65	115.996.029.005,65
2	Pendapatan Transfer	880.926.579.803,00	850.689.858.617,00	96,57	819.526.123.990,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	11.864.153.215,00	11.762.349.299,00	99,14	1.991.137.370,00
	JUMLAH	**1.015.028.916.052,00**	**970.822.454.588,79**	**95,64**	**937.513.290.365,65**

Rincian Pendapatan Daerah pada masing-masing OPD berdasarkan jenis Pendapatan Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1** di Laporan Keuangan ini.

Selanjutnya anggaran dan realisasi akun-akun Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.a.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**108.370.246.672,79**	**115.996.029.005,65**

PAD – terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah – Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp122.238.183.034,00 dan realisasinya sebesar Rp108.370.246.672,79 atau sebesar 88,65%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp115.996.029.005,65 maka terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp7.625.782.332,86 atau -6,57%.

Realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2024 dan 2023 dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.1.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pajak Daerah	26.432.781.411,00	25.092.743.485,78	94,93	23.692.000.465,50
2	Retribusi Daerah	78.258.242.617,00	65.941.537.340,00	84,26	2.449.560.848,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	5.347.929.006,00	100,00	4.832.210.107,00
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	12.199.230.000,00	11.988.036.841,01	98,27	85.022.257.585,15
	JUMLAH	**122.238.183.034,00**	**108.370.246.672,79**	**88,65**	**115.996.029.005,65**

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.a.1.	**Pendapatan Pajak Daerah**	**25.092.743.485,78**	**23.692.000.465,50**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan beberapa jenis pajak dan retribusi daerah.

Tabel 5.1.4
Perubahan Jenis Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Perubahan Jenis		Keterangan
	Lama	Baru	
a	Pajak Hotel	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan	Perubahan
b	Pajak Restoran	Pajak Barang Jasa Tertentu-Makanan dan/ atau minuman	Perubahan
c	Pajak Hiburan	Pajak Barang Jasa Tertentu -Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	Perubahan
d	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik	Perubahan
e	Pajak Parkir	Pajak Barang Jasa Tertentu-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	Perubahan
f	Pajak Reklame	Pajak Reklame	Tetap
g	Pajak Air Tanah	Pajak Air Tanah	Tetap
h	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet	Tetap
i	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tetap
j	PBB Perdesaan dan Perkotaan	PBB Perdesaan dan Perkotaan	Tetap
k	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Tetap

Berdasarkan penetapan target penerimaan dibebankan kepada Badan Keuangan Daerah selaku pemungut Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp26.432.781.411,00 dan realisasinya sebesar Rp25.092.743.485,78 atau sebesar 94,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.692.000.465,50,

maka terdapat **kenaikan** pendapatan sebesar Rp1.400.743.020,28 atau 5,91%. Adapun anggaran dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.5
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	193.432.436,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	1.721.533.518,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.129.250,00
4	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	13.226.640.017,46
5	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	6.427.883,00
6	Pajak Reklame	260.000.000,00	341.020.598,00	131,16	260.438.054,00
7	Pajak Air Tanah	63.000.000,00	69.875.770,00	110,91	16.611.667,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	3.900.000,00	39,00	10.100.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00	356.993.896,00	71,40	371.121.511,00
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	4.557.781.411,00	2.665.512.855,00	58,48	2.475.105.302,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.000.000.000,00	5.091.948.132,00	101,84	3.348.616.505,00
12	Pajak Barang Jasa Tertentu-Makanan dan/ atau minuman	1.350.000.000,00	1.490.712.906,78	110,42	0,00
13	Pajak Barang Jasa Tertentu-Tenaga Listrik	14.400.000.000,00	14.761.538.520,00	102,51	0,00
14	Pajak Barang Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan	270.000.000,00	288.281.956,00	106,77	0,00
15	Pajak Barang Jasa Tertentu-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	12.000.000,00	12.228.152,00	101,90	0,00
16	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000,00	10.730.700,00	107,31	0,00
JUMLAH		**26.432.781.411,00**	**25.092.743.485,78**	**94,93**	**21.634.156.143,46**

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 3 ayat 1 Penetapan Pajak terdiri atas :

a. Ditetapkan oleh Bupati yaitu :
    1. PBB Perdesaan dan Perkotaan;
    2. Pajak Reklame;
    3. Pajak Air Tanah;
    4. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor;
    5. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
b. Perhitungan sendiri oleh wajib pajak, yaitu :
    1. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    2. Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas:
        a. Makanan dan /atau minuman;
        b. Tenaga listrik;
        c. Jasa perhotelan;
        d. Jasa parkir;
        e. Jasa kesenian dan hiburan;
    3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB); dan
    4. Pajak Sarang Burung Walet.

			Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.a.2.	Pendapatan Daerah	Retribusi	65.941.537.340,00	2.449.560.848,00

Mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan uraian akun retribusi daerah. Semua jenis retribusi daerah yang diatur dengan peraturan daerah ini terdiri atas :

1. Retribusi Jasa Umum, meliputi :
   a. Pelayanan kesehatan;
   b. Pelayanan kebersihan;
   c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum ; dan
   d. Pelayanan pasar
2. Retribusi Jasa Usaha, meliputi :
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoaan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan temasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   c. penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
   d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
   e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   g. penjualan hasil produksi usaha; dan
   h. pemanfaat aset daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi :
   a. Persetujuan bangunan gedung; dan
   b. Penggunaan tenaga kerja asing

Adapun perubahan jenis retribusi daerah karena perubahan aturan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.1.6
Perubahan Jenis Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Perubahan Jenis		Keterangan
	Lama	Baru	
a	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	-	Dihilangkan
b	Retribusi Pelayan Tera / Tera Ulang	-	Dihilangkan
c	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	Dihilangkan
d	Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Lain-Lain PAD yang Sah pindah ke Retribusi
e	Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pelayanan Pasar	Tetap
f	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Tetap
k	Retribusi Rumah Potong Hewan	Retribusi Rumah Potong Hewan	Tetap
l	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Tetap
g	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	Retribusi Pelayanan Kebersihan	Perubahan
i	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	Perubahan
j	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	Perubahan
p	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Perubahan
h	-	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Baru

No	Perubahan Jenis		Keterangan
	Lama	Baru	
m	-	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Baru
n	-	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Baru
o	-	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	Baru

Retribusi Daerah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp78.258.242.617,00 dengan realisasi sebesar Rp65.941.537.340,00 atau 84,26%. Retribusi Daerah Tahun 2024 dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp63.491.976.492,00 atau sebesar 2591,97%. Kenaikan yang sangat signifikan ini terjadi karena adanya reklasifikasi pendapatan jasa layanan kesehatan yang semula merupakan pendapatan BLUD lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.7
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
A	**Retribusi Jasa Umum**	**75.875.487.617,00**	**64.417.107.253,00**	**84,90**	**877.390.500,00**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	75.561.487.617,00	64.022.568.743,00	84,73	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	200.000.000,00	250.608.500,00	125,30	211.622.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.000.000,00	14.400.010,00	720,00	-
4	Retribusi Pelayanan Pasar	82.000.000,00	96.780.000,00	118,02	1.730.000,00
5	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	32.750.000,00	109,17	30.600.000,00
6	Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor	-	-	-	228.268.000,00
7	Retribusi Pelayan Tera / Tera Ulang	-	-	-	44.620.500,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi			-	360.550.000,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.082.755.000,00**	**1.181.907.300,00**	**56,68**	**1.076.169.348,00**
1	Retribusi dari Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	676.601.148,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	2.500.800,00
3	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	6.050.000,00	121	-
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00	5.460.000,00	109,2	3.970.000,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.250.000,00	3.400.000,00	104,62	-
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	745.000.000,00	251.504.100,00	33,76	393.097.400,00
7	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	100	-
8	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	40.500.000,00	24.540.000,00	60,59	-
9	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.273.205.000,00	880.153.200,00	69,13	-
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**300.000.000,00**	**342.522.787,00**	**114,17**	**496.001.000,00**

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	496.001.000,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00	342.522.787,00	114,17	-
JUMLAH		**78.258.242.617,00**	**65.941.537.340,00**	**84,26**	**2.449.560.848,00**

Berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2024 memiliki 17 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai, 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah, uraian sejarah singkat mengenai pembentukan BLUD di Kabupaten Dharmasraya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Badan Layanan Umum RSUD Sungai Dareh

BLUD RSUD Sungai Dareh ditetapkan dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/460/KPTS-BUP/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penetapan RSUD Sungai Dareh untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh di Kabupaten Dharmasraya. Pelaksanaan unit BLUD RSUD Sungai Dareh mulai berjalan pada 1 Januari 2015.

2. Badan Layanan Umum UPT Puskesmas, RSUD Sungai Rumbai dan Labkesda

Tahun 2017 Kabupaten Dharmasraya memiliki UPT Puskesmas Kabupaten Dharmasraya *(holding)* pada Dinas Kesehatan. UPT Puskesmas membawahi 13 Puskesmas sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya.

Adanya penetapan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, telah terjadi Perubahan Struktur Organisasi UPT Puskesmas melalui Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/147/KPTS-BUP/2018 tentang Pencabutan atas Keputusan Dharmasraya Nomor 189.1/463/KPTS-BUP/2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas untuk Melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 18 April 2018.

Pencabutan keputusan tersebut diiringi dengan pembentukan UPT Puskesmas sebanyak 13 Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka diterbitkan Keputusan Bupati Tahun 2019 tentang penetapan UPT Puskesmas sebagai Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan uraian sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/463/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/464/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung I sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

3. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/465/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sitiung II sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/466/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sialang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/467/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Dareh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya SK Nomor 188.45/468/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Silago sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/469/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Timpeh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/470/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Padang Laweh sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/471/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Tiumang sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/472/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Baru sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/473/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Koto Besar sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/474/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/475/KPTS-BUP/2019 tentang Penetapan UPT Puskesmas Sungai Limau sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pada akhir Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya telah menambah 2 unit BLUD yaitu UPT RSUD Sungai Rumbai dan UPT Puskesmas Beringin Sakti yang mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2020, dengan dasar penetapan sebagai berikut:

a. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/462/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Sungai Rumbai sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
b. Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/476/KPTS-BUP/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Penetapan UPT RSUD Beringi Sakti sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Laboratorium Kesehatan Daerah Tahun 2024 ditetapkan menjadi BLUD sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/443/KPTS-BUP/2022 tanggal 12 Desember 2022, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp75.561.487.617,00 terealisasi sebesar Rp64.022.568.743,00 atau sebesar Rp84.73%. Retribusi Pelayanan kesehatan ini semula tercatat pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang

sah, dikarenakan perubahan aturan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pendapatan BLUD berpindah ke Pendapatan Retribusi. Realisasi Retribusi Pelayanan kesehatan ini bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp3.364.903.484,00, Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp60.496.355.259,00 dan Pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp161.310.000,00. Realiasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.8
Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas**	**3.186.487.617,00**	**3.364.903.484,00**	**105,60**	**0,00**
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	337.000.000,00	359.518.900,00	106,68	0,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	169.286.246,00	165.134.000,00	97,55	0,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	138.452.600,00	116.643.000,00	84,25	0,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	165.526.700,00	209.567.120,00	126,61	0,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	167.232.000,00	95.968.400,00	57,39	0,00
6	BLUD Puskesmas Silago	258.033.934,00	295.072.500,00	114,35	0,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	125.000.000,00	121.940.980,00	97,55	0,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	624.298.100,00	547.385.300,00	87,68	0,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	621.905.037,00	627.787.200,00	100,95	0,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	216.383.000,00	243.846.700,00	112,69	0,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	55.370.000,00	39.188.200,00	70,78	0,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	100.000.000,00	136.068.500,00	136,07	0,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	98.000.000,00	134.353.984,00	137,10	0,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	110.000.000,00	272.428.700,00	247,66	0,00
II	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah**	**72.200.000.000,00**	**60.496.355.259,00**	**83,79**	**0,00**
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	65.000.000.000,00	54.303.752.973,00	83,54	0,00
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	7.200.000.000,00	6.192.602.286,00	86,01	0,00
III	**Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis**	**175.000.000,00**	**161.310.000,00**	**92,18**	**0,00**
1	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	175.000.000,00	161.310.000,00	92,18	0,00
	JUMLAH	**75.561.487.617,00**	**64.022.568.743,00**	**84,77**	**0,00**

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ini diberikan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp250.608.500,00 atau sebesar 125,30%. Adanya **kenaikan** penerimaan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp38.986.500,00 atau 18,42%. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya area pelayanan persampahan/kebersihan di sektor perumahan.

c) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan yang ditargetkan sebesar Rp2.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.400.010,00 atau 720%. Dari total penerimaan tersebut, terdapat sebesar Rp5.525.010,00 pada tanggal 31 Desember 2024 masih berada di Rekening Penampungan Kas Bendahara Penerimaan

Dinas Perhubungan, namun telah disetor ke Kas Daerah tanggal 13 Januari 2025. Tingginya capaian atas retribusi ini adanya penetapan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

d) Retribusi Pelayanan Pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan Retribusi Los yang dianggarkan sebesar Rp82.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.780.000,00 atau 118,02%. Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024 mengalami **kenaikan** sebesar Rp95.050.000,00 atau 5494,21% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.730.000,00 karena adanya reklasifikasi pada Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari pemanfaatan sewa kios pasar di Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan menjadi Retribusi Pelayanan Pasar, diuraikan sebagai berikut :

1) Retribusi Los Pasar Ternak pada Dinas Pertanian ditargetkan sebesar Rp2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.020.000,00 atau 101%; dan
2) Retribusi Los Pasar pada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan target sebesar Rp80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.760.000,00 atau 118,45%.

e) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi Pelayanan Kebersihan sub rincian objeknya adalah Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Tahun 2024 ditargetkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.750.000,00 atau 109,17%. Mengalami **kenaikan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2.150.000,00 atau 7,03% disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan kakus.

f) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Pendapatan retribusi pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila baru ditargetkan Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.050.000,00 atau sebesar 121%, merupakan sewa penginapan/ mess Pemda yang berada di Kota Padang, dibawah pengelolaan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

g) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Tahun 2024 ditargetkan pada Dinas Pertanian sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp5.460.000,00 atau sebesar 109,20%. Mengalami **kenaikan** penerimaan retribusi dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1.490.000,00 atau 37,53% disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan pemotongan hewan ternak.

h) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pendapatan Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga merupakan pendapatan yang baru ditargetkan Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa sewa pemakaian GOR Olahraga di Koto Padang sebesar Rp3.250.000,00 terealisasi sebesar Rp3.400.000,00 atau sebesar 104,62%.

i) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan pada Tahun 2024 sebesar Rp745.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp251.504.100,00 atau 33,76%. Penerimaan Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp141.593.300,00 atau -36,02%, yang terdiri dari :

1) Dinas Pertanian adalah Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah adalah berupa Bibit atau Benih Tanaman yang terdiri dari penjualan anak ayam, telur, dan kambing persediaan yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.500.000,00 atau sebesar 47,50%. Mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp10.500.000,00 dibandingkan Tahun 2023 atau -52,50%.
2) Dinas Pangan dan Perikanan adalah Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan yang ditargetkan sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp32.080.000,00 atau 160,40%, mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp31.420.000,00 atau -49,48% dari penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp63.500.000,000.
3) Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan ditargetkan sebesar Rp705.000.000,00 terealisasi sebesar Rp209.924.100,00 yang merupakan pendapatan pada :
   a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalalah berupa Pengelolaan Air Minum berada pada Unit Pelaksana Teknis Sarana Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan target Tahun 2024 sebesar Rp700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp206.519.100,00 atau sebesar 29,50%. Mengalami **penurunan** penerimaan sebesar Rp101.278.300,00 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp307.797.400,00 atau -32,90%.
   b. Dinas Lingkungan Hidup berupa penjualan pupuk kompos yang baru ditargetkan Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.405.000,00 atau 68.10%

j) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Tahun 2024 baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024, pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan penyewaan tempat usaha berupa bengkel pada IKM Logam sebanyak 3 unit gudang yang ditargetkan sebesar Rp10.800.000,00 terealisasi 100%.

k) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan ditargetkan sebesar Rp40.500.000,00 terealisasi sebesar Rp24.540.000,00 atau sebesar 60,59% terdapat pada:

1) Dinas Perh ubungan ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 terealiasi sebesar Rp9.000.000,00 atau 30%. Dari total penerimaan tersebut, terdapat sebesar Rp1.400.000,00 pada tanggal 31 Desember 2024 masih berada di Rekening Penampungan Kas Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, namun telah disetor ke Kas Daerah tanggal 13 Januari 2025.
2) RSUD Sungai Dareh ditargetkan sebesar Rp10.500.000,00 terealisasi sebesar Rp15.540.000,00 atau sebesar 148%.

l) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan perubahan dari Pendapatan Tahun 2023 yang tercatat sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut berupa Pemakaian Rumah Dinas, Pemakaian Gedung Auditorium dan Gedung Pertemuan di Kecamatan, Sewa ATM, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), dan Sewa Alat Berat. Retribusi ini ditargetkan sebesar

Rp1.273.205.000,00 dengan realisasi sebesar Rp880.153.200,00 atau 69,13%. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terdapat pada 16 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.9
Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dinas Pendidikan	60.000.000,00	68.569.200,00	114,28	50.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	63.213.000,00	105,36	42.462.000,00
3	Puskesmas Sialang	0,00	20.875.000,00	0,00	0,00
4	RSUD Sungai Dareh	14.000.000,00	14.400.000,00	102,86	14.400.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20,00	94.570.000,00	15,76	234.388.720,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	240.000.000,00	289.300.000,00	120,54	205.450.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.000.000,00	1.530.000,00	76,50	0,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.000.000,00	4.300.000,00	17,20	0,00
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pertanian	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	0,00
11	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13.980.000,00	11.237.500,00	80,38	12.550.428,00
12	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	120.000.000,00	160,00	104.560.000,00
13	Badan Keuangan Daerah	83.000.000,00	86.408.500,00	104,11	0,00
14	Kecamatan Pulau Punjung	3.000.000,00	3.500.000,00	116,67	3.250.000,00
15	Kecamatan Sitiung	1.750.000,00	2.000.000,00	114,29	1.500.000,00
16	Kecamatan Koto Baru	2.000.000,00	4.750.000,00	237,50	1.750.000,00
17	Kecamatan Sungai Rumbai	6.475.000,00	10.750.000,00	166,02	3.540.000,00
18	Kecamatan Sembilan Koto	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.000.000,00
19	Kecamatan Timpeh	2.500.000,00	2.750.000,00	110,00	750.000,00
20	Kecamatan Koto Besar	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Jumlah		**1.273.205.000,00**	**880.153.200,00**	**69,13**	**676.601.148,00**

m) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berupa persetujuan bangunan gedung dan serfikat laik fungsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target penerimaan Tahun 2024 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp342.522.787,00 atau sebesar 114,17%.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.a.3.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.347.929.006,00**	**4.832.210.107,00**

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.10
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Deviden Bank Nagari Tahun 2023	5.334.340.116,00	5.334.340.116,00	100	4.820.177.266,00
2	Deviden BPR Pulau Punjung Tahun 2023	13.588.890,00	13.588.890,00	100	12.032.841,00
	Jumlah	**5.347.929.006,00**	**5.347.929.006,00**	**100**	**4.832.210.107,00**

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp5.347.929.006,00 dengan realisasi 100% yang berasal dari penerimaan deviden Bank Nagari Tahun 2023 sebesar Rp5.334.340.116,00 dan penerimaan deviden PT BPR Pulau Punjung Tahun 2023 sebesar Rp13.588.890,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp4.832.210.107,00 penerimaan untuk Tahun 2024 mengalami **kenaikan** sebesar Rp515.718.899,00 atau 10,67%.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.a.4.	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	**11.988.036.841,01**	**85.022.257.585,15**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp12.199.230.000,00 dengan realisasi Rp11.988.036.841,01 atau 98,27%. Terdapat penurunan pendapatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp73.034.220.744,14 atau -609,23%. Tinginya angka penurunan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023, disebabkan adanya perpindahan target Pendapatan Jasa Layanan BLUD dan Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD ke Pendapatan Retribusi dan perpindahan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP ke Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.11
Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000,00	380.741.100,00	126,91	0,00
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	589.917.100,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	150.464.000,00
4	Jasa Giro	1.010.000.000,00	900.964.205,71	89,20	643.906.908,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	8.800.000.000,00	9.039.251.467,21	102,72	1.684.241.231,38
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.203.500.000,00	1.270.764.474,09	105,59	906.706.078,00
7	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00	37.632.514,00	7,53	217.543.299,16
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	102.475.000,00	80.075.452,00	78,14	118.127.388,90
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.255.000,00	6.087.628,00	73,74	9.108.900,00
10	Pendapatan dari Pengembalian	275.000.000,00	272.520.000,00	99,10	5.153.594.959,00
11	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	66.641.212.874,73
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	8.907.434.846,00
JUMLAH		**12.199.230.000,00**	**11.988.036.841,01**	**98,27**	**85.022.257.585,17**

Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 terdiri dari delapan obyek penerimaan. Adapun perbedaan dengan Tahun 2023 yaitu berkurangnya tiga obyek penerimaan atas Hasil Penjualan Aset Lainnya- Aset Lain-lain, Pendapatan BLUD dan Pendapatan Dana Kapitasi. Berdasarkan realisasi penerimaan dari **delapan** obyek penerimaan dibandingkan tahun 2023, terdapat **empat** obyek penerimaan mengalami **kenaikan** penerimaan dan **empat** obyek penerimaan mengalami **penurunan**, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sub rincian objeknya adalah pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang, target Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp380.741.000,00 atau 126,91%. Penerimaan Hasil Penjualan BMD ini terdiri dari penerimaan atas penjualan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 28 November 2024 yang laku terjual sebanyak 42 item lelang dengan realisasi sebesar Rp339.950.000,00 sisanya sebesar Rp40.794.000,00 merupakan penjualan langsung atas sisa pembongkaran bangunan gedung-gedung sekolah.

2. **Jasa Giro**

Penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.010.000.000,00 terealisasi sebesar Rp900.964.205,71 atau 89,20%. Jasa Giro terdiri dari :

a) Jasa Giro pada Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp750.000.000,00 terealisasi sebesar Rp750.556.371,00 atau 100,07%. Terjadi **kenaikan** penerimaan sebesar Rp277.379.123,00 atau 58,62% dibandingkan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp473.177.248,00. Hal ini disebabkan banyaknya saldo kas yang mengendap di Kas Daerah.
b) Jasa Giro pada Kas di Bendahara dianggarkan sebesar Rp260.000.000,0 terealisasi sebesar Rp150.407.834,00 atau 57,85%. Terjadi **penurunan** penerimaan sebesar Rp20.321.825,29 atau -11,9% dibandingkan penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp 170.729.660,00. Tidak banyaknya saldo kas yang mengendap di rekening Kas Bendahara memberikan dampak penurunan penerimaan jasa giro Tahun 2024.

3. **Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**

Penerimaan Kerugian Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dikembalikan ke Kas Daerah berupa temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang telah dilakukan penetapan keputusan kerugian daerahnya terdiri dari Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Penerimaan Kerugian Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp8.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp9.039.251.467,21 atau 102,72%. Terdapat kenaikan penerimaan sebesar Rp7.355.010.235,83 atau 436,7% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp1.684.241.231,38 berupa pengembalian temuan LHP BPK atas Belanja Daerah dan LKPD Tahun 2023 yang disetor ke kas daerah Tahun 2024 serta penerimaan piutang TGR tahun-tahun sebelumnya.

4. **Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terdiri dari penerimaan penutupan rekening yang tidak aktif, penerimaan bunga deposito berasal dari penempatan deposito selama Tahun 2024. Target Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.203.500.000,00 dengan penerimaan sebesar Rp1.270.764.474,09 atau 105,59%. Terdapat **kenaikan** pendapatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp364.058.396,09 atau 40,15%.

5. **Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Penerimaan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan berupa penerimaan dari penyedia barang/jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak karena kesalahan penyedia

barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Penerimaan denda keterlambatan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.632.514,00 atau 7,53%. Mengalami **penuruan** sebesar Rp179.910.785,16 atau 82,70% dibandingkan penerimaan tahun 2023 sebesar Rp217.543.299,16.

6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Penerimaan Pendapatan Denda Pajak Daerah baru dianggarkan pada Tahun 2024 dengan target sebesar Rp102.475.000,00 dengan realisasi sebesar Rp80.075.452,00 atau 78,14%, dengan uraian realisasi sebagai berikut :

a. Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp320.061,00
b. Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp 2.537.324,00
c. Pendapatan Denda Pajak Reklame Rp 1.456.531,00
d. Pendapatan Denda Parkir Rp49.800,00
e. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Rp413.162,00
f. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp858.085,00
g. Pendapatan Denda PBBP2 sebesar Rp74.440.489,00

7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Daerah baru dianggarkan pada Tahun 2024 dengan target sebesar Rp8.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.087.628,00 atau 73,74%, dengan uraian realisasi sebagai berikut :

a. Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp93.000,00
b. Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan Rp4.267.028,00
c. Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp1.727.600,00.

8. Pendapatan Dari Pengembalian

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian terdiri dari Pengembalian Temuan pada saat NHP/LHP APIP yang tidak tercantum dalam kerugian daerah dan pengembalian pendapatan yang berasal dari keterlanjuran pembayaran Tunjangan Jabatan PNS tahun sebelumnya.

Penerimaan Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 dianggarkan di BKD sebesar Rp275.000.000,00 terealisasi sebesar Rp272.520.000,00 atau 99,10%, dengan uraian sebagai berikut :

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa Rp257.303.414,00.
b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS Rp15.216.586,00.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.	**Pendapatan Transfer**	**850.689.858.617,00**	**819.526.123.990,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh suatu entitas pelaporan dari entitas pelaporan lainnya yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dana Transfer dari Pemerintah Pusat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah.

Pendapatan Transfer Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp880.926.579.803,00 dengan realisasi Rp850.689.858.617,00 atau sebesar 96,57%. Pendapatan Transfer Tahun 2024 mengalami

kenaikan sebesar Rp31.163.734.627,00 atau 3,80% dibandingkan tahun lalu. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.12

Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	796.228.371.644,00	792.448.801.416,00	99,53	770.898.639.315,00
	a Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	720.162.822.644,00	716.383.072.416,00	99,48	707.811.761.315,00
	b Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	76.065.549.000,00	76.065.729.000,00	100,00	63.086.878.000,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	84.698.208.159,00	58.241.057.201,00	68,76	48.627.484.675,00
	JUMLAH	**880.926.579.803,00**	**850.689.858.617,00**	**96,57**	**819.526.123.990,00**

Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.1.	**Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**	**716.383.072.416,00**	**707.811.761.315,00**

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Dengan adanya penyesuaian anggaran dan belanja Negara Tahun 2024, maka dilakukanlah perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dianggarkan pada Tahun 2024 sebesar Rp720.162.822.644,00 dengan realisasi sebesar Rp716.383.072.416,00 atau 99,48%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp707.811.761.315,00, Pendapatan Transfer Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.571.311.101,00 atau 1,21%.

Tabel 5.1.13

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil Pajak	11.920.351.000,00	14.676.153.000,00	123,12	15.830.852.055,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18.103.314.000,00	22.402.073.000,00	123,75	19.414.761.014,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	519.999.606.000,00	512.944.707.932,00	98,643	489.147.246.531,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	170.139.551.644,00	166.360.138.484,00	97,779	183.418.901.715,00
JUMLAH		**720.162.822.644,00**	**716.383.072.416,00**	**99,475**	**707.811.761.315,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.1.a	**Bagi Hasil Pajak**	**14.676.153.000,00**	**15.830.852.055,00**

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan Bagi Hasil Pajak dianggarkan Rp11.920.351.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.676.153.000,00 atau sebesar 123,12%. Penerimaan Bagi Hasil

Pajak mengalami penurunan sebesar Rp1.154.699.055,00 atau -7,29% dibandingkan penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp15.830.852.055,00. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.14
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)				
1	**Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan**	**3.941.024.000,00**	**4.832.909.000,00**	**122,63**	**5.380.111.457,00**
a	DBH PPh Pasal 21	3.941.024.000,00	4.688.537.000,00	118,97	5.117.842.874,00
b	DBH PPh Pasall 25/29 OP	-	144.372.000,00	-	262.268.583,00
2	**Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**	**7.936.695.000,00**	**9.802.804.000,00**	123,51	**10.403.208.103,00**
a	- DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/ Kota	7.936.695.000,00	9.802.804.000,00	123,51	10.403.208.103,00
3	**Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**	**42.632.000,00**	**40.440.000,00**	94,86	**47.532.495,00**
a	DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota	42.632.000,00	40.440.000,00	94,86	47.532.495,00
JUMLAH		**11.920.351.000,00**	**14.676.153.000,00**	**123,12**	**15.830.852.055,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.1.b	**Bagi Hasil Sumber Daya Alam**	**22.402.073.000,00**	**19.414.761.014,00**

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp18.103.314.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.402.073.000,00 atau 123,75%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.987.311.986,00 atau 15,39% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp19.414.761.014,00. Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.15
Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	**18.103.314.000,00**	**22.402.073.000,00**	**123,75**	**19.414.761.014,00**
a.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	7.270.000,00	10.414.000,00	143,25	51.780.000,00
b.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	6.192.233.000,00	10.331.892.000,00	166,85	5.350.049.000,00
c.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	229.185.498,00
d	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	775.542.000,00	1.261.072.000,00	162,61	1.221.787.626,00
e.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	10.031.114.000,00	9.701.540.000,00	96,71	11.090.264.679,00
f.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.471.694.211,00
JUMLAH		**18.103.314.000,00**	**22.402.073.000,00**	**123,75**	**19.414.761.014,00**

Penerimaan Dana Bagi Hasil yang masuk ke Kas Daerah Tahun 2024 terdiri atas Penyaluran Transfer Tahun 2024 dan penerimaan Dana *Treasury Defosit Facilty* (TDF) Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.16
Sumber Pendapatan Dana Bagi Hasil Tahun 2024

No	Uraian	TDF 2023	Transfer 2024	Penerimaan Kasda 2024
1	**Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan**	**891.885.000,00**	**3.941.024.000,00**	**4.832.909.000,00**

No	Uraian	TDF 2023	Transfer 2024	Penerimaan Kasda 2024
a	DBH PPh Pasal 21	885.330.000,00	3.796.652.000,00	4.681.982.000,00
b	DBH PPh Pasal 25/29 OP	6.555.000,00	144.372.000,00	150.927.000,00
2	**Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan**	**1.866.109.000,00**	**7.936.695.000,00**	**9.802.804.000,00**
3	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi**	**3.144.000,00**	**7.270.000,00**	**10.414.000,00**
4	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara**	**4.139.659.000,00**	**6.192.233.000,00**	**10.331.892.000,00**
a	DBH SDA Minerba - Iuran Tetap	16.971.000,00	22.733.000,00	39.704.000,00
b	DBH SDA Minerba - Royalti	4.122.688.000,00	6.169.500.000,00	10.292.188.000,00
5	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi**	**485.530.000,00**	**775.542.000,00**	**1.261.072.000,00**
a	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap	50.841.000,00	46.872.000,00	97.713.000,00
b	DBH SDA Panas Bumi - Iuran Produksi	434.689.000,00	728.670.000,00	1.163.359.000,00
6	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan**	**-**	**9.701.540.000,00**	**9.701.540.000,00**
7	**Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan**	**-**	**1.097.155.000,00**	**1.097.155.000,00**
8	**DBH Cukai untuk Prov/Kab/Kota**	**-**	**40.440.000,00**	**40.440.000,00**
	Jumlah	**7.386.327.000,00**	**29.691.899.000,00**	**37.078.226.000,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.1.c.	**Dana Alokasi Umum**	**512.944.707.932,00**	**489.147.246.531,00**

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp519.999.606.000,00 terealisasi sebesar Rp512.944.707.932,00 atau 98,64%. Penerimaan DAU Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.797.461.401,00 atau 4,87% dibandingkan penerimaan Tahun 2023 sebesar RpRp489.147.246.531,00. Adapun rincian DAU Tahun 2024 terdiri dari :

Tabel 5.1.17
Rincian DAU Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5=4/3	6
1	DAU	422.691.705.000,00	422.691.705.000,00	100	300.804.874.531,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	20.734.362.000,00	13.679.463.932,00	65,97	58.668.492.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	33.343.800.000,00	33.343.800.000,00	100	66.922.648.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	16.365.536.000,00	16.365.536.000,00	100	26.329.033.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	26.864.203.000,00	26.864.203.000,00	100	36.422.199.000,00
	Jumlah	**519.999.606.000,00**	**512.944.707.932,00**	**98,64**	**489.147.246.531,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.1.d	**Dana Alokasi Khusus**	**166.360.138.484,00**	**183.418.901.715,00**

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan Dana Alokasi Khusus direncanakan Rp170.139.551.644,00 dan terealisasi Rp166.360.138.484,00 atau sebesar 97,78%. Penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17.058.763.231,00 atau -9,3% dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Tahun 2023 sebesar Rp183.418.901.715,00. Jika Dana Alokasi

Umum (DAU) diberikan kepada setiap daerah, maka Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya diberikan kepada daerah yang memiliki kegiatan khusus yang memiliki prioritas nasional tinggi dan memenuhi kriteria tertentu.

Tabel 5.1.18
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	36.038.894.000,00	34.621.165.717,00	96,07	58.171.037.299,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	134.100.657.644,00	131.738.972.767,00	98,24	125.247.864.416,00
JUMLAH		**170.139.551.644,00**	**166.360.138.484,00**	**97,78**	**183.418.901.715,00**

1) Dana Aloksi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penerimaan DAK Fisik Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.19
Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	10.416.151.000,00	9.898.329.250,00	95,03	1.661.190.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.742.380.000,00	4.728.640.261,00	99,71	9.210.673.951,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	656.592.000,00	569.310.000,00	86,71	1.429.134.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	486.379.000,00	483.177.500,00	99,34	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	110.300.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	13.460.724.000,00	12.679.434.706,00	94,20	18.999.769.528,00
7	DAK Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting	91.794.000,00	77.700.000,00	84,65	1.403.472.980,00
8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	9.461.215.840,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	6.184.874.000,00	6.184.574.000,00	100,00	15.895.281.000,00
JUMLAH		**36.038.894.000,00**	**34.621.165.717,00**	**96,07**	**58.171.037.299,00**

2) Dana Aloksi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-Non Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Penerimaan DAK Non Fisik Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.20
Realisasi DAK Non Fisik Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD	61.966.377.000	59.707.154.000	96,35	55.616.138.720,00
2	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.100.669.000	3.550.290.000	114,50	2.270.640.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.119.500.000	2.750.575.000	129,77	602.080.800,00
4	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	11.534.395.000	10.684.376.220	92,63	7.007.959.993,00
5	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	-	403.679.400,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
6	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	332.678.500,00	89,35	400.179.050,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.700.115.000	9.863.223.644	77,66	13.546.696.950,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.233.078.644	3.997.734.621	324,21	3.398.236.550,00
9	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000	398.452.445	76,63	307.597.492,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	580.092.000	565.061.300	97,41	511.082.000,00
11	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	876.835.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	33.551.300.000	33.532.789.037	99,94	33.427.416.461,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.237.500.000	1.237.500.000	100,00	1.450.000.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.221.600.000	4.192.128.000	99,30	4.422.522.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	60.000.000	60.000.000	100,00	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	768.700.000	732.010.000	95,23	1.006.800.000,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000	135.000.000	100,00	0,00
JUMLAH		**134.100.657.644,00**	**131.738.972.767,00**	**98,24**	**125.247.864.416,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.2.	**Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya**	**76.065.729.000,00**	**63.086.878.000,00**

Pada Tahun Anggaran 2024 penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dianggarkan sebesar Rp76.065.549.000,00 terealisasi 100%. Penerimaan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp12.978.851.000,00 atau 20,57%. Penerimaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.21
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
A.	**Dana Penyesuaian**				
1	Dana Desa	55.320.687.000,00	55.320.687.000,00	100%	54.485.661.000,00
2	Dana Insentif Daerah	20.744.862.000,00	20.745.042.000,00	100%	8.601.217.000,00
JUMLAH		**76.065.549.000,00**	**76.065.729.000,00**	**100%**	**63.086.878.000,00**

Untuk Penerimaan Transfer Dana Desa pada Tahun 2024 sebesar Rp55.320.687.000,00 tidak melalui RKUD, tetapi ditransfer dari KPPN ke Rekening Kas Desa. Sumber pencatatan Dana Desa di Laporan Realisasi Anggaran adalah data dari SIKD Next Generation Kementerian Keuangan dan Laporan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 2** pada Laporan Keuangan ini

V.A.1.b.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2024 terdiri dari.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.b.3.a.	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**58.241.057.201,00**	**48.627.484.675,00**

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp84.698.208.159,00 dengan realisasi sebesar Rp58.241.057.201,00 atau sebesar 68,76%. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp48.627.484.675,00 terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp9.613.572.526,00 atau 19,77%.

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp58.241.057.201,00 berasal dari penerimaan Tahun 2024 sebesar Rp40.282.085.918,00 dan penerimaan piutang kurang salur Tahun 2023 sebesar Rp17.958.971.283,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.22
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Bagi Hasil	Anggaran	Penerimaan Tahun 2024				2023
			2024	Piutang 2023	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	16.956.485.844	11.009.177.196,00	4.022.663.729,00	15.031.840.925,00	88,65	10.515.388.657,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	8.897.491.963	2.843.703.036,00	1.788.234.373,00	4.631.937.409,00	52,06	5.588.342.343,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	41.316.111.334	11.677.944.924,00	12.121.249.022,00	23.799.193.946,00	57,60	18.291.582.610,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	290.602.393	105.511.294,00	26.824.159,00	132.335.453,00	45,54	137.247.066,00
5	Pajak Rokok	17.237.516.625	14.645.749.468,00	0	14.645.749.468,00	84,96	14.094.923.999,00
	Jumlah	**84.698.208.159,00**	**40.282.085.918,00**	**17.958.971.283,00**	**58.241.057.201,00**	**68,76**	**48.627.484.675,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.1.c.	**Lain-Lain Pendapatan yang Sah**	**11.762.349.299,00**	**1.991.137.370,00**

Rencana penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 pada APBD Perubahan dianggarkan sebesar Rp11.864.153.215,00 dengan realisasi sebesar Rp11.762.349.299,00 atau 99,14%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.991.137.370,00 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.771.211.929,00 atau 490,74%.

Kenaikan target pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 karena ada reklasifikasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – Lain-Lain PAD yang Sah ke Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari target sebesar Rp11.764.153.215,00 terealisasi sebesar Rp11.690.998.858,00 atau 99,38%.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp71.350.441,00 dengan persentase 71,35%. Pemberi hibah adalah perusahaan sektor perkebunan yang ada di Dharmasraya.

Penerimaan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.23
Penerimaan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	-	1.924.000.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	100.000.000,00	71.350.441,00	71,35	67.137.370,00

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11.764.153.215,00	11.690.998.858,00	99,38	0,00
JUMLAH		**11.864.153.215,00**	**11.762.349.299,00**	**99,14**	**1.991.137.370,00**

1. Pendapatan Kapitasi Puskesmas

Penganggaran Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, diangkarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD sedangkan rencana belanja Kapitasi dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.

Reklasifikasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP – Lain-Lain PAD yang Sah ke Lain-Lain Pendapatan yang Sah terjadi pada penganggaran Tahun 2024, dianggarkan pada DPA Badan Keuangan Daerah sebesar Rp11.764.153.215,00 terealisasi sebesar Rp11.690.998.858,00 atau 99,38% mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.783.564.012,00 atau 31,25% dibandingkan penerimaan Dana Kapitasi Tahun 2023.

Tabel di bawah ini membandingkan Realisasi Pendapatan Kapitasi Puskesmas pada Tahun 2024 dengan Tahun 2023, walaupun jenis penerimaannya sudah direklas dari Lain-Lain PAD yang Sah-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP ke Lain-Lain Pendapatan yang Sah-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Penerimaan Kapitasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	1.086.000.000,00	1.118.225.326,00	102,97	719.135.582,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	281.500.000,00	294.345.870,00	104,56	277.361.793,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	779.569.623,00	815.086.603,00	104,56	683.352.651,00
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	436.834.812,00	389.504.483,00	89,17	277.888.781,00
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.848.000.000,00	1.803.082.181,00	97,57	1.477.675.751,00
6	BLUD Puskesmas Silago	651.441.222,00	679.659.028,00	104,33	589.024.157,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	660.000.000,00	651.977.466,00	98,78	556.626.931,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	1.222.849.095,00	1.223.924.003,00	100,09	833.998.166,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.431.661.463,00	1.520.596.410,00	106,21	1.103.394.129,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	703.617.000,00	646.462.121,00	91,88	478.155.463,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	737.630.000,00	747.478.187,00	101,34	580.955.745,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	610.050.000,00	642.069.854,00	105,25	404.638.332,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	898.000.000,00	888.658.166,00	98,96	716.617.204,00
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	392.000.000,00	269.929.160,00	68,86	208.610.161,00
15	BLUD Laboratoium Kesehatan Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**11.764.153.215,00**	**11.690.998.858,00**	**99,38**	**8.907.434.846,00**

V.A.2. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah. Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset

Lainnya. Belanja Tak Terduga dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak direncanakan dalam APBD tahun berjalan. Sedangkan Belanja Transfer merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya untuk Nagari di Kabupaten Dharmasraya.

Anggaran belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.060.684.455.529,00 dengan realisasi Rp1.013.167.924.077,29 atau sebesar 95,52%. Mengalami kenaikan belanja sebesar Rp81.672.641.108,53 atau 8,06% dibandingkan belanja Tahun 2023 sebesar Rp931.495.282.968,76.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023 terdiri dari :

Tabel 5.1.25
Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Operasi	828.429.541.746,00	793.179.544.263,13	95,74	680.833.715.658,76
2	Belanja Modal	113.003.447.993,00	102.187.717.063,16	90,43	137.284.235.323,00
3	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	2.485.520.287,00	82,85	3.924.380.709,00
4	Belanja Transfer	116.251.465.790,00	115.315.142.464,00	99,19	109.452.951.278,00
	JUMLAH	**1.060.684.455.529,00**	**1.013.167.924.077,29**	**95,52**	**931.495.282.968,76**

Adapun penjelasan Anggaran dan Realisasi pos-pos Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.a.	**Belanja Operasi**	**793.179.544.263,13**	**680.833.715.658,76**

Belanja Operasi TA 2024 direncanakan Rp828.429.541.746,00 dengan realisasi sebesar Rp793.179.544.263,13 atau sebesar 95,74%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp680.833.715.658,76 terjadi kenaikan sebesar Rp112.345.828.604,37 atau 14,16%.

Tabel 5.1.26
Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	469.211.518.709,00	454.911.665.442,94	96,95	373.990.257.238,36
2	Belanja Barang dan Jasa	324.625.008.037,00	304.013.952.063,19	93,65	278.076.015.874,40
3	Hibah	34.593.015.000,00	34.253.926.757,00	99,02	28.767.442.546,00
	JUMLAH	**828.429.541.746,00**	**793.179.544.263,13**	**95,74**	**680.833.715.658,76**

Realisasi Belanja Operasi masing-masing OPD Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3** Laporan Keuangan ini.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.a.1.	**Belanja Pegawai**	**454.911.665.442,94**	**373.990.257.238,36**

Belanja Pegawai Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp469.211.518.709,00 dengan realisasi Rp454.911.665.442,94 atau 96,95%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp373.990.257.238,36 terjadi peningkatan sebesar Rp80.921.408.204,58 atau 21,64%.

Belanja Pegawai Tahun 2024 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 5.1.27

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
A	**Belanja Pegawai**	**469.211.518.709,00**	**454.911.665.442,94**	**96,95**	**373.990.257.238,36**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	312.259.341.868,00	306.466.231.954,00	98,14	244.538.656.574,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.775.486.000,00	43.669.061.704,00	97,53	29.347.638.293,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	73.487.643.800,00	69.042.538.710,00	93,95	60.903.373.586,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.716.925.974,00	11.159.937.860,00	95,25	11.036.458.188,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	557.777.200,00	430.965.781,00	77,26	444.495.059,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.000.000,00	474.756.000,00	93,09	510.876.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	25.904.343.867,00	23.668.173.433,94	91,37	27.208.759.538,36
JUMLAH		**469.211.518.709,00**	**454.911.665.442,94**	**96,95**	**373.990.257.238,36**

Adapun rincian belanja pegawai Tahun 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp306.454.372.676,00, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.28

Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**312.259.341.868,00**	**306.466.231.954,00**	**98,14**	**244.538.656.574,00**
a	Belanja Gaji Pokok ASN	231.781.781.810,00	228.070.156.036,00	98,40	182.363.020.999,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	23.605.170.016,00	23.174.366.415,00	98,17	18.533.276.974,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	3.814.187.008,00	3.535.459.869,00	92,69	4.553.904.950,00
d	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.249.148.020,00	21.860.575.162,00	98,25	15.350.621.190,00
e	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.063.032.000,00	1.016.237.045,00	95,60	1.296.880.000,00
f	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.581.474.000,00	13.365.110.825,00	98,41	11.325.219.313,00
g	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	1.260.229.002,00	1.072.473.077,00	85,10	151.420.119,00
h	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.760.012,00	3.508.946,00	45,22	2.633.888,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.972.713.000,00	12.476.233.481,00	96,17	9.445.237.096,00
j	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	481.817.000,00	471.940.475,00	97,95	379.112.000,00
k	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.442.030.000,00	1.420.170.623,00	98,48	1.137.330.045,00
JUMLAH		**312.259.341.868,00**	**306.466.231.954,00**	**98,14**	**244.538.656.574,00**

2) Tambahan Penghasilan Pegawai dan Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp136.405.669.655,94, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.29

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai dan Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
2	**Belanja Tambahan Penghasilan**	**144.167.473.667,00**	**136.405.669.655,94**	**94,62**	**117.459.771.417,36**
1)	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**44.775.486.000,00**	**43.669.061.704,00**	**97,53**	**29.347.638.293,00**

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
a	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	44.775.486.000,00	43.669.061.704,00	97,53	29.347.638.293,00
2)	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**73.487.643.800,00**	**69.068.434.518,00**	**93,99**	**60.903.373.586,00**
a	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	985.114.000,00	809.279.643,00	82,15	737.634.843,00
b	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	94.278.800,00	44.288.475,00	46,98	53.395.091,00
c	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	62.924.884.000,00	60.062.543.200,00	95,45	54.869.097.357,00
d	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.210.797.000,00	2.619.546.200,00	81,59	2.253.806.295,00
e	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.128.500.000,00	2.049.250.000,00	96,28	675.750.000,00
f	Belanja Honorarium PNS	3.490.320.000,00	2.998.327.000,00	85,90	1.936.990.000,00
g	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	653.750.000,00	485.200.000,00	74,22	376.700.000
3)	**Belanja Pegawai BLUD**	**25.904.343.867,00**	**23.668.173.433,94**	**91,37**	**27.208.759.538,36**
JUMLAH		**144.167.473.667,00**	**136.405.669.655,94**	**94,62**	**117.459.771.417,36**

Anggaran Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp25.904.343.867,00 terealisasi sebesar Rp23.668.173.433,94 atau 91,37 %. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp27.208.759.538,36 terjadi penurunan sebesar Rp3.540.586.104,42 atau -13,01%.

3) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp12.065.659.641,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.1.30

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
3	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dan KDH/WKDH**	**12.784.703.174,00**	**12.065.659.641,00**	**94,38**	**11.991.829.247,00**
1)	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**11.716.925.974,00**	**11.159.937.860,00**	**95,25**	**11.036.458.188,00**
a	Belanja Uang Representasi DPRD	672.000.000,00	667.695.000,00	99,36	671.790.000,00
b	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	68.600.000,00	66.828.300,00	97,42	38.858.400,00
c	Belanja Tunjangan Beras DPRD	80.130.000,00	75.823.740,00	94,63	77.344.560,00
d	Belanja Uang Paket DPRD	59.000.000,00	57.172.500,00	96,90	57.582.000,00
e	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.010.000.012,00	968.157.750,00	95,86	974.095.500,00
f	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.912.000,00	86.949.975,00	87,91	96.282.900,00
g	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	38.395.000,00	22.883.183,00	59,60	30.602.250,00
h	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.294.800.000,00	2.261.700.000,00	98,56	2.268.000.000,00
i	Belanja Tunjangan Reses DPRD	568.000.000,00	365.400.000,00	64,33	560.700.000,00
j	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.000.000,00	180.264,00	18,03	270.396,00
k	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1.000.006,00	0,00	0,00	0,00
l	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.195.800.000,00	2.142.812.148,00	97,59	2.178.532.182,00
m	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.353.288.956,00	4.170.600.000,00	95,80	4.082.400.000,00
n	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	276.000.000,00	273.735.000,00	99,18	0,00
2)	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**557.777.200,00**	**430.965.781,00**	**77,26**	**444.495.059,00**
a	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.440.000,00	29.400.000,00	53,03	29.400.000,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
b	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.762.000,00	4.116.000,00	53,03	4.116.000,00
c	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.792.000,00	52.920.000,00	53,03	52.920.000,00
d	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.648.000,00	4.055.520,00	53,03	3.765.840,00
e	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.000.000,00	989.638,00	98,96	267.521,00
f	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000.000,00	556,00	0,06	536,00
g	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.500.000,00	2.963.520,00	45,59	2.963.520,00
h	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	750.000,00	60.480,00	8,06	60.480,00
i	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	1.000.000,00	181.440,00	18,14	181.440,00
j	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	336.480.000,00	317.297.852,00	94,30	327.936.111,00
k	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	40.405.200,00	18.980.775,00	46,98	22.883.611,00
3)	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**510.000.000,00**	**474.756.000,00**	**93,09**	**510.876.000,00**
a	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	110.000.000,00	74.760.000,00	67,96	110.880.000,00
b	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	399.996.000,00	100,00	399.996.000,00
JUMLAH		**12.784.703.174,00**	**12.065.659.641,00**	**94,38**	**11.991.829.247,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.a.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**304.013.952.063,19**	**278.076.015.874,40**

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pembelian barang maupun jasa yang digunakan untuk memperlancar operasional seluruh kegiatan yang akhirnya dapat memperlancar tugas-tugas pemerintahan.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp324.625.008.037,00 terealisasi sebesar Rp304.013.952.063,19 atau 93,65%. Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp25.937.936.188,79 atau 9,33 %.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.1.31
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian 2023	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	68.749.541.283,00	65.247.356.095,39	94,91	66.342.458.311,00
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.691.397.300,00	1.603.105.200,00	94,78	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	54.744.085.658,00	50.806.975.596,00	92,81	53.877.376.865,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.606.933.350,00	25.761.420.440,00	96,82	12.574.783.269,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.945.484.800,00	2.751.137.026,00	93,40	3.282.479.100,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.406.029.200,00	2.387.673.070,00	99,24	1.213.839.329,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.713.000,00	99,71	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	750.000.000,00	548.155.930,00	73,09	581.288.200,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	11.165.407.250,00	9.653.903.178,00	86,46	2.256.681.425,00
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.501.370.400,00	5.115.334.210,00	92,98	5.103.903.341,00

No	Uraian 2023	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	268.817.650,00	213.206.400,00	79,31	846.015.500,00
13	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.492.011.500,00	3.451.341.900,00	98,84	2.923.932.770,00
14	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.934.193.425,00	58.477.682.067,00	95,97	58.424.396.541,00
15	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	712.009.236,00	681.568.789,00	95,72	328.802.918,00
16	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.032.850.000,00	1.031.960.000,00	99,91	162.626.000,00
17	Belanja Barang dan Jasa BOS	157.135.000,00	48.585.000,00	30,92	24.831.556.670,00
18	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	22.864.923.608,00	22.826.610.780,00	99,83	0,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	614.400.000,00	577.362.216,00	93,97	0,00
20	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	139.800.000,00	136.200.000,00	97,42	0,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.730.408.200,00	1.658.108.477,00	95,82	0,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.011.460.177,00	50.929.802.688,80	87,79	45.325.875.635,40
Jumlah		**324.625.008.037,00**	**304.013.952.063,19**	**93,65**	**278.076.015.874,40**

a. Belanja Bahan Pakai Habis sebesar Rp65.247.356.095,39 terdiri dari:

Tabel 5.1.32
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	67.915.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	121.025.000,00	120.675.000,00	99,71	65.039.110,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.144.197.853,00	4.650.807.276,00	90,41	4.879.413.146,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	584.410.000,00	510.865.000,00	87,42	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00	546.556.250,00
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	21.600.000,00	20.672.000,00	95,70	24.925.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.343.375.000,00	416.447.000,00	31,00	598.760.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.850.000,00	19.725.000,00	99,37	3.784.063.500,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.744.520.215,00	2.728.985.175,00	99,43	30.412.400,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	15.660.800,00	14.083.240,00	89,93	19.516.825,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	154.922.100,00	146.666.000,00	94,67	124.524.000,00
12	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.690.000,00	1.690.000,00	100,00	0,00
13	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.014.800,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.719.000,00	489.514.815,00	97,76	1.265.674.010,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.102.260.600,00	1.084.985.900,00	98,43	908.472.550,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.807.173.700,00	2.673.013.564,00	95,22	2.894.351.799,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	268.920.000,00	268.102.000,00	99,70	187.520.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	809.987.200,00	797.430.860,00	98,45	901.139.500,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	51.170.000,00	50.929.000,00	99,53	19.737.000,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	476.706.000,00	471.013.420,00	98,81	445.522.400,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	28.085.000,00	28.005.000,00	99,72	111.134.500,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	137.365.000,00	136.383.000,00	99,29	26.900.000,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	95.650.000,00	94.675.716,00	98,98	380.127.500,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	912.490.200,00	905.750.706,00	99,26	1.411.884.305,00
25	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.958.705.000,00	4.767.980.455,00	96,15	1.805.031.597,00
26	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	33.463.700,00	33.449.282,00	99,96	2.668.033.303,00
27	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.911.412.100,00	13.187.485.614,39	94,80	22.600.387.864,00
28	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.662.623.315,00	22.359.239.323,00	98,66	3.996.558.597,00
29	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.248.382.000,00	1.228.699.600,00	98,42	1.648.089.854,00
30	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	123.097.500,00	118.929.500,00	96,61	105.740.000,00
31	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.640.000,00
32	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218.920.000,00	196.163.554,00	89,61	9.594.283.866,00
33	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	912.490.000,00	900.370.556,00	98,67	891.377.850,00
34	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	3.047.088.000,00	2.691.364.401,00	88,33	2.255.828.735,00
35	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.790.461.000,00	2.689.771.900,00	96,39	491.280.450,00
36	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	198.500.000,00	198.252.782,00	99,88	448.688.500,00
37	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	699.000.000,00	691.420.000,00	98,92	220.500.000,00
41	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	591.639.500,00
44	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	170.940.000,00	121.990.456,00	71,36	10.400.000,00
45	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	16.770.000,00	16.770.000,00	100,00	0,00
46	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	0,00
47	Belanja Pakaian Adat Daerah	156.800.000,00	156.570.000,00	99,85	42.712.600,00
48	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.500.000,00	52.100.000,00	99,24	0,00
49	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	63.800.000,00
50	Belanja Pakaian Paskibraka	197.301.000,00	197.069.000,00	99,88	172.862.000,00
JUMLAH		**68.749.541.283,00**	**65.247.356.095,39**	**94,91**	**66.342.458.311,00**

b. Belanja Aset tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi, merupakan belanja aset tetap peralatan dan mesin yang biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp1.000.000,00. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebesar Rp1.603.105.200,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.33
Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.120.000,00	1.120.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.070.000,00	4.875.000,00	96,15	0,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.470.549.600,00	1.386.753.500,00	94,30	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.805.000,00	3.070.000,00	80,68	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(),Home Use],	38.466.700,00	37.876.700,00	98,47	0,00
8	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.800.000,00	4.700.000,00	97,92	0,00
9	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	52.800.000,00	51.500.000,00	97,54	0,00
12	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	56.376.000,00	55.500.000,00	98,45	0,00
13	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	4.400.000,00	4.350.000,00	98,86	0,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.500.000,00	8.850.000,00	93,16	0,00
15	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.580.000,00	3.580.000,00	100,00	0,00
16	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	0,00
17	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.630.000,00	5.630.000,00	100,00	0,00
18	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	**1.691.397.300,00**	**1.603.105.200,00**	**94,78**	**0,00**

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, ketentuan mengenai nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp1.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, jika biaya perolehan

peralatan dan mesin kurang di bawah batasan minimal kapitalisasi aset tetap, dianggarkan dan dicatat pada kelompok belanja barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.

c. Belanja Jasa Kantor sebesar Rp50.806.975.596,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.34
Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	622.850.000,00	554.250.000,00	88,99	2.465.206.499,00
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	972.730.000,00	752.305.000,00	77,34	1.263.037.500,00
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	114.800.000,00	109.931.484,00	95,76	28.800.000,00
4	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	32.500.000,00	32.500.000,00	100,00	124.400.000,00
5	Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00	2.700.000,00	75,00	347.695.000,00
6	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	0,00
7	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	0,00
8	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	667.200.000,00	667.180.000,00	100,00	626.600.000,00
9	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00
10	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.608.189.000,00	3.476.671.573,00	96,36	3.998.205.409,00
11	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	337.476.000,00	231.442.083,00	68,58	52.769.874,00
12	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.210.180.000,00	3.077.160.000,00	95,86	2.798.281.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.012.000.000,00	990.400.000,00	97,87	1.111.170.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	429.260.000,00	405.340.000,00	94,43	0,00
15	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	132.160.000,00	100.330.000,00	75,92	23.918.571,00
16	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.099.370.000,00	1.762.995.000,00	83,98	235.950.000,00
17	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	138.220.000,00	127.400.000,00	92,17	1.583.690.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	157.300.000,00	147.915.000,00	94,03	58.320.000,00
19	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	780.956.500,00	774.949.669,00	99,23	414.780.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.104.220.000,00	10.912.325.000,00	90,15	10.720.100.000,00
21	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	85.110.000,00	84.285.000,00	99,03	87.735.000,00
22	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	80.160.000,00
23	Belanja Jasa Tenaga Ahli	398.640.000,00	380.640.000,00	95,48	469.611.320,00
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.269.010.000,00	3.955.800.000,00	92,66	4.082.245.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.937.070.000,00	2.793.360.000,00	95,11	2.666.940.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.254.280.000,00	1.963.080.000,00	87,08	2.043.070.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	401.830.000,00	393.210.000,00	97,85	374.475.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.470.000,00	7.980.000,00	94,21	42.256.500,00
29	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	164.500.000,00	163.500.000,00	99,39	
30	Belanja Jasa Tata Rias	220.700.000,00	218.500.000,00	99,00	31.900.000,00
31	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	241.010.900,00
32	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.370.000,00	28.023.580,00	98,78	110.000.000,00
33	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	783.621.500,00	772.151.000,00	98,54	122.655.000,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
35	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	706.700.000,00	624.482.500,00	88,37	0,00
36	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	105.800.000,00
37	Belanja Jasa Kalibrasi	156.629.200,00	155.680.657,00	99,39	0,00
38	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	9.420.000,00	8.679.720,00	92,14	43.999.410,00
39	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	39.000.000,00	38.400.000,00	98,46	3.479.520,00
40	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.250.000,00	5.000.000,00	48,78	0,00
41	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.910.320.000,00	1.909.104.000,00	99,94	13.023.200,00
42	Belanja Tagihan Telepon	677.195.000,00	642.629.470,00	94,90	1.280.965.800,00
43	Belanja Tagihan Air	48.965.000,00	31.366.600,00	64,06	884.950.651,00
44	Belanja Tagihan Listrik	10.120.141.046,00	9.702.355.709,00	95,87	41.965.800,00
45	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	1.680.000,00	93,33	4.126.649.323,00
46	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.591.210.012,00	1.541.451.014,00	96,87	1.120.000,00
47	Belanja Paket/Pengiriman	6.100.000,00	4.747.192,00	77,82	1.241.356.612,00
48	Belanja Penambahan Daya	24.929.400,00	24.874.600,00	99,78	6.781.999,00
49	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	464.515.000,00	271.178.605,00	58,38	42.164.167,00
50	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	267.605.810,00
51	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	8.000.000,00	0,00	0,00	5.500.000.000,00
52	Belanja Lembur	799.598.000,00	795.836.000,00	99,53	740.732.000,00
53	Belanja Medical Check Up	60.000.000,00	28.485.140,00	47,48	114.000.000,00
54	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	0,00	0,00	0,00	107.800.000,00
JUMLAH		**54.744.085.658,00**	**50.806.975.596,00**	**92,81**	**53.877.376.865,00**

d. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp25.761.420.440,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.35
Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2024 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.299.960.000,00	1.273.115.592,00	97,93	1.099.174.500,00
2	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PB	23.393.123.600,00	23.125.240.000,00	98,85	10.602.723.600,00
3	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.026.084.000,00	755.818.514,00	73,66	228.788.999,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	299.565.750,00	180.043.071,00	60,10	284.559.001,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	585.000.000,00	427.203.263,00	73,03	359.537.169,00
6	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**26.606.933.350,00**	**25.761.420.440,00**	**96,82**	**12.574.783.269,00**

e. Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.751.137.026,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.36
Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Belanja Sewa Alat Pengangkat	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	7.200.000,00
3	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	100,00	2.000.000,00
4	Belanja Sewa Electric Generating Set	61.065.000,00	60.890.000,00	99,71	50.000.000,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	541.900.000,00	487.039.866,00	89,88	590.886.000,00
6	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	205.600.000,00	204.000.000,00	99,22	46.900.000,00
7	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	633.500.000,00	580.780.000,00	91,68	1.048.655.500,00
9	Belanja Sewa Mebel	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Sewa Alat Pendingin	370.364.800,00	338.530.560,00	91,40	31.500.000,00
11	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	358.075.000,00	329.554.000,00	92,03	418.408.000,00
12	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	169.880.000,00	169.417.600,00	99,73	197.000.000,00
13	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	525.350.000,00	521.650.000,00	99,30	218.625.600,00
14	Belanja Sewa Peralatan Umum	45.000.000,00	42.525.000,00	94,50	607.604.000,00
15	Belanja Sewa Komputer Jaringan	18.000.000,00	0,00	0,00	56.700.000,00
JUMLAH		**2.945.484.800,00**	**2.751.137.026,00**	**93,40**	**3.282.479.100,00**

f. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.387.673.070,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.37
Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	120.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gudang	44.750.000,00	29.150.000,00	65,14	0,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	267.280.000,00
4	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.945.100.200,00	1.943.894.070,00	99,94	70.835.000,00
5	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	74.879.000,00	74.879.000,00	100,00	615.345.329,00
6	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	221.300.000,00	219.750.000,00	99,30	46.379.000,00
7	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
8	Belanja Sewa Pagar	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
JUMLAH		**2.406.029.200,00**	**2.387.673.070,00**	**99,24**	**1.213.839.329,00**

g. Belanja Sewa Aset Tetap lainnya sebesar Rp6.750.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.38

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**6.750.000,00**	**6.750.000,00**	**100,00**	**0,00**

h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp99.713.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.39

RealisasiBelanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00	99.713.000,00	99,71	0,00
JUMLAH		**100.000.000,00**	**99.713.000,00**	**99,71**	**0,00**

i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp548.155.930,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.40

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	296.580.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	400.000.000,00	199.618.000,00	49,90	0,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00	198.537.930,00	99,27	284.708.200,00
JUMLAH		**750.000.000,00**	**548.155.930,00**	**73,09**	**581.288.200,00**

j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp9.653.903.178,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.41
Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	769.605.000,00	711.949.426,00	92,51	66.140.000,00
2	Belanja Sosialisasi	7.125.437.700,00	6.009.723.900,00	84,34	0,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	3.162.419.550,00	2.824.284.852,00	89,31	1.719.651.425,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	107.945.000,00	107.945.000,00	100,00	470.890.000,00
JUMLAH		**11.165.407.250,00**	**9.653.903.178,00**	**86,46**	**2.256.681.425,00**

k. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.115.334.210,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.42
Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	275.000.000,00	254.201.750,00	92,44	493.005.519,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	49.500.000,00	30.101.900,00	60,81	84.108.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa	163.500.000,00	147.637.760,00	90,30	35.806.706,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350.000.000,00	281.050.986,00	80,30	533.427.169,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.943.630.400,00	2.792.617.724,00	94,87	2.260.658.338,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	310.450.000,00	297.077.769,00	95,69	83.504.316,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	483.750.000,00	441.981.289,00	91,37	461.152.828,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11.250.000,00	11.113.540,00	98,79	3.742.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	90.000.000,00	89.998.500,00	100,00	379.923.770,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	3.295.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	44.594.250,00	99,10	44.950.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.000.000,00	7.554.000,00	94,43	1.500.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	26.480.000,00	23.208.000,00	87,64	5.235.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	223.610.000,00	221.341.801,00	98,99	245.466.960,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	40.000.000,00	39.900.000,00	99,75	39.960.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	77.500.000,00	56.944.224,00	73,48	52.460.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	56.711.000,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	30.000.000,00	13.500.000,00	45,00	0,00
21	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	60.000.000,00	59.850.600,00	99,75	48.750.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	209.500.000,00	200.230.117,00	95,58	204.051.735,00
24	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	59.500.000,00	57.730.000,00	97,03	56.695.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	5.500.000,00
JUMLAH		**5.501.370.400,00**	**5.115.334.210,00**	**92,98**	**5.103.903.341,00**

l. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp213.206.400,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.43
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	130.210.000,00	75.082.800,00	57,66	279.867.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	49.335.000,00	49.197.000,00	99,72	148.361.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	89.272.650,00	88.926.600,00	99,61	0,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	146.777.500,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	271.010.000,00
JUMLAH		**268.817.650,00**	**213.206.400,00**	**79,31**	**846.015.500,00**

m. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.451.341.900,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.44
Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	3.340.011.500,00	3.299.803.900,00	98,80	1.500.000.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	1.199.850.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	50.000.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.953.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00	0,00	0,00	48.779.770,00
6	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	10.000.000,00	9.988.000,00	99,88	75.350.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	75.000.000,00	74.550.000,00	99,40	0,00
JUMLAH		**3.492.011.500,00**	**3.451.341.900,00**	**98,84**	**2.923.932.770,00**

n. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp59.159.250.856,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.45
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.446.284.200,00	47.621.865.817,00	98,30	44.621.284.575,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.433.909.225,00	10.826.229.850,00	87,07	13.423.751.066,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	184.960.900,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	40.800.000,00	16.386.400,00	40,16	194.400.000,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	712.009.236,00	681.568.789,00	95,72	328.802.918,00
JUMLAH		**61.646.202.661,00**	**59.159.250.856,00**	**95,97**	**58.753.199.459,00**

o. Belanja Uang dan/atau Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.031.960.000,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.46
Realisasi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/MasyarakatTahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	967.850.000,00	966.960.000,00	99,91	138.626.000,00
2	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	65.000.000,00	65.000.000,00	100	24.000.000,00
JUMLAH		**1.032.850.000,00**	**1.031.960.000,00**	**99,91**	**162.626.000,00**

p. Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp23.588.757.996,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.47
Realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa BOS dan BOSP Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	157.135.000,00	48.585.000,00	30,92	24.831.556.670,00
2	Belanja Barang dan Jasa BOSP	23.619.123.608,00	23.540.172.996,00	99,67	0,00
JUMLAH		**23.776.258.608,00**	**23.588.757.996,00**	**99,21**	**24.831.556.670,00**

Penerimaan Dana BOS Reguler dan Kinerja, BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024 dianggarkan pada Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024 yang ditransfer langsung ke rekening sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pendapatan dan Belanja Dana BOS, BOP PAUD dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.48
Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Saldo Awal	21.743.185,00	21.743.185,00	100,00	52.108.740,00
2	**Pendapatan**	**39.974.100.000,00**	**39.889.427.037,00**	**99,79**	**40.306.738.461,00**
	BOS Reguler	33.551.300.000,00	33.532.789.037,00	99,94	33.427.416.461,00
	BOS Kinerja	1.237.500.000,00	1.237.500.000,00	100,00	1.450.000.000,00
	BOP PAUD	4.281.600.000,00	4.252.128.000,00	99,31	4.422.522.000,00
	BOP Kesetaraan	903.700.000,00	867.010.000,00	95,94	1.006.800.000,00
3	**Total Penerimaan (1+2)**	**39.995.843.185,00**	**39.911.170.222,00**	**99,79**	**40.358.847.201,00**
4	**Belanja Barang dan Jasa BOSP (Negeri)**	**23.776.258.608,00**	**23.588.757.996,00**	**99,21**	**25.496.956.670,00**
	Belanja Barang dan Jasa BOS	157.135.000,00	48.585.000,00	30,92	0,00
	Barang dan Jasa- BOS Reguler	22.248.703.833,00	22.242.751.480,00	99,97	25.496.956.670,00
	Barang dan Jasa- BOS Kinerja	616.219.775,00	583.859.300,00	94,75	0,00
	Barang dan Jasa BOP PAUD	614.400.000,00	577.362.216,00	93,97	0,00
	Barang dan Jasa BOP Kesetaraan	139.800.000,00	136.200.000,00	97,42	0,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
5	**Belanja Modal BOSP (Negeri)**	**7.624.888.364,00**	**7.613.438.364,00**	**99,85**	**6.388.360.012,00**
	Belanja Peralatan dan Mesin BOS	4.003.891.164,00	3.993.991.164,00	99,75	3.736.121.187,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.620.997.200,00	3.619.447.200,00	99,96	2.652.238.825,00
6	**Belanja Hibah Dana BOSP (Swasta)**	**8.584.800.000,00**	**8.549.991.150,00**	**99,59**	**8.451.787.334,00**
	Belanja Hibah BOS	4.348.700.000,00	4.344.257.150,00	99,90	3.920.065.334,00
	Belanja Hibah BOP PAUD	3.607.200.000,00	3.576.834.000,00	99,16	3.757.122.000,00
	Belanja Hibah BOP Kesetaraan	628.900.000,00	628.900.000,00	100,00	774.600.000,00
	Surplus / Defisit	**9.896.213,00**	**158.982.712,00**		**21.743.185,00**

Nilai Surplus Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp158.982.712,00 terdiri dari saldo Kas di BOS sebesar Rp36.378.712,00 dan pengembalian Dana BOSP PAUD semester II Tahun 2024 ke Kas Daerah sebesar Rp122.604.000,00, tidak terealisasi pada belanja hibah karena PAUD tersebut tidak beroperasional pada semester 2 Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 4** pada Laporan Keuangan ini.

q. Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas sebesar Rp1.658.108.477,00 terdiri dari:

Tabel 5.1.49
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
I	**Dinas Kesehatan**	**750.000,00**	**750.000,00**	**100,00**	**0,00**
	Puskesmas Sitiung IV	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
II	BLUD Puskesmas	**1.729.658.200,00**	**1.657.358.477,00**	**95,82**	**0,00**
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	478.504.000,00	474.872.000,00	99,24	0,00
2	BLUD Puskesmas Sitiung II	413.889.200,00	395.942.000,00	95,66	0,00
3	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	1.710.000,00	750.000,00	43,86	0,00
4	BLUD Puskesmas Silago	537.520.000,00	530.711.147,00	98,73	0,00
5	BLUD Puskesmas Gunung Medan	750.000,00	750.000,00	100,00	0,00
6	BLUD Puskesmas Sitiung I	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7	BLUD Puskesmas Timpeh	750.000,00	0,00	0,00	0,00
8	BLUD Puskesmas Sialang	13.500.000,00	12.822.000,00	94,98	0,00
9	BLUD Puskesmas Tiumang	173.200.000,00	159.724.439,00	92,22	0,00
10	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	108.335.000,00	81.786.891,00	75,49	0,00
JUMLAH		**1.730.408.200,00**	**1.658.108.477,00**	**95,82**	**0,00**

r. Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp50.929.802.688,80 terdiri dari:

Tabel 5.1.50
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
I	BLUD RSUD	**50.575.453.525,00**	**44.141.885.938,00**	**87,28**	**39.169.186.874,00**
	BLUD RSUD Sungai Dareh	44.521.074.727,00	38.718.367.603,00	86,97	35.396.034.245,00
	RSUD Sungai Rumbai	6.054.378.798,00	5.423.518.335,00	89,58	3.773.152.629,00
II	BLUD Puskesmas	**7.436.006.652,00**	**6.787.916.750,80**	**91,28**	**6.156.688.761,40**
1	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	527.169.589,00	523.838.923,00	99,37	413.786.281,00
2	BLUD Puskesmas Sungai Limau	274.126.348,00	261.523.972,00	95,40	271.244.939,00
3	BLUD Puskesmas Sitiung II	475.001.020,00	474.935.262,00	99,99	478.065.015,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
4	BLUD Puskesmas Padang Laweh	369.123.024,00	353.578.373,00	95,79	236.231.477,39
5	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	826.954.456,00	734.162.922,00	88,78	777.153.621,00
6	BLUD Puskesmas Silago	391.833.016,00	391.452.600,00	99,90	387.247.062,00
7	BLUD Puskesmas Gunung Medan	365.319.867,00	348.120.543,00	95,29	336.012.247,00
8	BLUD Puskesmas Sitiung I	833.239.128,00	777.463.991,00	93,31	659.609.543,00
9	BLUD Puskesmas Koto Baru	1.129.888.103,00	920.573.063,00	81,47	1.044.409.727,00
10	BLUD Puskesmas Timpeh	423.566.724,00	423.470.588,98	99,98	337.989.696,00
11	BLUD Puskesmas Sialang	343.025.904,00	275.474.133,00	80,31	296.337.126,00
12	BLUD Puskesmas Tiumang	339.038.038,00	334.976.142,00	98,80	270.241.269,00
13	BLUD Puskesmas Koto Besar	692.792.741,00	566.521.091,82	81,77	430.356.760,76
14	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	308.142.570,00	294.756.030,00	95,66	136.441.245,25
15	BLUD Labkesda	136.786.124,00	107.069.116,00	78,27	81562752
JUMLAH		**58.011.460.177,00**	**50.929.802.688,80**	**87,79**	**45.325.875.635,40**

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp58.011.460.177,00 terealisasi sebesar Rp50.929.802.688,80 atau 87,79%. Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp5.603.927.053,40 atau 12,36 %.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2024 dapat dilihat di **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.a.3.	**Hibah**	**34.253.926.757,00**	**28.767.442.546,00**

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp34.593.015.000,00 dengan realisasi Rp34.253.926.757,00 atau 99,02%. Belanja Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.486.484.211,00 atau 19,07% dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp28.767.442.546,00

Tabel 5.1.51
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**	**21.770.000.000,00**	**21.706.113.000,00**	**99,71**	**12.800.000.000,00**
	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.770.000.000,00	21.706.113.000,00	99,71	12.800.000.000,00
2	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**3.382.500.000,00**	**3.142.109.059,00**	**92,89**	**11.158.986.332,00**
a.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.230.000.000,00	1.229.825.159,00	99,99	1.300.000.000,00
b.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	4.441.722.000,00
c.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.107.500.000,00	1.867.283.900,00	88,60	5.382.264.332,00
d.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	35.000.000,00
3	**Belanja Hibah Dana BOS**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.010.065.334,00**

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	3.920.065.334,00
b.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
4	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**855.715.000,00**	**855.713.548,00**	**100,00**	**798.390.880,00**
a.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	855.715.000,00	855.713.548,00	100,00	798.390.880,00
5	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**8.584.800.000,00**	**8.549.991.150,00**	**99,59**	**0,00**
a.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	4.348.700.000,00	4.344.257.150,00	99,90	0,00
b.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.607.200.000,00	3.576.834.000,00	99,16	0,00
c.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	628.900.000,00	628.900.000,00	100,00	0,00
JUMLAH		**34.593.015.000,00**	**34.253.926.757,00**	**99,02**	**28.767.442.546,00**

Rincian Belanja Hibah Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 6** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.	**Belanja Modal**	**102.187.717.063,16**	**137.284.235.323,00**

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun. Belanja Modal Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp113.003.447.993,00 dengan realisasi sebesar Rp102.187.717.063,16 atau 90,43%. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp35.096.518.259,84 atau -25,56 % dibandingkan Tahun 2023. Realisasi Belanja Modal terinci pada akun-akun aset berikut ini:

Tabel 5.1.52
Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.871.180.864,00	24.237.257.450,00	86,96	39.031.009.865,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.814.155.477,00	28.954.072.575,16	80,85	45.091.507.154,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	45.373.640.452,00	45.054.989.838,00	99,30	50.167.680.309,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.812.797.200,00	3.810.397.200,00	99,94	2.751.538.825,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	131.674.000,00	131.000.000,00	99,49	242499170
JUMLAH		**113.003.447.993,00**	**102.187.717.063,16**	**90,43**	**137.284.235.323,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.1	**Belanja Tanah**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat Belanja Modal Tanah pada Tahun 2024 dan Tahun 2023.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.2	**Belanja Peralatan dan Mesin**	**24.238.374.788,00**	**39.031.009.865,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp27.871.180.864,00 dengan realisasi sebesar Rp24.237.257.450,00 atau 86,96%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp14.793.752.415,00atau -37,90 %.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat diuraikan berikut ini:

Tabel 5.1.53
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar	12.642.100,00	12.642.100,00	100,00	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan	8.644.000.000,00	8.424.966.950,00	97,47	2.722.870.900,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.000.000,00	11.700.000,00	97,50	-
4	Belanja Modal Alat Pertanian	11.400.000,00	11.100.000,00	97,37	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.341.079.400,00	3.292.100.882,00	98,53	6.101.866.823,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	120.400.000,00	118.350.000,00	98,30	1.338.575.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.700.000.000,00	1.683.388.467,00	99,02	18.529.682.259,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	516.650.000,00	497.078.000,00	96,21	242.656.907,00
9	Belanja Modal Komputer	2.713.083.250,00	2.680.330.000,00	98,79	4.648.650.323,00
10	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	800.000,00
11	Belanja Modal Rambu-Rambu	34.390.720,00	34.380.000,00	99,97	147.250.000,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.003.891.164,00	3.993.991.164,00	99,75	3.736.121.187,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6.761.644.230,00	3.477.229.887,00	51,43	1.562.536.466,00
JUMLAH		**27.871.180.864,00**	**24.237.257.450,00**	**86,96**	**39.031.009.865,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.3	**Belanja Gedung dan Bangunan**	**28.954.072.575,16**	**45.091.507.154,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp35.814.155.477,00 dengan realisasi sebesar Rp28.954.072.575,16 atau 80,85%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp16.137.434.578,84,00 atau 35,79%.

Tabel 5.1.54
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.079.873.867,00	26.466.910.850,00	80,01	41.999.475.923,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.023.181.610,00	2.015.207.578,00	99,61	2.873.181.231,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	711.100.000,00	471.954.147,16	66,37	218.850.000,00
JUMLAH		**35.814.155.477,00**	**28.954.072.575,16**	**80,85**	**45.091.507.154,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.4	**Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**45.054.989.838,00**	**50.167.680.309,00**

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp45.373.640.452,00 dengan realisasi sebesar Rp45.054.989.838,00 atau 99,30%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp5.112.690.471,00 atau 10,19%.

Tabel 5.1.55
Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40.142.590.452,00	40.096.496.000,00	99,89	40.096.496.000,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	4.660.042.000,00	4.414.328.838,00	94,73	4.414.328.838,00
3	Belanja Modal Instalasi	93.008.000,00	88.450.000,00	95,10	412.276.200,00
4	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	88.450.000,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	478.000.000,00	455.715.000,00	95,34	455715000
JUMLAH		**45.373.640.452,00**	**45.054.989.838,00**	**99,30**	**45.467.266.038,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.5	**Belanja Aset Tetap Lainnya**	**3.810.397.200,00**	**2.751.538.825,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp3.812.797.200,00 dengan realisasi sebesar Rp3.810.397.200,00 atau 99,94%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar Rp1.058.858.375,00 atau 38,48%.

Tabel 5.1.56

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	191.800.000,00	190.950.000,00	99,56	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.300.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.620.997.200,00	3.619.447.200,00	99,96	2.652.238.825,00
JUMLAH		**3.812.797.200,00**	**3.810.397.200,00**	**99,94**	**2.751.538.825,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.b.6	**Belanja Aset Lainnya**	**131.000.000,00**	**242.499.170,00**

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp131.674.000,00 dengan realisasi sebesar Rp131.000.000,00 atau 99,49%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan sebesar Rp111.499.170,00 atau 45,98%.

Tabel 5.1.57

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	113.774.000,00	113.170.000,00	9,47	0,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	17.900.000,00	17.830.000,00	99,61	242.499.170,00
JUMLAH		**131.674.000,00**	**131.000.000,00**	99,49	**242.499.170,00**

Rincian Belanja Modal masing-masing SKPD Tahun 2024 terdapat pada **Lampiran 7** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.2.c.	**Belanja Tak Terduga**	**2.485.520.287,00**	**3.924.380.709,00**

Belanja Tak Terduga dianggarkan Rp3.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.485.520.287,00 atau sebesar 82,85%.

Penganggaran Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024 yang dianggarkan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial. Adapun realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5.1.58

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan korban banjir di Kabupaten Dharmasraya an. Martin Efendi, HS.S.Hut,M.M dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/08/KPTS-BUP/2024 tanggal 2 Januari 2024	339.103.750,00
2	Pembayaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Dharmasraya an. Eldison, ST dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/42/KPTS-BUP/2024 tanggal 12 Januari 2024.	41.100.000,00
3	Pembayaran belanja tidak terduga untuk Pendistribusian Bantuan Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 an. Martin Efendi, HS.S.Hut,M.M dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/102/KPTS-BUP/2024 tanggal 20 Maret 2024.	34.010.600,00
4	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan korban kebakaran dan banjir di Kabupaten Dharmasraya an. Neni Sarlinda Susanti dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/78/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Februari 2024, Nomor: 100.3.3.2/79/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Februari 2024, Nomor: 100.3.3.2/80/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Februari 2024, Nomor: 100.3.3.2/81/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Februari 2024, Nomor: 100.3.3.2/82/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Februari 2024, dan Nomor: 100.3.3.2/83/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Februari 2024 rek terlampir	60.000.000,00
5	Pembayaran belanja tidak terduga untuk Operasional Pendistribusian Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam Tahun 2024 an. Martin Efendi, HS.S.Hut,M.M dibayarkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 100.3.3.2/141/KPTS-BUP/2024 tanggal 21 Mei 2024.	18.401.700,00
6	Pembayaran belanja tidak terduga untuk bantuan korban kebakaran dan banjir di Kabupaten Dharmasraya an. Jenni Sukri dkk dibayarkan sesuai dengan Surat Permohonan Proses Pencairan BTT nomor : 490/874/Dinsosp3APPKB-2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan rek.terlampir.	33.000.000,00
7	Pembayaran belanja tidak terduga atas pengembalian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2021 kabupaten dharmasraya sesuai SK Bupati Dharmasraya nomor : 100.3.3.2/426/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Desember 2024.	1.563.639.467,00
8	Pembayaran belanja tidak terduga atas pengembalian sisa dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2021 kabupaten dharmasraya sesuai SK Bupati Dharmasraya nomor : 100.3.3.2/426/KPTS-BUP/2024 tanggal 27 Desember 2024 sudah disetorkan ke kas negara Tahun 2023.	396.265.000,00
JUMLAH		**2.485.520.517,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.3	**Belanja Transfer**	**115.315.142.464,00**	**109.452.951.278,00**

Belanja Transfer /Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2024 berupa Transfer Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Bagi Hasil Pendapatan Lainnya.

Realisasi Transfer dianggarkan sebesar Rp116.251.465.790,00 dan terealisasi sebesar Rp115.315.142.464,00 atau 99,19% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.59
Realisasi Transfer Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
I.	**Transfer Bagi Hasil**	**2.920.693.150,00**	**1.984.369.824,00**	**67,94**	**1.217.315.278,00**
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.651.291.150,00	1.762.449.469,00	66,48	1.107.049.776,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	269.402.000,00	221.920.355,00	82,38	110.265.502,00

No	Uraian	Tahun 2024			Realiasi 2023
		Anggaran	Realisasi	%	
II.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**113.330.772.640,00**	**113.330.772.640,00**	**100,00**	**108.235.636.000,00**
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.330.772.640,00	113.330.772.640,00	100,00	108.235.636.000,00
JUMLAH		**116.251.465.790,00**	**115.315.142.464,00**	**99,19**	**109.452.951.278,00**

Bagi Hasil Pajak Tahun 2024 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp2.651.291.150,00 dan terealisasi sebesar Rp1.762.449.469,00 atau 66,48%. Bagi Hasil Retribusi Tahun 2024 berupa Belanja Bagi Hasil Retribusi Kepada Pemerintahan Desa/Nagari dianggarkan Rp269.402.000,00 terealisasi sebesar Rp221.920.355,00 atau 82,38%.

Uraian selengkapnya mengenai Transfer Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8** dan Transfer Bagi Hasil Retribusi pada **Lampiran 9** di Laporan Keuangan ini.

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp113.330.772.640,00 dan terealisasi 100% yang diperuntukkan untuk 52 Nagari. Dana Desa bersumber dari dana transfer APBN sebesar Rp58.010.085.640,00 dan terealisasi 100%. Dana Bantuan Keuangan ke Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp55.320.687.000,00 dan terealisasi 100%.

Penyaluran Dana Desa dari APBN dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKD) tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dicatat di Laporan Realisasi Anggaran sebesar penyaluran ke Desa berdasarkan Laporan pada Aplikasi Simtrada dan OMSPAN Kementerian Keuangan. Rincian Dana Bantuan Keuangan ke Desa bersumber dari dana transfer APBN dan Dana Desa yang bersumber dari dana APBD atau Alokasi Dana Desa (ADD) pada **Lampiran 10** di Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.4	**Surplus/(Defisit)**	**(42.345.469.488,50)**	**6.018.007.396,89**

Jumlah Surplus/(Defisit) LRA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah (Defisit) sebesar Rp(42.345.469.488,50) sedangkan pada Tahun 2023 Surplus sebesar Rp6.018.007.396,89.

V.A.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Rencana dan realisasi pembiayaan daerah Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.A.5.a.	**Penerimaan Pembiayaan**	**46.430.539.477,05**	**41.912.532.080,16**

Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp46.430.539.477,00 terealisasi sebesar Rp46.430.539.477,05 atau 100%.

V.A.5.a.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 ini merupakan penerimaan SiLPA Tahun 2023. Secara rinci nilai penerimaan SiLPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Secara rinci Nilai SILPA Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah sebesar Rp39.009.956.376,09 dengan uraian sebagai berikut			Rp	39.009.956.376,09
	- Fisik Kas di Kasda	Rp	38.618.338.669,09		
	- Sisa Belanja Hibah Penanggulangan Bencana Daerah yang telah disetor ke Kas Negara	Rp	396.265.000,00		
	- Salah setor Pajak Pusat ke Kasda	Rp	(4.647.293,00)		
b.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh			Rp	3.577.669.528,67
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Rumbai			Rp	6.494.797,73
d.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas			Rp	974.640.114,56
e.	Saldo Akhir Kas Lainnya atas Sisa Dana BOK Puskesmas yang berasal dari DAK Non Fisik TA.2023			Rp	2.836.891.356,00
f.	Saldo Akhir Dana di BOS			Rp	21.743.185,00
h.	Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah			Rp	3.144.119,00
	Jumlah			**Rp**	**46.430.539.477,05**

		Tahun 2024 (Rp)	**Tahun 2023 (Rp)**
V.A.5.b.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**1.500.000.000,00**

Untuk Tahun 2024 tidak ada penganggaran Pengeluaran Pembiayaan sedangkan untuk Tahun 2023 dianggarkan Rp1.500.000.000,00 terealisasi 100% adalah merupakan penyertaan modal pada Bank Nagari.

		Tahun 2024 (Rp)	**Tahun 2023 (Rp)**
V.A.6.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**	**4.085.069.988,55**	**46.430.539.477,05**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 sebesar Rp4.085.069.988,55 sedangkan SILPA Tahun 2023 sebesar Rp46.430.539.477,05. Bila dibandingkan SILPA Tahun 2024 dengan Tahun 2023 terjadi penurunan SILPA sebesar Rp42.345.469.488,50 atau -91,20 %.

Secara rinci Nilai SiLPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a.	Kas di Kas Daerah			Rp	1.714.291.612,49
	- Fisik Kas di Kasda	Rp	1.803.954.033,49		
	- Pengembalian Dana BOP PAUD	Rp	(89.662.421,00)		
b.	Kas di Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD			Rp	6.925.010,00
c.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Dareh			Rp	37.538.774,51
d.	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sungai Rumbai			Rp	34.614,73
e.	Saldo Akhir Kas di BLUD Puskesmas			Rp	1.234.968.495,82
f.	Saldo Akhir Kas di Dana BOK Puskesmas			Rp	932.328.769,00
g.	Saldo Akhir Dana BOS			Rp	36.378.712,00

h.	Dana BOP PAUD Tahun 2024 atas sekolah yang tidak beroperasional dikembalikan ke Kas Daerah :		
	1) Pengembalian sebelum tanggal 31 Desember 2024	Rp	89.662.421,00
	2) Pengembalian setelah tanggal 31 Desember 2024	Rp	32.941.579,00
	Jumlah	**Rp**	**4.085.069.988,55**

Uraian Perhitungan SILPA Tahun 2024 sebagai berikut:

Surplus/Defisit LRA	Rp	**(42.345.469.488,50)**
Pembiayaan Netto	Rp	46.430.539.477,05
SILPA LRA Sebelum Koreksi	Rp	4.085.069.988,55
Koreksi SILPA	Rp	0,00
SILPA LRA Setelah Koreksi	**Rp**	**4.085.069.988,55**

V.B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menggambarkan perubahan atas Saldo Anggaran Lebih dimana pada akhir Tahun 2023 terdapat Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp46.430.539.477,05 dan terjadi penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024 sebesar Rp(42.345.469.488,50) sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 menjadi Rp4.085.069.988,55.

Rincian perhitungan LPSAL sebagai berikut.

Surplus/ (Defisit LRA)	Rp	(42.345.469.488,50)
Pembiayaan Netto	Rp	46.430.539.477,05
SILPA LRA sebelum koreksi	**Rp**	**4.085.069.988,55**
Koreksi SILPA:	Rp	0,00
Jumlah Koreksi	**Rp**	**0,00**
SILPA LRA setelah koreksi	**Rp**	**4.085.069.988,55**

V.C. NERACA

V.C.1. ASET

Neraca Kabupaten Dharmasraya merupakan Neraca yang kesembilan belas kali disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Neraca Kabupaten Dharmasraya mengambarkan posisi keuangan Kabupaten Dharmasraya mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2023.

Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 memiliki Aset sebesar Rp2.452.898.457.443,96, Kewajiban sebesar Rp31.732.265.978,39 dan Ekuitas sebesar Rp2.421.166.191.465,57

Total Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.452.898.457.443,96, turun sebesar Rp71.386.415.184,21 dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.524.284.872.628,17 atau -2,83%. Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.	**Aset Lancar**	**112.519.782.305,82**	**117.202.581.643,59**

Aset Lancar adalah kas dan setara kas, serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar adalah aset dalam bentuk Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Setara Kas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Belanja Dibayar Dimuka dan Persediaan. Jumlah keseluruhan Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp112.519.782.305,82 mengalami penurunan sebesar Rp4.682.799.337,77 atau -4,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.202.581.643,59. Adapun rincian Aset Lancar pada Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023

Aset Lancar		Tahun 2024	Tahun 2023
a.	Kas di Kas Daerah	1.714.291.612,49	38.613.691.376,09
b.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.144.119,00
c.	Kas di Bendahara Penerimaan	6.925.010,00	0,00
d.	Kas di BLUD	1.272.541.885,06	4.558.804.440,96
e.	Kas di BOS	36.378.712,00	21.743.185,00
f.	Kas Lainnya	1.054.932.769,00	3.240.615.649,00
g.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
h.	Piutang Pajak	25.474.630.116,00	40.215.979.303,00
i.	Penyisihan Piutang Pajak	(15.864.849.434,96)	(30.635.258.580,82)
j.	Piutang Retribusi	6.774.178.699,00	1.143.451.911,00
k.	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.305.862.079,55)	(888.109.288,00)
l.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.459,00	13.588.890,00
m.	Penyisihan Piutang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	(27.646.597,30)	(67.944,45)
n.	Piutang Lain - lain PAD yang Sah	6.818.492.334,53	10.974.350.629,14
o.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(3.041.699.022,11)	(2.964.852.215,80)
p.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	15.091.731.000,00	3.084.000,00

Aset Lancar		Tahun 2024	Tahun 2023
q.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	21.749.014.918,00	17.958.971.283,00
r.	Piutang Pendapatan Lainnya	459.460,00	0,00
s.	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(2.297,40)	0,00
t.	Belanja Dibayar Dimuka	274.605.153,94	214.617.938,50
u	Persediaan	46.962.340.588,12	34.728.826.947,97
	Jumlah	**112.519.782.305,82**	**117.202.581.643,59**

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.1	**Kas di Kas Daerah**	**1.714.291.612,49**	**38.613.691.376,09**

Kas di Kas Daerah merupakan rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Dharmasraya adalah Bank Nagari Cabang Pulau Punjung. Penunjukan Bank Nagari sebagai bank umum untuk menyimpan uang daerah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/1/KPTS-BUP/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan rekening nomor 1403.0101.00075-4, serta diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pulau Punjung Nomor 900/796/BKD-2021 dan Nomor PKS/03/PL/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pelayanan Perbankan dan Pelaksanaan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Saldo akhir Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan rekening koran Bank Nagari Cabang Pulau Punjung adalah Rp1.803.954.033,49. Terdapat saldo sebesar Rp89.662.421,00 merupakan pengembalian Dana BOSP PAUD Dinas Pendidikan semester 2 Tahun 2024 yang disetor ke kas daerah per 31 Desember 2024 untuk dikembalikan ke Kas Negara. Sehingga nilai di rekening koran dikurangi nilai pengembalian dana BOSP PAUD, nilai kas di Kas Daerah menjadi sebesar Rp1.714.291.612,49.

Kas di Kas Daerah merupakan SILPA Tahun 2024 termasuk di dalamnya sisa dana transfer pusat yang peruntukannya telah ditentukan seperti DAU yang Ditentukan Penggunaannya, DAK Fisik dan DAK Non Fisik, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.2

Rincian Sisa Dana Transfer Earmark Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	1.627.158.400,00
	- Bidang Pendidikan	904.984.808,00
	- Bidang Kesehatan	168.765.543,00
	- Bidang Pekerjaan Umum	553.408.049,00
2.	DAK Fisik	65.801.055,00
3.	DAK Non Fisik	3.195.236.071,00
	Jumlah	4.888.195.526,00

Sisa Dana Transfer Earmak sebesar Rp4.888.195.526,00 seharusnya berada di Kas Daerah, namun dana earmark tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 digunakan untuk pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Aktif (Bantuan Iuran JKSS) Tahap II bulan Juli s.d. Desember 2024. Saldo Kas di Kasda sebesar Rp1.714.291.612,49 adalah merupakan bagian dari sisa Dana Earmark tersebut.

Rincian mengenai Sisa DAK Fisik Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 11a** dan DAK Non Fisik pada **Lampiran 11b** di Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.2	**Kas di Bendahara Pengeluaran**	**0,00**	**3.144.119,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Saldo Tahun 2023 adalah saldo di kas Bendahara Sekretariat Daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp3.144.119,00, telah disetor ke kas daerah pada tanggal 19 Januari 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.3	**Kas di Bendahara Penerimaan**	**6.925.010,00**	**0,00**

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024 adalah kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sebesar Rp6.925.010,00 yang terdiri atas Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp5.525.010,00 dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebesar Rp1.400.000 yang disetor ke RKUD pada tanggal 13 Januari 2025. Sedangkan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 bernilai Rp0,00.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.4	**Kas di Kas BLUD**	**1.272.541.885,06**	**4.558.804.440,96**

Kabupaten Dharmasraya Pada Tahun 2024 memiliki 17 unit Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak pada bidang kesehatan yaitu 2 unit Badan Layanan Umum RSUD yaitu RSUD Sungai Dareh dan RSUD Sungai Rumbai, 14 unit Badan Layanan Umum UPT Puskesmas dan 1 unit Laboratorium Kesehatan Daerah.

Adapun rincian saldo yang ada direkening BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Saldo Kas di BLUD Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1	BLUD RSUD Sungai Dareh	37.538.774,51	3.577.669.528,67
2	BLUD RSUD Sungai Rumbai	34.614,73	6.494.797,73
3	BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	84.467.918,00	84.941.840,00
4	BLUD Puskesmas Sungai Limau	51.519.744,70	62.440.101,70
5	BLUD Puskesmas Sitiung II	13.789.638,09	34.141.222,09
6	BLUD Puskesmas Padang Laweh	14.252.133,21	38.361.512,21
7	BLUD Puskesmas Sungai Dareh	80.366.231,00	13.401.232,00
8	BLUD Puskesmas Silago	77.758.822,00	12.779.389,00
9	BLUD Puskesmas Gunung Medan	7.747.969,00	17.219.867,00
10	BLUD Puskesmas Sitiung I	52.334.006,62	88.075.726,62
11	BLUD Puskesmas Koto Baru	325.978.568,00	12.628.288,00

No	Uraian	2024	2023
12	BLUD Puskesmas Timpeh	60.730.996,25	147.605.240,00
13	BLUD Puskesmas Sialang	94.671.586,00	92.385.904,00
14	BLUD Puskesmas Tiumang	82.712.372,00	60.317.233,00
15	BLUD Puskesmas Koto Besar	218.333.964,37	184.627.741,36
16	BLUD Puskesmas Beringin Sakti	59.648.792,58	52.142.569,58
17	BLUD Labkesda	10.655.754,00	73.572.248,00
	JUMLAH	**1.272.541.885,06**	**4.558.804.440,96**

Saldo di BLUD Tahun 2024 merupakan saldo kas dibank sebesar Rp1.272.541.885,06, Kas di BLUD Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.558.804.440,96.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD Tahun 2024 dapat dilihat di **Lampiran 5** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.5	**Kas di BOS**	**36.378.712,00**	**21.743.185,00**

Kas di BOS adalah saldo Kas Dana BOS pada saat tanggal neraca merupakan sisa Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan atas sekolah-sekolah negeri pengelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2024 terdiri dari 147 Sekolah Dasar Negeri, 33 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 16 Taman Kanak-Kanak Negeri, dan 1 Sanggar Kegiatan Belajar. Saldo Kas di BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp36.378.712,00 merupakan kas dibank. Nilai saldo kas di BOS Tahun 2023 sebesar Rp21.743.185,00.

Realisasi Pendapatan dan Belanja BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2024 dapat dilihat di **Lampiran 4a dan 4b** pada Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.6	**Kas Lainnya**	**1.054.932.769,00**	**3.240.615.649,00**

Kas Lainnya adalah berupa berupa pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara/ Kas Daerah atau pihak terkait.

Kas Lainnya sebesar Rp1.054.932.769,00 terdiri dari :

1. Pengembalian dana DAK Non Fisik BOP PAUD yang tidak beroperasional pada Tahun 2024 yang telah masuk ke Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp89.662.421,00, dari total pengembalian seharusnya sebesar Rp122.604.000,00. Sisanya sebesar Rp32.941.579,00 baru disetor ke Kas Daerah pada Bulan Januari Tahun 2025 oleh Penyelenggara PAUD yang tidak beroperasional. Untuk selanjutnya dilakukan penyetoran pengembaliannya ke Kas Negara. Rincian pengembalian Dana BOSP PAUD Semester 2 Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 4c pada Laporan Keuangan ini.
2. Sisa Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas sebesar Rp932.328.769,00, diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2.4
Saldo Kas di Dana BOK Puskesmas Tahun 2024 dan 2023

No	Puskesmas	2024	2023
1	Beringin Sakti	111.162.109,00	195.997.576,00
2	Gunung Medan	39.529.945,00	108.097.592,00

No	Puskesmas	2024	2023
3	Koto Baru	121.278.458,00	298.241.462,00
4	Koto Besar	102.854.414,00	302.141.785,00
5	Padang Laweh	26.714.057,00	106.940.500,00
6	Sialang	33.803.252,00	19.752.175,00
7	Silago	28.305.853,00	32.835.959,00
8	Sitiung I	147.187.256,00	321.403.403,00
9	Sitiung II	39.739.578,00	210.180.525,00
10	Sitiung IV	37.051.734,00	0,00
11	Sungai Dareh	33.998.041,00	89.815.017,00
12	Sungai Limau	121.964.474,00	444.107.391,00
13	Sungai Rumbai	12.104.937,00	179.928.209,00
14	Timpeh	11.256.600,00	306.196.225,00
15	Tiumang	65.378.061,00	221.253.537,00
	JUMLAH	**932.328.769,00**	**2.836.891.356,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.7	**Setara Kas**	**0,00**	**0,00**

Nilai saldo Setara Kas Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.8	**Piutang Pajak**	**25.474.630.116,00**	**40.215.979.303,00**

Piutang Pajak terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Piutang Pajak Reklame, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Piutang Pajak Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023
1	PBB-P2	24.014.340.394,00	38.854.414.240,00
2	Pajak Penerangan Jalan	1.250.349.347,00	1.164.490.563,00
3	Pajak Reklame	13.509.375,00	643.500,00
4	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	196.431.000,00	196.431.000,00
	Jumlah	**25.474.630.116,00**	**40.215.979.303,0**

1. Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 sebagian besar merupakan piutang sewaktu pelimpahan dari Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2, dan Aset Sitaan Nomor BA-47/WPJ.27/KP.06/2014 pada tanggal 27 Februari 2014. Pada tahun 2023, sesuai dengan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 100.3.3.2/315/KPTS-BUP/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2013 di Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan penghapusan piutang PBB-P2 yang berasal dari pelimpahan Pemerintah Pusat (KPP Pratama Solok) sebesar Rp16.867.528.291,00 sehingga nilai piutang menjadi berkurang karena adanya penghapusan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menyajikan dan mempertahankan nilai piutang yang sesuai dengan *net realizable value* atau

nilai bersih dari piutang tersebut agar menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat.

Piutang PBB-P2 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Piutang PBB-P2 Tahun 2024 dan 2023

No	Tahun Pajak	Piutang Per 31 Desember 2023	Penghapusan Piutang 2024	Ketetapan Tahun 2024	Penerimaan Pokok Piutang PBB-P2	Saldo Piutang Per 31 Des 2024
1	2	3	4	5	6	7=3-4+5-6
1	2024			4.688.611.300,00	2.417.078.972,00	2.271.532.328,00
2	2023	2.215.938.581,00			116.271.734,00	2.099.666.847,00
3	2022	2.103.262.851,00			43.689.712,00	2.059.573.139,00
4	2021	2.014.567.429,00			32.943.924,00	1.981.623.505,00
5	2020	2.197.061.924,00			24.430.226,00	2.172.631.698,00
6	2019	2.002.629.408,00			8.155.902,00	1.994.473.506,00
7	2018	2.236.543.990,00			7.089.394,00	2.229.454.596,00
8	2017	1.960.596.438,00			5.386.416,00	1.955.210.022,00
9	2016	2.171.467.179,00			6.065.233,00	2.165.401.946,00
10	2015	2.297.578.736,00				2.297.578.736,00
11	2014	2.787.239.413,00			45.342,00	2.787.194.071,00
12	1996 s.d. 2013	16.867.528.291,00	16.867.528.291,00			-
	Jumlah	**38.854.414.240,00**	**16.867.528.291,00**	**4.688.611.300,00**	**2.661.156.855,00**	**24.014.340.394,00**

2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang PPJ per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.250.349.347,00 berasal dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ PLN) yang telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 22 Januari 2025 sebesar Rp1.250.349.347,00, dan Piutang PPJ PLN Tahun 2023 sebesar Rp1.164.490.563,00 telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 17 Januari 2024.

3. Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp13.509.375,00 yang berasal dari beberapa Wajib pajak yang sampai pada Laporan Keuangan ini disusun belum melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6

Piutang Pajak Reklame Tahun 2024

No	Nama Wajib	Jumlah
1	CV. Wulan Cahaya Rivski	321.750,00
2	PT. Kreasi Firi Kusalo	10.560.000,00
3	CV. Arizona Cendika Abadi	321.750,00
4	Sutan Riki	1.287.000,00
5	Heri	214.500,00
6	Heri	214.500,00
7	Mandiri Taspen KCP Dharmasraya	536.250,00
8	Mandiri Taspen KCP Dharmasraya	53.625,00
	Jumlah	**13.509.375,00**

Piutang Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp643.500,00 yang berasal dari CV Ray Advertising, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah No.SKP 000000238/REK/23 jatuh tempo tanggal 20 Oktober 2023 yang telah disetor pada Tahun 2024.

4. Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2024 sebesar Rp196.431.000,00 yang masih merupakan piutang tahun 2022 dari PT Nindya Karya atas Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung *(multy years)* Kabupaten Dharmasraya dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp785.724.000,00 sesuai dengan tarif sebesar 25% yang disampaikan melalui SPTPD yang diterbitkan tanggal 01 Oktober 2021 yang sampai pada Laporan Keuangan ini disusun belum melakukan pembayaran.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**(15.864.849.434,96)**	**(30.635.258.580,82)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.864.849.434,96 terdiri dari.

	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2024	2023
a.	Penyisihan Piutang PBB-P2	15.760.314.641,34	30.531.217.410,51
b.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	6.251.746,74	5.822.452,82
c.	Penyisihan Piutang Reklame	67.546,88	3.217,50
d.	Penyisihan Mineral Bukan Logam dan Batuan	98.215.500,00	98.215.500,00
	Jumlah	**15.864.849.434,96**	**30.635.258.580,82**

a. Penyisihan Piutang PBB-P2 sampai Tahun 2024 sebesar Rp15.760.314.641,34 dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 5.2.7
Penyisihan Piutang PBB-P2 Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Umur (Th)	Kualitas	% Cad.	Jumlah Penyisihan
1	Tahun Pajak 2024	2.271.532.328,00	< 1	Lancar	0,5	11.357.662,00
2	Tahun Pajak 2023	2.099.666.847,00	1 s.d 2	Kurang Lancar	10	209.966.684,70
3	Tahun Pajak 2022	2.059.573.139,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.029.786.569,50
4	Tahun Pajak 2021	1.981.623.505,00	2 s.d 5	Diragukan	50	990.811.752,50
5	Tahun Pajak 2020	2.172.631.698,00	2 s.d 5	Diragukan	50	1.086.315.849,00
6	Tahun Pajak 2019	1.994.473.506,00	2 s.d 5	Diragukan	50	997.236.753,00
7	Tahun Pajak 2018	2.229.454.596,00	> 5	Macet	100	2.229.454.596,00
8	Tahun Pajak 2017	1.955.210.022,00	> 5	Macet	100	1.955.210.022,00
9	Tahun Pajak 2016	2.165.401.946,00	> 5	Macet	100	2.165.401.946,00
10	Tahun Pajak 2015	2.297.578.736,00	> 5	Macet	100	2.297.578.736,00
11	Tahun Pajak 2014	2.787.194.071,00	> 5	Macet	100	2.787.194.071,00
	Jumlah	**24.014.341.394,00**				**15.760.314.641,34**

Merujuk data diatas penyisihan piutang PBB-P2 sampai keadaan 31 Desember 2024 sebesar Rp15.760.314.361,34, terdapat penyisihan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa sebesar Rp11.434.839.371,00 yang berasal dari penyisihan piutang tahun 2014 s.d 2018 dengan kategori macet.

b. Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 adalah sebesar Rp6.251.746,74, dari perhitungan (0,5% x Rp1.250.349.347,00).

c. Penyisihan Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 adalah sebesar Rp67.546,88 dari perhitungan (0,5% x Rp13.509.375,00)

d. Penyisihan Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 atas adalah sebesar Rp98.215.500,00 dari perhitungan (50% x Rp196.431.000,00).

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.9	**Piutang Retribusi**	**6.774.178.699,00**	**1.143.451.911,00**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.774.178.699,00 terdiri dari:

No	Uraian	2024	2023
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.431.394.188,00	169.624.261,00
2.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	60.953.000,00	53.759.400,00
3.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	169.624.261,00	914.068.250,00
4.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.618.000,00	6.000.000,00
5.	Retribusi Los	6.380.000,00	0,00
6.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	1.097.209.250,00	0,00
	Jumlah	**6.774.178.699,00**	**1.143.451.911,00**

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp5.431.394.188,00 yang berasal dari piutang retribusi pelayanan pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh sebesar Rp4.594.644.649,00, Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Sungai Rumbai sebesar Rp403.487.539 dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp433.262.000,00, dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

a. Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh sebesar Rp4.594.644.649.00 dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.8
Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Piutang Klaim suku anak dalam bulan Des 2019	5.784.900,00
2	Klaim Pending obat kronis bulan Agustus 2024	52.719.648,00
3	Klaim Pending obat kronis bulan September 2024	88.151.452,00
4	Klaim obat kronis bulan November 2024	182.261.788,00
5	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024	13.415.687,00
6	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024	13.411.275,00
7	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan September 2024	102.225,00
8	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Oktober 2024	445.900,00
9	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan November 2024	12.228.971,00
10	Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Desember 2024	65.437.328,00
11	Klaim Pelayanan Ambulance Tk Lanjutan bulan November 2024	1.468.000,00
12	Klaim Jasaraharja bulan Desember 2024	6.151.175,00
13	Klaim JKN bulan Desember 2024	4.153.066.300,00
Jumlah		**4.594.644.649,00**

Piutang BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp4.594.644.649,00 belum diterima per 31 Desember 2024.

b. Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Rumbai dan BLUD Puskesmas sebesar Rp836.749.539,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.9
Piutang BLUD RSUD Sungai Rumbai dan BLUD Puskesmas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Piutang 2023	Piutang 2024
1	RSUD Sungai Rumbai	-	403.487.539,00
2	Sungai Rumbai	-	41.664.000,00
3	Koto Besar	-	-
4	Sungai Limau	-	27.050.000,00
5	Koto Baru	-	95.910.000,00
6	Tiumang	-	2.860.000,00
7	Padang Laweh	-	41.511.000,00
8	Sitiung I	-	91.155.000,00
9	Timpeh	-	28.020.000,00
10	Gunung Medan	-	-
11	Sitiung II	-	2.800.000,00
12	Beringin Sakti	-	43.182.000,00
13	Silago	-	46.725.000,00
14	Sungai Dareh	-	5.808.000,00
15	Sialang (Piutang Tahun 2018 dan 2019)	3.625.000,00	6.577.000,00
	Jumlah	**3.625.000,00**	**836.749.539,00**

2. Piutang Pemanfaatan Aset Daerah

Piutang Pemanfaaan Aset Daerah tahun 2024 sebesar Rp60.953.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.2.10
Piutang Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Piutang 2024	Piutang 2023
1	**Dinas Pendidikan**	**47.841.000,00**	**47.841.000,00**
	Rumah Dinas	47.841.000,00	47.841.000,00
2	**Dinas Perkimtan**	**13.112.000,00**	**5.918.400,00**
	Sewa Rusunawa	13.112.000,00	5.918.400,00
Jumlah		**60.953.000,00**	**53.759.400,00**

3. Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024 sama dengan jumlah piutang tahun 2023 sebesar Rp169.624.261,00. Tidak terdapat penambahan piutang tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan aturan tentang Retribusi yang tercantum dalam UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan sebagian objek retribusi tidak tercantum lagi dengan tujuan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah sehingga Retribusi Menara Telekomunikasi yang menjadi salah satu objek yang tidak dicantumkan lagi dalam aturan tersebut tidak lagi dilakukan pemungutan retribusinya. Adapun piutang tahun sebelumnya tetap ditagih sesuai dengan peraturan sebelumnya. Piutang tersebut dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.2.11
Daftar Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2024 dan 2023.

No	Nama Perusahaan	Piutang 2024	Piutang 2023
A	**Tahun 2023**		
1	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
2	PT. Era Bangun Towerindo	4.950.000,00	4.950.000,00
3	PT. Excellindo Pratama (XI)	2.750.000,00	2.750.000,00
B	**Tahun 2022**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	32.725.000,00	32.725.000,00
2	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00

No	Nama Perusahaan	Piutang 2024	Piutang 2023
3	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
C	**Tahun 2021**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	15.125.000,00	15.125.000,00
2	Protelindo	11.275.000,00	11.275.000,00
3	PT. Era Bangun Towerindo	2.900,00	2.900,00
7	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
D	**Tahun 2020**		
1	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	15.125.000,00	15.125.000,00
2	PT. Indosat	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Protelindo	11275000	11.275.000,00
4	Era Bangun Towerindo	4.500.000,00	4.500.000,00
5	PT. Excellindo Pratama (XI)	5.500.000,00	5.500.000,00
E	**Tahun 2017**		
1	PT. Telkomsel	5.500.000,00	5.500.000,00
2	PT. Tower Bersama	550.000,00	550.000,00
F	**Tahun 2015**		
1	PT. Tower Bersama	8.995.321,00	8.995.321,00
2	PT. Indosat	12.301.040,00	12.301.040,00
	Jumlah	**169.624.261,00**	**169.624.261,00**

4. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Piutang retribusi sampah berasal dari pemungutan sampah yang belum dibayarkan selama tahun 2024 sebesar Rp8.618.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.12
Piutang Retribusi Sampah Tahun 2024

No	No. SKRD	Tgl Terbit SKRD	Uraian	Nilai SKRD
1	429/SKRD/DLH/ 2022	30/12/2022	Retribusi sampah pondok ikan rawang bulan Juli -Desember 2022	900.000,00
2	457/SKRD/DLH/2023	29/12/2023	Retribusi sampah Perumahan Sakinah Bulan Desember 2023	550.000,00
3	461/SKRD/DLH/2023	05/06/2023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Juni 2023	150.000,00
4	462/SKRD/DLH/2023	05/08/2023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Juli 2023	150.000,00
5	463/SKRD/DLH/2023	05/09/2023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Agustus 2023	150.000,00
6	464/SKRD/DLH/2023	05/102023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan September 2023	150.000,00
7	465/SKRD/DLH/2023	05/11/2023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Oktober 2023	150.000,00
8	466/SKRD/DLH/2023	05/12/2023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan November 2023	150.000,00
9	467/SKRD/DLH/2023	29/12/2023	Retribusi sampah Kantor DPMPTSP bulan Desember 2023	150.000,00
10	490/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Perumahan Sakinah bulan Desember 2024	640.000,00
11	491/SKRD/DLH/2023	05/12/2024	Retribusi sampah Perumahan Ranah Tibarau bulan November 2024	704.000,00
12	492/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Perumahan Ranah Tibarau bulan Desember 2024	704.000,00
13	493/SKRD/DLH/2023	05/11/2024	Retribusi sampah Perumahan Villa Mindawa bulan Oktober 2024	640.000,00
14	494/SKRD/DLH/2023	05/122024	Retribusi sampah Perumahan Villa Mindawa bulan November 2024	640.000,00
15	495/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Perumahan Villa Mindawa bulan Desember 2024	640.000,00
16	496/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Perumahan Taratak Garden bulan Desember 2024	520.000,00
17	497/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Perumahan Lawai bulan Desember 2024	1.400.000,00
18	498/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Nagari Mart Gunung Medan bulan Desember 2024	150.000,00
19	499/SKRD/DLH/2023	05/12/2024	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan November 2024	40.000,00
20	500/SKRD/DLH/2023	31/12/2024	Retribusi sampah Ampera Minang Jaya bulan Desember 2024	40.000,00
			Jumlah	**8.618.000,00**

5. Piutang Retribusi Los

Piutang retribusi Los pada Dinas Kumperdag tahun 2024 sebesar Rp6.380.000,00 yang terdiri dari piutang tahun 2023 sebesar Rp3.340.000,00 dan penambahan piutang Tahun 2024 dengan target sebesar Rp5.040.000,00 terealisasi sebesar Rp2.000.000,00 sehingga terdapat piutang tahun 2024 sebesar Rp3.040.000,000 berasal dari Pasar Koto Baru.

6. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2024 merupakan Piutang Air Minum UPT SPAM pada Dinas PUPR sebesar Rp 1.097.209.250,00 berasal dari piutang Tahun 2024 sebesar Rp267.144.300,00 dan piutang-piutang tahun sebelumnya sebesar Rp830.064.950,00. Piutang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.2.13
Piutang Air Minum UPT SPAM Tahun 2024

No	Tahun Tunggakan	Nilai Piutang per 31 Des 2023	Piutang tertagih Tahun 2024	Piutang Tahun 2024	Nilai Piutang per 31 Des 2024
1	Tahun 2012	13.130.300,00	0,00	0,00	13.130.300,00
2	Tahun 2013	2.667.800,00	0,00	0,00	2.667.800,00
3	Tahun 2014	22.578.050,00	0,00	0,00	22.578.050,00
4	Tahun 2015	10.933.900,00	0,00	0,00	10.933.900,00
5	Tahun 2016	3.523.500,00	0,00	0,00	3.523.500,00
6	Tahun 2017	32.487.600,00	0,00	0,00	32.487.600,00
7	Tahun 2018	35.428.500,00	0,00	0,00	35.428.500,00
8	Tahun 2019	78.859.900,00	0,00	0,00	78.859.900,00
9	Tahun 2020	109.537.400,00	0,00	0,00	109.537.400,00
10	Tahun 2021	124.926.600,00	0,00	0,00	124.926.600,00
11	Tahun 2022	155.464.000,00	19.500,00	0,00	155.444.500,00
12	Tahun 2023	324.530.700,00	83.983.800,00	0,00	240.546.900,00
13	Jan- Agust 2024	0,00	0,00	196.720.000,00	196.720.000,00
14	Sept- Nov 2024	0,00	0,00	39.687.700,00	39.687.700,00
15	Desember 2024	0,00	0,00	30.736.600,00	30.736.600,00
	Jumlah	**914.068.250,00**	**84.003.300,00**	**267.144.300,00**	**1.097.209.250,00**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Retribusi	**(1.305.862.079,55)**	**(888.109.288,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.14
Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1. Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Dareh				
Klaim Pending obat kronis bulan Agustus 2024	52.719.648,00	diragukan	50,0%	26.359.824,00
Klaim Pending obat kronis bulan September 2024	88.151.452,00	kurang lancar	10,0%	8.815.145,20
Klaim obat kronis bulan November 2024	182.261.788,00	kurang lancar	10,0%	18.226.178,80
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Maret 2024	13.415.687,00	diragukan	50,0%	6.707.843,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Mei 2024	13.411.275,00	diragukan	50,0%	6.705.637,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan September 2024	102.225,00	kurang lancar	10,0%	10.222,50
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Oktober 2024	445.900,00	kurang lancar	10,0%	44.590,00
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan November 2024	12.228.971,00	kurang lancar	10,0%	1.222.897,10
Klaim BPJS Tenaga Kerjaan bulan Desember 2024	65.437.328,00	lancar	0,5%	327.186,64
Klaim Pelayanan Ambulance Tk	1.468.000,00	kurang	10,0%	146.800,00

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lanjutan bulan November 2024		lancar		
Klaim Jasaraharja bulan Desember 2024	6.151.175,00	lancar	0,5%	30.755,88
Klaim JKN bulan Desember 2024	4.153.066.300,00	lancar	0,5%	20.765.331,50
Tahun 2019	5.784.900,00	macet	100,0%	5.784.900,00
Jumlah	**4.594.644.649,00**			**95.147.312,62**
2. Jasa Layanan BLUD Puskesmas				
Tahun 2018	2.125.000,00	macet	100,00%	2.125.000,00
Tahun 2019	1.500.000,00	macet	100,00%	1.500.000,00
Januari - Agustus 2024	0,00	diragukan	50,00%	0,00
September - November 2024	306.504.000,00	kurang lancar	10,00%	30.650.400,00
Desember 2024	123.133.000,00	lancar	0,50%	615.665,00
Jumlah	**433.262.000,00**			**34.891.065,00**
3. Jasa Layanan BLUD RSUD Sungai Rumbai				
Januari - Agustus 2024	12.613.797,00	diragukan	50,00%	6.306.898,50
September - November 2024	75.082.955,00	kurang lancar	10,00%	7.508.295,50
Desember 2024	315.790.787,00	lancar	0,50%	1.578.953,94
Jumlah	**403.487.539,00**			**15.394.147,94**
4. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Piutang 2015	21.296.361,00	Macet	100%	21.296.361,00
Piutang 2017	6.050.000,00	Macet	100%	6.050.000,00
Piutang 2020	41.900.000,00	Macet	100%	41.900.000,00
Piutang 2021	37.402.900,00	Macet	100%	37.402.900,00
Piutang 2022	44.000.000,00	Macet	100%	44.000.000,00
Piutang 2023	18.975.000,00	Macet	100%	18.975.000,00
Jumlah	**169.624.261,00**			**169.624.261,00**
5. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah				
Dinas Pendidikan				
Tahun 2017	7.927.000,00	Macet	100%	7.927.000,00
Tahun 2018	26.131.000,00	Macet	100%	26.131.000,00
Tahun 2019	13.783.000,00	Macet	100%	13.783.000,00
Jumlah	**47.841.000,00**			**47.841.000,00**
Dinas Perumahan dan Permukiman				
Tahun 2023	1.612.000,00	macet	100,00%	1.612.000,00
Januari - Agustus 2024	2.400.000,00	diragukan	50,00%	1.200.000,00
September - November 2024	4.000.000,00	kurang lancar	10,00%	400.000,00
Desember 2024	5.100.000,00	lancar	0,50%	25.500,00
Jumlah	**13.112.000,00**			**3.237.500,00**
6. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
Tahun 2022	900.000,00	macet	100,00%	900.000,00
Tahun 2023	1.600.000,00	macet	100,00%	1.600.000,00
September - November 2024	640.000,00	kurang lancar	10,00%	64.000,00
Desember 2024	5.478.000,00	lancar	0,50%	27.390,00
Jumlah	**8.618.000,00**			**2.591.390,00**
7. Retribusi Los				
Tahun 2023	3.340.000,00	macet	100,00%	3.340.000,00
Januari - Agustus 2024	2.360.000,00	diragukan	50,00%	1.180.000,00
September - November 2024	680.000,00	kurang lancar	10,00%	68.000,00
Jumlah	**6.380.000,00**			**4.588.000,00**
8. Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah				
Tahun 2012	13.130.300,00	macet	100%	13.130.300,00
Tahun 2013	2.667.800,00	macet	100%	2.667.800,00
Tahun 2014	22.578.050,00	macet	100%	22.578.050,00
Tahun 2015	10.933.900,00	macet	100%	10.933.900,00
Tahun 2016	3.523.500,00	macet	100%	3.523.500,00

Jenis Retribusi	Saldo Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tahun 2017	32.487.600,00	macet	100%	32.487.600,00
Tahun 2018	35.428.500,00	macet	100%	35.428.500,00
Tahun 2019	78.859.900,00	macet	100%	78.859.900,00
Tahun 2020	109.537.400,00	macet	100%	109.537.400,00
Tahun 2021	124.926.600,00	macet	100%	124.926.600,00
Tahun 2022	155.444.500,00	macet	100%	155.444.500,00
Tahun 2023	240.546.900,00	macet	100,00%	240.546.900,00
Januari - Agustus 2024	196.720.000,00	diragukan	50,00%	98.360.000,00
September - November 2024	39.687.700,00	kurang lancar	10,00%	3.968.770,00
Desember 2024	30.736.600,00	lancar	0,50%	153.683,00
Jumlah	**1.097.209.250,00**			**932.547.403,00**
Total	**6.774.178.699,00**			**1.305.862.079,55**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.10	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.529.319.459,00**	**13.588.890,00**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang deviden yang akan diterima dari penempatan modal pada Bank Nagari, PT. Balairung Citrajaya dan PT.BPR Pulau Punjung.

Nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp5.529.319.459,00 terdiri dari piutang deviden PT. BPR Pulau Punjung Tahun 2024 sebesar Rp14.972.830,00, diterima di Kas Daerah pada tanggal 26 Februari 2025 dan deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.514.346.629,00 yang telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 Maret 2025. Sedangkan deviden PT. Balairung Citrajaya tidak ada penerimaannya selama Tahun 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**27.646,597,30**	**67.944,45**

Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.646,597,30 dari hasil perhitungan :

Tabel 5.2.15
Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan
a.	Deviden PT. BPR Pulau Punjung	14.972.830,00	lancar	0,5%	74.864,15
b.	Deviden Bank Nagari	5.514.346.629,00	lancar	0,5%	27.571.733,15
	Jumlah				**27.646.597,30**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.11	**Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**6.818.492.334,53**	**10.974.350.629,14**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.818.492.334,53 yang terdiri dari:

Tabel 5.2.16
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	6.257.847.164,53	5.248.365.337,14
3	Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	5.129.991,00
4	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	146.000,00	0,00
5	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	471.500,00	585.000,00
	Jumlah	**6.818.492.334,53**	**5.808.978.007,14**

a. Piutang Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Kabupaten Dharmasraya merupakan Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2010 dengan Berita Acara Serah Terima Asset Tahap Kedua dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor 900/898/B.A/2010 tanggal 27 Desember 2010 berupa Kredit Penguatan Modal/Dana Bergulir UMKM (Pokok + Bunga + Denda) sebesar Rp834.993.485,00. Berdasarkan BAST tersebut, penyerahan kredit penguatan modal ke masyarakat direalisasikan pada Tahun 2002 dan 2004 oleh Dinas Koperindag Kabupaten Sijunjung.

Tidak dilakukannya penagihan atas Piutang Dana Bergulir disebabkan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan serta tidak adanya piutang yang dapat ditagih dari debitur. Hal lain tidak bisanya dilakukan penagihan disebabkan alamat yang tidak ditemukan, pindah alamat, meninggal dunia, dan tidak mampu.

Hingga saat ini nilai Piutang Dana Bergulir Tahun 2024 adalah sebesar Rp554.897.679,00 tidak ada perubahan nilai piutang dari Tahun 2019.

Adapun rincian Piutang Dana Bergulir Tahun 2024 dan 2023 terdapat di **Lampiran 12** pada Laporan Keuangan ini.

b. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

Piutang TGR tahun 2024 tercatat sebesar Rp6.257.847.164,53 dapat dijelaskan pada perhitungan sebagai berikut.

Piutang TGR Tahun 2023	Rp	5.248.365.337,14
Penambahan Piutang 2024	Rp	9.371.053.536,71
Pengurangan Piutang tahun sebelumnya	Rp	(128.865.594,00)
Penyetoran Tahun 2024	Rp	8.232.706.115,32
Penyetoran penetapan SKP2KS Tahun 2024	Rp	0
Nilai Piutang Per 31 Desember 2024	Rp	6.257.847.164,53

Adapun rincian mengenai Piutang TGR Tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 13** pada laporan keuangan ini.

c. Piutang Pengembalian Belanja

Piutang pengembalian Belanja Tahun 2024 adalah piutang belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2019 sebesar Rp5.129.991,00.

Piutang tersebut timbul sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dharmasraya serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 09.I/LHP/XVIII.PDG/03/2020 atas Pertanggunjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2019 pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan, terdapat kelebihan pembayaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik periode Agustus 2019 pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.129.991,00.

d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Piutang penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain tahun 2024 sebesar Rp146.000,00 yang berasal dari pendapatan sewa air pada Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

e. Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Piutang denda retribusi pemakaian kekayaan daerah- penyewaan tanah dan bangunan Rusunawa Tahun 2024 sebesar Rp471.500,00 pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.17
Piutang Denda Rusunawa Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian Piutang	Piutang per 31 Des 2023	Penerimaan Tahun 2024	Piutang 2024	Piutang per 31 Des 2024
1	Tahun 2023	585.000,00	425.000,00	0,00	160.000,00
2	Januari - Agustus 2024	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3	September - November 2024	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00
4	Desember 2024	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
	Jumlah	**585.000,00**	**425.000,00**	**311.500,00**	**471.500,00**

Piutang denda tersebut merupakan piutang atas keterlambatan iuran sewa kamar Rusunawa sesuai dengan dengan ketentuan yang tertuang pada Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	**(3.041.699.022,11)**	**(2.964.852.215,80)**

Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp3.041.699.022,11, per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.2.18
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
a.	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	554.897.679,00
b.	Penyisihan Piutang TGR	2.481.399.759,11	2.336.293.567,84
c.	Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	5.129.991,00
d.	Penyisihan piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	13.288,00	0,00

No	Uraian	2024	2023
e.	Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	258.305,00	70.750,00
	Jumlah	**3.041.699.022,11**	**2.896.391.987,84**

a) Penyisihan Piutang Dana Bergulir

Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2024 masih sama dengan penyisihan tahun sebelumnya sebesar Rp554.897.679,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.19
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	(%) Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang
1	Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00	Macet	100%	122.349.281,00
2	Kec. Sitiung	42.186.005,00	Macet	100%	42.186.005,00
3	Kec. Koto Baru	339.304.897,00	Macet	100%	339.304.897,00
4	Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00	Macet	100%	51.057.496,00
	Jumlah	**554.897.679,00**			**554.897.679,00**

b) Penyisihan Piutang TGR tahun 2024 sebesar Rp 2.481.399.759,11 diperoleh dari perhitungan :

Tabel 5.2.20

Penyisihan Piutang TGR Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	2023 keatas /Tagihan kedua belum lunas	4.639.037.606,64	diragukan	50%	2.319.518.803,32
2	Piutang TGR 2024 SKP2KS telah jatuh tempo (lebih dari 90 hari)	1.618.809.557,89	kurang lancar	10%	161.880.955,79
	Jumlah	**6.257.847.164,53**			**2.481.399.759,11**

c) Penyisihan Piutang Pengembalian Belanja tahun 2024 sebesar Rp5.129.991,00 dari perhitungan (100%xRp5.129.991,00).

d) Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp13.288,00 diperoleh dari perhitungan:

Tabel 5.2.21

Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2024

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
1	Januari	3.600,00	diragukan	50%	1.800,00
2	Februari	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
3	Maret	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
4	April	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
5	Mei	1.200,00	diragukan	50%	600,00
6	Juni	1.200,00	diragukan	50%	600,00
7	Juli	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
8	Agustus	2.400,00	diragukan	50%	1.200,00
9	September	6.000,00	Kurang Lancar	10%	600,00
10	Oktober	10.800,00	Kurang Lancar	10%	1.080,00
11	November	21.600,00	Kurang Lancar	10%	2.160,00
12	Desember	89.600,00	Lancar	0,50%	448,00
	Jumlah	**146.000,00**			**13.288,00**

e) Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp258.305,00 dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2.22

Penyisihan Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2024

No	Bulan	Nilai Piutang	Kualitas Piutang	% penyisihan	Penyisihan Piutang
	Tahun 2023	**160.000,00**			**160.000,00**
1	Oktober	30.000,00	Macet	100%	30.000,00
2	November	30.000,00	Macet	100%	30.000,00
3	Desember	100.000,00	Macet	100%	100.000,00
	Tahun 2024	**311.500,00**			**98.305,00**
1	Januari	33.000,00	diragukan	50%	16.500,00
2	Februari	30.000,00	diragukan	50%	15.000,00
3	Maret	27.000,00	diragukan	50%	13.500,00
4	April	24.000,00	diragukan	50%	12.000,00
5	Mei	21.000,00	diragukan	50%	10.500,00
6	Juni	18.000,00	diragukan	50%	9.000,00
7	Juli	15.000,00	diragukan	50%	7.500,00
8	Agustus	12.000,00	diragukan	50%	6.000,00
9	September	31.500,00	Kurang Lancar	10,00%	3.150,00
10	Oktober	30.000,00	Kurang Lancar	10,00%	3.000,00
11	November	19.000,00	Kurang Lancar	10,00%	1.900,00
12	Desember	51.000,00	Lancar	0,50%	255,00
	Jumlah	**471.500,00**			**258.305,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023(Rp)
V.C.1.a.12	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**15.091.731.000,00**	**3.084.000,00**

Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp15.091.731.000.00 bersumber dari Dana Transfer Pemerintah pusat atas ketetapan Lebih dan Kurang Salur DBH Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2024.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 bersumber dari Piutang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp3.084.000,00 telah diterima kas daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 terdiri dari:

1.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	Rp	3.223.000,00
2.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	Rp	1.920.212.000,00
3.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	Rp	1.325.304.000,00
4.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	Rp	11.826.791.000,00
5.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	Rp	11.598.000,00
6.	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp	4.603.000,00
	Jumlah	**Rp**	**15.091.731.000,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.13	**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**21.749.014.918,00**	**17.958.971.283,00**

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah berupa Dana Bagi Hasil Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 05 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Keputusan tersebut, Kabupaten Dharmasraya memiliki alokasi definitif Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp62.031.100.836,00 dengan penerimaan pajak tahun 2024 yang telah masuk ke kas daerah sebesar Rp40.282.085.918,00 sehingga terdapat kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp21.749.014.918,00 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.2.23
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Bagi Hasil	Definitif 2024	Penerimaan Tahun 2024		Penerimaan LRA 2024	Piutang DBH 2024
			Salur 2024	Piutang 2023		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=3-4
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	12.861.030.397	9.059.776.577	4.022.663.729	13.082.440.306	3.801.253.820
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.321.727.461	4.793.103.655	1.788.234.373	6.581.338.028	1.528.623.806
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	27.998.962.549	11.677.944.924	12.121.249.022	23.799.193.946	16.321.017.625
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	203.630.961	105.511.294	26.824.159	132.335.453	98.119.667
5	Pajak Rokok	14.645.749.468	14.645.749.468		14.645.749.468	0,00
	Jumlah	**62.031.100.836**	**40.282.085.918**	**17.958.971.283**	**58.241.057.201**	**21.749.014.918**

Penerimaan Dana Bagi hasil Provinsi yang telah diterima di Kas Daerah selama Tahun 2024 adalah sebesar sebesar Rp58.241.057.201,00 berasal dari salur tahun 2024 sebesar Rp40.282.085.918,00 dan penerimaan kurang salur Tahun 2023 sebesar Rp17.958.971.283,00. Sedangkan kurang salur Dana Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 adalah sebesar Rp21.749.014.918,00.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.14	**Piutang Pendapatan Lainnya**	**459.480,00**	**591,068**

Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan piutang yang berasal dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP untuk bulan Desember 2024.

Piutang Tahun 2024 sebesar Rp459.480,00 seperti yang diuraikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.24
Piutang Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2024 dan 2023

No	Nama BLUD	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Sungai Rumbai	62.577,00	92.806,00
2	Koto Besar	44.012,00	10.770,00
3	Sungai Limau	13.802,00	20.874,00
4	Koto Baru	65.741,00	89.054,00
5	Tiumang	21.333,00	55.233,00
6	Padang Laweh	72.450,00	6.957,00
7	Sitiung I	35.545,00	64.494,00
8	Timpeh	18.942,00	42.216,00
9	Gunung Medan	29.671,00	12.786,00
10	Sitiung II	39.138,00	55.570,00
11	Beringin Sakti	21.597,00	-

No	Nama BLUD	Tahun 2024	Tahun 2023
12	Silago	15.220,00	-
13	Sungai Dareh	5.704,00	120.658,00
14	Sialang	13.748,00	19.650,00
	Jumlah	**459.480,00**	**591.068,00**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**2.297,40**	**2.955,34**

Nilai Penyisihan Piutang Lain-lain pendapatan Daerah yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.297,40 dari perhitungan (459.480,00 x 0,50%=2.297,40)

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.15	**Belanja Dibayar Dimuka**	**274.605.153,94**	**214.617.938,50**

Belanja Dibayar Dimuka pada Tahun 2024 sebesar Rp274.605.153,94 terdiri dari

1. Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah sebesar Rp140.232.331,75, dan
2. Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas Sekretariat DPRD sebesar Rp134.372.822,19.

Adapun Belanja Dibayar Dimuka untuk pembayaran premi asuransi kendaraan dinas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.25
Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2024

No	SKPD	Asuransi Dibayar Dimuka 2024			Beban Asuransi
		total kontrak	TMT Kontrak	Asuransi dibyr dimuka	
I	**Sekretariat Daerah**				
1		6.205.990,00	31 Januari 2024 s.d 31 Januari 2025	525.643,96	5.680.346,04
2		6.546.129,00	7 April 2024 s.d 7 April 2025	1.739.656,20	4.806.472,80
3		30.740.400,00	15 Februari 2024 s.d 15 Februari 2025	3.863.547,54	26.876.852,46
4		29.093.664,00	2 April 2024 s.d 2 April 2025	7.333.197,50	21.760.466,50
5		11.240.400,00	30 Mei 2024 s.d 30 Mei 2025	3.695.473,97	7.544.926,03
6		9.279.000,00	19 Juni 2024 s.d 19 Juni 2025	4.321.726,03	4.957.273,97
7		19.258.000,00	1 Agustus 2024 s.d 1 Agustus 2025	11.238.230,14	8.019.769,86
8		10.729.600,00	26 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2025	6.996.287,12	3.733.312,88
9		107.593.190,00	07 Desember 2024 s.d 07 Desember 2025	100.518.569,29	7.074.620,71
	Jumlah	**230.686.373,00**		**140.232.331,75**	**90.454.041,25**
II	**Sekretariat DPRD**				
1		49.976.890,00	1 April 2024 s.d 1 April 2025	12.323.068,77	37.653.821,23
2		146.540.000,00	1 November 2024 s.d 1 November 2025	122.049.753,42	24.490.246,58
	Jumlah	**196.516.890,00**		**134.372.822,19**	**62.144.067,81**
	Total I + II	**427.203.263,00**		**274.605.153,94**	**152.598.109,06**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.a.16	**Persediaan**	**46.962.340.588,10**	**34.728.826.947,97**

Akun persediaan digunakan untuk mencatat barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan/atau dijual /diserahkan/digunakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2.26
Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Persediaan Bahan habis pakai		**46.962.340.588,10**	**33.198.411.916,96**
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.855.089.172,50	4.594.462.662,50
2	Bahan-Bahan Kimia	256.328.045,73	32.250.800,00
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.561.684,21	20.535.000,00
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.050.000,00	0,00
5	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	36.080.000,00	0,00
6	Bahan-Isi Tabung Gas	13.422.200,00	20.794.000,00
7	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	134.675.000,00	103.045.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.059.063.680,64	20.000.000,00
9	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.460.175.098,58	3.573.654.912,87
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	560.000,00	0,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	210.592.980,19
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	65.460.357,00	37.448.640,00
13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.983.900,00	13.744.010,00
14	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	102.366.351,00	102.299.500,00
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.500.000,00	1.870.000,00
16	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	89.809.000,00	139.915.000,00
17	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	11.046.500,00	13.736.000,00
18	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.125.000,00	202.000,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.305.000,00	0,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.585.694,00	15.611.630,00
21	Obat-Obatan	7.262.880.883,09	6.744.375.503,05
22	Obat-Obatan Lainnya	1.946.756.661,50	211.077.614,00
23	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.894.383.230,93	16.713.314.989,35
24	Barang untuk Dijual/Diserahkan lainnya	17.678.634.503,92	614.964.200,00
25	Natura dan Pakan-Natura	5.557.875,00	11.058.375,00
26	Belanja Pakaian Adat Daerah	32.500.000,00	0,00
27	Beban Persediaan Dana BOS - LO	3.440.750,00	3.459.100,00
Persediaan lainnya		**0,00**	**1.530.415.031,00**
1	Persediaan barang yg berasal Belanja Modal yang akan diberikan pada masyarakat/ pihak ketiga	0,00	103.535.360,00
2	Persediaan barang yg berasal Belanja Modal	0,00	0,00
3	Pers. Barang yg akan diberikan kepada masyarakat	0,00	1.300.703.401,00

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
4	Pers. Barang yg akan diberikan pada pihak ke- 3	0,00	0,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
6	Persediaan Sumbangan dari Pihak ketiga	0,00	126.176.270,00
Jumlah		**46.962.340.588,10**	**34.728.826.947,96**

Adapun rincian persediaan per SKPD Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.2.27
Persediaan per SKPD Tahun 2024

No	SKPD	Persediaan Habis Pakai
1	Dinas Pendidikan	6.000.000,00
	- Dinas Pendidikan Dana BOSP	40.154.521,00
2	- Dinas Kesehatan	6.800.672.104,37
	- BLUD Puskesmas	4.547.300.120,78
	- RSUD Sungai Dareh	0,00
	- BLUD RSUD Sungai Dareh	2.949.691.298,31
3	Dinas PUPR	17.588.114.156,71
4	Dinas Perkimtan	11.485.401.081,43
5	Dinas Satpol PP & Damkar	300.000,00
6	BPBD	190.000,00
7	DINSOSP3APPKB	969.271.055,50
8	Dinas Pangan Dan Perikanan	104.275.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	453.360.775,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	139.662.000,00
11	Dinas PMD	0,00
12	Dinas Perhubungan	50.439.000,00
13	Dinas Kominfo	140.000,00
14	Diskumperdag	617.900,00
15	Dinas PMPTSP	1.200.000,00
16	Dinas Budparpora	1.657.270.975,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	170.000,00
18	Dinas Pertanian	150.705.600,00
19	Dinas Transnaker	594.000,00
20	Sekretariat Daerah	10.111.000,00
21	Sekretariat DPRD	1.685.000,00
22	Bapperida	815.000,00
23	BKD	1.193.000,00
24	BKPSDM	202.000,00
25	Inspektorat	400.000,00
26	Kecamatan Pulau Punjung	338.000,00
27	Kecamatan Sitiung	110.000,00
28	Kecamatan Koto Baru	180.000,00
29	Kecamatan Sungai Rumbai	40.000,00
30	Kecamatan Sembilan Koto	330.000,00
31	Kecamatan Timpeh	360.000,00
32	Kecamatan Koto Salak	250.000,00
33	Kecamatan Asam Jujuhan	216.000,00
34	Kecamatan Koto Besar	395.000,00
35	Kecamatan Padang Laweh	186.000,00
36	Kecamatan Tiumang	0,00
37	Kesbangpol	0,00
	Jumlah	**46.962.340.588,10**

Penjelasan lebih terinci terkait Persediaan per SKPD Tahun 2024 dapat di lihat pada **Lampiran 14** Laporan Keuangan ini.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.1.b.1.	Investasi Jangka Panjang	28.952.000.000,00	28.952.000.000,00

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.952.000.000,00 merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Sumatera Barat (Bank Nagari), PT Balairung Citrajaya Sumbar, dan BPR Pulau Punjung. Adapun perkembangan penyertaan modal pada ketiga *investee* tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	**27.352.000.000,00**
Penambahan selama Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	**27.352.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Nagari tersebut terdiri dari.

a) Tahun 2007 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000013 dengan nilai nominal Rp1.000.000.000,00;
b) Tahun 2009 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000033 dengan nilai nominal Rp322.000.000,00;
c) Tahun 2010 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000052 dengan nilai nominal Rp9.678.000.000,00;
d) Tahun 2012 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000088 dengan nilai nominal Rp3.200.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000102 dengan nilai nominal Rp36.000.000,00;
e) Tahun 2013 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000118 dengan nilai nominal Rp5.369.000.000,00 dan Surat Kolektif Saham Nomor A.000131 dengan nilai nominal Rp31.000.000,00.
f) Tahun 2017 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.1427724-1431444 dengan nilai nominal Rp3.716.000.000,00.
g) Tahun 2019 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000232 dengan nilai nominal Rp2.500.000.000,00
h) Tahun 2023 berupa Surat Kolektif Saham Nomor A.000276 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00

Sampai dengan 31 Desember 2024 Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada Bank Nagari sebesar Rp27.352.000.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 1,48%, sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Balairung Citrajaya Sumbar

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	**1.500.000.000,00**
Penambahan selama Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	**1.500.000.000,00**

Investasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada PT Balairung Citra Jaya Sumatera Barat di Jakarta senilai Rp1.500.000.000,00 dengan jumlah modal disetor keseluruhan sebesar Rp164.025.990.000,00 sehingga kepemilikan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,91%. Pada tahun 2008 bersama-sama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menanamkan investasi pada pembangunan Balairung

Sumatera Barat. Investasi ini didasarkan pada adendum Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Nomor 030-424.1-2007.

PT Balairung Citrajaya Sumbar merupakan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang bergerak pada bidang usaha Hotel, Restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Penyertaan modal pada PT Balairung Citrajaya Sumbar sesuai dengan Surat Saham Gabungan Nomor 012 dengan nilai nominal Rp1.500.000.000,00.

Jumlah lembar saham sebanyak 600.900 lembar terdiri dari :

a. Saham seri A sebanyak : 900 lembar/ no.seri 55.296 s.d. 56.195
b. Saham seri B sebanyak 600.000 lembar/ no.seri 36.864.299 s.d. 464.298

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada Balairung, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 0,91% dari ekuitas Balairung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

3) Penyertaan Modal Pemerintah pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung

Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	**100.000.000,00**
Penambahan selama Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo Per 31 Desember 2024	Rp	**100.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah pada BPR Pulau Punjung pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Saham Biasa Nomor Seri B 0542 dengan nilai nominal Rp100.000.000,00.

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperoleh bagi hasil dari penyertaan modal pada BPR Pulau Punjung. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggunakan metode biaya karena kepemilikan hanya sebesar 1,92% dari ekuitas PT BPR Pulau Punjung sehingga pendapatannya tidak mempengaruhi kepemilikan investasi.

V.C.1.c. ASET TETAP

Tabel. 5.2.28
Daftar Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ penurunan	Trend
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
a.	Tanah	643.176.924.008,00	643.277.190.582,00	(100.266.574,00)	-0,02%
b.	Peralatan dan Mesin	457.431.418.474,76	438.393.703.299,76	19.037.715.175,00	4,16%
c.	Gedung dan Bangunan	1.129.495.528.240,53	1.076.301.011.447,98	53.194.516.792,55	4,71%
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.511.485.488.792,33	1.474.867.532.577,16	36.617.956.215,17	2,42%
e.	Aset Tetap Lainya	48.963.924.243,00	44.898.465.176,00	4.065.459.067,00	8,30%
f.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.970.751.677,00	14.752.739.322,00	(11.781.987.645,00)	396,60%
	Aset Tetap	**3.793.524.035.435,62**	**3.692.490.642.404,90**	**101.033.393.030,72**	**2,66%**
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		**(1.527.992.628.347,13)**	**(1.362.023.205.760,32)**	**(165.969.422.586,81)**	**10,86%**
Nilai Buku Aset Tetap		**2.265.531.407.088,49**	**2.330.467.436.644,58**	**(64.936.029.556,09)**	**-2,87%**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.265.531.407.088,49 dan Rp2.330.467.436.644,58 atau terjadinya penurunan nilai aset tetap setelah penyusutan senilai Rp64.936.029.556,09 atau menurun sebesar 2,87%. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan secara signifikan pada Konstruksi Dalam Pengerjaan dimana pada tahun 2023 sebesar Rp14.752.739.322,00 menjadi Rp2.970.751.677,00 atau menurun sebesar Rp11.781.987.645,00 atau 396%.

Tabel. 5.2.29
Mutasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	31 DESEMBER 2024
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4
Tanah	643.277.190.582,00	957.378.426,00	1.057.645.000,00	643.176.924.008,00
Peralatan dan Mesin	438.393.703.299,76	33.050.828.421,00	14.013.113.246,00	457.431.418.474,76
Gedung dan Bangunan	1.076.301.011.447,98	62.054.093.306,55	8.859.576.514,00	1.129.495.528.240,53
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.474.867.532.577,16	56.593.676.915,00	19.975.720.699,83	1.511.485.488.792,33
Aset Tetap Lainya	44.898.465.176,00	4.321.032.200,00	255.573.133,00	48.963.924.243,00
KDP	14.752.739.322,00	1.139.321.288,00	12.921.308.933,00	2.970.751.677,00
JUMLAH	**3.692.490.642.404,90**	**158.116.330.556,55**	**57.082.937.525,83**	**3.793.524.035.435,62**

Nilai aset tetap sebelum penyusutan tahun 2023 sebesar Rp3.692.490.642.404,90, selama tahun 2024 terdapat penambahan aset tetap sebesar Rp158.116.330.556,55 dan pengurangan aset tetap sebesar Rp57.082.937.525,83, sehingga nilai aset tetap sebelum penyusutan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp3.793.524.035.435,62. Adapun komponen penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen Penambahan Nilai Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp Rp158.116.330.556,55 diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 5.2.30
Komponen Penambahan Nilai Aset Tetap

URAIAN	BELANJA MODAL	PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	PENAMBAHAN ASET DARI HUTANG TAHUN 2024	HIBAH	KAPITALISASI ASET	REKLASIFIKASI ASET	PENILAIAN KURANG CATAT MENJADI ASET	JUMLAH PENAMBAHAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	8=2+3+4+5+6+7
Tanah	-	61.200.000	-	-	-	216.778.136	679.400.290	957.378.426
Peralatan dan Mesin	24.237.257.450	4.357.681.467	77.354.838	2.438.534.672	80.870.000	1.859.129.994	-	33.050.828.421
Gedung dan Bangunan	28.954.072.575	5.283.062.024	418.236.000	17.981.618.340	1.255.449.135	8.161.655.232	-	62.054.093.307
Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.054.989.838	8.588.649.440	-	777.193.154	169.455.000	2.003.389.483	-	56.593.676.915
Aset Tetap Lainya	3.810.397.200	-	-	-	11.070.000	499.565.000	-	4.321.032.200
KDP	-	-	-	-	-	1.139.321.288	-	1.139.321.288
JUMLAH	**102.056.717.063**	**18.290.592.931**	**495.590.838**	**21.197.346.166**	**1.516.844.135**	**13.879.839.133**	**679.400.290**	**158.116.330.557**

Komponen Pengurangan Nilai Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp57.082.937.525,83, diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 5.2.31
Komponen Pengurangan Nilai Aset Tetap

URAIAN	KOREKSI PENCATATAN	PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	HIBAH	REKLASIFIKASI ASET	JUMLAH PENGURANGAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Tanah	38.125.000,00	61.200.000,00	958.320.000,00	-	-
Peralatan dan Mesin	181.968.000,00	4.357.681.467,00	-	-	9.473.463.779,00
Gedung dan Bangunan	-	5.283.062.024,00	-	-	3.576.514.490,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	279.846.000,00	8.588.649.440,00	-	-	11.107.225.259,83
Aset Tetap Lainya	750.000,00	-	-	-	254.823.133,00
KDP	-	-	-	-	12.921.308.933,00
JUMLAH	**500.689.000,00**	**18.290.592.931,00**	**958.320.000,00**	-	**37.333.335.594,83**

V.C.1.c.1. TANAH

Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	643.176.924.008,00	**643.277.190.582,00**

Nilai aset tetap tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp643.176.924.008,00 dan Rp643.277.190.582,00. Nilai tanah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi tanah, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.32
Perhitungan Mutasi Tanah Per 31 Desember 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2023		**643.277.190.582,00**
Mutasi Tambah		
1	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	61.200.000,00
2	Reklasifikasi Aset	216.778.136,00
3	Kurang Catat Tanah	37.000.000,00
4	Penambahan penilaian Kurang catat	642.400.290,00
Total Penambahan		**957.378.426,00**
Mutasi Kurang		
1	Koreksi Pencatatan	38.125.000,00
2	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	61.200.000,00
3	Hibah	958.320.000,00
Total Pengurangan		**1.057.645.000,00**
Jumlah Tanah per 31 Desember 2024		**643.176.924.008,00**

Berikut uraian perhitungan mutasi aset tetap tanah tahun 2024:

1. **Penambahan Aset Tetap Tanah**
   a. Penambahan karena Penyerahan/ Pengalihan status Pengguna pada SKPD Dinas Lingkungan dari Dinas Pendidikan untuk pengerjaan taman di Kecamatan Sitiung sebesar Rp61.200.000,00.

b. Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan Gedung berupa *landscape* ke Aset Tetap Tanah pada Dinas PUPR sebesar Rp216.778.136,00.

c. Terdapat Aset Tetap yang belum dicatat yaitu Tanah Fasilitas Umum Tower di Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar senilai Rp37.000.000,00.

d. Penambahan karena adanya penambahan penilaian kurang catat tanah jalan dan badan jalan di Dinas PUPR senilai Rp642.400.290,00.

2. Pengurangan Aset Tetap Tanah

a. Koreksi Pencatatan sebesar Rp38.125.000,00.
Merupakan koreksi catat terhadap tanah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp13.125.000,00 dan Pada Dinas Pertanian sebesar Rp25.000.000,00;

b. Pengurangan karena penyerahan/pengalihan status penggunaan pada SKPD Dinas Pendidikan untuk pembuatan taman di Kecamatan Sitiung sebesar Rp61.200.000,00;

c. Pengurangan karena penyerahan hibah tanah pada lokasi Sport Center kepada TVRI sebesar Rp958.320.000,00.

Aset Tetap Tanah saat ini terdiri dari 720 persil, sudah bersertifikat sebanyak 274 persil, dan sisanya sebanyak 446 belum bersertifikat. Permasalahan atas Tanah yang belum bersertifikat, yang saat ini sedang dalam pengurusan di BPN Dharmasraya, diantaranya tidak sesuainya luas lokasi pada saat pembelian atau saat perolehan hibah dengan kondisi luas tanah di lapangan.

Adapun seperti lokasi tanah yang bermasalah terdapat pada :

1. Dinas PUPR pada tanah bangunan terminal darat yang berlokasi di samping SPBU Sialang.
2. Dinas Perkimtan pada tanah yang berlokasi di samping kantor Dinas Kumperdag.
3. Dinas DLH pada tanah TPA di Sitiung V Rebusa.
4. Dinas Pendidikan pada tanah SMP 3 Sitiung di Nagari Taratak Tinggi.

V.C.1.c.2 PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	457.431.418.474,76	**438.393.703.299,76**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp457.431.418.474,76 dan Rp438.393.703.299,76 Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.33
Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2024

	URAIAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2023		**438.393.703.299,76**
Mutasi Tambah		
1	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	4.357.681.467,00
2	Belanja Modal	24,237,257,450.00
3	Penambahan Aset dari Hutang Tahun 2024	77.354.838,00
4	Hibah	2.438.534.672,00
5	Kapitalisasi Aset	80.870.000,00
6	Reklasifikasi Aset	1.859.129.994,00
	Total Penambahan	**33.050.828.421,00**
Mutasi Kurang		
1	Koreksi Pencatatan	181.968.000,00
2	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	4.357.681.467,00
3	Reklasifikasi Aset	9.473.463.779,00
	Total Pengurangan	14.013.113.246,00
	Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	**457.431.418.474,76**

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024:

1. Mutasi Tambah

a. Penyerahan/ Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp4.357.681.467,00 merupakan mutasi peralatan dan mesin antar SKPD yang tidak mempengaruhi nilai aset secara keseluruhan. Pengalihan status Pengguna diantaranya berupa alat angkut kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat).

b. Belanja Modal

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 paling signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal yaitu sebesar Rp24.237.257.450,00 diantaranya untuk pembelian alat angkut sebesar Rp8.384.966.950,00 dengan rincian pembelian 10 unit kendaraan ambulance pada Dinas Kesehatan, 1 unit kendaraan jabatan pimpinan DPRD, dan 2 unit kendaraan operasional pada Inspektorat.

c.Hibah

Merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat pada 4 (Empat) SKPD dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Perkimtan berupa alat kantor rumah tangga untuk operasional Rusunawa Sungai Rumbai sebesar Rp1.192.518.240,00.
2. BPBD berupa alat angkut sebesar Rp114.330.000,00 , alat komunikasi dan pemancar sebesar Rp28.000.000, alat keselamatan kerja Rp98.766.000,00.
3. Dinas Perhubungan berupa alat labor sebesar Rp688,527,500.00.
4. Dinas Kesehatan berupa alat kantor rumah tangga Rp 80.837.074,00 dan alat Laboratorium Rp. 235.555.858,00.

d. Reklasifikasi Aset

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan uraian sebagai berikut :

1. Reklasifikasi dari Aset Lainnya
   Tersebar pada 11 SKPD sebesar Rp741.145.000,00.
2. Reklasifikasi dari KDP
   Pada RSUD terdapat beberapa unit peralatan dan mesin dengan nilai sebesar Rp1.117.984.994,00 merupakan reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan.

2. Mutasi Kurang

a. Koreksi Pencatatan sebesar Rp181.968.000,00 pada Dinas Pendidikan yang merupakan belanja modal menjadi persediaan.

b. Penyerahan/pengalihan status pengguna pada beberapa SKPD sebesar Rp4.357.681.467,00.

c. Reklasifikasi aset sebesar Rp9.473.463.779,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklas ke aset lainnya karena perubahan kondisi barang yang sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk operasional SKPD sebesar Rp9.408.789.739,00.
2. Reklas ke Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.014.040,00.
3. Reklas ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp53.660.000,00.

V.C.1.c.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung Dan Bangunan	31 Desember 2024(Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.129.495.528.240,53	**1.076.301.011.477,98**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.129.296.594.440,53 dan Rp1.076.301.011.477,98 Penjelasan mengenai perhitungan mutasi gedung dan bangunan, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.34
Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2023		1.076.301.011.447,98
Mutasi Tambah		
1	Belanja Modal	28.954.072.575,16
2	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	5.283.062.024,00
3	Penambahan Aset dari Hutang tahun 2024	418.236.000,00
4	Hibah	17.981.618.340,00
5	Kapitalisasi Aset	1.255.449.135,39
6	Reklasifikasi Aset	8.161.655.232,00
	Total Penambahan	**62.054.093.306,55**
Mutasi Kurang		
1	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	5.283.062.024,00
2	Reklasifikasi Aset	3.576.514.490,00
	Total Pengurangan	8.859.576.514,00
	Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	**1.129.495.528.240,53**

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024:

1. Mutasi Tambah

a. Belanja Modal

Dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp28.954.072.575,16 terdiri dari:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 yang bersumber dari APBD adalah senilai Rp26.562.770.563,00 yang tersebar pada 14 SKPD;
2. Penambahan Belanja Modal BLUD menjadi Aset berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp2.391.302.012,16 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.942.710.815,00 dan RSUD Sungai Dareh sebesar Rp448.591.197,16.

b. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena adanya mutasi antar SKPD sebesar Rp5.283.062.024,00 berupa mutasi dari beberapa SKPD ke Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut :

1. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari dari Dinas PUPR berupa :
   - RTH Simpang Silago senilai Rp5.003.368.000,00.
   - Gedung pos jaga permanen senilai Rp89.600.000,00.
2. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pendidikan berupa bekas Bangunan SDN 01 Sitiung terdiri dari:
   - Sanitasi MCK Sekolah senilai Rp53.833.864,00.
   - Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen (Rumah Dinas Guru) senilai Rp86.632.260,00.
   - Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen (Rumah Dinas Kepala Sekolah) senilai Rp24.627.900,00.
   - Istana Peninggalan senilai Rp25.000.000,00.

c. Penambahan Aset dari Hutang tahun 2024 senilai Rp418.236.000,00.

1. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa rehab bangunan senilai Rp219.302.200,00 pada RSUD Sungai Dareh.
2. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa rehab bangunan gedung Kantor Bupati senilai Rp198.933.800,00 pada Sekretariat Daerah

d. Hibah

Merupakan Hibah BMN berupa Rumah Susun MBR Sungai Rumbai dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPRyang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya senilai Rp17.981.618.340,00.

e. Kapitalisasi Aset

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp 1.255.449.135,39 berupa:

1. Penambahan dari belanja pemeliharaan RSUD Sungai Dareh sebesar Rp942.205.576,00.
2. Belanja barang yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp313.243.559,39.

f. Reklasifikasi Aset

Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap Bangunan dan Gedung sebesar Rp8.161.655.232,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Reklas dari aset extra berupa rehab rumah dinas Camat Koto Baru senilai Rp816.000,00.
2. Reklas sesama Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa rehab kantor dan pagar Dinas PUPR senilai Rp199.530.000,00.
3. Reklas dari KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Rusun Sungai Rumbai pada Dinas Perkimtan senilai Rp39.900.000,00.
4. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp11.014.040,00.
5. Reklas dari KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa bangunan pada RSUD Sungai Dareh senilai Rp7.807.514.766,00.
6. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Perencanaaan dan Pengawasan pada Dinas Pendidikan senilai Rp58.977.426,00.
7. Reklas sesama Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada bangunan gedung IPAL di RPH Gunung Medan pada Dinas Pertanian senilai Rp43.903.000,00.

2. Mutasi Kurang

a. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.283.062.024,00 berupa mutasi dari beberapa SKPD ke Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna dari Dinas PUPR berupa :
   - RTH Simpang Silago senilai Rp5.003.368.000,00.
   - Gedung pos jaga permanen senilai Rp89.600.000,00.
2. Penyerahan/Pengalihan Status Pengguna dari Dinas Pendidikan berupa bekas Bangunan SDN 01 Sitiung terdiri dari :
   - Sanitasi MCK sekolah senilai Rp53.833.864,00.
   - Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen (Rumah Dinas Guru) senilai Rp86.632.260,00.
   - Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen (Rumah Dinas Kepala Sekolah) senilai Rp24.627.900,00.
   - Istana Peninggalan senilai Rp24.627.900,00.

3. Reklasifikasi Aset

Pengurangan Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp3.576.514.490,00 terdiri dari:

1. Reklas pengurangan ke Aset lainnya pada Dinas PUPR senilai Rp1.566.285.069,00.
2. Reklas pengurangan ke Aset lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp255.730.968,00.
3. Reklas pengurangan ke Aset lainnya pada Dinas Budparpora senilai Rp604.413.965,00.
4. Reklas pengurangan ke Aset lainnya pada Dinas Pertanian senilai Rp1.089.540.400,00.
5. Reklas pengurangan ke KDP pada DinsosP3APPKB senilai Rp60.544.088,00.

V.C.1.c.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.511.485.488.792,33	**1.474.867.532.577,16**

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.511.485.488.792,33 dan Rp1.474.867.532.577,16.

Total nilai Aset Tetap Jalan di Kabupaten Dharmasraya adalah Rp1.511.485.488.792,33, dari jumlah tersebut terdapat di Dinas PUPR sebesar Rp1.425.661.662.158,98 yang terdiri dari 254 ruas. Dari jumlah tersebut sebanyak 195 telah sesuai dengan SK Jalan sedangkan sisanya sebanyak 59 ruas yang berupa Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa. Berdasarkan penelusuran terhadap 59 ruas jalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 1 ruas jalan yang yang terdiri dari 2 katagori jalan, yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan sehingga pencatatannya menjadi 2 ruas jalan.
2. Tercatat 3 ruas jalan yang seharusnya hanya 1 ruas jalan .
3. Berdasarkan point (1) dan (2) total jalan menjadi 58 ruas dengan rincian sebagai berikut :
   a. Terdapat 23 ruas jalan yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang akan dihibahkan ke instansi terkait.
   b. Terdapat 23 ruas bagian dari Jalan Kabupaten, terhadap ruas ini akan dikapitalisasi ke ruas induk jalan sesuai dengan SK Jalan.
   c. Terdapat 1 ruas jalan lingkung pada RSUD Sungai Dareh.
   d. Terdapat 11 ruas jalan yang merupakan kategori jalan lingkungan.

Adapun perhitungan mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.35
Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2023		1.474.867.532.577,16
Mutasi Tambah		
1	Belanja Modal	45.054.989.838,00
2	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	8.588.649.440,00
3	Hibah	777.193.154,00
4	Kapitalisasi Aset	169.455.000,00
5	Reklasifikasi Aset	2.003.389.483,00
	Total Penambahan	**56.593.676.915,00**
Mutasi Kurang		
1	Koreksi Pencatatan	279.846.000,00
2	Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna	8.588.649.440,00
3	Reklasifikasi Aset	11.107.225.259,83
	Total Pengurangan	**19.975.720.699,83**
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Des 2024		**1.511.485.488.792,33**

Uraian Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah

a. Penambahan Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp45.054.989.838,00 pada 4 SKPD sebagai berikut:
   1) Pada Dinas PUPR dengan nilai Rp43.964.848.838,00
   2) Pada Dinas Kesehatan dengan nilai Rp625.826.000,00.
   3) Pada Dinas Lingkungan Hidup dengan nilai Rp8.600.000,00.
   4) Pada RSUD dengan nilai sebesar Rp455.715.000,00.

b. Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna sebesar Rp.8.588.649.440,00 dengan rincian sebagai berikut :
   1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan karena adanya mutasi dari Dinas PUPR sebesar Rp7.142.611.362,00 terkait peralihan kewenangan pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
   2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada RSUD Sungai Dareh karena adanya mutasi dari Dinas PUPR berupa Peningkatan Jalan lingkar RSUD Sungai Dareh sebesar Rp497.873.831,00 dan peningkatan jalan pada RSUD kantor baru senilai Rp948.164.247,00.

c. Hibah

   Merupakan Hibah BMN pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupa 50 unit PJU Tenaga Surya senilai Rp777.193.154,00.

d. Kapitalisasi Aset

   Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp169.455.000,00 pada RSUD Sungai Dareh.

e. Reklasifikasi Aset

   Reklasifikasi Aset menjadi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.2.003.389.483,00 dengan rincian sebagai berikut:
   1) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp.573.654.000 berupa 5 paket perencanaan jalan 3 paket perencanaan jembatan.
   2) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada RSUD sebesar Rp1.176.269.680,00 berupa instalasi air, jaringan pipa, gas, jaringan listrik dan jaringan telepon.
   3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp253.465.803.

2. Mutasi Kurang

a. Koreksi Pencatatan

   Terdapat Koreksi Pencatatan senilai Rp279.846.000,00 yang merupakan barang persediaan.

b. Penyerahan / Pengalihan Status Pengguna Rp8.588.649.440,00.
   1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR karena adanya mutasi ke Dinas Perhubungan sebesar Rp7.142.611.362,00 terkait peralihan kewenangan pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
   2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR karena adanya mutasi ke RSUD Sungai Dareh berupa Peningkatan Jalan lingkar RSUD Sungai Dareh sebesar Rp497.873.831,00. dan peningkatan jalan pada RSUD kantor baru senilai Rp948.164.247,00.

c. Reklasifikasi Aset

   Reklasifikasi Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas PUPR sebesar Rp11.107.225.259,83 merupakan aset yang di reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp499.565.000,00 dan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp999.102.000,00 dan ke Aset Lainnya sebesar Rp9.608.558.259,83. Reklas ke Aset Lainnya merupakan aset jalan yang akan dihibahkan ke instansi lain sebanyak 23 ruas.

V.C.1.c.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	48.963.924.243,00	**44.898.465.176,00**

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp48.963.924.243,00 dan Rp44.898.465.176,00, Nilai tersebut merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai, sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Kabupaten Dharmasraya pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya, disajikan pada Tabel berikut :`

Tabel. 5.2.36
Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2023		44.898.465.176,00
Mutasi Tambah		
1	Reklasifikasi Aset	499.565.000,00
2	Kapitalisasi Aset	11.070.000,00
3	Belanja Modal	61.520.000,00
4	Belanja Modal BOS	3.619.447.200,00
	Total Penambahan	**4.191.602.200,00**
Mutasi Kurang		
1	Koreksi Pencatatan	750.000,00
2	Reklasifikasi Aset	125.393.133,00
	Total Pengurangan	**126.143.133,00**
	Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	**48.963.924.243,00**

Berikut uraian perhitungan mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2024:

1. **Penambahan Aset Tetap Lainnya**
   a. Reklasifikasi Aset
      Pada Dinas PUPR sebesar Rp499.565.000,00 berupa Dokumen Data Survey Kondisi Irigasi dan Dokumen Data Survey Kondisi Jalan Kabupaten.
   b. Kapitalisasi Aset
      Kapitalisasi Belanja BOSP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.070.000.
   c.Belanja Modal
      Belanja Modal pada Dinas Pendidikan sebesar Rp61.520.000.
   d. Belanja Modal BOSP
      Belanja Modal BOSP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.619.447.200,00.

2. **Pengurangan Aset Tetap Lainnya**
   Pengurangan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp126.143.133,00 terdiri dari:
   1) Koreksi pencatatan belanja BOSP pada Dinas Pendidikan sebesar Rp750.000,00;
   2) Reklasifikasi belanja Aset Tetap Lainnya ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.873.133,00 dan aset ekstrakomptable sebesar Rp61.500.000,00;

V.C.1.c.6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
	2.970.751.677,00	**14.752.739.322,00**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.970.751.677,00 dan Rp14.752.739.322,00.

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan apabila telah selesai pengerjaannya serta sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat atau pemerintah, maka dilakukan reklasifikasi ke aset masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.2.37
Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024

URAIAN		JUMLAH (Rp)
Saldo Awal per 31 Desember 2023		14.752.739.322,00
MUTASI TAMBAH		
1	Reklasifikasi Aset	1.139.321.288,00
	TOTAL PENAMBAHAN	**1.139.321.288,00**
MUTASI KURANG		
1	Reklasifikasi Aset	12.921.308.933,00
	TOTAL PENGURANGAN	**12.921.308.933,00**
JUMLAH KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2024		**2.970.751.677,00**

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Mutasi Tambah** sebesar Rp1.139.321.288,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp140.219.288,00 terdapat pada.
      1) Dinas PUPR sebesar Rp79.675.200,00.
      2) Dinas SOSP3APPKB sebesar Rp60.544.088,00.
   b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp999.102.000,00.
2. **Mutasi Kurang** sebesar Rp12.921.308.933,00 terdapat pada:
   a. Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa perencanaan 3 Paket Jembatan dan 5 paket jalan kabupaten pada Dinas PUPR sebesar Rp573.654.000,00.
   b. Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Instalasi Jaringan Listrik pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.176.269.680,00.
   c. Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa perencanaan rumah susun MBR Sungai Rumbai pada Dinas Perkimtan dikapitalisasi ke bangunan induk berupa bangunan Rumah Susun yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp39.900.000,00.
   d. Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa rehab bangunan gedung baru RSUD Sungai Dareh sebesar Rp7.807.514.766,00.
   e. Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa perencanaan ruang kelas baru SDN 01 Koto Baru pada Dinas Pendidikan dengan nilai sebesar Rp58.977.426,00.
   f. Reklas ke Aset Tetap peralatan dan Mesin berupa pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga dan peralatan mesin lainnya pada RSUD Sungai Dareh. Sebesar Rp1.117.984.994,00.
   g. Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa pengadaan peralatan kantor dan rumah tangga dan peralatan mesin lainnya pada RSUD Sungai Dareh. Sebesar Rp2.147.008.067,00.

Tabel. 5.2.38
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 2024

No	Jenis Barang /Nama Barang	Tahun Mulai	Nilai Kontrak (Rp)	Keterangan
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	31/12/2019	79.696.000,00	Perencanaan Pembangunan Command Center
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	31/12/2017	127.020.000,00	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	31/12/2017	125.059.000,00	DED Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	31/12/2017	127.899.000,00	DED Pembangunan Gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Barang /Nama Barang	Tahun Mulai	Nilai Kontrak (Rp)	Keterangan
5	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	31/12/2017	123.920.000,00	DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya
6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	31/12/2017	49.960.000,00	Perencanaan pembangunan Sarana olah raga nagari Sungai Duo
7	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31/12/2017	29.275.000,00	DED Pembangunan Rumah Dinas Camat Padang Laweh
8	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	31/12/2019	79.680.000,00	DED Rumah Dinas Wakil Bupati
9	Flat/rumah Lain-lain (dst)	31/12/2016	49.920.000,00	DED Kawasan Kumuh Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung
10	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain	31/12/2017	46.453.000,00	Perencanaan RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung
11	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	31/12/2020	79.900.000,00	Perencanaan paket V Jembatan
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30/12/2024	79.675.200,00	Perencanaan Rehab Kantor DPRD Kab. Dharmasraya
13	Flat/rumah Lain-lain (dst)	28/12/2023	49.910.000,00	DED Kawasan Rawan Bencana Kec.Pulau Punjung
14	Rumah Adat	28/12/2023	609.640.800,00	Perencanaan Rumah Gadang - Gunung Medan
15	Jalan Kabupaten Arteri	30/12/2024	99.900.000,00	Perencanaan Paket VI 2024 Jalan
16	Jalan Kabupaten Arteri	30/12/2024	99.905.000,00	Perencanaan Paket VII 2024 Jalan
17	Jalan Kabupaten Arteri	30/12/2024	99.906.000,00	Perencanaan Paket VIII 2024 Jalan
18	Jalan Kabupaten Arteri	30/12/2024	99.921.000,00	Perencanaan Paket IX 2024 Jalan
19	Jalan Kabupaten Arteri	30/12/2024	99.911.000,00	Perencanaan Paket XIII 2024 Jalan
20	Jalan Kabupaten Arteri	30/12/2024	99.900.000,00	Perencanaan Paket XIV 2024 Jalan
21	Jalan Kabupaten Lain-lain	30/12/2023	99.850.000,00	Perencaan Paket IV (APBD) Pembangunan Jalan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Usulan Propinsi
22	Jalan Kabupaten Lain-lain	28/12/2023	99.900.000,00	Perencaan Paket VIII (APBD) Pembangunan Jalan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan" Usulan Propinsi
23	Jalan Kabupaten Lain-lain	28/12/2023	74.930.000,00	Pembuatan Dokumen UKP/UPL Jalan Inpres Sungai Rumbai -Batas Solok Selatan
24	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	31/12/2022	99.893.000,00	Jasa Konsultansi DED Embung Koto Padang 2022
2. Dinas Pendidikan				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	30/12/2023	78.563.589,00	Perencanaan Penambahan Ruang Kelas Baru Bangunan Bertingkat
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	31/12/2019	99.913.000,00	Master Plan dan DED PSU Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Sungai Kambut
2	Jalan Khusus Lainnya	12/12/2017	49.950.000,00	DED Kawasan Kumuh
3	Jalan Khusus Lainnya	12/12/2017	49.757.000,00	DED Peningktan Kualitas Pemukiman Kumuh
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	23/12/2024	60.544.088,00	Perencanaan Gedung Kantor UPT PPA
JUMLAH			**2.970.751.677,00**	

V.C.1.c. 7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023
	1.527.992.628.347,13	**1.362.023.205.760,32**

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.527.992.628.347,13 dan Rp1.362.023.205.760,32.

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD pada Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.2.39
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

URAIAN	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	MUTASI TAHUN 2024						PENYUSUTAN TAHUN INI	31 DESEMBER 2024
		BERKURANG			BERTAMBAH				
		PENYERAHAN PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	REKLASIFIKASI	KOREKSI	PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	REKLASIFIKASI	KOREKSI		
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11=2-3-4+6+7+8+9+10
Peralatan dan Mesin	301.068.729.429,04	3.712.345.233	7.033.111.991	57.151.525	3.712.345.233	540.041.429	-	49.611.334.337,00	344.129.841.679,04
Gedung dan Bangunan	166.698.549.497,00	806.071.250	578.626.921	226.285.405	806.071.250	6.878.137	-	24.909.968.746,00	190.810.484.054,00
Jalan, Jembatan, Irigasi,& Jaringan	894.154.576.834,28	2.040.428.732	3.003.106.159	1.849.574.928	2.040.428.732	-	2.735.569.736	100.796.397.130,81	992.833.862.614,09
Aset Tetap Lainnya	101.350.000,00	-	-	-	-	-	-	117.090.000,00	218.440.000,00
JUMLAH	1.362.023.205.760,32	6.558.845.215	10.614.845.071	2.133.011.858	6.558.845.215	546.919.566	2.735.569.736	175.434.790.213,81	1.527.992.628.347,13

Tabel. 5.2.40
Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	MUTASI TAHUN 2023						PENYUSUTAN TAHUN INI	31 DESEMBER 2024
			BERKURANG			BERTAMBAH				
			PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	REKLASIFIKASI	KOREKSI	PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	REKLASIFIKASI	KOREKSI		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sekretariat DPRD	20.124.654.006,00	-	203.846.094,00	-	-	-	-	1.698.438.065,00	21.619.245.977,00
2	Sekretariat Daerah	35.452.604.738,00	1.100.226.591,00	-	-	661.195.842,00	296.150.000,00	-	3.646.938.231,00	38.956.662.220,00
3	Kec. Pulau Punjung	780.509.657,00	-	5.005.000,00	-	-	-	-	25.893.786,00	801.398.443,00
4	Kec. Sitiung	524.375.115,00	-	13.499.520,00	-	-	-	-	68.028.135,00	578.903.730,00
5	Kec. Koto Baru	793.244.737,00	-	-	-	-	-	-	84.932.197,00	878.176.934,00
6	Kec. Sungai Rumbai	952.304.492,00	-	43.750.000,00	-	-	-	-	71.765.715,00	980.320.207,00
7	Kec. IX Koto	412.013.262,00	-	-	-	-	-	-	14.770.386,00	426.783.648,00
8	Kec. Timpeh	753.129.649,00	-	21.754.000,00	-	-	21.105.000,00	-	67.229.819,00	819.710.468,00
9	Kec. Padang Laweh	650.628.001,00	-	-	-	-	-	-	43.614.133,00	694.242.134,00
10	Kec Tiumang	761.414.341,00	-	36.300.000,00	-	-	15.950.000,00	-	52.952.318,00	794.016.659,00
11	Kec Koto Besar	922.970.386,00	-	14.750.000,00	-	-	-	-	91.519.389,00	999.739.775,00
12	Kec Koto Salak	762.944.663,00	-	25.800.000,00	-	-	-	-	84.499.922,00	821.644.585,00
13	Kec. Asam Jujuhan	953.687.849,00	157.950.000,00	16.662.100,00	-	173.250.000,00	-	-	64.569.136,00	1.016.894.885,00
14	Dinas PUPR	902.662.347.646,28	3.251.439.265,00	3.588.127.702,00	1.970.239.925	-	-	2.735.569.736	101.362.638.597,81	997.950.749.088,09
15	Dinas PERKIMTAN	20.362.824.501,00	-	-	-	-	-	-	5.373.779.474,00	25.736.603.975,00
16	Dinas Perhubungan	6.158.820.833,00	143.100.000,00	1.214.543.650,00	-	1.777.883.764,00	-	-	1.399.128.471,00	7.978.189.418,00
17	Dinas Kesehatan	71.172.409.340,14	-	1.085.646.891,00	-	-	-	-	10.973.231.323,00	81.059.993.772,14
18	RSUD	82.975.075.484,00	9.682.800,00	1.268.695.994,00	-	713.044.968,00	-	-	20.406.058.115,00	102.815.799.773,00
19	Dinas Pendidikan	109.392.617.548,00	45.560.717,00	871.813.738,00	-	378.360.000,00	-	-	18.602.774.131,00	127.456.377.224,00
20	Dinas	19.356.206.732,00	-	198.974.052,00	105.620.408	-	-	-	2.223.193.784,00	21.274.806.056,00

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	MUTASI TAHUN 2023						PENYUSUTAN TAHUN INI	31 DESEMBER 2024
			BERKURANG			BERTAMBAH				
			PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	REKLASIFIKASI	KOREKSI	PENYERAHAN / PENGALIHAN STATUS PENGGUNA	REKLASIFIKASI	KOREKSI		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	BUDPARPORA									
21	Dinas TRANSNAKER	2.315.411.787,00	90.000.000,00	39.250.000,00	-	296.150.000,00	-	-	125.564.406,00	2.608.876.193,00
22	DSP3KB	4.573.651.516,00	378.360.000,00	14.500.000,00	-	147.015.000,00	-	-	895.678.344,00	5.223.484.860,00
23	DISDUKCAPIL	3.323.954.159,00	-	38.538.000,00	-	-	-	-	421.329.054,00	3.706.745.213,00
24	Dinas PMD	1.250.443.291,00	-	234.000.000,00	-	360.125.924,00	12.600.000	-	138.693.112,00	1.527.862.327,00
25	Dinas Pertanian	12.341.637.841,00	-	478.195.959,00	-	-	6.878.137	-	796.858.915,00	12.667.178.934,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	10.661.468.453,50	-	-	-	-	-	-	329.824.688,00	10.991.293.141,50
27	Dinas KUMPERDAG	18.700.994.731,40	-	-	-	-	-	-	3.388.305.710,00	22.089.300.441,40
28	BKD	5.701.723.644,00	175.730.000,00	97.591.923,00	-	157.950.000,00	-	-	459.490.468,00	6.045.842.189,00
29	DPMPTSP	1.566.665.988,00	-	-	-	118.037.800,00	-	-	102.519.151,00	1.787.222.939,00
30	Inspektorat Kabupaten	1.626.260.778,00	292.710.000,00	64.398.000,00	-	-	19.300.000	-	396.810.151,00	1.685.262.929,00
31	BAPPPEDA	1.481.906.737,00	-	214.696.958,00	-	-	-	-	92.696.170,00	1.359.905.949,00
32	DLH	5.123.141.189,00	-	4.981.350,00	-	806.071.250,00	174.936.429	-	310.350.107,00	6.409.517.625,00
33	Kantor KESBANGPOL	265.469.146,00	-	-	-	143.100.000,00	-	-	14.544.375,00	423.113.521,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.225.925.591,00	-	-	-	153.900.000,00	-	-	127.519.752,00	6.507.345.343,00
35	BPBD	2.647.118.110,00	-	226.103.683,00	35.651.000,00	-	-	-	469.180.619,00	2.854.544.046,00
36	BKPSDM	1.428.866.459,00	284.910.000,00	216.221.407,00	-	290.050.667,00	-	-	87.823.728,00	1.305.609.447,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.361.337.322,00	147.015.000,00	-	-	90.000.000,00	-	-	650.066.031,00	2.954.388.353,00
38	Dinas KOMINFO	4.501.446.037,00	482.160.842,00	377.199.050,00	21.500.525,00	292.710.000,00	-	-	271.580.305,00	4.184.875.925,00
	JUMLAH	1.362.023.205.760,32	6.558.845.215,00	10.614.845.071,00	2.133.011.858	6.558.845.215,00	546.919.566	2.735.569.73	175.434.790.213,81	1.527.992.628.347,13

V.C.1.d PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
b. Dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap Aset Tetap Kabupaten Dharmasraya yang sudah menghasilkan pendapatan, terdapat beberapa aset yang tergolong ke dalam Aset Properti Investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.2.41
Rincian Aset Properti Investasi Tahun 2024

NO	SKPD	URAIAN	LOKASI	LUAS (M2)	NILAI ASET	KETERANGAN
1	Dinas Perkimtan	Properti Investasi Tanah	Jl. Jorong Pasir Putih Nagari Sungai Kambut, Kec Pulau Punjung	23.815,00	595.625.000,00	Kebun Karet
2	Dinas Pertanian	Properti Investasi Tanah	Jorong Koto Padang Nagari Koto Padang	78.335,00	1.986.750.000,00	Kebun sawit
3	Sekretariat Daerah (Pengelola Aset)	PTanah Menara Telekomunikasi	Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kec. Koto Besar	3.700,00	37.000.000,00	Tower Menara Telkomsel
4	Sekretariat Daerah	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Jl. Padang Pasir ujung gurun Kec Padang barat padang	714	1.327.612.000,00	Mess Pemda di Padang
5	BLUD UPT Puskesmas Sialang	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	Jorong Sialang ,Nagari Gunung Selasih, Kec. Pulau Punjung	43.850	200.000.000,00	Kebun Sawit
6	Dinas Kumperdag	Bangunan Tempat Kerja lain-lain	Nagari Gunung Medan , Kec. Sitiung	-	567.517.100,00	Ruko Gedung IKM
7	Dinas Kumperdag	Bangunan Los dan Kios	Kabupaten Dharmasraya	-	18.631.974.684,43	Kios pada 26 pasar
8	SDN 08 Koto Baru	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Jorong Padang Bintungan, Nagari Sialang Gaung, Kec. Koto Baru	16.466	254.100.000,00	Kebun sawit

Berdasarkan tabel diatas, aset tetap yang tergolong ke dalam properti investasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tanah pada Dinas Perkimtan dimana sebahagian lokasi tanahnya dimafaatkan untuk lahan perkebunan karet yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
2. Tanah pada Dinas Pertanian yang dimanfaatkan untuk kebun sawit yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
3. Tanah pada Sekretariat Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk tower menara telkomsel dan Gedung dan Bangunan yang dimanfaatkan untuk penginapan/mess pemda.
4. Tanah pada BLUD UPT Puskesmas Sialang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
5. Gedung dan Bangunan Ruko Gedung IKM dan Kios pada 26 pasar di Nagari pada Dinas Kumperdag
6. Tanah pada SDN 08 Koto Baru yang dimanfaatkan untuk Kebun Sawit.

V.C.1.e ASET LAINNYA

Aset Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	45.895.268.049,65	**47.662.854.340,00**

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp45.895.268.049,65 dan Rp47.662.854.340,00 terdiri dari:

Tabel. 5.2.42
Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
1	2	3
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	287.907.729,00	287.907.729,00
Kas yang dibatasi penggunaannya		
Aset Tidak Berwujud	4.557.476.277,00	4.444.306.277,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.873.514.683,00)	(2.566.804.283,00)
Aset Tidak Berwujud Netto	1.683.961.594,00	1.877.501.994,00
Aset Lain-Lain	225.626.423.917,27	206.655.459.416,44
Akumulasi Penyusutan	(182.859.988.190,62)	(168.544.341.799,44)
Aset Lain-lain Netto	42.766.435.726,65	38.111.117.617,00
Dana Transfer – TDF	1.156.963.000,00	7.386.327.000,00
JUMLAH	**45.895.268.049,65**	**47.662.854.340,00**

Adapun penambahan nilai aset lainnya sebagai berikut :

Tabel. 5.2.43
Komponen Penambahan Nilai Aset Lainnya

URAIAN	PENILAIAN KURANG CATAT	BELANJA MODAL	REKLASIFIKASI ASET	JUMLAH PENAMBAHAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Tidak Berwujud	-	131.000.000,00	-	131.000.000,00
Aset Lain-lain	217.440.000,00		22.559.910.723,83	22.777.350.723,83
Jumlah	**217.440.000,00**	**131.000.000,00**	**22.559.910.723,83**	**22.908.350.723,83**

Rincian Penambahan Nilai Aset Lainnya sebesar Rp22.908.350.723,83 sebagai berikut:

a. Aset Tak Berwujud sebesar Rp131.000.000,00 dengan rincian :
   1. Reklasifikasi sebesar Rp17.830.000,00 dari Belanja Modal Peralatan Mesin pada Dinas Kesehatan;
   2. Reklasifkasi sebesar Rp38.300.000,00 dari Aset Tetap Lainnya pada Badan Keuangan Daerah;dan
   3. Reklasifkasi sebesar Rp74.870.000,00 dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip.
b. Aset Lain - lain sebesar Rp22.777.350.723,83 dengan rincian sebagai berikut :
   1. Penilaian kurang catat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp144.200.000,00 berupa Rumah Dinas Negara SD Negeri 11 Timpeh sebesar Rp217.440.000,00.
   2. Reklasifikasi dari Aset Lainnya dan sesama Aset Lainnya dengan nilai Rp10.804.344.397,00 yang berasal dari:
      - Sekretariat DPRD sebesar Rp203.846.094,00;
      - Kecamatan Pulau Punjung sebesar Rp5.005.000,00;
      - Kecamatan Sitiung sebesar Rp13.499.520,00;
      - Kecamatan Sungai Rumbai sebesar Rp43.750.000,00;
      - Kecamatan Timpeh sebesar Rp21.754.000,00;
      - Kecamatan Tiumang Rp36.300.000,00;
      - Kecamatan Koto Besar Rp14.750.000,00;
      - Kecamatan Koto Salak Rp25.800.000,00;
      - Kecamatan Asam Jujuhan Rp49.467.100,00;
      - Dinas PUPR sebesar Rp1.487.159.809,00;
      - Dinas Perhubungan sebesar Rp1.214.543.650,00;
      - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.920.566.635,00;
      - RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.322.196.921,00;
      - Dinas Pendidikan sebesar Rp939.193.121,00;
      - Dinas Budparpora sebesar Rp699.718.265,00;
      - Dinas Transnaker sebesar Rp39.250.000,00;

- Dinas Sosial P3PPKB sebesar Rp14.500.000,00;
- Dinas Dukcapil sebesar Rp38.538.000,00;
- Dinas PMD sebesar Rp234.000.000,00;
- Dinas Pertanian sebesar Rp1.266.514.076,00;
- Badan Keuangan Daerah sebesar Rp104.819.840,00;
- Inspektorat sebesar Rp64.398.000,00;
- BAPPPEDA sebesar Rp214.696.958,00;
- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.981.350,00;
- BPBD sebesar Rp229.850.600,00;
- BKPSDM sebesar Rp217.246.408,00;dan
- Kominfo sebesar Rp377.999.050,00;

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP
   - Dinas Kumperdag sebesar Rp332.915.000;dan
   - Dinas PUPR sebesar Rp181.093.067,00;
4. Reklas Dari Aset Tetap Jalan irigasi dan jaringan
   - Dinas PUPR sebesar Rp9.608.558.259,83.

Adapun pengurangan nilai aset lainnya sebagai berikut :

Tabel. 5.2.44
Komponen Pengurangan Nilai Aset Lainnya

URAIAN	PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI ASET	JUMLAH PENGURANGAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Aset Tidak Berwujud		17.830.000,00	17.830.000,00
Aset Lain-lain	3.227.671.223,00	578.715.000,00	3.806.386.223,00
Jumlah	**3.227.671.223,00**	**596.545.000,00**	**3.824.216.223,00**

Rincian pengurangan nilai Aset Lainnya sebesar Rp3.824.216.223,00 sebagai berikut:

a. Aset Tidak berwujud sebesar Rp17.830.000,00 pada Dinas Kesehatan direklasifikasi ke Peralatan Mesin;
b. Pengurangan Aset Lainnya sebesar Rp3.806.386.223,00, terdiri dari :
   1. Penghapusan nilai aset senilai Rp3.227.671.223,00 tersebar pada beberapa SKPD sebagai berikut:
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp72.000.000,00;
      - Kecamatan Pulau Punjung sebesar Rp35.370.000,00;
      - Kecamatan Koto Baru sebesar Rp46.260.000,00;
      - Kecamatan Sembilan Koto sebesar Rp284.790.000,00;
      - Kecamatan Timpeh sebesar Rp42.304.000,00;
      - Kecamatan Tiumang sebesar Rp18.900.000,00;
      - Kecamatan Koto Besar Rp42.615.000,00;
      - Dinas PUPR sebesar Rp198.030.000,00;
      - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.559.841.723,00;
      - RSUD Sungai dareh sebesar Rp340.380.000,00;
      - Dinas Pendidikan sebesar Rp39.600.000,00;
      - Dinas PMD sebesar Rp179.100.000,00;
      - Dinas Pertanian sebesar Rp154.800.000,00;
      - BPBD sebesar Rp59.780.500,00;dan
      - Dinas KOMINFO sebesar Rp153.900.000,00;

   2. Reklasifikasi Aset dengan nilai Rp578.715.000,00 dengan rincian :
      - Sekretariat Daerah sebesar Rp296.150.000,00;
      - Kecamatan Timpeh sebesar Rp21.105.000,00;
      - Kecamatan Tiumang sebesar Rp15.950.000,00;
      - Kecamatan Asam Jujuhan sebesar Rp32.805.000,00;
      - Dinas PMD sebesar Rp12.600.000,00;
      - Inspektorat Kabupaten sebesar Rp19.300.000,00;dan
      - DLH sebesar Rp180.805.000,00;

V.C.1.e.1 TAGIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	287.907.729,00	**287.907.729,00**

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp287.907.729,00.

Aset Lainnya berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp287.907.729,00 adalah merupakan reklas dari kas di bendahara pengeluaran pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup yang dahulunya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Tahun 2008 sampai pada LKPD Tahun 2014 berada diakun Kas di Bendahara Pengeluaran. Reklas ini didasari Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/109/KPTS-BUP/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara. Kasus ini telah diajukan ke Ketua Majelis Tuntutan Perbendaharaan cq. Kaditama Binbangkum BPK RI dengan surat Bupati Nomor 130/468/PEM-2016 tanggal 03 Maret 2016. BPK RI telah mengeluarkan dengan Surat Keputusan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 14.TP.04-2016/XII/2016.SKPc tanggal 23 Januari 2017 tentang Pencatatan Kerugian Negara. Hasil keputusan Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudari Neneng Elis Herlina, S.Si Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp287.907.729,00.

V.C.1.e.2 ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	4.557.476.277,00	**4.444.306.277,00**

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp4.557.476.277,00 dan Rp4.444.306.277,00.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Tak Berwujud, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.45
Perhitungan Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024

URAIAN		JUMLAH (RP)
1		2
Saldo Awal per 31 Desember 2023		4.444.306.277,00
Mutasi Tambah		
1	Belanja Modal	131.000.000,00
	Total Penambahan	**131.000.000,00**
Mutasi Kurang		
2	Reklasifikasi Aset	17.830.000,00
	Total Pengurangan	17.830.000,00
	Jumlah Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	**4.557.476.277,00**

Rincian Aset Tak Berwujud pada masing-masing SKPD diuraikan pada Tabel berikut:

Tabel. 5.2.46
Rincian Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL(Rp)
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	145.750.000,00
2	Dinas Perhubungan	333.519.000,00
3	Dinas Kesehatan	144.650.000,00
4	RSUD	223.334.000,00
5	Dinas Pendidikan	925.382.392,00
6	Dinas BUDPARPORA	117.746.541,00
7	DISDUKCAPIL	142.679.569,00
8	Dinas PMD	52.675.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TOTAL(Rp)
1	2	3
9	BKD	1.761.550.400,00
10	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	7.500.000,00
11	BKPSDM	142.000.000,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74870000,00
13	Dinas KOMINFO	485.819.375,00
	JUMLAH	**4.557.476.277,00**

Berikut uraian perhitungan Aset Tak Berwujud Tahun Anggaran 2024:

1. **Penambahan Aset Tidak Berwujud**
   Penambahan Aset Tidak Berwujud terdapat pada Belanja Modal Sebesar Rp131.000.000,00 yang terdiri dari:
   a. Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Dinas Kesehatan Sebesar Rp 17.830.000,00.
   b. Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada BKD Sebesar Rp 38.300.000,00.
   c. Belanja Modal Aset Tak Berwujud pada Dinas Perpustakaan dan arsip Sebesar Rp 74.870.000,00.

2. **Pengurangan Aset Tak Berwujud**
   Reklasifikasi Aset Tak Berwujud pada Dinas Kesehatan sebesar Rp17.830.000 ke Aset Peralatan dan Mesin bersumber dari belanja BLUD.

V.C.1.e.3 AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	2.873.514.683,00	**2.566.804.283,00**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 2.873.514.683,00 dan Rp2.566.804.283,00.

Masa manfaat atau umur ekonomisnya ditetapkan selama 10 Tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel. 5.2.47
Daftar Mutasi Amortisasi Per 31 Desember 2024

No	SKPD	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	PENYUSUTAN TAHUN INI	31 DESEMBER 2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Sekretariat Daerah	74.089.583,00	14.575.000,00	88.664.583,00
2	Dinas Perhubungan	133.630.808,00	26.866.900,00	160.497.708,00
3	Dinas Kesehatan	144.650.000,00	0,00	144.650.000,00
4	RSUD	152.305.108,00	22.333.400,00	174.638.508,00
5	Dinas Pendidikan	630.178.509,00	70.621.789,00	700.800.298,00
6	DISDUKCAPIL	65.857.302,00	14.267.957,00	80.125.259,00
7	Dinas PMD	35.555.625,00	5.267.500,00	40.823.125,00
8	BKD	1.111.496.984,00	115.936.000,00	1.227.432.984,00
9	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	1.250.000,00	750.000,00	2.000.000,00
10	BKPSDM	89.025.000,00	13.891.667,00	102.916.667,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	1.871.750,00	1.871.750,00
12	Dinas KOMINFO	128.765.364,00	20.328.437,00	149.093.801,00
	Jumlah	**2.566.804.283,00**	**306.710.400,00**	**2.873.514.683,00**

V.C.1.e.4 ASET TAK BERWUJUD SETELAH AMORTISASI

Aset Tak Berwujud Setelah Amortisasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.683.961.594,00	1.877.501.994,00

Nilai Aset tidak berwujud tahun 2024 sebesar Rp4.557.476.277,00 dan amortisasi aset Tidak Berwujud Rp2.873.514.683,00. Dengan demikian nilai Aset Tidak Berwujud Netto tahun 2024 adalah sebesar Rp1.683.961.594,00 (Rp4.557.476.277,00 - Rp2.873.514.683,00).

V.C.1.e.5 ASET LAIN - LAIN

Aset Lain –Lain	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	225.626.423.917,27	206.655.459.416,44

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp225.626.423.917,27 dan Rp206.655.459.416,44 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.48
Rincian Aset Lain - Lain

Aset Lain-Lain	Saldo Aset Tetap 2024	Saldo Aset Tetap 2023 ()
1. Rusak Berat	84.342.259.219,27	65.045.959.718,44
2. Barang yang Digunakan Pihak Lain	8.603.095.542,00	8.928.430.542,00
3. Aset yang akan diserahkan ke masyarakat	132.681.069.156,00	132.681.069.156,00
Total	**225.626.423.917,27**	**206.655.459.416,44**

a. Aset Rusak Berat.

Mutasi aset rusak berat terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 5.2.49
Perhitungan Aset Rusak Berat Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal per 31 Desember 2024	65.045.959.718,44
MUTASI TAMBAH	
Penilaian Kurang Catat	217.440.000,00
Reklasifikasi Aset	22.229.605.723,83
TOTAL PENAMBAHAN	22.447.045.723,83
MUTASI KURANG	
Penghapusan	3.098.641.223,00
Reklasifikasi Aset	52.105.000,00
TOTAL PENGURANGAN	3.150.746.223,00
JUMLAH ASET RUSAK BERAT PER 31 DESEMBER 2024	84.342.259.219,27

Dari uraian tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Aset Rusak Berat tahun 2024 adalah senilai Rp84.342.259.219,27, disajikan sebesar nilai buku pada saat aset tersebut dipindahkan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya. Penjelasan mengenai perhitungan mutasi Aset Rusak Berat sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah terdiri dari:

a. Penilaian kurang catat sebesar Rp217.440.000,00 merupakan penambahan pada Dinas Pendidikan.

b. Reklasifikasi ke aset lainnya senilai Rp22.229.605.723,83 yang tersebar di SKPD.

2. Mutasi Kurang

a. Penghapusan sebesar Rp3.098.641.223,00 merupakan penghapusan yang dilakukan dengan cara Penjualan dan Lelang pada SKPD dengan rincian sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp72.000.000,00;

- Kec.Sembilan Koto berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp284.790.000,00;
- Kec.Timpeh berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp13.804.000,00;
- Kec.Koto Besar berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp42.615.000,00;
- Dinas Kesehatan berupa Kendaraan dan Alat-alat Kesehatan sebesar Rp1.559.841.723,00;
- RSUD berupa Kendaraan sebesar Rp340.380.000,00;
- Dinas Pendidikan berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp39.600.000,00;
- Dinas PMD berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp179.100.000,00;
- Dinas Pertanian berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp154.800.000,00;
- BPBD berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp59.780.500,00;
- Dinas Kominfo berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp153.900.000,00;dan
- Dan penghapusan dilakukan karena Hibah pada Dinas PUPR ke Yayasan Albarokah Chozien Adenan berupa pemasangan Paving Blok sebesar Rp198.030.000,00.

b. Reklasifikasi Aset
   - Reklasifikasi aset pada Kec. Asam Jujuhan sebesar Rp32.805.000,00;dan
   - Reklasifikasi aset pada Inspektorat sebesar Rp19.300.000,00.

b. Barang Yang Digunakan Pihak Lain

Mutasi aset rusak berat terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 5.2.50
Perhitungan Barang Yang Digunakan Pihak Lain Per 31 Desember 2024

URAIAN	JUMLAH
Saldo Awal per 31 Desember 2023	**8.928.430.542,00**
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Aset	330.305.000,00
Total Penambahan	**330.305.000,00**
Mutasi Kurang	
Penghapusan	129.030.000,00
Reklasifikasi Aset	526.610.000,00
Total Pengurangan	**655.640.000,00**
Jumlah Barang yang Digunakan Pihak Lain 31 Desember 2024	**8.603.095.542,00**

Barang yang digunakan pihak lain terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

Tabel. 5.2.51
Barang Yang Digunakan Pihak Lain

No	SKPD	31 Desember 2024
1.	Sekretariat Daerah	4.635.085.442,00
2.	Kec. Pulau Punjung	294.525.000,00
3.	Kec. Sitiung	201.870.000,00
4.	Kec. Koto Baru	216.973.000,00
5.	Kec. Sungai Rumbai	303.525.000,00
6.	Kec. IX Koto	164.445.000,00
7.	Kec. Timpeh	114.435.000,00
8.	Kec. Padang Laweh	168.585.000,00
9.	Kec Tiumang	212.708.000,00
10.	Kec Koto Besar	347.835.000,00
11.	Kec Koto Salak	343.440.000,00
12.	Kec. Asam Jujuhan	292.395.000,00
13.	Dinas Perhubungan	160.500.000,00
14.	Dinas Kesehatan	297.500.000,00
15.	DLH	849.274.100,00
	JUMLAH	8.603.095.542,00

Berikut penjelasan Mutasi Barang yang digunakan pihak lain tahun 2024:

1. Mutasi Tambah

Merupakan reklasifikasi Aset Barang yang digunakan Pihak Lain tahun 2024 sebesar Rp330.305.000,00 yang terdiri dari:

a. Pada Dinas Kesehatan berupa Kendaraan Dinas Operasional Ambulance yang dipinjam pakaikan ke Nagari Kurnia Koto Salak senilai Rp297.500.000,00.
b. Pada Kantor Camat Asam Jujuhan berupa pinjam pakai kendaraan roda ke Nagari-Nagari 2 senilai Rp32.805.000,00.

2. Mutasi Kurang
   a. Penghapusan Barang yang digunakan pihak lain sebesar Rp129.030.000,00
      1) Kec. Pulau Punjung berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp35.370.000,00.
      2) Kec. Koto Baru Kendaraan Dinas sebesar Rp46.260.000,00.
      3) Kec. Timpeh berupa kendaraan dinas sebesar Rp28.500.000,00.
      4) Kec. Tiumang berupa Kendaraan Dinas sebesar Rp18.900.000,00.
   b. Reklasifikasi Aset
      Pengurangan karena Reklas pada aset yang digunakan Pihak Lainnya sebesar Rp526.610.000,00 terdiri dari :
      1) Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Daerah sebesar Rp296.150.000,00.
      2) Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Timpeh sebesar Rp21.105.000,00.
      3) Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Tiumang sebesar Rp15.950.000,00.
      4) Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin pada Dinas PMD sebesar Rp12.600.000,00 .
      5) Reklasifikasi Barang yang digunakan pihak lain ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp19.300.000,00.

Dalam rangka untuk membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terdapat Aset Pinjam Pakai oleh Instansi Vertikal dan Nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.52
Daftar Aset Pinjam Pakai

NO	SKPD	JENIS BMD	JUMLAH	MEREK/ TIPE	NO POLISI	HARGA PEROLEHAN (RP)
I	**Sekretariat Daerah**					
1	POLRES Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Nissan X- Trail	BA 1517 V	336.515.500
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1150 V	542.600.000
2	KEJAKSAAN NEGERI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas roda 4	1 Unit	Nissan X- Trail	BA 1848 VL	349.216.000
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1148 V	542.600.000
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Suzuki Thunder	BA 7930 V	13.410.000
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Avanza Vellos	BA 1129 V	299.100.000
3	KODIM	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Suzuki Katana	BA 3351 VG	83.565.000
		Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi / Pajero Sport Exceed	BA 1149 V	542.600.000
4	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 5 V	308.034.473
5	LKAAM Kabupaten Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Mitsubishi Kuda	BA 1891 VL	126.000.000
6	BATALYON C PELOPOR SATBRIMOB POLDA SUMBAR	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Hilux	BA 8013 V	369.740.000
7	KORPRI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Honda Supra X	BA 6538 VB	14.840.000
8	MUI Kab. Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Suzuki Katana	BA 1854 VG	83.565.000
9	SAMSAT Kab.	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Toyota Innova	BA 50 V	207.600.000

NO	SKPD	JENIS BMD	JUMLAH	MEREK/ TIPE	NO POLISI	HARGA PEROLEHAN (RP)
	Dharmasraya					
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	Shogun Axelo	BA 2994 V	15.000.000
10	BAWASLU	Meubelair	12 Unit			46.580.000
		Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit			
11	KEMENAG	Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	Kijang Innova	BA 1523 V	260.480.000
12	KAMPUS III UNAND Dharmasraya	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Isuzu Panther	BA 1021 V	90.000.000
13	LAPAS	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	Fortuner 4 x 2	BA 1974 VG	348.200.000
14	Pengadilan Agama	Meubelair				188.724.469
II	**DLH**					
1	Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Kaisar / Triseda RX		34.837.000
2	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Happy Motor Cycle Perkasa		38.920.000
3	Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Dharmasraya	Kendaraan Roda Tiga (Becak Motor)	1 Unit	Happy Motor Cycle		37.920.000
4	Nagari Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai	Kendaraan Roda 6	1 Unit			399.088.100
5	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit			109.175.000
6	Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit			48.680.000
7	Nagari Kurnia Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai	Alat Kantor Lainnya	1 Unit			44.100.000
8	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit			90.354.000
9	Blok A Piruko Sitiung,Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit			26.950.000
10	Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1 Unit			19.250.000
III	**Dinas Perhubungan**					
1		Mitsubishi L300	1 Unit		BA 8903 VN	160.500.000,00

c. Barang Yang Diserahkan ke Masyarakat

Barang yang diserahkan ke Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp132.681.069.156,00 merupakan Aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diserahkan ke masyarakat melalui SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 5.2.53
Daftar Aset Yang Diserahkan Kepada Masyarakat

No	SKPD	31 Desember 2024
1	Dinas PUPR	119.156.987.124,00
2	Dinas PERKIMTAN	80.607.000,00
3	Dinas Perhubungan	233.795.000,00
4	DISDUKCAPIL	3.360.000,00
5	Dinas Pertanian	13.206.320.032,00
	JUMLAH	**132.681.069.156,00**

V.C.1.e.6 PENYUSUTAN ASET LAIN - LAIN

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Penyusutan Aset Lain –Lain	**168.544.341.799,44**	**179.071.155.129,62**

Saldo Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp168.544.341.799,44 dan Rp179.071.155.129,62.

Penjelasan mengenai perhitungan Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 5.2.54
Perhitungan Penyusutan Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	MUTASI TAHUN 2024				PENYUSUTAN TAHUN INI	31 DESEMBER 2024
			BERKURANG			BERTAMBAH		
			PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI	KOREKSI	REKLASIFIKASI		
1	Sekretariat DPRD	328.481.755,00	0,00	0,00	0,00	203.846.094,00	1.103.572,00	533.431.421,00
2	Sekretariat Daerah	7.307.876.554,00	72.000.000,00	296.150.000,00	0,00	0,00	276.547.782,00	7.216.274.336,00
3	Kec. Pulau Punjung	549.144.000,00	35.370.000,00	0,00	0,00	5.005.000,00	0,00	518.779.000,00
4	Kec. Sitiung	280.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.499.520,00	0,00	293.699.520,00
5	Kec. Koto Baru	354.749.263,00	46.260.000,00	0,00	0,00	0,00	550.836,00	309.040.099,00
6	Kec. Sungai Rumbai	455.664.886,00	0,00	0,00	0,00	43.750.000,00	33.425,00	499.448.311,00
7	Kec. IX Koto	542.040.000,00	284.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.250.000,00
8	Kec. Timpeh	254.710.000,00	42.304.000,00	21.105.000,00	0,00	21.754.000,00	0,00	213.055.000,00
9	Kec. Padang Laweh	224.768.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.333,00	224.956.750,00
10	Kec Tiumang	388.866.000,00	18.900.000,00	15.950.000,00	0,00	36.300.000,00	0,00	390.316.000,00
11	Kec Koto Besar	512.821.334,00	42.615.000,00	0,00	0,00	14.750.000,00	0,00	484.956.334,00
12	Kec Koto Salak	551.035.608,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	6.295.867,00	583.131.475,00
13	Kec. Asam Jujuhan	372.927.967,00	0,00	32.805.000,00	0,00	49.467.100,00	500.000,00	390.090.067,00
14	Dinas PUPR	102.185.145.462,00	33.995.150,00	0,00	0,00	3.588.127.702,00	5.913.517.343,00	111.652.795.357,00
15	Dinas PERKIMTAN	46.349.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338.995,00	51.688.652,00
16	Dinas Perhubungan	917.679.124,00	0,00	0,00	0,00	1.214.543.650,00	594.000,00	2.132.816.774,00
17	Dinas Kesehatan	8.807.843.447,00	1.546.533.419,00	0,00	0,00	1.085.646.891,00	178.405.662,45	8.525.362.581,45
18	RSUD	10.758.528.989,60	340.380.000,00	0,00	0,00	1.268.695.994,00	116.417.612,00	11.803.262.595,60
19	Dinas Pendidikan	10.457.024.431,84	39.600.000,00	0,00	41.607.231,43	871.813.738,00	143.766.851,15	11.391.397.789,56
20	Dinas BUDPARPORA	66.391.792,00	0,00	0,00	0,00	198.974.052,00	6.987.676,00	272.353.520,00
21	Dinas TRANSNAKER	278.152.858,00	0,00	0,00	0,00	39.250.000,00	0,00	317.402.858,00
22	DSP3KB	1.455.796.235,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	8.523.426,00	1.478.819.661,00
23	DISDUKCAPIL	536.029.335,00	0,00	0,00	0,00	38.538.000,00	2.599.479,00	577.166.814,00

NO	SKPD	SALDO AWAL 31 DESEMBER 2023	MUTASI TAHUN 2024				PENYUSUTAN TAHUN INI	31 DESEMBER 2024
			BERKURANG			BERTAMBAH		
			PENGHAPUSAN	REKLASIFIKASI	KOREKSI	REKLASIFIKASI		
24	Dinas PMD	422.939.255,00	179.100.000,00	12.600.000,00	0,00	234.000.000,00	0,00	465.239.255,00
25	Dinas Pertanian	12.046.736.772,00	154.800.000,00	0,00	0,00	471.317.822,00	549.400.812,00	12.912.655.406,00
26	Dinas Pangan dan Perikanan	1.120.576.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.202.003,00	1.150.778.283,00
27	Dinas KUMPERDAG	151.199.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.260,00	151.415.915,00
28	BKD	1.620.709.987,00	0,00	0,00	0,00	97.591.923,00	7.227.917,00	1.725.529.827,00
29	DPMPTSP	326.583.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173.575,00	331.757.182,00
30	Inspektorat Kabupaten	125.679.000,00	0,00	19.300.000,00	0,00	64.398.000,00	0,00	170.777.000,00
31	BAPPPEDA	490.840.862,00	0,00	0,00	0,00	214.696.958,00	1.234.432,00	706.772.252,00
32	DLH	2.763.790.548,00	0,00	174.936.429,00	0,00	4.981.350,00	76.448.393,00	2.670.283.862,00
33	Kantor KESBANGPOL	154.349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.349.000,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	310.212.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.212.098,00
35	BPBD	988.531.666,00	59.780.500,00	0,00	0,00	226.103.683,00	5.431.500,00	1.160.286.349,00
36	BKPSDM	178.329.400,00	0,00	0,00	0,00	216.221.407,00	1.025.001,00	395.575.808,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	135.276.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.434,00	136.402.038,00
38	Dinas KOMINFO	75.359.950,00	153.900.000,00	0,00	0,00	377.199.050,00	800.000,00	300.459.000,00
	JUMLAH	168.544.341.799,44	3.050.328.069,00	572.846.429,00	41.607.231,43	10.640.771.934,00	7.339.656.186,61	182.859.988.190,62

V.C.1.e.7 ASET LAIN – LAIN SETELAH PENYUSUTAN

Aset Lain –Lain Netto	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	42.766.435.726,65	**38.111.117.617,00**

Saldo Aset Lain-Lain Netto per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp42.766.435.726,65 dan Rp38.111.117.617,00.

V.C.1.e.8. *TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)*

Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	1.156.963.000,00	**7.386.327.000,00**

Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) / Dana Alokasi Umum (DAU) secara non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Nilai TDF per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.156.963.000,00 dan Rp7.386.327.000,00.

V.C.2 KEWAJIBAN

Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp31.732.265.978,39 mengalami kenaikan sebesar Rp13.219.980.536,35 atau 71,41% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.512.285.442,04. Jumlah tersebut terdiri atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.2.a Kewajiban Jangka Pendek	**31.732.265.978,39**	**18.512.285.442,04**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga), utang bunga maupun utang perhitungan fihak ketiga (PFK).

Tabel 5.2.55
Rincian Kewajiban Jangka pendek Per 31 Desember 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	140.789.551,00	654.558.374,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	3.032.855.895,36	64.227.368,27
3	Utang Belanja	23.667.417.832,03	12.902.296.999,77
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	4.891.202.700,00
	Jumlah	**31.732.265.978,39**	**18.512.285.442,04**

Utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Dharmasraya per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.2.a.1 Utang kepada Pihak Ketiga (PFK)	**140.789.551,00**	**654.558.374,00**

Utang kepada Pihak Ketiga (PFK) tahun 2024 sebesar Rp140.789.551,00 adalah iuran 1% dan 4 % atas Jasa Pelayanan pada BLUD Puskesmas Dinas kesehatan berdasar surat BPJS

Kesehatan Nomor: 326/II-06/0225 tanggal 14 Februari 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.56
Utang PFK BLUD Puskesmas Tahun 2024

No	Nama BLUD	Utang PFK		Total
		1%	4%	
1	Sungai Rumbai	1.692.560,00	6.770.531,00	8.463.091,00
2	Koto Besar	1.395.331,00	5.652.654,00	7.047.985,00
3	Sungai Limau	491.690,00	1.966.765,00	2.458.455,00
4	Koto Baru	9.764.621,00	39.058.487,00	48.823.108,00
5	Tiumang	837.786,00	3.351.149,00	4.188.937,00
6	Padang Laweh	652.756,00	2.613.177,00	3.265.933,00
7	Sitiung I	2.272.360,00	9.089.431,00	11.361.791,00
8	Timpeh	-	-	-
9	Gunung Medan	2.305.801,00	9.223.214,00	11.529.015,00
10	Sitiung II	2.051.833,00	8.207.333,00	10.259.166,00
11	Beringin Sakti	291.431,00	1.165.721,00	1.457.152,00
12	Silago	1.443.922,00	5.775.704,00	7.219.626,00
13	Sungai Dareh	3.467.192,00	13.948.781,00	17.415.973,00
14	Sialang	1.045.360,00	6.253.959,00	7.299.319,00
Jumlah		**27.712.645,00**	**113.076.906,00**	**140.789.551,00**

Utang kepada Pihak Ketiga tahun 2023 sebesar Rp654.558.374,00 terdiri dari :

1. Utang pada BPJS sebesar Rp647.099.081,00, berdasarkan Berita Acara Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan Tahun 2023 Nomor : 2520/BA/0.06/1223, Nomor 800.1.18.2/37/BKD/I/2024 Tanggal 18 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Dinas Pendidikan
      Kurang bayar iuran tahun 2022 pada Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar Rp208.370.800,00 telah disetor ke BPJS pada tahun 2024.
   b. Dinas Kesehatan
      Kekurangan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan BP kelas 3 Aktif Pemerintah Daerah sebesar Rp43.361.600,00 telah disetor ke BPJS pada tahun 2024.
   c. RSUD Sungai Dareh
      Utang PFK pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp395.366.681,00, terdiri atas utang jasa pelayanan tahun 2020 sebesar Rp141.190.787,00 dan tahun 2021 (juni s.d Desember 2021) sebesar Rp254.175.894,00 telah disetor ke BPJS pada tahun 2024.

2. Utang Pajak Negara yang belum disetor pada Tahun 2023 sebesar Rp7.459.293,00 terdiri dari :
   a. Kurang Setor Pajak Penghasilan Ps 4 ayat (2) CV. Tri Mitra Pratama atas Pekerjaan Pembangunan RKB SDN 23 Pulau Punjung sebesar Rp2.812.000,00 dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 28 Februari 2024.
   b. Salah setor pembayaran Pajak Negara ke kas daerah sebesar Rp4.647.293,00 terdiri dari PPN sebesar Rp4.109.260,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp538.033,00, telah dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Dharmasraya ke kas negara pada tanggal 29 Februari 2024.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.2.a.2	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**3.032.855.895,36**	**64.227.368,27**

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp3.032.855.895,36 tersebut terdiri atas pendapatan diterima dimuka atas kerja sama pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian sewa gedung ATM pada beberapa SKPD, sewa untuk tanah dan bangunan, sewa tanah menara telekomunikasi, sewa Rusunawa, dan lebih salur klaim BPJS BLUD Dinas Kesehatan dan RSUD Sungai Dareh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.57
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2024
1	**Dinas Kesehatan**				
	ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru	PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021, 20 /6/2016 sd 20/6/2021	01/01/2024 s.d. 31/12/2024		3.004.926,11
		5 Tahun	01/01/2025 s.d 31/12/2025	2.996.715,93	
		Rp15.000.000,00	01/01/2026 s.d. 20/06/2026	1.403.940,88	
		1827 hari			
	Jumlah			**4.400.656,81**	**3.004.926,11**
2	**BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai**				
	1. RSUD Sungai Rumbai			3.143.300,00	
	2. Sungai Rumbai			15.469.800,00	
	3. Koto Besar			32.140.800,00	
	4. Sungai Limau			16.302.000,00	
	5. Koto Baru			38.245.200,00	
	6. Tiumang			5.846.000,00	
	7. Padang Laweh			4.056.000,00	
	8. Sitiung I			16.848.100,00	
	9. Timpeh			11.661.900,00	
	10. Gunung Medan			21.103.200,00	
	11. Sitiung II			29.082.900,00	
	12. Beringin Sakti			5.439.000,00	
	13. Silago			26.967.600,00	
	14. Sungai Dareh			31.271.700,00	
	15. Sialang			11.531.850,00	
	Jumlah			**271.109.350,00**	**0,00**
3	**RSUD Sungai Dareh**				
	Payment Point dan ATM Bank Nagari	445/29/RSUD-2021, dari 16 /11/2021 s.d 16/12/ 2024 (3 Tahun) Rp27.469.303,00 1097 hari	01/01/2024 s.d. 16/11/2024		8.037.963,78
	Pendapatan Diterima dimuka Klaim BPJS			2.662.502.400,00	
	Jumlah			**2.662.502.400,00**	**8.037.963,78**
4	**Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan**				
	Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa			6.712.903,23	
	Jumlah			**6.712.903,23**	**0,00**
5	**Dinas Penanaman Modal terpadu satu Pintu**				
	Pendapatan Diterima dimuka IMB			18.300.000,00	
	Jumlah			**18.300.000,00**	**0,00**
6	**Sekretariat Daerah**				
		PKS/129/PL/12-2022 01/12/2022 s.d 01/01/2027	01/01/2024 s.d. 31/12/2024		4.008.762
		5 Tahun (1.826 Hari)	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	3.997.809,42	
		Rp20.000.000,00	01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3.997.809,42	
			01/01/2027 s.d. 30/11/2027	3.658.269,44	

No	SKPD	Nomor / Jangka Waktu / Jumlah Kontrak	Tahun Pembayaran s.d. Selesai kontrak	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan Retribusi LO s.d. Tahun 2024
	Jumlah			**11.653.888,28**	**4.008.762,32**
7	**Badan Keuangan Daerah**				
	Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi	Nomor:0363/HK 810/J DMT-1063000/2024	01/01/2024 s.d. 31/12/2024		12.307.876,85
		17/06/2023 s.d. 16/06/2024	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	12.274.248,77	
			01/01/2026 s.d. 31/12/2026	12.274.248,77	
		5 Tahun (1.827 hari)	01/01/2027 s.d. 31/12/2027	12.274.248,77	
		Rp61.438.500,00	01/01/2028 s.d. 16/06/2028	5.649.517,24	
	Jumlah I			**42.472.263,55**	**12.307.876,85**
	ATM Bank Nagari pada MPP di DPMPTSP	Nomor:100.3.7/10/BKD/VIII/2024	13/05/2024 s.d. 31/12/2024		2.295.566,50
		13/05/2024 s.d. 13/05/2029	01/01/2025 s.d. 31/12/2025	3.596.059,11	
			01/01/2026 s.d. 31/12/2026	3.596.059,11	
		5 Tahun (1.827 hari)	01/01/2027 s.d. 31/12/2027	3.596.059,11	
		Rp18.000.000,00	01/01/2028 s.d. 31/12/2028	3.605.911,33	
			01/01/2029 s.d. 13/05/2029	1.310.344,83	
	Jumlah II			**15.704.433,50**	**2.295.566,50**
	Jumlah i + ii			**58.176.697,04**	**14.603.443,35**
	Total			**3.032.855.895,36**	**29.655.095,56**

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp3.032.855.895,36 terdapat pada beberapa SKPD antara lain :

1. Dinas Kesehatan
   Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp4.400.656,81 adalah merupakan sewa ATM Bank Nagari Cabang Koto Baru yang berlokasi di Komplek Puskesmas Koto Baru, dengan Kontrak Nomor : PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021, jangka selama 5 tahun dari tanggal 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026 dengan nilai Kontrak sebesar Rp15.000.000,00
2. BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai
   Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp271.109.350,00 terdiri dari :
   a. BLUD Puskesmas
      Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp267.966.050,00 adalah merupakan pengembalian kelebihan kapitasi Tahun 2021 atas Hasil Audit BPKP dan BPK RI berdasarkan hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok dengan Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya.
   b. RSUD Sungai Rumbai
      Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp3.143.300,00 adalah merupakan Kelebihan Klaim atas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Sungai Rumbai Tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp1.571.000,00 sesuai dengan Berita Acara Hasil Audit Administrasi Klaim atas Pembayaran Kelebihan Biaya Pelayanan Kesehatan Nomor : 244/BA/II-06/1124, Nomor 800.1.13.1/01/RSUD SR-2025) dan Lebih salur klaim BPJS bulan April s.d Juli 2023 sebesar Rp1.572.300,00, akan dikompensasikan pada pembebanan November atau Desember 2023 sesuai dengan berita acara nomor 444/1545/RSUD SR/XI/2023 tetapi belum dilakukan pemotongan oleh BPJS sampai akhir tahun 2024.
3. RSUD Sungai Dareh
   Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp2.662.502.400,00 adalah merupakan kelebihan pembayaran klaim Bayi Baru Lahir (BBL) dan Klaim Rekam Medis (RM) oleh BPJS.
4. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
   Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp6.712.903,23 adalah merupakan sewa Rusunawa Pulau Punjung.

5. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
   Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp18.300.000,00 adalah merupakan Pendapatan dari IMB tahun 2021.
6. Sekretariat Daerah
   Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp11.653.888,28 adalah merupakan sewa ATM Bank Nagari yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati dengan kontrak Nomor : PKS/129/PL/12-2022 tanggal 01 Desember 2022, jangka waktu selama 5 tahun, dari tanggal 01 Desember 2022 s.d 01 Desember 2027 dengan nilai kontrak sebesar Rp20.000.000,00.
7. Badan Keuangan Daerah
   Pendapatan Pendapatan Diterima dimuka sebesar Rp58.176.697,04 terdiri dari:
   a. Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah untuk pemasangan dan penempatan menara telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi TBK sebesar Rp42.472.263,55 yang berlokasi di Jorong Koto Agung Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar, kontrak Nomor : 0363/HK810/JDMT-1063000/2024, jangka waktu selama 5 Tahun, dari tanggal 17 Juni 2023 s.d 18 Juni 2028 dengan nilai kontrak sebesar Rp61.438.500,00.
   b. Pendapatan diterima dimuka atas sewa ATM Bank Nagari yang terletak di Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu sebesar Rp15.704.433,50 dengan Nomor : 100.3.7/10.BKD/VIII/2024, jangka waktu selama 5 tahun dari tanggal 13 Mei 2024 s.d 13 Mei 2029 sebesar Rp18.000.000,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.2.a.3 Utang Belanja	**23.667.417.832,03**	**12.902.296.999,77**

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.667.417.832,03 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.2.58
Utang Belanja Tahun 2024

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
a.	**Belanja Pegawai**		
	1. Dinas Pendidikan	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	884.776.200,00
		Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	618.750.000,00
		Jumlah	**1.503.526.200,00**
	2. BLUD Puskesmas	Utang pegawai (Jaspel ASN)	576.642.320,10
		Jumlah	**576.642.320,10**
	3. BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang honorarium Tenaga Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	30.800.000,00
		Jasa pelayanan ASN	6.913.257.280,00
		Jumlah	**6.944.057.280,00**
		Jumlah I	**9.024.225.800,10**
b.	**Belanja Barang Jasa**		
	1. BLUD Puskesmas	Utang Jasa Tenaga Kesehatan	684.550.553,79
		Utang barang Habis Pakai	224.689.730,76
		Utang obat- obatan	411.209.472,38
		Utang operasional Ambulance	15.553.200,00
		Utang izin Operasional Rontgen	3.330.000,00
		Jumlah	**1.339.332.956,93**
	2. BLUD RSUD Sungai Dareh	**Belanja Habis Pakai :**	**10.745.429.901,00**
		Utang belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	3.438.317.983,00
		Utang belanja Bahan Obat	5.361.883.708,00
		Utang belanja Bahan Laboratorium	1.212.919.896,00
		Utang belanja Cetak	293.400.714,00

No	Utang Belanja	Uraian	Saldo Utang
		Utang belanja ATK	86.349.000,00
		Utang belanja Alat Listrik	36.257.300,00
		Utang belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	114.511.500,00
		Utang belanja isi tabung gas - gas medis	201.789.800,00
		Belanja Jasa :	**1.714.293.803,00**
		Utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.260.972.499,00
		Utang belanja Rujukan Parsial	60.900.000,00
		Utang belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	347.014.454,00
		Utang belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00
		Utang belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlanggganan	39.406.850,00
		Belanja Pemeliharaan :	**313.612.033,00**
		Utang pemeliharaan AC/ Alat Pendingin	82.978.050,00
		Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	38.957.383,00
		Utang belanja Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	58.498.100,00
		Utang belanja Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa Lantai 1	133.178.500,00
		Jumlah	**12.773.335.737,00**
		Jumlah II	**14.112.668.693,93**
c.	**Belanja Modal**		
	1. BLUD RSUD Sungai Dareh	Utang Belanja Modal Peralatan Kantor	48.461.000,00
		Utang Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga	28.893.838,00
		Utang Belanja Modal Gedung Hemodialisa	199.441.200,00
		Utang perencanaan Gedung Hemodialisa	11.900.000,00
		Utang pengawasan Gedung Hemodialisa	7.961.000,00
		Jumlah	**296.657.038,00**
	2. Dinas PUPR	Utang Belanja Modal	34.932.500,00
		Jumlah	**34.932.500,00**
	3. Sekretariat Daerah	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	184.097.750,00
		Perencanaan Gedung dan Bangunan	14.836.050,00
		Jumlah	**196.933.800,00**
		Jumlah III	**530.523.338,00**
		JUMLAH (I+II+III)	**23.667.417.832,03**

		Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023(Rp)
a.	**Utang Belanja Pegawai**	**9.024.225.800,10**	**791.564.476,00**

Utang Belanja Pegawai Tahun 2024

Utang Belanja Pegawai Tahun 2024 sebear Rp9.024.225.800,10 terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
   Utang belanja pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.503.526.200,00 adalah merupakan utang belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp884.776.200,00 dan Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp618.750.000,00 untuk Triwulan IV Tahun 2024 yang akan *Carry Over* pada Tahun 2025, karena adanya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan

Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASND dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024).

2. BLUD Puskesmas

Utang belanja BLUD Puskesmas sebesar Rp576.642.320,10,00 merupakan utang jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.2.59
Utang Pegawai Jasa Pelayanan BLUD Puskesmas

No	Puskesmas	Utang Pegawai 2024	Utang Pegawai 2023
1	Sungai Rumbai	36.020.740,00	87.549.416,00
2	Koto Besar	70.757.528,84	62.039.788,00
3	Sungai Limau	11.366.797,00	5.538.554,00
4	Koto Baru	79.271.045,20	35.754.000,00
5	Tiumang	29.426.734,00	58.931.505,00
6	Padang Laweh	48.326.063,00	53.813.819,00
7	Sitiung I	38.865.601,00	87.903.058,00
8	Timpeh	0,00	49.993.473,00
9	Gunung Medan	2.887.638,00	12.251.775,00
10	Sitiung II	2.800.000,00	3.246.560,00
11	Beringin Sakti	110.521.098,00	57.409.855,00
12	Silago	99.044.333,06	57.310.420,00
13	Sungai Dareh	3.488.222,00	3.360.000,00
14	Sialang	43.866.520,00	67.501.000,00
Jumlah		**576.642.320,10**	**642.603.223,00**

3. Utang Belanja RSUD Sungai Dareh

Utang pada BLUD RSUD Sungai Dareh tahun 2024 sebesar Rp6.944.057.280,00 terdiri dari :

a. Utang Belanja Honorarium Tim Teknis barang dan jasa sebesar Rp30.800.000,00.
b. Utang Jasa Pelayanan pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp6.913.257.280,00.

Utang Belanja Pegawai Tahun 2023

Utang Belanja pegawai Tahun 2023 sebear Rp791.564.476,00 terdiri dari :

1. Badan Keuangan Daerah

Utang Belanja Pegawai tahun 2023 merupakan sisa utang Insentif Pemungutan PBB dan insentif DBH Pajak Triwulan IV Tahun 2022 sebesar Rp146.861.073,00, terdiri dari Utang Insentif bagi ASN dan KDH/WKDH atas Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp31.726.453,00, Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Rp101.310.848,00, Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Rp13.823.772,00 telah dibayar pada Tahun 2024.

2. BLUD Puskesmas

Utang BLUD Puskesmas Tahun 2023 merupakan utang jasa Pelayanan sebesar Rp642.603.223,00 yang telah dibayarkan tahun 2024 sebesar Rp635.636.844,00 serta adanya koreksi sebesar Rp7.849,00 sehingga masih tersisa utang 2023 yang belum dibayarkan pada tahun 2024 sebesar Rp6.958.530,00 terdapat pada Puskesmas Koto Baru sebesar Rp6.900,912,00 dan Puskesmas Timpeh sebesar Rp57.618,00.

3. Dinas Pertanian

Utang Belanja Pegawai Tahun 2023 merupakan utang Tunjangan Beras PNS Bulan Desember 2023 sebesar Rp2.100.180,00 telah dibayar pada tahun 2024.

		Tahun 2024(Rp)	Tahun 2023(Rp)
b.	**Utang Belanja Barang dan Jasa**	**14.112.668.693,93**	**12.075.800.023,77**

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.112.668.693,93 terdiri dari :

1. BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan

Utang belanja Barang dan jasa pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Tahun 2024 sebesar Rp1.339.332.956,93 terdapat pada :

Tabel 5.2.60
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Dinas Kesehatan

No	Nama Puskesmas	Tahun 2024	Tahun 2023
1	RSUD Sungai Rumbai	1.135.948.168,14	1.129.812.311,77
2	Sungai Rumbai	253.260,00	18.388.750,00
3	Koto Besar	41.203.270,56	34.746.871,00
4	Sungai Limau	4.871.484,00	3.692.370,00
5	Koto Baru	35.840.954,80	17.436.000,00
6	Tiumang	8.706.777,00	23.338.482,00
7	Padang Laweh	27.268.412,00	33.007.025,00
8	Sitiung I	18.927.556,00	36.436.181,00
9	Timpeh	41.680.860,00	68.391.418,00
10	Gunung Medan	525.522,00	3.094.425,00
11	Sitiung II	0,00	1.016.740,00
12	Beringin Sakti	0,00	26.486.100,00
13	Silago	16.163.212,43	16.648.298,00
14	Sungai Dareh	0	0,00
15	Sialang	7.943.480,00	19.852.400,00
Jumlah		**1.339.332.956,93**	**1.432.347.371,77**

2. BLUD RSUD Sungai Dareh

Utang belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp12.773.335.737,00 terdiri dari :

Tabel 5.2.61
Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Sungai Dareh

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Utang belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	3.438.317.983,00	2.499.011.479,00
2	Utang belanja Bahan Obat	5.361.883.708,00	2.529.623.322,00
3	Utang belanja Bahan Laboratorium	1.212.919.896,00	772.101.614,00
4	Utang belanja Cetak	293.400.714,00	135.889.200,00
5	Utang belanja ATK	86.349.000,00	-
6	Utang belanja Alat Listrik	36.257.300,00	-
7	Utang belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	114.511.500,00	-
8	Utang belanja isi tabung gas - gas medis	201.789.800,00	-
9	Utang belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.260.972.499,00	3.891.998.905,00
10	Utang belanja Rujukan Parsial	60.900.000,00	-
11	Utang belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	347.014.454,00	256.272.938,00
12	Utang belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	-
13	Utang belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlaggganan	39.406.850,00	-
14	Utang pemeliharaan AC/ Alat Pendingin	82.978.050,00	26.179.000,00
15	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Khusus	38.957.383,00	99.899.000,00
16	Utang belanja Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	58.498.100,00	-
17	Utang belanja Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa Lantai 1	133.178.500,00	-

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
18	Belanja Barang Pemeliharaan Gedung	-	5.663.500,00
19	Belanja Alat RT (Home Use)	-	10.091.080,00
	Jumlah	**12.773.335.737,00**	**10.226.730.038,00**

Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebesar Rp12.075.800.023,77 adalah sebagai berikut :

1. BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan

   Utang Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Puskesmas dan RSUD Sungai Rumbai Dinas Kesehatan Tahun 2023 sebesar Rp.1.432.347.371,77 telah dibayarkan sebesar Rp1.422.071.621,00 dan sisanya sebesar Rp10.275.750,77 terdiri dari koreksi utang jaspel sebesar Rp100,00 pada RSUD Sungai Rumbai, koreksi utang belanja obat sebesar Rp8.179.989,00 yang sudah dibayar di Tahun 2023 namun masih tercatat di tahun 2024, retur obat sebesar Rp1.288.888,48 dan sisa utang tahun 2023 yang belum dibayar tahun 2024 sebesar Rp806.972,29 berupa belanja obat pada RSUD Sungai Rumbai.

2. BLUD RSUD Sungai Dareh

   Utang Belanja pada BLUD RSUD Sungai Dareh sebesar Rp10.226.730.038,00 telah dibayar pada tahun 2024.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

   Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebesar Rp416.722.614,00 merupakan utang tagihan listrik kantor dan UPTD bulan November s.d Desember 2023 sebesar Rp.115.988,045,00 telah dibayarkan tahun 2024 sedangkan untuk Tagihan PJU bulan Desember 2023 sebesar Rp300.734.569,00 pada tahun 2024 utang Listrik PJU dimutasi ke Dinas Perhubungan dan telah dibayarkan pada tahun 2024 dengan SP2D Nomor : 13.10/04.0/000003/ LS/ 2.15.0.00.0.00.010000/ M/1/2024 tanggal 22 Januari 2024.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
c. Utang Belanja Modal	**530.523.338,00**	**34.932.500,00**

Utang Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp530.523.338,00 terdiri dari :

1. BLUD RSUD Sungai Dareh

   Utang Belanja Modal pada BLUD RSUD tahun 2024 sebesar Rp296.657.038,00 adalah :

   a. Utang belanja modal peralatan kantor sebesar Rp48.461.000,00,
   b. Utang Belanja Modal Peralatan Rumah Tangga Rp28.893.838,00,
   c. Utang Belanja Modal Gedung Hemodialisa Rp199.441.200,00 pada CV. Kurnia Jasa Pratama dengan nomor SPK : 020/655.b/ KNTRK/ PL/ BLUD/ RSUD/2024,
   d. Perencanaan Gedung Hemodialisa Rp11.900.000,00 pada CV. Nadra Cons dengan Nomor SPK : 020/636.b/KNTRK/PL/BLaUD/RSUD/2024 dan,
   e. Pengawasan Gedung Hemodialisa Rp7.961.000,00 pada CV. Urban Arsitek dengan Nomor SPK : 020/656.b/ KNTRK/PL/ BLUD/ RSUD/ 2024.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   Utang Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 atas sisa utang tahun 2021 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp19.970.000,00.
b. Sisa pembayaran termin final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan Landscape Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant sebesar Rp14.962.500,00.

3. Sekretariat Daerah

Utang Belanja Modal tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp198.933.800,00 terdiri dari :

a. Utang Belanja Modal sebesar Rp184.097.750,00 atas Pekerjaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah, berdasarkan Kontrak Adendum Nomor : 000.1.8.3/761/Add I/Umum/Setda/XII-2024 dengan nilai kotrak sebesar Rp1.798.790.900,00, fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 baru selesai sebesar 94,49% sedangkan pembayaran per 31 Desember 2024 baru terealisasi sebesar 89,77%. Pekerjaan diselesaikan 100% setelah lewat tahun 2024, sehingga nilai utang yang timbul tercatat di Neraca menjadi sebesar Rp184.097.750,00.
b. Utang Perencanaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp14.836.050,00 berdasarkan SPK Nomor : 027/02/SPK/SETDA- UMUM/V-2024 dengan nilai kotrak sebesar Rp98.907.000,00 tanggal 6 Mei 2024. Pada tanggal 31 Desember 2024 terealisasi pembayaran baru 85%, sisanya 15% tercatat sebagai utang.

Utang Belanja Modal Tahun 2023 merupakan Utang Belanja Modal Tahun 2021 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp34.932.500,00 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2023, terdiri dari:

1. Sisa pembayaran dari Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Jalan (DAK Reguler) Paket IV Nomor Kontrak 620.04/PRC/PEMB-JLN/DAK/BM-DPUPR/IX-2020 oleh perusahaan konsultan CV. Diazka Konsultan sebesar Rp99.850.000,00 yang fisiknya belum selesai dikerjakan pada Tahun 2020 pembayaran pekerjaan baru dibayarkan sebesar Rp79.880.000,00 (85%) pada tahun 2021, sehingga masih ada sisa pembayaran sebesar Rp19.970.000,00.
2. Sisa pembayaran termin final 100% kegiatan pembangunan gedung kantor pekerjaan review perencanaan pembangunan *Landscape* Mesjid Agung Dharmasraya Nomor Kontrak 640/09/014-SL/PRC/PGK-APBD/CK-DPUPR/2020 oleh CV Gatra Consultant dengan jumlah Rp99.750.000,00 yang dibayarkan pada Tahun 2021 sebesar Rp84.787.500,00 (85%) sehingga masih ada sisa utang sebesar Rp14.962.500,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
d. Utang Belanja Bantuan Keuangan	**0,00**	**0,00**

Utang Belanja bantuan Keuangan 2024 dan Tahun 2023 Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
e. Utang Belanja Tak Terduga	**0,00**	**0,00**

Utang Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.2.a.4 Utang Jangka Pendek Lainnya	**4.891.202.700,00**	**4.891.202.700,00**

Utang jangka pendek lainnya Tahun 2024 berupa utang retensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kepada PT Nindya Karya atas Pembangunan Masjid Agung yang muncul karena adanya pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar Rp4.891.202.700,00 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dibayarkan.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.2.b Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.C.3 EKUITAS	**2.421.166.105.649,07**	**2.505.772.587.186,13**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Total Ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.421.166.105.649,07 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp2.505.772.587.186,13 ditambah surplus/defisit laporan operasional sebesar (Rp78.710.461.119,36) ditambah dampak kumulatif kesalahan mendasar sebesar (Rp5.895.416.544,62).

Ekuitas Awal	2.505.772.587.186,13
Surplus/Defisit LO	(78.711.064.992,44)
Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	(5.895.416.544,62)
Ekuitas Akhir	**2.421.166.105.649,07**

V.D. LAPORAN OPERASIONAL

V.D.1. PENDAPATAN – LO

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.	**PENDAPATAN**	**1.022.365.976.055,99**	**1.045.497.294.901,84**	**(23.131.318.845,85)**

Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan LO Tahun 2024 sebesar Rp1.022.365.976.055,99 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp1.045.497.294.901,84, terdapat penurunan sebesar Rp23.131.318.845,85 atau -2,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1
Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
7.	**PENDAPATAN**	**1.022.365.976.055,99**	**1.045.497.294.901,84**	**(23.131.318.845,85)**
7.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	120.084.773.552,20	116.975.429.423,99	3.109.344.128,21
7.2.	Pendapatan Transfer	863.339.185.252,00	832.998.619.259,00	30.340.565.993,00
7.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	38.942.017.251,79	95.523.246.218,85	(56.581.228.967,06)

V.D.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.	**Pendapatan Asli Daerah**	**120.084.773.552,20**	**116.975.429.423,99**	**3.109.344.128,21**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp3.109.344.128,21 atau 2,66%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**120.084.773.552,20**	**116.975.429.423,99**	**3.109.344.128,21**
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	27.218.922.589,78	25.421.181.413,50	1.797.741.176,28
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	70.063.061.076,91	2.666.970.194,83	67.396.090.882,08
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan	10.863.659.575,00	4.833.766.156,00	6.029.893.419,00
7.1.4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	11.939.130.310,51	84.053.511.659,66	(72.114.381.349,15)

V.D.1.a.1 Pendapatan Pajak Daerah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.1	**Pendapatan Pajak Daerah**	**27.218.922.589,78**	**25.421.181.413,50**	**1.797.741.176,28**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp1.797.741.176,28 atau 7,07%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.3
Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Pajak Daerah	**25.092.743.485,78**	**27.218.922.589,78**	**2.126.179.104,00**
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	341.020.598,00	353.886.473,00	12.865.875,00
Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	69.875.770,00	69.875.770,00	0,00
Pajak Sarang Burung Walet	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	356.993.896,00	356.993.896,00	0,00
PBBP2	2.665.512.855,00	4.692.967.300,00	2.027.454.445,00
BPHTB-Pemindahan Hak	4.581.776.382,00	4.581.776.382,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
BPHTB-Pemberian Hak Baru	510.171.750,00	510.171.750,00	0,00
PBJT-Restoran	1.490.712.906,78	1.490.712.906,78	0,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	14.214.737.472,00	14.300.596.256,00	85.858.784,00
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	546.801.048,00	546.801.048,00	0,00
PBJT-Hotel	288.281.956,00	288.281.956,00	0,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	12.228.152,00	12.228.152,00	0,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.730.700,00	10.730.700,00	0,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Pajak Daerah-LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO jumlah sebesar Rp2.126.179.104,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.4
Selisih Pendapatan Pajak Daerah antara LRA dan LO Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Penambahan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	643.500,00	13.509.375,00	12.865.875,00
Penerimaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.661.156.855,00	0,00	(2.661.156.855,00)
Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	4.688.611.300,00	4.688.611.300,00
Penerimaan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	1.164.490.563,00	0,00	(1.164.490.563,00)
Penambahan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	1.250.349.347,00	1.250.349.347,00
JUMLAH	**3.826.290.918,00**	**5.952.470.022,00**	**2.126.179.104,00**

Penjelasan selisih tabel diatas diuraikan sebagai berikut:

a. Penerimaan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Tahun 2023 sebesar Rp643.500,00 dan penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp13.509.375,00.
b. Adanya penambahan Piutang PBB pada awal Tahun 2024 sesuai dengan SKP sebesar Rp4.688.611.300,00 dan penerimaan Piutang selama Tahun 2024 sebesar Rp2.661.156.855,00.
c. Penerimaan Piutang PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain Tahun 2023 yang diterima Tahun 2024 sebesar Rp1.164.490.563,00 dan penambahan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.250.349.347,00.

V.D.1.a.2 Pendapatan Retribusi Daerah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	70.063.061.076,91	2.666.970.194,83	67.396.090.882,08

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp67.396.090.882,08 atau 2.527,07%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.5
Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Pendapatan Retribusi Daerah	**65.941.537.340,00**	**70.063.061.076,91**	**4.121.523.736,91**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di			

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
Puskesmas	3.364.903.484,00	3.472.269.264,00	107.365.780,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	60.496.355.259,00	64.354.574.693,00	3.858.219.434,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	161.310.000,00	161.310.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	250.608.500,00	253.226.500,00	2.618.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.400.010,00	14.400.010,00	0,00
Retribusi Los	96.780.000,00	99.820.000,00	3.040.000,00
Retribusi Kios	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Alat	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	6.050.000,00	6.050.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	32.080.000,00	32.080.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	209.924.100,00	393.065.100,00	183.141.000,00
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	880.153.200,00	847.292.722,91	(32.860.477,09)
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	342.522.787,00	342.522.787,00	0,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO jumlah sebesar Rp4.121.523.736,91 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.6

Penjelasan Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah antara LRA dan LO Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas :	**323.423.820,00**	**430.789.600,00**	**107.365.780,00**
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	323.423.820,00	429.637.000,00	106.213.180,00
Pengurangan pendapatan diterima dimuka - Klaim bulan November 2023 (piutang november-masuk rekening koran bulan Januari 2024) dipotong karena keterlanjuran setor Klaim BPJS Kesehatan tahun 2022 atas Temuan Pengawasan Internal BPJS	0,00	300.000,00	300.000,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD Puskesmas Tahun 2024	0,00	852.600,00	852.600,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah :	**4.828.194.954,00**	**8.686.414.388,00**	**3.858.219.434,00**
Piutang RSUD Sungai Dareh	4.349.114.568,00	4.588.859.749,00	239.745.181,00

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Piutang RSUD Sungai Rumbai	479.080.386,00	403.487.539,00	(75.592.847,00)
RSUD Sungai Dareh - Pengurangan pendapatan diterima dimuka atas Pembayaran utang kelebihan klaim hasil audit	0,00	3.693.447.000,00	3.693.447.000,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD RSUD Sungai DarehTahun 2024	0,00	469.300,00	469.300,00
Biaya Pemotongan Adm Bank Transfer BPJS ke Rekening BLUD RSUD Sungai Rumbai Tahun 2024	0,00	150.800,00	150.800,00
Dinas Lingkungan Hidup - Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	**3.500.000,00**	**6.118.000,00**	**2.618.000,00**
Dinas Perhubungan - Piutang Retribusi Los	**0,00**	**3.040.000,00**	**3.040.000,00**
Dinas PUPR - Piutang Air Minum UPT SPAM - Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan :	**84.003.300,00**	**267.144.300,00**	**183.141.000,00**
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah :	**69.196.000,27**	**36.335.523,18**	**(32.860.477,09)**
Dinas Kesehatan - Pendapatan retribusi daerah diterima dimuka ATM Bank Nagari dengan Nomor Kontrak PKS/007/KB/12-2021 dan 010/2646/Umum-Dinkes/XII/2021, jangka waktu 20 Juni 2021 s.d 20 Juni 2026	0,00	3.004.926,11	3.004.926,11
Dinas Perkimtan - Piutang retribusi pemanfaatan aset daerah (rusunawa)	4.306.400,00	11.500.000,00	7.193.600,00
Dinas Perkimtan - Pendapatan Diterima dimuka dari Rusunawa	6.712.903,23	9.783.870,97	3.070.967,74
RSUD Sungai Dareh - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk Payment Poin pada RSUD Sungai Dareh kontrak nomor 445/29/RSUD-2021 jangka waktu 16 November 2021 s.d 16 November 2024	0,00	8.037.963,78	8.037.963,78
Sekretariat Daerah - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa ATM Bank Nagari Pulau Punjung di kantor Bupati dgn kontrak nomor PKS/129/PL/12-2022 jangka waktu 1 Des 2022 s.d 30 November 2027	0,00	4.008.762,32	4.008.762,32
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Menara Telekomunikasi PT. Dayamitra Telekomunikasi dengan kontrak nomor 0363/HK 810/J DMT-1063000/2024 jangka waktu 17 Juni 2023 s.d 16 Juni 2028	42.472.263,55	0,00	(42.472.263,55)
BKD - Pendapatan diterima dimuka atas Perjanjian sewa untuk ATM Bank Nagari' pada MPP di DPMPTSP dengan kontrak nomor 100.3.7/10/BKD/VIII/2024 jangka waktu 13 Mei 2024 s.d 13 Mei 2029	15.704.433,50	0,00	(15.704.433,50)
JUMLAH	**5.308.318.074,27**	**9.429.841.811,18**	**4.121.523.736,91**

V.D.1.a.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahan	10.863.659.575,00	4.833.766.156,00	6.029.893.419,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp6.029.893.419,00 atau 124,75%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah-LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.7
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**5.347.929.006,00**	**10.863.659.575,00**	**5.515.730.569,00**

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.347.929.006,00	10.863.659.575,00	5.515.730.569,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO jumlah sebesar Rp5.515.730.569,00, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Piutang Deviden atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2023 sebesar Rp13.588.890,00.
2. Penambahan Piutang deviden atas Deviden PT.BPR Pulau Punjung Tahun 2024 sebesar Rp14.972.830,00.
3. Penerimaan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-atas Deviden Bank Nagari Tahun 2024 sebesar Rp5.514.346.629,00.

V.D.1.a.4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
7.1.4	**Pendapatan Asli Daerah Lainnya**	**11.939.130.310,51**	**84.053.511.659,66**	**(72.114.381.349,15)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Asli Daerah Lainnya Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat penurunan sebesar Rp72.114.381.349,15 atau -85,80%.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya -LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.8
Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	**11.988.036.841,01**	**11.939.130.310,51**	**(48.906.531,00)**
Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	380.741.100,00	0,00	(380.741.100,00)
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	750.556.371,00	750.556.371,00	0,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.407.834,71	150.407.834,71	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	9.039.251.467,21	9.371.053.536,71	331.802.069,50
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.270.764.474,09	1.270.910.474,09	146.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37.632.514,00	37.632.514,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	320.061,00	320.061,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.537.324,00	2.537.324,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.456.531,00	1.456.531,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	49.800,00	49.800,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	413.162,00	413.162,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	858.085,00	858.085,00	0,00
Pendapatan Denda PBBP2	74.440.489,00	74.440.489,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	93.000,00	93.000,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan	4.267.028,00	4.153.528,00	(113.500,00)

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA Rp	Pendapatan-LO Rp	Selisih +/- Rp
Bangunan			
Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	1.727.600,00	1.727.600,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	257.303.414,00	257.303.414,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	15.216.586,00	15.216.586,00	0,00
Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00

Penjelasan perbedaan Lain-lainPendapatan Asli Daerah yang sah-LRA dengan Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO jumlah sebesar Rp48.906.531,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.9
Penjelasan Perbedaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya antara LRA dan LO Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Reklas pendapatan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang ke Surplus penjualan aset nonlancar	**380.741.100,00**	**0,00**	**(380.741.100,00)**
Penjualan Aset lain-lain (rusak berat) pada RSUD Sungai Dareh Sebesar Rp9.265.000,00 disetor ke kasda tanggal 3 Oktober 2023, dan Penjualan aset lain-lain sisa bongkaran SMPN 2 Pulau Punjung, sebesar Rp.5.500.000,00 disetor ke kasda tanggal 17 Oktober 2023.	40.794.000,00	0,00	(40.794.000,00)
Pelelangan aset Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2024 sebanyak satu kali kegiatan dengan nilai buku Rp0,00, nilai Lelang Rp339.950.000,00, disetor ke kasda tanggal 28 November 2024 sebesar Rp339.947.100,00 karena dipotong biaya transfer Rp2.900,00	339.947.100,00	0,00	(339.947.100,00)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	**9.039.251.467,21**	**9.371.053.536,71**	**331.802.069,50**
Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR)	0,00	9.371.053.536,71	9.371.053.536,71
Penerimaan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (TGR) diTahun 2024, terdiri dari piutang Tahun sebelumnya sebesar Rp609.327.731,00 dan dari SKP2KS Tahun 2024 sebesar Rp8.429.923.736,21	9.039.251.467,21	0,00	(9.039.251.467,21)
Dinas Perkimtan - Piutang Lain-Lain PAD atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	**0,00**	**146.000,00**	**146.000,00**
Dinas Perkimtan - Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	**425.000,00**	**311.500,00**	**(113.500,00)**
JUMLAH	**9.420.417.567,21**	**9.371.511.036,71**	**(48.906.530,50)**

V.D.1.b. PENDAPATAN TRANSFER

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.2.	Pendapatan Transfer	863.339.185.252,00	832.998.619.259,00	30.340.565.993,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pendapatan Transfer Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp30.340.565.993,00 atau 3,64%.

Pendapatan Transfer ini terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.10
Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2024

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
7.2.	**Pendapatan Transfer**	**850.689.858.617,00**	**863.339.185.252,00**	**12.649.326.635,00**
7.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat**	**716.383.072.416,00**	**725.242.355.416,00**	**8.859.283.000,00**
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	37.078.226.000,00	45.937.509.000,00	8.859.283.000,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	512.944.707.932,00	512.944.707.932,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	34.621.165.717,00	34.621.165.717,00	0,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	131.738.972.767,00	131.738.972.767,00	0,00
7.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	**76.065.729.000,00**	**76.065.729.000,00**	0,00
	Dana Penyesuaian	76.065.729.000,00	76.065.729.000,00	0,00
7.2.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	**58.241.057.201,00**	**62.031.100.836,00**	**3.790.043.635,00**
	Pendapatan bagi Hasil Pajak	58.241.057.201,00	62.031.100.836,00	3.790.043.635,00

Penjelasan perbedaan Pendapatan Transfer-LRA dengan Pendapatan Transfer-LO jumlah sebesar Rp12.649.326.635,00 berasal dari:

Tabel. 5.3.11
Perbedaan Pendapatan Transfer antara LRA dan LO Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Badan Keuangan Daerah - Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**7.389.411.000,00**	**16.248.694.000,00**	**8.859.283.000,00**
Piutang Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.084.000,00	0,00	(3.084.000,00)
Penambahan Piutang Pendapatan Transfer :	0,00	0,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	1.920.212.000,00	1.920.212.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	1.325.304.000,00	1.325.304.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	11.826.791.000,00	11.826.791.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00	11.598.000,00	11.598.000,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	4.603.000,00	4.603.000,00
Aset Lainnya - Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) yang telah diterima :	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LO	1.866.109.000,00	0,00	(1.866.109.000,00)
Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH PPh Pasal 21-LO	891.885.000,00	0,00	(891.885.000,00)

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	3.144.000,00	0,00	(3.144.000,00)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	485.530.000,00	0,00	(485.530.000,00)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.139.659.000,00	0,00	(4.139.659.000,00)
Penambahan Aset Lainnya - Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) :	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	1.153.400.000,00	1.153.400.000,00
Pendapatan DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	2.000,00	2.000,00
Pendapatan Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0,00	3.561.000,00	3.561.000,00
Koreksi Pencatatan kurang bayar Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak)	**17.958.971.283,00**	**21.749.014.918,00**	**3.790.043.635,00**
Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.022.663.729,00	3.801.253.820,00	(221.409.909,00)
Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.788.234.373,00	1.528.623.806,00	(259.610.567,00)
Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	12.121.249.022,00	16.321.017.625,00	4.199.768.603,00
Pendaaptan Pajak Air Permukaan (PAP)	26.824.159,00	98.119.667,00	71.295.508,00
JUMLAH	**25.348.382.283,00**	**37.997.708.918,00**	**12.649.326.635,00**

V.D.1.b. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
7.3.	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**38.942.017.251,79**	**95.523.246.218,85**	**(56.581.228.967,06)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat penurunan sebesar Rp56.581.228.967,06 atau -59,23%.

Lain-lain Pendapatan yang Sah ini merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.12
Perbedaan Lain-lain Pendapatan yang sah antara LRA dan LO Tahun 2024

KODE REK	Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan-LRA	Pendapatan-LO	Selisih +/-
		Rp	Rp	Rp
7.3.	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**11.762.349.299,00**	**38.942.017.251,79**	**27.179.667.952,79**
7.3.1	**Pendapatan Hibah**	**71.350.441,00**	**27.250.662.781,79**	**27.179.312.340,79**
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	27.179.312.340,79	27.179.312.340,79
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	71.350.441,00	71.350.441,00	0,00
7.3.2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**11.690.998.858,00**	**11.691.354.470,00**	**355.612,00**
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non BLUD	11.690.998.858,00	11.691.354.470,00	355.612,00

Penjelasan perbedaan Lain-lain Pendapatan yang Sah -LRA dengan Lain-lain Pendapatan yang sah - LO jumlah sebesar Rp27.179.667.952,79 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat berupa persediaan sebesar Rp5.981.966.174,79 terdiri dari:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp5.377.180.660,93.
- Dinas Sosial sebesar Rp466.976.513,86.
- Dinas Pertanian sebesar Rp137.809.000,00.

2. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Aset Tetap Peralatan Dan Mesin sebesar Rp2.438.534.672,00 terdiri dari:

1)	Dinas Kesehatan	274.048.216,00
2)	Puskesmas Sungai Rumbai	1.408.000,00
3)	Puskesmas Koto Besar	13.428.358,00
4)	Puskesmas Sungai Limau	1.408.000,00
5)	Puskesmas Koto Baru	1.408.000,00
6)	Puskesmas Tiumang	1.408.000,00
7)	Puskesmas Padang Laweh	1.408.000,00
8)	Puskesmas Sitiung I	1.408.000,00
9)	Puskesmas Timpeh	1.408.000,00
10)	Puskesmas Gunung Medan	1.408.000,00
11)	Puskesmas Sitiung II	1.408.000,00
12)	Puskesmas Beringin Sakti	12.020.358,00
13)	Puskesmas Silago	1.408.000,00
14)	Puskesmas Sungai dareh	1.408.000,00
15)	Puskesmas Sialang	1.408.000,00
16)	Dinas Perkimtan berupa meubelair	1.192.518.240,00
17)	Badan Penanggulangan Bencana DaerahDaerah	241.096.000,00
18)	Dinas Perhubungan	688.527.500,00
	Jumlah	**2.438.534.672,00**

3. Penambahan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Berupa Aset Tetap Gedung Dan Bangunan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp17.981.618.340,00 berupa rumah susun pada satuan kerja penyediaan perumahan Provinsi Sumatera Barat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan berita acara Nomor 112/BA/Dr/2024 dan 600.2.4/Setda/2/2024 tanggal 1 Februari 2024.
4. Penambahan Pendapatan Hibah dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berupa aset tetap jalan, irigasi dan bangunan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp777.193.154,00 berupa PJU yang berlokasi di Kabupaten Dharmasraya, dengan berita acara Nomor Pihak Pertama : 100/BAST/BN.07/KPB/2024 dan Nomor Pihak Kedua 500.10.11/147/DISHUB-2024 tanggal 9 Juli 2024.
5. Penerimaan piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2023 sebesar Rp591.068,00 dan penambahan piutang Tahun 2024 sebesar Rp459.480,00.
6. Adanya penambahan pendapatan atas biaya pemotongan administrasi bank dari transfer BPJS ke rekening BLUD atas pendapatan kapitasi sebesar Rp487.200,00.

V.D.2. BEBAN

Beban pada Laporan Operasional sesuai dengan format Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	**BEBAN**	**1.098.972.178.944,35**	**999.468.050.485,47**	**99.504.128.458,88**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Operasional Tahun 2024 dan Tahun 2023, yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Transfer. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp99.504.128.458,87 atau 9,96%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13
Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.	BEBAN	1.098.972.178.944,35	999.468.050.465,47	99.504.128.458,88
8.1.01	Beban Pegawai	459.854.645.158,04	374.678.693.388,09	85.175.951.769,95
8.1.02	Beban Persediaan	100.041.670.605,50	120.216.633.694,53	(20.174.963.089,03)
8.1.02	Beban Jasa	122.893.828.449,15	101.399.153.391,17	21.494.675.057,98
8.1.02	Beban Sewa	5.782.869.796,00	4.654.019.879,00	1.128.849.917,00
8.1.02	Beban Pemeliharaan	12.080.586.952,00	13.938.757.696,00	(1.858.170.744,00)
8.1.02	Beban Perjalanan Dinas	62.205.866.889,00	61.363.605.826,00	842.261.063,00
8.1.05	Beban Hibah	35.212.246.757,00	28.767.442.546,00	6.444.804.211,00
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	2.619.299.693,24	2.086.794.260,39	532.505.432,85
8.1.08	Beban Penyusutan Aset tetap	175.434.790.213,81	175.016.110.448,29	418.679.765,52
8.1.08	Beban Penyusutan Aset lain-lain	7.339.656.186,61	7.831.950.346,00	(492.294.159,39)
8.1.08	Beban Amortisasi	306.710.400,00	333.488.396,00	(26.777.996,00)
8.3	Beban Transfer	115.200.007.844,00	109.181.400.614,00	6.018.607.230,00

V.D.2.a Beban Pegawai

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
9.1.1.	**Beban Pegawai**	**459.854.645.158,04**	**374.678.693.388,09**	**85.175.951.769,95**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp85.175.951.769,95 atau 22,73%.

Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan, Beban Tambahan Penghasilan PNS, Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, Insentif Pemungutan Pajak Daerah, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Uang Lembur, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Beban Pegawai BLUD, Beban Pegawai Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.14
Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.01	**Beban Pegawai**	**459.854.645.158,04**	**374.678.693.388,09**	**85.175.951.769,95**
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	306.255.760.974,00	244.782.726.024,73	61.473.034.949,27
9.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	43.669.061.704,00	29.347.638.293,00	14.321.423.411,00
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.519.809.554,00	60.793.673.482,00	9.726.136.072,00
8.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.159.937.860,00	11.036.458.188,00	123.479.672,00
8.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	425.853.947,00	430.099.300,00	(4.245.353,00)
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	474.756.000,00	510.876.000,00	(36.120.000,00)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	27.349.465.119,04	27.777.222.100,36	(427.756.981,32)

Saldo Beban Pegawai tersebut adalah jumlah *netto* setelah dikuranginya pengembalian Beban Pegawai selama Tahun 2024.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai dengan Beban Pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.15
Perbedaan Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA (Rp)	Belanja-LO (Rp)	Selisih +/- (Rp)
Beban Pegawai	454.911.665.442,94	459.854.645.158,04	(4.942.979.715,10)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	306.466.231.954,00	306.255.760.974,00	210.470.980,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	43.669.061.704,00	43.669.061.704,00	0,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.042.538.710,00	70.519.809.554,00	(1.477.270.844,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.159.937.860,00	11.159.937.860,00	0,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	430.965.781,00	425.853.947,00	5.111.834,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	474.756.000,00	474.756.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	23.668.173.433,94	27.349.465.119,04	(3.681.291.685,10)

Penjelasan perbedaan belanja pegawai-LRA dengan beban pegawai-LO jumlah sebesar Rp4.942.979.715,10 dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	140.789.551,00	426.390.715,00	285.601.164,00
Utang Belanja Pegawai	9.024.225.800,10	3.795.644.921,00	(5.228.580.879,10)
JUMLAH	**9.165.015.351,10**	**4.222.035.636,00**	**(4.942.979.715,10)**

Penjelasan Selisih

a) Penyesuaian atas Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp285.601.164,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.16
Penjelasan Selisih Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) antara LRA dan LO Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) atas Jasa Pelayanan Puskesmas	140.789.551,00	0,00	(140.789.551,00)
Utang PFK atas adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)	0,00	208.370.800,00	208.370.800,00
Utang PFK atas Jasa Medis RSUD Sungai Dareh	0,00	218.019.915,00	218.019.915,00
Jumlah	**140.789.551,00**	**426.390.715,00**	**285.601.164,00**

Penjelasan tabel terkait selisih Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

- Penambahan Utang Kepada Fihak Ketiga Tahun 2023 sebesarRp603.737.481,00, merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4% kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Data Iuran Jasa Pelayanan PNS antara BPJS Cabang Solok dengan Puskesmas se-Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebesar Rp140.789.551,00.
- Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp426.390.715,00, merupakan utang atas Iuran Jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah

(PPU) Pemerintah Daerah antara KPPN Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dan BPJS Kesehatan. Utang tersebut dikarenakan adanya selisih kurang bayar iuran 1% dan 4 % pada iuran jaminan kesehatan Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Terdiri dari Gaji Dinas Pendidikan sebesar Rp208.370.800,00 dan Jasa Pelayanan RSUD Sungai Dareh sebesar Rp218.019.915,00.

b) Penyesuaian atas Utang Belanja Pegawai sebesar Rp5.228.580.879,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.17

Penjelasan Selisih Utang Belanja Pegawai antara LRA dan LO Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0,00	2.100.180,00	2.100.180,00
Dinas Pertanian - Utang Beban Tunjangan Beras PNS"	0,00	2.100.180,00	2.100.180,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	**1.503.526.200,00**	**26.255.356,00**	**(1.477.270.844,00)**
BKD - Utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	26.255.356,00	26.255.356,00
Dinas Pendidikan - Utang Belanja TKG PNSD	884.776.200,00	0,00	(884.776.200,00)
Dinas Pendidikan - Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	618.750.000,00	0,00	(618.750.000,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	**0,00**	**5.111.834,00**	**5.111.834,00**
BKD - Utang Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	5.111.834,00	5.111.834,00
Beban Pegawai BLUD	**7.520.699.600,10**	**3.762.177.551,00**	**(3.758.522.049,10)**
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN RSUD Sungai Dareh	6.913.257.280,00	3.119.574.328,00	(3.793.682.952,00)
Utang Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh	30.800.000,00	0,00	(30.800.000,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Rumbai	36.020.740,00	87.549.416,00	51.528.676,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Besar	70.757.528,84	62.039.788,00	(8.717.740,84)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Limau	11.366.797,00	5.538.554,00	(5.828.243,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Koto Baru	79.271.045,20	35.754.000,00	(43.517.045,20)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Tiumang	29.426.734,00	58.931.505,00	29.504.771,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Padang Laweh	48.326.063,00	53.813.819,00	5.487.756,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sitiung I	38.865.601,00	87.903.058,00	49.037.457,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Timpeh	0,00	49.993.473,00	49.993.473,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Gunung Medan	2.887.638,00	12.251.775,00	9.364.137,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sitiung II	2.800.000,00	3.246.560,00	446.560,00
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Beringin Sakti	110.521.098,00	57.409.855,00	(53.111.243,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Silago	99.044.333,06	57.310.420,00	(41.733.913,06)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sungai Dareh	3.488.222,00	3.360.000,00	(128.222,00)
Utang jasa layanan kesehatan BLUD Puskesmas Sialang	43.866.520,00	67.501.000,00	23.634.480,00
Jumlah	**9.024.225.800,10**	**3.795.644.921,00**	**(5.228.580.879,10)**

Penjelasan selisih utang belanja pegawai sebagai berikut:

- Pembayaran utang Beban Tunjangan Beras PNS pada Dinas Pertanian sebesar Rp2.100.180,00.
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan merupakan utang Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp26.255.356,00, dibayarkan pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- Penambahan Utang Belanja TKG PNSD sebesar Rp884.776.200,00 dan utang belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp618.750.000,00 Triwulan IV Tahun 2024 Carry over pada Tahun 2025, karena adanya KMK Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian DAK Non Fisik Dana Tunjangan Guru ASND dan Dana Pelayanan Kepariwisataan Tahun 2024.
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah yang merupakan merupakan utang Insentif bagi Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.111.834,00, dibayarkan pada Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp6.913.257.280,00.
- Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp3.119.574.328,00.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Belanja Honorarium Tenaga Teknis/P3K/PHO pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp30.800.000,00.
- Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD atas Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp576.642.320,10, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Puskesmas Sungai Rumbai	36.020.740,00
2)	Puskesmas Koto Besar	70.757.528,84
3)	Puskesmas Sungai Limau	11.366.797,00
4)	Puskesmas Koto Baru	79.271.045,20
5)	Puskesmas Tiumang	29.426.734,00
6)	Puskesmas Padang Laweh	48.326.063,00
7)	Puskesmas Sitiung I	38.665.601,00
8)	Puskesmas Timpeh	0,00
9)	Puskesmas Gunung Medan	2.887.638,00
10)	Puskesmas Sitiung II	2.800.000,00
11)	Puskesmas Beringin Sakti	110.521.098,00
12)	Puskesmas Silago	99.044.333,06
13)	Puskesmas Sungai Dareh	3.488.222,00
14)	Puskesmas Sialang	43.866.520,00
	Jumlah	576.642.320,10

- Pembayaran Utang Belanja Pegawai Jasa Layanan pada Puskesmas sebesar Rp642.603.223,00, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Puskesmas Sungai Rumbai	87.549.416,00
2)	Puskesmas Koto Besar	62.039.788,00
3)	Puskesmas Sungai Limau	5.538.554,00
4)	Puskesmas Koto Baru	35.754.000,00
5)	Puskesmas Tiumang	58.931.505,00
6)	Puskesmas Padang Laweh	53.813.819,00
7)	Puskesmas Sitiung I	87.903.058,00
8)	Puskesmas Timpeh	49.993.473,00
9)	Puskesmas Gunung Medan	12.251.775,00
10)	Puskesmas Sitiung II	3.246.560,00
11)	Puskesmas Beringin Sakti	57.409.855,00
12)	Puskesmas Silago	57.310.420,00
13)	Puskesmas Sungai Dareh	3.360.000,00
14)	Puskesmas Sialang	67.501.000,00
	Jumlah	642.603.223,00

V.D.2.b. Beban Persediaan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.1.2.b	Beban Persediaan	100.041.670.605,50	120.216.633.694,53	(20.174.963.089,03)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Persediaan dalam Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat penurunan sebesar Rp20.174.963.089,03 atau -16,78%.

Beban Persediaan ini terdiri dari Beban Pakai Habis, Beban Bahan Material, Beban Cetak dan Penggandaan serta Beban Persediaan BLUD dan Beban Persediaan BOS, yaitu:

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa (Persediaan)-LRA dengan Beban Persediaan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.18
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Persediaan) LRA dan Beban Persediaan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan	**100.274.174.560,39**	**100.041.670.605,50**	**232.503.954,89**
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	42.904.850,00	(42.904.850,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	120.675.000,00	132.944.300,00	(12.269.300,00)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.650.807.276,00	4.665.780.591,79	(14.973.315,79)
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	510.865.000,00	474.785.000,00	36.080.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.560.000,00	6.560.000,00	0,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	20.672.000,00	20.672.000,00	0,00
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	416.447.000,00	384.817.000,00	31.630.000,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	19.725.000,00	29.650.000,00	(9.925.000,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.728.985.175,00	285.243.772,65	2.443.741.402,35
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.083.240,00	14.083.240,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	146.666.000,00	146.666.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	489.514.815,00	493.571.315,00	(4.056.500,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.084.985.900,00	1.084.746.010,00	239.890,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.673.013.564,00	2.676.508.564,00	(3.495.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	268.102.000,00	262.852.000,00	5.250.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	797.430.860,00	847.536.860,00	(50.106.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	50.929.000,00	55.741.000,00	(4.812.000,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	471.013.420,00	469.102.420,00	1.911.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	28.005.000,00	28.005.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	136.383.000,00	136.383.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	94.675.716,00	94.675.716,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	905.750.706,00	907.079.556,00	(1.328.850,00)
Beban Obat-Obatan-Obat	4.767.980.455,00	441.288.310,04	4.326.692.144,96
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	33.449.282,00	253.759.361,50	(220.310.079,50)
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.187.485.614,39	21.316.525.539,36	(8.129.039.924,97)

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	22.359.239.323,00	5.519.747.208,00	16.839.492.115,00
Beban Natura dan Pakan-Natura	1.228.699.600,00	1.234.200.100,00	(5.500.500,00)
Beban Natura dan Pakan-Pakan	118.929.500,00	118.929.500,00	0,00
Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	196.163.554,00	196.163.554,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	900.370.556,00	900.370.556,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.694.064.401,00	2.694.064.401,00	0,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.686.591.900,00	2.686.591.900,00	0,00
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	198.252.782,00	198.252.782,00	0,00
Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	691.420.000,00	691.420.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	121.990.456,00	121.990.456,00	0,00
Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	16.770.000,00	16.770.000,00	0,00
Beban Pakaian Kerja Laboratorium	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
Beban Pakaian Adat Daerah	156.570.000,00	124.070.000,00	32.500.000,00
Beban Pakaian Olahraga	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00
Beban Pakaian Paskibraka	197.069.000,00	197.069.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	1.386.753.500,00	2.180.328.700,00	(793.575.200,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	3.070.000,00	5.850.000,00	(2.780.000,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	37.876.700,00	38.576.700,00	(700.000,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	4.350.000,00	65.870.000,00	(61.520.000,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8.850.000,00	8.850.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.580.000,00	3.580.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
Beban Peralatan dan Mesin-Alat	5.630.000,00	5.630.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja			
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Beban Persediaan Dana BLUD - LO	22.896.234.634,00	36.568.399.132,16	(13.672.164.498,16)
Beban Persediaan Dana BOS - LO	10.527.958.631,00	10.983.530.210,00	(455.571.579,00)

Penjelasan perbedaan belanja persediaan-LRA dengan beban persediaan-LO jumlah sebesar Rp232.503.954,89 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.19
Selisih Belanja Persediaan LRA dan LO Tahun 2024

URAIAN	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Saldo Persediaan awal tahun	34.728.826.947,97	0,00	(34.728.826.947,97)
Saldo Persediaan akhir tahun	0,00	46.962.340.588,12	46.962.340.588,12
Utang Belanja Persediaan Tahun 2023	0,00	6.654.481.267,48	6.654.481.267,48
Utang Belanja Persediaan Tahun 2024	11.380.522.131,85	0,00	(11.380.522.131,85)
Penyesuaian Belanja Persediaan Berasal Dari Belanja Modal	1.812.748.698,00	0,00	(1.812.748.698,00)
Penyesuaian Belanja Persediaan Berasal dari Hibah	5.981.966.174,79	0,00	(5.981.966.174,79)
Penyesuaian Belanja Persediaan menambah nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	80.870.000,00	80.870.000,00
Penyesuaian Belanja Persediaan menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	313.243.559,39	313.243.559,39
Penyesuaian Belanja Persediaan menambah nilai Aset Tetap Lainnya	0,00	11.070.000,00	11.070.000,00
Koreksi Penambahan Persediaan	9.468.777,48	124.031.270,00	114.562.492,52
JUMLAH	**53.913.532.730,09**	**54.146.036.684,99**	**232.503.954,90**

Penjelasan selisih:

1) Penyesuaian Persediaan yang terpakai pada Tahun 2023 sebesar Rp34.728.826.947,97 dan yang masih menjadi Persediaan (*stock*) pada Tahun 2024 sebesar Rp46.962.340.588,12 berdasarkan *stock opname* Persediaan per 31 Desember 2024.
2) Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2023 yang mengurangi Beban Persediaan sebesar Rp6.654.481.267,48 dan penambahan Utang Belanja Persediaan Tahun 2024 sebesar Rp11.380.522.131,85, dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel. 5.3.20
Penyesuaian Utang Belanja Persediaan Tahun 2024

SKPD/ Uraian	JUMLAH (Rp)
Pembayaran Utang Persediaan Tahun 2023 :	**6.654.481.267,48**
BLUD RSUD SUNGAI DAREH:	
Utang Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	2.499.011.479,00
Utang Belanja Bahan Obat	2.529.623.322,00
Utang Belanja Bahan Laboratorium	772.101.614,00
Utang Belanja Cetak	135.889.200,00
Utang Belanja Alat RT (Home Use)	10.091.080,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI:	
Utang Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	211.450.297,00
Utang Belanja Obat Obatan	484.614.275,48
BLUD PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI:	
Utang Makan Minum Prolanis	11.700.000,00
Penambahan Utang Persediaan Tahun 2024 :	**11.380.522.131,85**
BLUD RSUD SUNGAI DAREH:	
Utang Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	3.438.317.983,00
Utang Belanja Bahan Obat	5.361.883.708,00
Utang Belanja Bahan Laboratorium	1.212.919.896,00
Utang Belanja Cetak	293.400.714,00
Utang Belanja ATK	86.349.000,00
Utang Belanja Alat Listrik	36.257.300,00

SKPD/ Uraian	JUMLAH (Rp)
Utang Belanja Alat/bahan Kegiatan Kantor lainnya	114.511.500,00
Utang Belanja isi tabung gas - gas medis	201.789.800,00
BLUD RSUD SUNGAI RUMBAI	
Utang Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	223.882.758,47
Utang Belanja Obat Obatan	411.209.472,38
Pembayaran Utang Persediaan Tahun 2023 :	6.654.481.267,48
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	
Utang Belanja Bahan Pakai Habis/ Kedokteran	2.499.011.479,00
Utang Belanja Bahan Obat	2.529.623.322,00
Utang Belanja Bahan Laboratorium	772.101.614,00
Utang Belanja Cetak	135.889.200,00
Utang Belanja Alat RT (Home Use)	10.091.080,00

3) Penambahan Persediaan Berasal Dari Belanja Modal sebesar Rp1.812.748.698,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.21
Penyesuaian Belanja Persediaan berasal dari Belanja Modal Tahun 2023

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS PENDIDIKAN			
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	793.575.200,00	0,00	(793.575.200,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	61.520.000,00	0,00	(61.520.000,00)
Beban Persediaan BOSP	566.737.000,00	0,00	(566.737.000,00)
DINAS PUPR			
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	279.846.000,00	0,00	(279.846.000,00)
DINAS KESEHATAN			
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use]	700.000,00	0,00	(700.000,00)
RSUD SUNGAI DAREH	53.737.898,00	0,00	(53.737.898,00)
BLUD PUSKESMAS - Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
RSUD Sungai Rumbai	1.432.600,00	0,00	(1.432.600,00)
Puskesmas Sungai Limau	1.850.000,00	0,00	(1.850.000,00)
Puskesmas Tiumang	3.774.000,00	0,00	(3.774.000,00)
Puskesmas Sitiung I	15.673.000,00	0,00	(15.673.000,00)
Puskesmas Timpeh	9.435.000,00	0,00	(9.435.000,00)
Puskesmas Gunung Medan	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)
Puskesmas Sitiung I	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)
Puskesmas Silago	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Puskesmas Sungai Dareh	10.878.000,00	0,00	(10.878.000,00)
Puskesmas Sialang	750.000,00	0,00	(750.000,00)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur :	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)
BAPPERIDA			
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	980.000,00	0,00	(980.000,00)
Jumlah	1.812.748.698,00	0,00	(1.812.748.698,00)

4) Penambahan Persediaan non APBD sebesar Rp5.981.966.174,79, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5.3.22
Penambahan Persediaan non APBD Tahun 2024

SKPD / Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Dinas Kesehatan	5.377.180.660,93	0,00	(5.377.180.660,93)
Dinas Sosial	466.976.513,86	0,00	(466.976.513,86)
Dinas Pertanian	137.809.000,00	0,00	(137.809.000,00)
Jumlah	**5.981.966.174,79**	**0,00**	**(5.981.966.174,79)**

5) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan sebesar Rp63.400.000,00, dan Puskesmas Sungai Rumbai sebesar Rp17.470.000,00.
6) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp313.243.559,39.
7) Penyesuaian Beban Persediaan menambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.070.000,00.
8) Adanya koreksi pengurangan nilai Utang Persedian pada RSUD Sungai Rumbai sebesar Rp9.468.777,48, merupakan koreksi Utang Obat sebesar Rp8.179.989,00 dan koreksi retur obat yang ditarik dari pemasaran sebesar Rp1.288.788,48.
9) Adanya koreksi pengurangan nilai Persedian pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp124.031.270,00.

V.D.2.c Beban Jasa

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.b	**Beban Jasa**	**122.893.828.449,15**	**101.399.153.391,17**	**21.494.675.057,98**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp21.494.675.057,98 atau 21,20%.

Beban Jasa ini terdiri dari Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Jasa Konsultasi dan Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Beban Jasa BLUD dan Beban Jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.23
Perbedaan Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa	**122.746.682.862,80**	**122.893.828.449,15**	**(147.145.586,35)**
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	554.250.000,00	554.250.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	752.305.000,00	752.305.000,00	0,00
Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	109.931.484,00	109.931.484,00	0,00
Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00
Beban Honorarium Rohaniwan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	667.180.000,00	667.180.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.476.671.573,00	3.476.671.573,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	231.442.083,00	231.442.083,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	3.077.160.000,00	3.077.160.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	990.400.000,00	990.400.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	405.340.000,00	405.340.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	100.330.000,00	100.330.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Perhubungan	1.762.995.000,00	1.762.995.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	127.400.000,00	127.400.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	147.915.000,00	147.915.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	774.949.669,00	774.949.669,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	10.912.325.000,00	10.912.325.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	84.285.000,00	84.285.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	380.640.000,00	380.640.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	3.955.800.000,00	3.955.800.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.793.360.000,00	2.793.360.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Supir	1.963.080.000,00	1.963.080.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Juru Masak	393.210.000,00	393.210.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	7.980.000,00	7.980.000,00	0,00
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.500.000,00	163.500.000,00	0,00
Beban Jasa Tata Rias	218.500.000,00	218.500.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	28.023.580,00	28.023.580,00	0,00
Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	772.151.000,00	772.151.000,00	0,00
Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	624.482.500,00	624.482.500,00	0,00
Beban Jasa Kalibrasi	155.680.657,00	155.680.657,00	0,00
Beban Jasa Pengolahan Sampah	8.679.720,00	8.679.720,00	0,00
Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00
Beban Jasa Pengukuran Tanah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.909.104.000,00	1.909.104.000,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	642.629.470,00	642.629.470,00	0,00
Beban Tagihan Air	31.366.600,00	31.366.600,00	0,00
Beban Tagihan Listrik	9.702.355.709,00	9.285.633.095,00	416.722.614,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.541.451.014,00	1.541.451.014,00	0,00
Beban Paket/Pengiriman	4.747.192,00	4.747.192,00	0,00
Beban Penambahan Daya	24.874.600,00	24.874.600,00	0,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	271.178.605,00	271.181.505,00	(2.900,00)
Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	0,00	0,00	0,00
Beban Lembur	795.836.000,00	795.836.000,00	0,00
Beban Medical Check Up	28.485.140,00	28.485.140,00	0,00
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	0,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.273.115.592,00	1.273.115.592,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	23.125.240.000,00	23.081.878.400,00	43.361.600,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	755.818.514,00	755.818.514,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	180.043.071,00	180.043.071,00	0,00
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	427.203.263,00	367.216.047,56	59.987.215,44
Beban Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	99.713.000,00	99.713.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	199.618.000,00	199.618.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	198.537.930,00	198.537.930,00	0,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	711.949.426,00	711.949.426,00	0,00
Beban Sosialisasi	6.009.723.900,00	6.009.723.900,00	0,00
Beban Bimbingan Teknis	2.824.284.852,00	2.824.284.852,00	0,00
Beban Diklat Kepemimpinan	107.945.000,00	107.945.000,00	0,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	966.960.000,00	966.960.000,00	0,00
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
Beban Jasa dana BLUD - LO	22.888.367.418,80	23.555.581.534,59	(667.214.115,79
Beban Jasa dana BOS - LO	10.297.598.823,00	10.297.598.823,00	0,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.658.588.477,00	1.658.588.477,00	0,00

Penjelasan perbedaan Belanja Jasa-LRA dengan Jasa-LO sebesar Rp147.145.586,35 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel. 5.3.24
Selisih Belanja Jasa LRA dan LO Tahun 2024

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Utang Belanja Jasa	2.418.004.000,79	2.212.557.555,00	(205.526.445,79)
Premi Asuransi Barang Milik Daerah	214.617.938,50	274.605.153,94	59.987.215,44
Utang PFK atas Selisih kurang bayar Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	0,00	0,00
Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS tahun 2024 RSUD Sungai Dareh yang terpotong biaya transfer	469.300,00	0,00	(469.300,00)
Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS RSUD Sungai Rumbai yang terpotong biaya transfer pada RSUD Sungai Rumbai	150.800,00	0,00	(150.800,00)
Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS Puskesmas yang terpotong biaya transfer pada Puskesmas	1.339.800,00	0,00	(1.339.800,00)
Pencatatan Pendapatan Penjualan Aset pelelangan melalui KPKNL yang terpotong biaya transfer pada Badan Keuangan Daerah	2.900,00	0,00	(2.900,00)
JUMLAH	**2.634.664.739,30**	**2.487.162.708,94**	**(147.502.030,35)**

Penjelasan selisih:

a.) Selisih penyesuaian Utang Belanja Jasa sebesar Rp205.526.445,79, yaitu:

Tabel. 5.3.25
Penyesuaian Utang Belanja Jasa Tahun 2024

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
DINAS KESEHATAN	**0,00**	**43.361.600,00**	**43.361.600,00**
Selisih kurang bayar Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	0,00	43.361.600,00	43.361.600,00
BLUD RSUD SUNGAI DAREH	**1.714.293.803,00**	**1.028.697.515,00**	**(685.596.288,00)**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.260.972.499,00	772.424.577,00	(488.547.922,00)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	0,00	256.272.938,00	256.272.938,00
Belanja Rujukan Parsial	60.900.000,00	0,00	(60.900.000,00)
Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Limbah B3)	347.014.454,00	0,00	(347.014.454,00)
Belanja Jasa Pembersih, Pengendalian Hama dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Aplikasi SIMRS	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
Belanja Kawat/Faximile/Internet/TV Berlanggganan	39.406.850,00	0,00	(39.406.850,00)
RSUD SUNGAI RUMBAI	**500.048.965,00**	**432.940.766,00**	**(67.108.199,00)**
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	496.718.965,00	432.940.766,00	(63.778.199,00)
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.330.000,00	0,00	(3.330.000,00)
BLUD PUSKESMAS	**203.741.232,79**	**290.835.060,00**	**87.093.827,21**
PembayaraN Utang 2023 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :	0,00	290.835.060,00	290.835.060,00
Sungai Rumbai	0,00	6.688.750,00	6.688.750,00
Koto Besar	0,00	34.746.871,00	34.746.871,00
Sungai Limau	0,00	3.692.370,00	3.692.370,00
Koto Baru	0,00	17.436.000,00	17.436.000,00
Tiumang	0,00	23.338.482,00	23.338.482,00
Padang Laweh	0,00	33.007.025,00	33.007.025,00
Sitiung I	0,00	36.436.181,00	36.436.181,00
Timpeh	0,00	68.391.418,00	68.391.418,00
Gunung Medan	0,00	3.094.425,00	3.094.425,00
Sitiung II	0,00	1.016.740,00	1.016.740,00
Beringin Sakti	0,00	26.486.100,00	26.486.100,00
Silago	0,00	16.648.298,00	16.648.298,00
Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00
Sialang	0,00	19.852.400,00	19.852.400,00
Penambahan Utang 2024 Jasa Pelayanan dan Jasa Klaim BPJS pada Puskesmas :	203.417.232,79	0,00	(203.417.232,79)

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Sungai Rumbai	253.260,00	0,00	(253.260,00)
Koto Besar	41.203.270,56	0,00	(41.203.270,56)
Sungai Limau	4.871.484,00	0,00	(4.871.484,00)
Koto Baru	35.840.954,80	0,00	(35.840.954,80)
Tiumang	8.382.777,00	0,00	(8.382.777,00)
Padang Laweh	27.454.412,00	0,00	(27.454.412,00)
Sitiung I	19.098.000,00	0,00	(19.098.000,00)
Timpeh	41.680.860,00	0,00	(41.680.860,00)
Gunung Medan	525.522,00	0,00	(525.522,00)
Sitiung II	0,00	0,00	0,00
Beringin Sakti	0,00	0,00	0,00
Silago	16.163.212,43	0,00	(16.163.212,43)
Sungai Dareh	0,00	0,00	0,00
Sialang	7.943.480,00	0,00	(7.943.480,00)
Penambahan Utang 2024 operasional ambulan pada Puskesmas Tiumang	324.000,00	0,00	(324.000,00)
DINAS PUPR	**0,00**	**115.988.045,00**	**115.988.045,00**
Utang Belanja Tagihan Listrik	0,00	115.988.045,00	115.988.045,00
Dinas PUPR - Utang Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 2023	0,00	0,00	0,00
DINAS PERHUBUNGAN	**0,00**	**300.734.569,00**	**300.734.569,00**
Utang Belanja Tagihan Listrik	0,00	300.734.569,00	300.734.569,00
JUMLAH	**2.418.084.000,79**	**2.212.557.555,00**	**(205.526.445,79)**

b.) Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp59.987.215,44, sebagai berikut:

Tabel. 5.3.26
Penyesuaian Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah Tahun 2024

Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat Daerah	144.346.733,58	140.232.331,75	(4.114.401,83)
Premi Asuransi Kendaraan Dinas pada Sekretariat DPRD	13.175.303,28	12.323.068,77	(852.234,51)
Premi Asuransi Gedung pada Sekretariat DPRD	57.095.901,64	122.049.753,42	64.953.851,79
JUMLAH	**214.617.938,50**	**274.605.153,94**	**59.987.215,44**

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp144.346.733,58 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp13.175.303,28.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas Gedung Kantor Tahun 2023 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp57.095.901,64.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas kendaraan dinas Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp140.232.331,75 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp12.323.068,77.
- Penyesuaian Premi Asuransi Dibayar Dimuka atas Gedung Kantor Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp122.049.753,42.

c.) Penyesuaian Beban Jasa BLUD atas Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS RSUD Sungai Dareh yang terpotong biaya transfer pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp469.300,00.

d.) Penyesuaian Beban Jasa BLUD atas Pencatatan Pendapatan Klaim BPJS Puskesmas dan Kapitasi yang terpotong biaya transfer pada BLUD Puskesmas sebesar Rp1.490.600,00, terdiri dari:

Tabel. 5.3.27
Penyesuaian Beban Jasa BLUD Tahun 2024

No	BLUD	Klaim BPJS	Kapitasi	Jumlah
1)	RSUD Sungai Rumbai	150.800,00	0,00	150.800,00
2)	Sungai Rumbai	84.100,00	34.800,00	118.900,00
3)	Koto Besar	87.000,00	34.800,00	121.800,00
4)	Sungai Limau	29.000,00	34.800,00	63.800,00
5)	Koto Baru	66.700,00	34.800,00	101.500,00
6)	Tiumang	72.500,00	34.800,00	107.300,00
7)	Padang Laweh	31.900,00	34.800,00	66.700,00
8)	Sitiung I	98.600,00	34.800,00	133.400,00
9)	Timpeh	78.300,00	34.800,00	113.100,00
10)	Gunung Medan	49.300,00	34.800,00	84.100,00
11)	Sitiung II	58.000,00	34.800,00	92.800,00
12)	Beringin Sakti	78.300,00	34.800,00	113.100,00
13)	Silago	43.500,00	34.800,00	78.300,00
14)	Sungai Dareh	40.600,00	34.800,00	75.400,00
15)	Sialang	34.800,00	34.800,00	69.600,00
	JUMLAH	1.003.400,00	487.200,00	1.490.600,00

e.) Penyesuaian Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan atas Pencatatan Pendapatan Penjualan Aset pelelangan melalui KPKNL yang terpotong biaya transfer pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp2.900,00.

V.D.2.d Beban Sewa

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.c	**Beban Sewa**	**5.782.869.796,00**	**4.654.019.879,00**	**1.128.849.917,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Sewa Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp1.128.849.917,00 atau 24,26%.

Beban Sewa ini terdiri dari Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat dan Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Serta Beban Sewa BLUD dan Beban Jasa BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Sewa-LRA dengan Beban Sewa-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.28
Perbedaan Belanja Barang dan Jasa (Sewa) LRA dan Beban Sewa LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa	**5.782.869.796,00**	**5.782.869.796,00**	**0,00**
Beban Sewa Excavator	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Pengangkat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00
Beban Sewa Electric Generating Set	60.890.000,00	60.890.000,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	487.039.866,00	487.039.866,00	0,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	580.780.000,00	580.780.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Pendingin	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	338.530.560,00	338.530.560,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	329.554.000,00	329.554.000,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	169.417.600,00	169.417.600,00	0,00
Beban Sewa Peralatan Umum	521.650.000,00	521.650.000,00	0,00
Beban Sewa Komputer Jaringan	42.525.000,00	42.525.000,00	0,00
Beban Sewa Personal Computer	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Terbuka	1.943.894.070,00	1.943.894.070,00	0,00
Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	74.879.000,00	74.879.000,00	0,00
Beban Sewa Hotel	219.750.000,00	219.750.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Beban Sewa Pagar	0,00	0,00	0,00
Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00
Beban Sewa dana BLUD - LO	316.535.200,00	316.535.200,00	0,00
Beban Sewa dana BOS - LO	320.774.500,00	320.774.500,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan belanja sewa-LRA dengan beban sewa-LO

V.D.2.e Beban Pemeliharaan

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2.d	Beban Pemeliharaan	12.080.586.952,00	13.938.757.696,00	(1.858.170.744,00)

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat penurunan sebesar Rp1.858.170.744,00 atau -13,33%.

Beban Pemeliharaan ini terdiri dari Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan serta Beban Pemeliharaan BLUD dan Beban Pemeliharaan BOS.

Perbedaan jumlah Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.29
Perbedaan Belanja Pemeliharaan LRA dan Beban Pemeliharaan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan	13.004.357.955,00	12.080.586.952,00	923.771.003,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	254.201.750,00	254.201.750,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	30.101.900,00	30.101.900,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	147.637.760,00	147.637.760,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	281.050.986,00	281.050.986,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.792.617.724,00	2.792.617.724,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	297.077.769,00	297.077.769,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	441.981.289,00	441.981.289,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11.113.540,00	11.113.540,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	89.998.500,00	89.998.500,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	44.594.250,00	44.594.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7.554.000,00	7.554.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.208.000,00	23.208.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	221.341.801,00	221.341.801,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	56.944.224,00	56.944.224,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	59.850.600,00	59.850.600,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	200.230.117,00	200.230.117,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	57.730.000,00	57.730.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	75.082.800,00	75.082.800,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	49.197.000,00	49.197.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	88.926.600,00	88.926.600,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	3.299.803.900,00	3.299.803.900,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	9.988.000,00	9.988.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	74.550.000,00	74.550.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara	0,00	0,00	0,00
Beban Pemeliharaan dana BLUD - LO	3.265.380.403,00	2.341.609.400,00	923.771.003,00
Beban Pemeliharaan dana BOS - LO	959.095.042,00	959.095.042,00	0,00

Penjelasan perbedaan belanja pemeliharaan-LRA dengan beban pemeliharaan-LO sebesar Rp923.771.003,00, yaitu:

Tabel 5.3.30
Penjelasn Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan Tahun 2024

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Belanja Barang dan JAsa menambah nilai Aset Tetap	0,00	1.111.660.576,00	1.111.660.576,00
Utang Belanja Pemeliharaan BLUD RSUD Sungai Dareh	313.612.033,00	131.741.500,00	(181.870.533,00)

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
Puskesmas Timpeh - Reklas Aset Gedung dan Bangunan ke Aset Ekstrakomptabel (pembangunan garasi)	6.019.040,00	0,00	(6.019.040,00)
JUMLAH	**319.631.073,00**	**1.243.402.076,00**	**923.771.003,00**

Penjelasan selisih:

- Adanya Belanja Barang dan Jasa menambah nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada RSUD Sungai Dareh sebesar Rp1.111.660.576,00, dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp942.205.576,00 dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya sebesar Rp169.455.000.
- Penambahan utang pemeliharaan sebesar Rp313.612.033,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	38.957.383,00
2)	Utang Pemeliharaan Alat Pendingin	82.978.050,00
3)	Utang Pemeliharaan Rutin Faximile/Internet	85.498.100,00
4)	Utang Pemeliharaan Listrik Ruang Hemodialisa	133.178.500,00
	Jumlah	**313.612.033,00**

- Penambahan utang pemeliharaan sebesar Rp131.741.500,00 pada BLUD RSUD Sungai Dareh, dengan rincian sebagai berikut:

1)	Utang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor	99.899.000,00
2)	Utang Pemeliharaan Alat Pendingin	26.179.000,00
3)	Utang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.663.500,00
	Jumlah	**131.741.500,00**

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak menambah nilai Aset Tetap, direklas ke-Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp6.019.040,00 pada Puskesmas Timpeh.

V.D.2.f Beban Perjalanan Dinas

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.2	**Beban Perjalanan Dinas**	**62.205.866.889,00**	**61.363.605.826,00**	**842.261.063,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp842.261.063,00 atau 1,37%.

Beban Perjalanan Dinas ini terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Beban Perjanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, Beban Perjalanan Dinas BLUD, dan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah BOS.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Perjalanan dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.31
Perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dan Beban Perjalanan Dinas LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjanan Dinas	**62.205.866.889,00**	**62.205.866.889,00**	**0,00**
Beban Perjalanan Dinas Biasa	47.621.865.817,00	47.621.865.817,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.826.229.850,00	10.826.229.850,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.386.400,00	16.386.400,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	681.568.789,00	681.568.789,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Perjalanan Dinas dana BLUD - LO	1.563.285.033,00	1.563.285.033,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas dana BOS - LO	1.483.331.000,00	1.483.331.000,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO.

V.D.2.g Beban Hibah

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.5	**Beban Hibah**	**35.212.246.757,00**	**28.767.442.546,00**	**6.444.804.211,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp6.444.804.211,00 atau 22,40%.

Beban hibah ini terdiri dari :

Tabel 5.3.32

Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Hibah	**35.212.246.757,00**	**28.767.442.546,00**	**6.444.804.211,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.706.113.000,00	12.800.000.000,00	8.906.113.000,00
Beban Hibah Barang kepada BUMN	958.320.000,00	0,00	958.320.000,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.229.825.159,00	1.300.000.000,00	(70.174.841,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	4.441.722.000,00	(4.441.722.000,00)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.867.283.900,00	5.382.264.332,00	(3.514.980.432,00)
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	3.920.065.334,00	(3.920.065.334,00)
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	90.000.000,00	(90.000.000,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	855.713.548,00	798.390.880,00	57.322.668,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.344.257.150,00	0,00	4.344.257.150,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.576.834.000,00	0,00	3.576.834.000,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	628.900.000,00	0,00	628.900.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp6.444.804.211,00 atau 22,40%, hal ini karena adanya hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024.

Untuk perbedaan jumlah Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO adalah sebagai berikut.

Tabel. 5.3.33

Perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Hibah	**34.253.926.757,00**	**34.253.926.757,00**	**0,00**
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	21.706.113.000,00	21.706.113.000,00	0,00

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA	Beban-LO	Selisih +/-
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.229.825.159,00	1.229.825.159,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.867.283.900,00	1.867.283.900,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	855.713.548,00	855.713.548,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.344.257.150,00	4.344.257.150,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	3.576.834.000,00	3.576.834.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	628.900.000,00	628.900.000,00	0,00

Tidak terdapat perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO.

V.D.2.h Beban Bantuan Sosial

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.6.	**Beban Bantuan Sosial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat saldo beban bantuan sosial Tahun 2024.

V.D.2.i Beban Penyusutan dan Amortisasi

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.7.	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	**183.081.156.800,42**	**183.181.549.190,29**	**(100.392.389,87)**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, maka terdapat penurunan sebesar Rp100.392.389,87 atau -0,06%.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari:

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**183.081.156.800,42**	**183.181.549.190,29**	**(100.392.389,87)**
Beban Penyusutan Aset Tetap	175.434.790.213,81	175.016.110.448,29	418.679.765,52
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	7.339.656.186,61	7.831.950.346,00	(492.294.159,39)
Beban Penyusutan Amorisasi Aset Tak Berwujud	306.710.400,00	333.488.396,00	(26.777.996,00)

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok aset dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

V.D.2.j Beban Penyisihan Piutang

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.1.8	**Beban Penyisihan Piutang**	**2.619.299.693,24**	**2.086.794.260,39**	**532.505.432,85**

Jumlah tersebut merupakan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp532.505.432,85 atau 25,52%.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Pajak, Beban Penyisihan Piutang Retribusi, Beban Penyisihan Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Beban Penyisihan Piutang Transfer Dan Beban Penyisihan Piutang Lainnya.

Saldo Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel. 5.3.34

Saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Beban Penyisihan Piutang	**2.619.299.693,24**	**2.086.794.260,39**	**532.505.432,85**
Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.097.119.145,14	1.927.600.324,54	169.518.820,60
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	349.295.518,93	240.867.963,00	108.427.555,93
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	27.578.652,85	7.780,24	27.570.872,61
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	145.307.034,27	(81.681.807,39)	226.988.841,66
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah pusat	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(657,94)	0,00	(657,94)

Beban Penyisihan untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Piutang Lain-Lain PAD dihitung berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Penjelasan terkait Beban Penyisihan Piutang dapat dilihat pada Lampiran 29 pada laporan keuangan ini.

V.D.2.k Beban Transfer

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.	**Beban Transfer**	**115.200.007.844,00**	**109.181.400.614,00**	**6.018.607.230,00**

Jumlah tersebut merupakan Beban Transfer dalam Tahun 2024 dan Tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023, terdapat kenaikan sebesar Rp6.018.607.230,00 atau 5,51%.

Beban Transfer terdiri dari:

Tabel. 5.3.35

Saldo Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.3.	**Beban Transfer**	**115.200.007.844,00**	**109.181.400.614,00**	**6.018.607.230,00**
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.661.138.621,00	867.947.754,00	793.190.867,00
8.3.1.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	208.096.583,00	77.816.860,00	130.279.723,00

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/ Penurunan Rp
8.3.2.02.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	108.235.636.000,00	(108.235.636.000,00)
8.3.2.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada	113.330.772.640,00	0,00	113.330.772.640,00

Untuk perbedaan jumlah Belanja Transfer-LRA dengan Beban Transfer-LO adalah sebagai berikut:

Tabel. 5.3.36

Perbedaan Belanja Transfer antara LRA dan LO Tahun 2024

Objek Belanja LRA/LO	Belanja-LRA Rp	Beban-LO Rp	Selisih +/- Rp
Beban Transfer	**115.315.142.464,00**	**115.200.007.844,00**	**115.134.620,00**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.762.449.469,00	1.661.138.621,00	101.310.848,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	221.920.355,00	208.096.583,00	13.823.772,00
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	113.330.772.640,00	113.330.772.640,00	0,00

Penjelasan selisih sebesar Rp115.134.620,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKPD/ Uraian	PENYESUAIAN		SELISIH LRA-LO
	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)	(Rp)
BKD - Utang DBH Pajak	0,00	101.310.848,00	101.310.848,00
BKD - Utang DBH Retribusi	0,00	13.823.772,00	13.823.772,00
JUMLAH	**0,00**	**115.134.620,00**	**115.134.620,00**

Penjelasan:

- Pembayaran sisa utang belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp101.310.848,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya No:862.1/59/KPTS-BKD/2023 tanggal 20 Februari 2023.
- Pembayaran sisa utang belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa Triwulan IV kepada 52 Nagari Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.823.772,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya No:862.1/59/KPTS-BKD/2023 tanggal 20 Februari 2023.

V.D.2.l Beban Lain-lain

KODE REK	URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
8.2.	**Beban Lain-lain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tidak terdapat saldo beban bantuan lain-lain tahun 2024.

V.D.3. Surplus/Defisit dari Operasi

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit dari Operasi	**(76.606.202.888,36)**	**46.029.244.416,37**	**(122.635.447.304,73)**

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 sebesar Rp76.606.202.888,36 mengalami penurunan sebesar Rp122.635.447.304,73 atau -266,43% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp46.029.244.416,37.

Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2024 sebesar Rp76.606.202.888,36 merupakan selisih dari Pendapatan sebesar Rp1.022.365.976.055,99 dengan Beban Operasi sebesar Rp1.098.972.178.944,35.

V.D.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**380.744.000,00**	**564.764.285,00**	**(184.020.285,00)**

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp380.744.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp184.020.285,00 atau -32,58% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp564.764.285,00.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp380.744.000,00 merupakan reklasifikasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-Hasil Penjualan Aset Lain-Lain- Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang atas penjualan Aset Lain-lain pada Tahun 2024 ke Surplus Penjualan Aset Nonlancar. Terdiri dari penerimaan atas penjualan aset lain-lain (rusak berat), dengan rincian sebagai berikut:

- Penjualan persediaan yang berasal dari hibah KPU pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, disetor ke kasda tanggal 5 April 2024 sebesar Rp33.643.000,00
- Penjualan atas sisa bongkaran bangunan gedung berupa atap seng dan kayu sekolah SDN 10 Tiumang, disetor ke kasda tanggal 26 November 2024 sebesar Rp900.000,00
- Penjualan sisa bongkaran bangunan gedung pada SDN 01 Koto Besar disetor ke kasda tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp1.500.000,00
- Penjualan aset lain-lain berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak berat pada Puskesmas Sungai Rumbai, disetor ke kasda tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp3.251.000,00
- Penjualan aset lain-lain-aset rusak berat/usang yang disetor ke kasda tanggal 8 Agustus 2024 sebeasr Rp500.000,00 melalui Nagari *Virtual Account* (NVA)
- Penjualan sisa bongkaran bangunan gedung pada SDN 10 Sitiung, disetor ke kasda tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.000.000,00
- penjualan kendaraan dinas operasional yang dilakukan dengan pelelangan umum sebanyak satu kali melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada tanggal 24 November 2024 dengan nilai Buku Rp0,00 terjual Rp339.950.000,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp339.950.000,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional merupakan penjualan aset lain-lain di Tahun 2024.

V.D.5. Pos Luar Biasa

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Pos Luar Biasa	**2.485.520.287,00**	**3.924.380.709,00**	**(1.438.860.422,00)**

Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp2.485.520.287,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.438.860.422,00 atau -36,66% bila dibandingkan dengan Pos Luar Biasa Tahun 2023 adalah sebesar Rp3.924.380.709,00.

Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp2.485.520.287,00 merupakan Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2024, belanja tidak terduga yang terealisasi untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang direklasifikasi ke beban luar biasa pada Laporan Operasional.

V.D.6. Surplus/ Defisit LO

URAIAN	TAHUN 2024 Rp	TAHUN 2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
Surplus/ Defisit LO	**(78.710.979.175,36)**	**42.669.627.992,37**	**(121.380.607.167,73)**

Surplus/Defisit Laporan Operasional Tahun 2024 sebesar Rp78.710.979.175,36 mengalami penurunan sebesar Rp121.380.607.167,73 atau -284,47% bila dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp42.669.627.992,37.

Defisit Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp78.710.979.175,36 merupakan penjumlahan dari Defisit dari Operasi sebesar Rp76.606.202.888,36 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp380.744.000,00 setelah Pengurangan Beban Transfer atas reklas pengakuan Belanja Tak Terduga pada LO dari Beban Tak Terduga ke Beban Luar Biasa sebesar Rp2.485.520.287,00.

V.E PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang memberikan informasi arus kas masuk *(Cash In Flow)* dan arus kas keluar *(Cash Out Flow)* yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris selama satu periode akuntansi. Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sebagai berikut.

V.E.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah. Posisi selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.1.a	**Arus Masuk Kas**	**970.441.713.488,79**	**936.937.243.265,65**

Arus Masuk Kas merupakan pendapatan operasi yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah lainnya, Pendapatan Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Penerimaan kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 5.5.1

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	25.092.743.485,78	23.692.000.465,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	65.941.537.340,00	2.449.560.848,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.347.929.006,00	4.832.210.107,00
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	11.607.295.741,01	84.446.210.485,15
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	14.676.153.000,00	15.830.852.055,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	22.402.073.000,00	19.414.761.014,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	512.944.707.932,00	489.147.246.531,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	166.360.138.484,00	183.418.901.715,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	76.065.729.000,00	63.086.878.000,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	58.241.057.201,00	48.627.484.675,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
12	Penerimaan Hibah	71.350.441,00	1991137370
13	Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
14	Penerimaan Lainnya	11.690.998.858,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	**970.441.713.488,79**	**936.937.243.265,65**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.1.b	**Arus Keluar Kas**	**910.980.207.014,13**	**794.211.047.645,76**

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi mencakup seluruh pengeluaran kas untuk keperluan operasional pemerintahan. Berdasarkan SAP, pengeluaran ini mencakup belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan belanja bagi hasil. Pada Tahun 2024 pengeluaran kas untuk aktivitas operasi sebagai berikut.

Tabel 5.5.2

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	454.911.665.442,94	373.990.257.238,36
2	Pembayaran Barang	304.013.952.063,19	278.076.015.874,40
3	Pembayaran Bunga	0,00	0,00
4	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
5	Pembayaran Hibah	34.253.926.757,00	28.767.442.546,00
6	Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
7	Pembayaran Tak Terduga	2.485.520.287,00	3.924.380.709,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.762.449.469,00	1.107.049.776,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	221.920.355,00	110.265.502,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	113.330.772.640,00	108.235.636.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	**910.980.207.014,13**	**794.211.047.645,76**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**59.461.506.474,66**	**142.726.195.619,89**

Merupakan kenaikan/penurunan kas dari aktivitas operasi. Pada Tahun 2024 terjadi kenaikan kas (arus masuk kas - arus keluar kas) dari aktivitas operasi sebesar Rp59.454.581.464,66

Arus Masuk Kas	Rp 970.441.713.488,79
Arus Keluar Kas	(Rp 910.980.207.014,13)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp 59.461.506.474,66

V.E.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.2.a	**Arus Masuk Kas**	**380.741.100,00**	**576.047.100,00**

Pada Tahun 2024 terdapat penerimaan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp380.741.100,00 terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)
1	Penjualan BMD secara lelang melalui KPKNL Nomor 575/03.01 / 2024 – 01 tanggal 28 November 2024	339.947.100,00
2	Penjualan atas gedung dan bangunan	40.794.000,00
	Jumlah	**380.741.100,00**

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.2.b	**Arus Keluar Kas**	**102.187.717.063,16**	**137.284.235.323,00**

Pada Tahun 2024 terdapat pengeluaran kas dari aktivitas investasi sebesar Rp102.187.717.063,16. Pengeluaran kas dimaksud ditujukan untuk perolehan aset tetap sebagai berikut.

Tabel 5.5.3
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	24.237.257.450,00	39.031.009.865,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	28.954.072.575,16	45.091.507.154,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.054.989.838,00	50.167.680.309,00
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	3.810.397.200,00	2.751.538.825,00
6	Perolehan Aset Tak berwujud	131.000.000,00	242.49.9170,00
	Jumlah	**102.187.717.063,16**	**137.284.235.323,00**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(101.806.975.963,16)**	**(136.708.188.223,00)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Pada Tahun 2024 arus kas bersih (arus masuk kas - arus keluar kas) dari Aktivitas Investasi sebesar Rp(101.806.975.963,16)

Arus Masuk Kas	Rp	380.741.100,00
Arus Keluar Kas	Rp	102.187.717.063,16
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	(101.806.975.963,16)

V.E.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Posisi selama Tahun 2024 arus masuk kas dan arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan adalah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.3.a Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**

Pada Tahun 2024 tidak terdapat penerimaan kas dari aktivitas pendanaan yang diterima kembali.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.3.b Arus Keluar Kas	**0,00**	**1.500.000.000,00**

Pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan yang akan diterima kembali dan atau dibayar kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang dan utang jangka panjang. Pada Tahun 2024 arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**(1.500.000.000,00)**

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

V.E.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.E.4.a Arus Masuk Kas	**56.445.682.997,00**	**51.634.990.982,81**

Arus masuk kas selama Tahun 2024 sebesar Rp56.445.682.997,00 yang berasal dari penerimaan PFK dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4

Penerimaan PFK Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan IWP	2.590.096.479,00	1.927.381.623,00
2	Penerimaan TASPEN	14.584.219.458,00	12.881.152.375,00
3	Penerimaan BPJS 4%	10.382.099.348,00	7.709.453.936,00
4	Penerimaan JKK	471.900.283,00	379.179.762,00

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
5	Penerimaan JKM	1.415.695.004,00	1.137.533.310,00
6	Penerimaan PPN	15.877.958.425,00	15.713.008.409,10
7	Penerimaan PPh Psl 21	8.300.617.325,00	8.997.000.485,00
8	Penerimaan PPh Psl 22	856.008.682,00	678.376.350,78
9	Penerimaan PPh Psl 23	270.969.525,00	114.512.773,93
10	Penerimaan PPh Psl 26	0,00	1.864.371,00
11	Penerimaan PPh Psl 4	1.696.118.468,00	2.095.527.587,00
	Jumlah	**56.445.682.997,00**	**51.634.990.982,81**

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 merupakan penerimaan dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga.

	Tahun 2024 (Rp)	2023 Tahun (Rp)
V.E.4.b Arus Keluar Kas	**56.453.142.290,00**	**51.750.795.250,81**

Arus keluar kas selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp56.453.142.290,00 yang berasal dari:

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 20223 (Rp)
Penyetoran PFK	56.453.142.290,00	51.750.348.126,81
Pengeluaran Kas	0,00	447.124,00
Jumlah	**56.453.142.290,00**	**51.750.795.250,81**

Tabel 5.5.5

Penyetoran PFK Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penyetoran IWP	2.590.096.479,00	1.927.381.623,00
2	Penyetoran TASPEN	14.584.219.458,00	12.881.152.375,00
3	Penyetoran BPJS 4%	10.382.099.348,00	7.709.453.936,00
4	Penyetoran JKK	471.900.283,00	379.179.762,00
5	Penyetoran JKM	1.415.695.004,00	1.137.533.310,00
6	Penyetoran PPN	15.882.067.685,00	15.807.632.345,10
7	Penyetoran PPh Psl 21	8.300.617.325,00	8.997.000.485,00
8	Penyetoran PPh Psl 22	856.546.715,00	701.921.558,78
9	Penyetoran PPh Psl 23	270.969.525,00	114.512.773,93
10	Penyetoran PPh Psl 26	0,00	1.864.371,00
11	Penyetoran PPh Psl 4	1.698.930.468,00	2.092.715.587,00
	Jumlah	**56.453.142.290,00**	**51.750.348.126,81**

Penyetoran PFK Tahun 2024 sebesar Rp56.453.142.290,00 terdiri dari penyetoran PFK Tahun 2024 sebesar Rp56.445.682.997,00, dan utang PFK Tahun 2023 yang disetor ke Kas Negara Tahun 2024 sebesar Rp7.459.293,00 terdiri dari PPN sebesar Rp4.109.260,00 dan PPh Pasal 22 sebesar Rp538.033,00 dan PPh Psl 4 sebesar Rp2.812.000,00

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**(7.459.293,00)**	**(115.804.268,00)**

Pada Tahun 2024 arus kas bersih (arus masuk kas – arus keluar kas) dari aktivitas transitoris sebesar Rp56.445.682.997,00 - Rp56.453.142.290,00 sebesar Rp(7.459.293,00).

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan / Penurunan Kas	**(42.352.928.781,50)**	**4.402.203.128,89**

Merupakan total kenaikan/penurunan kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris. Pada Tahun 2024 terjadi penurunan kas (arus masuk kas – arus keluar kas) sebesar Rp (42.352.928.781,50)

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	**(42.352.928.781,50)**	**4.402.203.128,89**
Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas	38.616.835.495,09	34.291.745.810,17
Saldo Awal Kas di Kas BLUD	4.553.804.440,96	7.568.677.529,99
Saldo Awal Kas di Dana BOS	21.743.185,00	52.108.740,00
Saldo Awal Kas Lainnya	3.240.615.649,00	123.263.561,00
Jumlah Saldo Awal Kas	**46.437.998.770,05**	**42.035.795.641,16**
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	1.714.291.612,49	38.613.691.376,09
Saldo Akhir Kas di BLUD	1.272.541.885,06	4.558.804.440,96
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.144.119,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	6.925.010,00	0,00
Saldo Akhir pada Dana BOS	36.378.712,00	21.743.185,00
Saldo Akhir Kas lainnya	1.054.932.769,00	3.240.615.649,00
Saldo Akhir Kas	**4.085.069.988,55**	**46.437.998.770,05**

Saldo akhir kas di LAK sebesar Rp4.085.069.988,55, data SILPA menurut LRA sebesar Rp4.085.069.988,55 sehingga tidak terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas di LAK dan SILPA di LRA Tahun 2024.

No	Uraian	Rp
1.	SILPA LRA	Rp4.085.069.988,55
2.	Saldo Akhir Kas	Rp4.085.069.988,55
	Selisih	Rp 0,00

VF. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
V.F.	**Ekuitas**	**2.421.166.191.465,57**	**2.505.772.587.186,13**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2024. Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :

Tabel 5.6.1
Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	2.505.772.587.186,13	2.458.059.251.659,61
2	Surplus/Defisit-LO	(78.710.979.175,36)	42.669.627.992,37
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(5.895.416.545,20)	5.043.707.534,15
	Ekuitas Akhir	**2.421.166.191.465,57**	**2.505.772.587.186,13**

Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai ekuitas awal Tahun 2024 sebesar Rp2.505.772.587.186,13 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.458.059.251.659,61 yang merupakan nilai ekuitas pada akhir tahun anggaran sebelumnya.
2. Nilai surplus/defisit LO Tahun 2024 sebesar (Rp78.710.979.175,36) dan Tahun 2023 sebesar Rp42.669.627.992,37. Jumlah tersebut merujuk pada Laporan Operasional.
3. Nilai Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Tahun 2024 sebesar (Rp5.895.416.545,20) dan Tahun 2023 sebesar Rp5.043.707.534,1, yang merupakan Koreksi Lain-Lain dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.6.2
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024	2023
1	Koreksi Aset Lancar	553.235.607,89	11.300.000,00
2	Koreksi Aset Tetap	73.439.412,00	13.598.377.144,15
3	Koreksi Aset Lainnya	(86.944.922,57)	(8.579.919.610,00)
4	Koreksi Utang	(6.435.146.642,52)	13.950.000,00
	Jumlah	**(5.895.416.545,20)**	**5.043.707.534,15**

4. Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp2.421.166.191.465,57 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.505.772.587.186,13 sesuai dengan saldo ekuitas di Neraca pada akhir tahun berkenaan.

V.G. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan); dan
b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan).

Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Pengakuan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp21.749.014.918,00 timbul berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 05 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/ Kota Se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024

2. Utang PFK sebesar Rp140.789.551,00 yaitu iuran 1% dan 4% atas Jasa Pelayanan pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan berdasarkan Surat BPJS Kesehatan Nomor 326/II-06/0225 tanggal 14 Februari 2025.
3. Utang Belanja Modal pada Sekretariat Daerah atas Pekerjaan Rehab Ringan Bangunan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah, berdasarkan Kontrak Adendum Nomor : 000.1.8.3/761/Add I/Umum/Setda/XII-2024 dengan nilai kotrak sebesar Rp1.798.790.900,00, fisik pekerjaan per 31 Desember 2024 baru selesai sebesar 94,49% sedangkan pembayaran per 31 Desember 2024 baru terealisasi sebesar 89,77%. Pekerjaan diselesaikan 100% setelah lewat tahun 2024, sehingga nilai utang yang timbul tercatat di Neraca menjadi sebesar Rp184.097.750,00.

BAB VI
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

VI.A Gambaran Umum Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Visi

Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, mempunyai visi yaitu.

"Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya"

Definisi kalimat Visi RPJMD :

Maju :

Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat.

Mandiri :

Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanaan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal.

Berbudaya :

Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa.

Misi

Berdasarkan VISI di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai enam Misi, yaitu.

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien.
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah.

Letak dan Luas Wilayah

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat, dengan topografi daerah bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar dengan variasi ketinggian dari 100 m - 1.500 m di atas permukaan laut. Kabupaten Dharmasraya mempunyai luas wilayah $\pm$ 2.961,13 Km atau 296.113 Ha. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya berada pada posisi 0^0 47'07" Lintang Selatan dan 1^0 41' 56" Lintang Selatan dan,101^0 09' 21",BT -- 101^0 54' 27" Bujur Timur.

Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan, luas wilayah menurut per kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah
1	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	47,63
2	Koto Besar	Koto Besar	488,19
3	Asam Jujuhan	Sungai Limau	257,72
4	Koto Baru	Koto Baru	251,35
5	Koto Salak	Koto Salak	464,39
6	Tiumang	Tiumang	129,18
7	Padang Laweh	Padang Laweh	59,76
8	Sitiung	Sitiung	87,68
9	Timpeh	Tabek	237,93
10	Pulau Punjung	Sungai Dareh	482,50
11	Sembilan Koto	Sembilan Koto	454,80
	Luas Dharmasraya		2.961,13

Sumber : Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka 2024

Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh jalur lalu lintas Sumatera dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Dharmasraya, penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2024 berjumlah 244.000 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 82 jiwa/km². Jumlah Penduduk terbanyak di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 49.100 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit pada Kecamatan Padang Laweh dengan jumlah penduduk 6.900 jiwa, dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 6.2
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km	Rasio Jenis Kelamin
1.	Sungai Rumbai	24,4	2,19	10	512	103,3
2.	Koto Besar	29,3	2,24	12	60	100,8
3.	Asam Jujuhan	9,5	-0,06	3,88	37	110,8
4.	Koto Baru	33,9	1,12	13,9	135	99,3
5.	Koto Salak	18,6	1,47	7,62	40	101,4
6.	Tiumang	14	1,62	5,72	108	101,2
7.	Padang Laweh	6,9	1,8	2,83	116	99,1
8.	Sitiung	30,1	1,62	12,33	343	104,2
9.	Timpeh	18,4	2,12	7,53	77	104,8

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km	Rasio Jenis Kelamin
10.	Pulau Punjung	49,1	1,79	20,1	102	103,9
11	Sembilan Koto	10	1,76	4,1	22	104,7
Jumlah		**244**	**1,76**	**100**	**82**	**102,7**

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024.

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 4.593 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri 1.226 PNS Laki-Laki dan 3.367 orang PNS Perempuan.

Tabel 6.3

Pegawai Negeri Sipil menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	22	3	25
2	Administrator	81	37	118
3	Pengawas/Supervisor	55	67	122
4	Jabatan Fungsional Guru	504	1.861	2.365
5	Jabatan Fungsional Medis	158	1.066	1.224
6	Jabatan Fungsional Teknis	194	158	352
7	Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	212	175	387
	Total	**1.226**	**3.367**	**4.593**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia 2024.

VI.B Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Pasal 212 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Jumlah entitas akuntansi pada tahun 2024 berkurang 1 dari jumlah 38 entitas pada tahun 2023, menjadi 37 entitas pada tahun 2024. RSUD Sungai Dareh pada Tahun 2024 bukan merupakan SKPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, mencabut Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 89 Tahun 2011

tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah. Ketentuan pasal 3 ayat (3) menjabarkan bahwa UPTD RSUD Sungai Dareh dipimpin oleh Direktur RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga terhitung Tahun 2024, secara teknis RSUD Sungai Dareh merupakan UPTD dibawah Dinas Kesehatan dan bukan merupakan SKPD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya dibagi dalam tiga tipe,yaitu.

1. Perangkat Daerah Tipe A, yaitu.
    1) Sekretariat Daerah
    2) Inspektorat
    3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
    4) Badan Keuangan Daerah
    5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    7) Dinas Pertanian
    8) Kecamatan Asam Jujuhan
    9) Kecamatan Koto Baru
    10) Kecamatan Koto Besar
    11) Kecamatan Koto Salak
    12) Kecamatan Pulau Punjung
    13) Kecamatan Sembilan Koto
    14) Kecamatan Sitiung
    15) Kecamatan Sungai Rumbai
    16) Kecamatan Timpeh
    17) Kecamatan Tiumang

2. Perangkat Daerah Tipe B, yaitu.
    1) Dinas Pendidikan
    2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga
    3) Dinas Kesehatan
    4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
    6) Dinas Komunikasi dan Informatika,
    7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    8) Dinas Lingkungan Hidup
    9) Kecamatan Padang Laweh
    10) Dinas Pangan dan Perikanan

3. Perangkat Daerah Tipe C, yaitu.
    1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    2) Sekretariat DPRD
    3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
    4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
    5) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
    6) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,dan
    7) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
    8) Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berjumlah 35 Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 18 Dinas, 3 Badan dan 11 Kecamatan. Selain 35 Perangkat Daerah tersebut, ada 1 SKPD yang tetap mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 1 SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan urusan/urusan penunjang, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.4
SKPD Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Urusan/Urusan Penunjang

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
1	Pendidikan	1.	Dinas Pendidikan
2	Kebudayaan	2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
3	Kepemudaan dan Olahraga		
4	Pariwisata		
5	Kesehatan	3	Dinas Kesehatan
6	Sosial	4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
9	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Pol PP)		
13	Penanaman Modal	8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menegah dan Perdagangan
15	Perindustrian		
16	Perdagangan		
17	Energi dan Sumber Daya Mineral		-
18	Transmigrasi	10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
19	Tenaga Kerja		
20	Komunikasi dan Informatika	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Statistik		
22	Persandian		
23	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
24	Perumahan dan Kawasan Permukiman	13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
25	Pertanahan		
26	Perhubungan	14	Dinas Perhubungan
27	Lingkungan Hidup	15	Dinas Lingkungan Hidup
28	Kehutanan		-
29	Pangan	16	Dinas Pangan dan Perikanan
30	Pertanian	17	Dinas Pertanian
31	Kelautan dan Perikanan		-
32	Perpustakaan	18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33	Kearsipan		
34	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Perencanaan	20	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset

No.	Urusan / Urusan Penunjang	No.	OPD HASIL EVALUASI
36	Penelitian dan Pengembangan		dan Inovasi Daerah
37	Keuangan	21	Badan Keuangan Daerah
38	Sekretariat Daerah	22	Sekretariat Daerah
39	Sekretariat Dewan	23	Sekretariat DPRD
40	Inspektorat	24	Inspektorat
41	Kecamatan Asam Jujuhan	25	Kecamatan Asam Jujuhan
42	Kecamatan Koto Baru	26	Kecamatan Koto Baru
43	Kecamatan Koto Besar	27	Kecamatan Koto Besar
44	Kecamatan Koto Salak	28	Kecamatan Koto Salak
45	Kecamatan Padang Laweh	29	Kecamatan Padang Laweh
46	Kecamatan Pulau Punjung	30	Kecamatan Pulau Punjung
47	Kecamatan IX Koto	31	Kecamatan IX Koto
48	Kecamatan Sitiung	32	Kecamatan Sitiung
49	Kecamatan Sungai Rumbai	33	Kecamatan Sungai Rumbai
50	Kecamatan Timpeh	34	Kecamatan Timpeh
51	Kecamatan Tiumang	35	Kecamatan Tiumang

Kabupaten Dharmasraya telah melakukan Pemilu Legislatif pada tanggal 14 Februari 2024 dan pelantikan terhadap 30 orang anggota DPRD terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2024, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya definif dilantik pada tanggal 27 Desember 2024.

Tahun 2024 Kabupaten Dharmasraya juga telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak) pada tanggal 14 Februari 2024. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih untuk periode 2024 s.d. 2029 dilaksanakan tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Secara umum Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, yaitu.

1) Bupati : Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, M.AP
2) Ketua DPRD : Pariyanto S.H (1 Januari 2024 s.d. 13 Agustus 2024)
   Jemi Hendra, S.T. (27 Desember 2024)
3) Sekretaris Daerah : H. Adlisman, S.Sos, M.Si.

Berikut Nama Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya terpilih dari tahun 2005 s.d. sekarang.

Tabel 6.5
Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Terpilih

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan
1	H. Marlon Martua Dt. Rangkayo Mulie, SE	Ir. Tugimin	2005-2010
2	Ir. H. Adi Gunawan, MM	Drs. H. Syafruddin R (almarhum)	2010-2015
3	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE	Amrizal Dt. Rajo Medan, S.Sos	2015-2020
4	Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE, M.AP	Drs. Dasril Panin Dt. Labuan (almarhum)	2020-2025
5	Annisa Suci Ramadhani, S.H., LL.M	Leli Arni, S.Pd., M.Si.	2025-2030

VI.C Pelaksanaan Transaksi Non Tunai

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910-1867-SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Bupati Dharmasraya meneruskan dengan Instruksi Bupati Bupati Dharmasraya Nomor 188.55/1/INST-BUP/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai tanggal 28 Desember 2017. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai dilakukan untuk pembayaran sebagai berikut.

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
3. Belanja Makanan dan Minuman
4. Belanja Honorarium dan lembur PNS dan Non PNS
5. Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor, Jasa Servis dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
6. Belanja Alat Tulis Kantor, Alat Listrik, Alat Rumah Tangga, Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai habis, Seminar Kit, Belanja Cetak dan Penggandaan

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pembayaran secara non tunai sebelum ditetapkannya Pelaksanaan Transaksi Non Tunai secara nasional untuk pembayaran Belanja Pegawai.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan.

Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang lebih baik dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam mengemban tugas amanah pengabdian kita kepada daerah, bangsa, dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
1	Badan Keuangan Daerah	**Piutang Pajak**	**40.215.979.303,00**	**2.126.179.104,00**	**16.867.528.291,00**	**25.474.630.116,00**
		- Pajak PBB-P2	38.854.414.240,00	**2.027.454.445,00**	**16.867.528.291,00**	24.014.340.394,00
		- Pajak Penerangan Jalan	1.164.490.563,00	85.858.784,00	0,00	1.250.349.347,00
		- Pajak Reklame	643.500,00	12.865.875,00	0,00	13.509.375,00
		- Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	196.431.000,00	0,00	0,00	196.431.000,00
2		**Piutang Retribusi**	**1.143.451.911,00**	**6.375.170.777,00**	**744.443.989,00**	**6.774.178.699,00**
		- Retribusi Pelayanan Kesehatan	169.624.261,00	5.261.769.927,00	0,00	5.431.394.188,00
		- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	914.068.250,00	0,00	744.443.989,00	169.624.261,00
		- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	53.759.400,00	7.193.600,00	0,00	60.953.000,00
		- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.000.000,00	2.618.000,00	0,00	8.618.000,00
		- Retribusi Los	0,00	6.380.000,00	0,00	6.380.000,00
		- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah	0,00	1.097.209.250,00	0,00	1.097.209.250,00
3		**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**	**13.588.890,00**	**5.515.730.569,00**	**0,00**	**5.529.319.459,00**
4		**Piutang Lain-lain PAD yang sah**	**5.808.978.007,14**	**1.009.627.827,39**	**113.500,00**	**6.818.492.334,53**
		- Piutang Dana Bergulir	554.897.679,00	0,00	0,00	554.897.679,00
		- Piutang Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Piutang Air Minum UPT SPAM	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Piutang TGR	5.248.365.337,14	1.009.481.827,39	0,00	6.257.847.164,53
		- Piutang Pengembalian Belanja	5.129.991,00	0,00	0,00	5.129.991,00
		- Piutang Remunerasi DBH Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Piutang Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
		- Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	585000,00	0,00	113.500,00	471.500,00
5		**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Pusat**	**3.084.000,00**	**15.088.647.000,00**	**0,00**	**15.091.731.000,00**
6		**Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**17.958.971.283,00**	**4.271.064.111,00**	**481.020.476,00**	**21.749.014.918,00**

NO	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
		- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.022.663.729,00	0,00	221.409.909	3.801.253.820,00
		- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.788.234.373,00	0,00	259.610.567,00	1.528.623.806,00
		- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	12.121.249.022,00	4.199.768.603,00	0,00	16.321.017.625,00
		- Pajak Air Permukaan (PAP)	26.824.159,00	71.295.508,00	0,00	98.119.667,00
		- Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Piutang Lainnya	**0,00**	**459.480,00**	**0,00**	**459.480,00**
		Jumlah	**65.144.053.394,14**	**34.386.878.868,39**	**18.093.106.256,00**	**81.437.826.006,53**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	JUMLAH			

NIHIL

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya	554.897.679,00	554.897.679,00	0,00
1.	Kec. Pulau Punjung	122.349.281,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	122.349.281,00	0,00
				0,00
2.	Kec. Sitiung	42.186.005,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	42.186.005,00	0,00
				0,00
3.	Kec. Koto Baru	339.304.897,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	339.304.897,00	0,00
				0,00
	4. Kec. Sungai Rumbai	51.057.496,00	0,00	0,00
	a. s/d tanggal Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
	b. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	c. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	0,00	0,00	0,00
	d. 1 bulan terhitung sejak tanggal tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	0,00	51.057.496,00	0,00
JUMLAH		554.897.679,00	554.897.679,00	0,00

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI DAERAH)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AWAL TAHUN	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL (INVESTASI) YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL (INVESTASI) YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10	11	12	13 = 9-12
1	2006 2007 2012 2013 2017	PT BPD Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari	Perda No. 2 Tahun 2009 Perda No.8 Tahun 2017	11.000 lembar saham Seri A 3.236 lembar saham Seri A 5.400 lembar saham seri A 3.716 lembar saham seri A	27.352.000.000,00	27.352.000.000,00	0,00	27.352.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.352.000.000,00
				saham seri A.000232 Saham Nomor A.000232								
2	2010	PT. Balairung Citra Jaya Sumbar	Surat Gubernur Sumbar	900 lembar saham Seri A 600.000 lembar Saham Seri B	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
3	2012	PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pulau Punjung		10.000 lembar saham Seri B	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
JUMLAH					**28.952.000.000,00**	**28.952.000.000,00**	**0,00**	**28.952.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.952.000.000,00**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	OPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Sekretariat DPRD	63.668.269.539,00	967.580.000,00	203.846.094,00	64.432.003.445,00
2	Sekretariat Daerah	488.024.525.174,06	3.810.995.750,00	2.439.438.167,00	489.396.082.757,06
3	Kec. Pulau Punjung	2.412.342.545,00	34.100.000,00	5.005.000,00	2.441.437.545,00
4	Kec. Sitiung	2.044.002.385,00	15.250.000,00	13.499.520,00	2.045.752.865,00
5	Kec. Koto Baru	3.475.200.386,00	816.000,00	0,00	3.476.016.386,00
6	Kec. Sungai Rumbai	2.961.661.053,00	15.000.000,00	43.750.000,00	2.932.911.053,00
7	Kec. IX Koto	660.559.379,00	111.296.000,00	0,00	771.855.379,00
8	Kec. Timpeh	3.463.039.939,00	21.105.000,00	21.754.000,00	3.462.390.939,00
9	Kec. Padang Laweh	1.819.312.433,00	43.660.000,00	0,00	1.862.972.433,00
10	Kec Tiumang	2.882.637.284,00	43.450.000,00	36.300.000,00	2.889.787.284,00
11	Kec Koto Besar	3.195.049.052,00	4.500.000,00	14.750.000,00	3.184.799.052,00
12	Kec Koto Salak	2.603.006.224,00	27.350.000,00	25.800.000,00	2.604.556.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.282.808.325,00	173.250.000,00	174.612.100,00	3.281.446.225,00
14	Dinas PUPR	1.726.144.074.290,81	46.250.868.464,00	28.311.736.711,83	1.744.083.206.042,98
15	Dinas PERKIMTAN	54.095.998.484,00	19.217.366.580,00	39.900.000,00	73.273.465.064,00
16	Dinas Perhubungan	15.973.868.700,00	9.156.712.016,00	1.357.643.650,00	23.772.937.066,00
17	Dinas Kesehatan	186.415.093.615,00	16.323.457.348,00	1.994.263.275,00	200.744.287.688,00
18	RSUD	293.736.352.832,92	19.763.911.359,16	11.489.387.059,00	302.010.877.133,08
19	Dinas Pendidikan	485.428.460.868,42	28.140.261.551,00	2.854.014.771,00	510.714.707.648,42
20	Dinas BUDPARPORA	106.259.954.145,85	18.050.000,00	699.718.265,00	105.578.285.880,85
21	Dinas TRANSNAKER	6.849.845.581,00	372.150.000,00	129.250.000,00	7.092.745.581,00

NO	OPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4-5
26	Dinas Pangan dan Perikanan	21.076.755.951,50	64.850.000,00	0,00	21.141.605.951,50
27	Dinas KUMPERDAG	81.418.813.456,80	122.969.500,00	332.915.000,00	81.208.867.956,80
28	BKD	11.409.249.975,00	470.587.200,00	280.549.840,00	11.599.287.335,00
29	DPMPTSP	2.381.793.029,00	341.221.500,00	0,00	2.723.014.529,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.073.998.146,00	1.071.687.589,00	357.108.000,00	4.788.577.735,00
31	BAPPPEDA	1.861.979.720,00	49.805.000,00	215.676.958,00	1.696.107.762,00
32	DLH	11.541.299.170,00	6.159.777.265,39	4.981.350,00	17.696.095.085,39
33	Kantor KESBANGPOL	287.689.500,00	192.450.000,00	0,00	480.139.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.372.700.596,00	153.900.000,00	0,00	6.526.600.596,00
35	BPBD	14.962.162.644,00	283.558.000,00	229.850.600,00	15.015.870.044,00
36	BKPSDM	2.268.052.136,00	334.200.667,00	502.156.408,00	2.100.096.395,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.382.187.547,00	692.320.500,00	148.815.000,00	16.925.693.047,00
38	Dinas KOMINFO	5.898.172.696,00	292.710.000,00	1.122.604.550,00	5.068.278.146,00
	JUMLAH	**3.692.490.642.404,90**	**156.083.534.425,55**	**55.050.141.394,83**	**3.793.524.035.435,62**

BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	OPD	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
1	Sekretariat DPRD	63.668.269.539,00	967.580.000,00	203.846.094,00	64.432.003.445,00
2	Sekretariat Daerah	488.024.525.174,06	3.810.995.750,00	2.439.438.167,00	489.396.082.757,06
3	Kec. Pulau Punjung	2.412.342.545,00	34.100.000,00	5.005.000,00	2.441.437.545,00
4	Kec. Sitiung	2.044.002.385,00	15.250.000,00	13.499.520,00	2.045.752.865,00
5	Kec. Koto Baru	3.475.200.386,00	816.000,00	0,00	3.476.016.386,00
6	Kec. Sungai Rumbai	2.961.661.053,00	15.000.000,00	43.750.000,00	2.932.911.053,00
7	Kec. IX Koto	660.559.379,00	111.296.000,00	0,00	771.855.379,00
8	Kec. Timpeh	3.463.039.939,00	21.105.000,00	21.754.000,00	3.462.390.939,00
9	Kec. Padang Laweh	1.819.312.433,00	43.660.000,00	0,00	1.862.972.433,00
10	Kec Tiumang	2.882.637.284,00	43.450.000,00	36.300.000,00	2.889.787.284,00
11	Kec Koto Besar	3.195.049.052,00	4.500.000,00	14.750.000,00	3.184.799.052,00
12	Kec Koto Salak	2.603.006.224,00	27.350.000,00	25.800.000,00	2.604.556.224,00
13	Kec. Asam Jujuhan	3.282.808.325,00	173.250.000,00	174.612.100,00	3.281.446.225,00
14	Dinas PUPR	1.726.144.074.290,81	46.250.868.464,00	28.311.736.711,83	1.744.083.206.042,98
15	Dinas PERKIMTAN	54.095.998.484,00	19.217.366.580,00	39.900.000,00	73.273.465.064,00
16	Dinas Perhubungan	15.973.868.700,00	9.156.712.016,00	1.357.643.650,00	23.772.937.066,00
17	Dinas Kesehatan	186.415.093.615,00	16.323.457.348,00	1.994.263.275,00	200.744.287.688,00
18	RSUD	293.736.352.832,92	19.763.911.359,16	11.489.387.059,00	302.010.877.133,08
19	Dinas Pendidikan	485.428.460.868,42	28.140.261.551,00	2.854.014.771,00	510.714.707.648,42
20	Dinas BUDPARPORA	106.259.954.145,85	18.050.000,00	699.718.265,00	105.578.285.880,85
21	Dinas TRANSNAKER	6.849.845.581,00	372.150.000,00	129.250.000,00	7.092.745.581,00
22	DSP3KB	10.028.976.616,19	239.209.088,00	392.860.000,00	9.875.325.704,19
23	DISDUKCAPIL	5.040.576.182,00	305.637.548,00	38.538.000,00	5.307.675.730,00
24	Dinas PMD	1.661.264.500,00	753.617.500,00	234.000.000,00	2.180.882.000,00
25	Dinas Pertanian	40.428.908.303,35	43.903.000,00	1.335.417.076,00	39.137.394.227,35

NO	OPD	NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI		NILAI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2024
			TAMBAH	KURANG	
28	BKD	11.409.249.975,00	470.587.200,00	280.549.840,00	11.599.287.335,00
29	DPMPTSP	2.381.793.029,00	341.221.500,00	0,00	2.723.014.529,00
30	Inspektorat Kabupaten	4.073.998.146,00	1.071.687.589,00	357.108.000,00	4.788.577.735,00
31	BAPPPEDA	1.861.979.720,00	49.805.000,00	215.676.958,00	1.696.107.762,00
32	DLH	11.541.299.170,00	6.159.777.265,39	4.981.350,00	17.696.095.085,39
33	Kantor KESBANGPOL	287.689.500,00	192.450.000,00	0,00	480.139.500,00
34	Kantor SATPOL PP dan DAMKAR	6.372.700.596,00	153.900.000,00	0,00	6.526.600 596,00
35	BPBD	14.962.162.644,00	283.558.000,00	229.850.600,00	15.015.870.044,00
36	BKPSDM	2.268.052.136,00	334.200.667,00	502.156.408,00	2.100.096.395,00
37	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.382.187.547,00	692.320.500,00	148.815.000,00	16.925.693.047,00
38	Dinas KOMINFO	5.898.172.696,00	292.710.000,00	1.122.604.550,00	5.068.278.146,00
	JUMLAH	**3.692.490.642.404,90**	**156.083.534.425,55**	**55.050.141.394,83**	**3.793.524.035.435,62**

BUPATI DHARMASRAYA

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	OPD	SALDO PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI									REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERKURANG				BERTAMBAH						
			ASET LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	PERALATAN DAN MESIN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN		
1	Dinas PUPR	3.940.993.867,00	1.814.093.067,00	0,00	573.654.000,00	0,00	0,00	79.675.200,00	0,00	999.102.000,00	0,00	0,00	2.632.024.000,00
2	Dinas PERKIMTAN	239.520.000,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.620.000,00
3	Dinas Pendidikan	137.541.015,00	0,00	58.977.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.563.589,00
4	RSUD Sungai Dareh	10.101.769.440,00	0,00	7.807.514.766,00	1.176.269.680,00	1.117.984.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DISKUMPERDAG	332.915.000,00	0,00	332.915.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DINSOSP3APPKB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.544.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.544.088,00
	JUMLAH	**14.752.739.322,00**	**1.814.093.067,00**	**8.239.307.192,00**	**1.749.923.680,00**	**1.117.984.994,00**	**0,00**	**140.219.288,00**	**0,00**	**999.102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.970.751.677,00**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	**Aset lain-lain**	206.655.459.416,44	22.777.350.723,83	3.806.386.223,00	225.626.423.917,27
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	65.045.959.718,44	22.447.045.723,83	3.150.746.223,00	84.342.259.219,27
	Aset Yang Dipinjampakaikan	8.928.430.542,00	330.305.000,00	655.640.000,00	8.603.095.542,00
	Aset Yang Akan Diserahkan Kemasyarakat	132.681.069.156,00	0,00	0,00	132.681.069.156,00
2	**Aset Tidak Berwujud**	4.444.306.277,00	113.170.000,00	0,00	4.557.476.277,00
	Aset Tidak Berwujud	4.444.306.277,00	113.170.000,00	0,00	4.557.476.277,00
	JUMLAH	**209.269.206.672,84**	**22.890.520.723,83**	**3.806.386.223,00**	**230.183.900.194,27**

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS DAERAH	TRANSFER DARI KAS DAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			NIHIL					
	JUMLAH							

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	654.558.374,00	140.789.551,00	654.558.374,00	140.789.551,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	64.227.368,27	3.032.855.895,36	64.227.368,27	3.032.855.895,36
3	Utang Belanja	12.902.296.999,77	23.667.417.832,03	12.902.296.999,77	23.667.417.832,03
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.891.202.700,00	0,00	0,00	4.891.202.700,00
	JUMLAH	18.512.285.442,04	26.841.063.278,39	13.621.082.742,04	31.732.265.978,39

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
		NIHIL			
	JUMLAH				

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XIX

DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024 DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA

DAFTAR SUB KEGIATAN-SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KONSTRUKS DALAM PEKERJAAN			4.556.295.750,00	2.970.751.677,00	1.585.544.073,00	65%	2.005.654.970,00	
1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**2.880.265.000,00**	**2.632.024.000,00**	**248.241.000,00**	91%		
		Perencanaan Pembangunan Command Center	100.000.000,00	79.696.000,00	20.304.000,00	80%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	127.020.000,00	2.980.000,00	98%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	125.059.000,00	4.941.000,00	96%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	127.899.000,00	2.101.000,00	98%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya	130.000.000,00	123.920.000,00	6.080.000,00	95%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan pembangunan Sarana olah raga nagari Sungai Duo	50.000.000,00	49.960.000,00	40.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		DED Pembangunan Rumah Dinas Camat Padang Laweh	29.000.000,00	29.275.000,00	(275.000,00)	101%	Anggaran belum tersedia	
		DED Rumah Dinas Wakil Bupati	100.000.000,00	79.680.000,00	20.320.000,00	80%	Anggaran belum tersedia	
		DED Kawasan Kumuh Nagari Sungai Duo Kec. Sitiung	50.000.000,00	49.920.000,00	80.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan RTH Batas Kabupaten Dharmasraya Sijunjung	46.500.000,00	46.453.000,00	47.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan paket V Jembatan	100.000.000,00	79.900.000,00	20.100.000,00	80%	Menunggu Hibah Dari Balai Jalan Nasional	
		Perencanaan Rehab Kantor DPRD Kab. Dharmasraya	99.806.500,00	79.675.200,00	20.131.300,00	80%	Anggaran belum tersedia	
		DED Kawasan Rawan Bencana Kec.Pulau Punjung	50.000.000,00	49.910.000,00	90.000,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		Perencanaan Rumah Gadang - Gunung Medan	759.958.500,00	609.640.800,00	150.317.700,00	80%	Usulan Fisik Hibah Balai BPPW Propinsi Sumbar	
		Perencanaan Paket VI 2024 Jalan	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	

NO	NAMA OPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN**)	REALISASI	TAMBAH/KURANG	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perencanaan Paket IX 2024 Jalan	100.000.000,00	99.921.000,00	79.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		Perencanaan Paket XIII 2024 Jalan	100.000.000,00	99.911.000,00	89.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		Perencanaan Paket XIV 2024 Jalan	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	100%	Efisiensi Anggaran	
		[-] Perencaan Paket IV (APBD) Pembangunan Jalan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Usulan Propinsi	100.000.000,00	99.850.000,00	150.000,00	100%	Fisik di BPJN	
		[-] Perencaan Paket VIII (APBD) Pembangunan Jalan Spesifikasi : Perencanaan Teknis Jalan" Usulan Propinsi	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	100%	Fisik di BPJN	
		"[-] Pembuatan Dokumen UKP/UPL Jalan Inpres Sungai Rumbai -Batas Solok Selatan	75.000.000,00	74.930.000,00	70.000,00	100%	Fisik di BPJN	
		Jasa Konsultansi DED Embung Koto Padang 2022	100.000.000,00	99.893.000,00	107.000,00	100%	Usulan Fisik Hibah Balai BPPW Propinsi Sumbar	
2	**Dinas Pendidikan**		**1.400.000.000,00**	**78.563.589,00**	**1.321.436.411,00**			
		- Rehab sedang bangunan gedung tenpat pendidikan spesifikasi Rehab sedang bangunan gedung tempat pendidikan SDN 01 Koto Besar	1.400.000.000,00	78.563.589,00	1.321.436.411,00	6%	Anggaran belum tersedia	
3	**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana**		**76.410.750,00**	**60.544.088,00**	**15.866.662,00**	79%	**2.005.654.970,00**	
		Perencanaan Gedung Kantor UPT PPA	76.410.750,00	60.544.088,00	15.866.662,00	79%	2.005.654.970,00	
4	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**		**199.620.000,00**	**199.620.000,00**	**0,00**			
		Master Plan dan DED PSU Nagari IV Koto Pulau Punjung dan Sungai Kambut	99.913.000,00	99.913.000,00	0,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		DED KAWASAN KUMUH	49.950.000,00	49.950.000,00	0,00	100%	Anggaran belum tersedia	
		DED PENINGKTAN KUALITAS PEMUKIMAN KUMUH	49.757.000,00	49.757.000,00	0,00	100%	Anggaran belum tersedia	

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5+6+7	9	10	11 = 9+10	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 x18
								NIHIL										

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI

LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

LAMPIRAN XX.2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN DHARMASRAYA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/ RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH / PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	PERUSAHAAN DAERAH TAHUN	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN	BEBAN	LABA (RUGI) KOTOR	PENDAPATAN DI LUAR USAHA	BEBAN DI LUAR USAHA	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				NIHIL					

BUPATI DHARMASRAYA,

ANNISA SUCI RAMADHANI